



PaninBank

PT BANK PAN INDONESIA Tbk.

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
Email: panin@panin.co.id

www.panin.co.id

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	27 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	5 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	1 - 2 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi	5 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	3 Juli 2024	Tanggal Pencatatan di BEI	8 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PAN INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
www.panin.co.id
Email: panin@panin.co.id

Kantor Cabang
1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, 459 Kantor Cabang Pembantu,
dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembelian Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2031.

OBLIGASI & OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN HARTA KEKAYAAN PERSEROAN YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPAPAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG BERSIFAT SUBORDINASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016, DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2016 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGAYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN 2022, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN 2022 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari :

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

AA (Double A) untuk Obligasi dan A+ (Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I perihal Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus ini.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan akan dicatalkn pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek



PT Aldiracita Sekuritas Indonesia



PT Evergreen Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV ini kepada OJK di Jakarta, dengan Surat No. 039/DIR/OJK/24 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal: Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024" dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024" dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No.: S-03217/BEI.PPI/04-2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No.IX.A.2**").

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin, Perseroan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebagaimana diwajibkan dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Perseroan telah memperoleh penegasan dari OJK-Direktorat Pengawasan Bank berkaitan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 berdasarkan surat dari OJK-Direktorat Pengawasan Bank No. S-60/PB.31/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan Penawaran Umum Berkelanjutan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI dalam Prospektus ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xvii
1. Umum.....	xvii
2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	xvii
3. Rencana Penggunaan Dana.....	xvii
4. Keterangan Tentang Obligasi dan Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan.....	xviii
5. Risiko Usaha	xx
6. Kegiatan Usaha.....	xx
7. Prospek Usaha.....	xxi
8. Strategi Usaha	xxii
9. Kegiatan Penyertaan.....	xxii
10. Keterangan tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi.....	xxii
11. Ikhtisar Data Keuangan Penting	xxiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	2
2. Keterangan Tentang Obligasi yang Diterbitkan.....	2
3. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan.....	14
4. Pemberitahuan.....	30
5. Hukum yang Berlaku	30
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI & OBLIGASI SUBORDINASI	31
III. PERNYATAAN UTANG	33
1. Liabilitas Segera.....	33
2. Simpanan	33
3. Simpanan Dari Bank Lain	34
4. Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga.....	34
5. Liabilitas Derivatif.....	34
6. Liabilitas Akseptasi.....	35
7. Pinjaman Yang Diterima.....	35
8. Utang Pajak.....	37
9. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	37
10. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	37
11. Obligasi Subordinasi – bersih	37
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	41
2. Laporan Laba Rugi.....	42
3. Rasio-Rasio Penting	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	44
1. Keuangan.....	44
2. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat	51
VI. FAKTOR RISIKO	65
1. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Perseroan.....	65
2. Risiko Investasi Bagi Investor Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi	67
3. Risiko Umum.....	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	69
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	70
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	70
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	72
3. Kepengurusan dan Kepengawasan	73
4. Tata Kelola Perseroan	78
5. Komite Audit	79



6.	Komite Remunerasi dan Nominasi.....	83
7.	Audit Internal.....	86
8.	Komite Pemantau Risiko.....	87
9.	Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>).....	90
10.	Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama.....	91
11.	Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan.....	94
12.	Sumber Daya Manusia.....	102
13.	Struktur Kepemilikan Saham dan Kelompok Usaha Perseroan.....	105
14.	Keterangan tentang Aset Tetap.....	106
15.	Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	106
16.	Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	107
17.	Kegiatan Usaha.....	114
18.	Penghimpunan Dana.....	130
19.	Penempatan atau Penyaluran Dana.....	131
20.	Kebijakan Pendanaan.....	138
21.	Pendapatan Imbal Jasa (<i>Fee Based Income</i>).....	138
22.	Asuransi.....	142
23.	Manajemen Risiko, Kepatuhan Dan Pengendalian Intern.....	143
24.	Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	143
25.	Kegiatan Penyertaan.....	144
26.	Pemasaran.....	145
27.	Prospek dan Persaingan Usaha Dan Strategi Menghadapi Persaingan.....	146
IX.	PERPAJAKAN.....	150
1.	Umum.....	150
2.	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan.....	151
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.....	152
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....	154
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	157
1.	Riwayat Singkat.....	157
2.	Permodalan.....	157
3.	Pengurusan dan Pengawasan.....	158
4.	Kegiatan Usaha.....	159
5.	Kantor Cabang.....	160
6.	Tugas dan Kewajiban Wali Amanat.....	160
7.	Penggantian Wali Amanat.....	161
8.	Laporan Keuangan Wali Amanat.....	161
XIII.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.....	164
1.	Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif.....	164
2.	Pemesan yang Berhak.....	164
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi.....	165
4.	Jumlah Minimum Pemesanan.....	165
5.	Masa Penawaran Umum.....	165
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi.....	165
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.....	165
8.	Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.....	165
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi.....	166
10.	Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik.....	167
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum.....	167
12.	Lain-Lain.....	168
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.....	169
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	171
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	197
XVII.	AGEN PEMBAYARAN.....	427



DEFINISI DAN SINGKATAN

- ALCO : Adalah singkatan dari “*Asset Liabilities Committee*” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Aset Tetap : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
- Agan Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi beserta Denda dan manfaat lain atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agan Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agan Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
ATM	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar modal yang berwenang.
Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
BPS	: Berarti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	: Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bunga Obligasi Subordinasi	: Berarti jumlah Bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CFI	: Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
CKPN	: Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.



- Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/ atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi per tahun, yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- DPS** : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Dokumen Emisi** : Berarti Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada), Pernyataan Penawaran Umum berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi, serta semua perubahan, penambahan dan pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- Efek** : Berarti surat berharga (termasuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK:
1. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 2. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
- Emisi** : Berarti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Emiten** : Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
- Force Majeure (Keadaan Kahar)** : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO dan Obligasi Subordinasi atau FPPOS** : Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.



Grup Bank Panin	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum.
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
Harga Pasar Yang Wajar	: Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
Harga penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Hutang Senior	: Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.
Instrumen Keuangan	: Adalah aset keuangan yang bermanfaat bagi suatu entitas, baik untuk mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai perangkat lindung nilai.
Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jadwal Emisi	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.



- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Kustodian** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Efek harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Kreditur Preferen** : Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan.
- KPMM** : Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- LDR** : Berarti *Loan to Deposit Ratio*.
- Likuidasi** : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum Asing yang bertempat/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
- Material** : Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (*revenues*) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
- Masa Penawaran Umum** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus ini, yaitu selama 2 (dua) Hari Kerja.
- Manajer Penjatahan** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam hal ini PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
- Nasabah Penyimpanan** : Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
- NPL** : Berarti *Non Performing Loan*, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
- Obligasi Berkelanjutan IV** : Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).



- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV** : Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).
- Obligasi** : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan Jumlah Obligasi dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi atau pembelian kembali dalam hal Obligasi tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Obligasi Subordinasi** : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- PBI No. 24/4/PBI/2022** : Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 24/4/PBI/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
- Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi; dan/atau (b) Masyarakat diluar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemeringkat** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- Penawaran Awal** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Obligasi Subordinasi termasuk perkiraan Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi (jika ada) berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan.



- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi untuk ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) dengan mengacu kepada POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi.
- Pengakuan Utang : Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 34 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tahap I tahun 2024 No. 38 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan Penawaran Awal (*bookbuilding*) terhadap Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Evergreen Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
- Penutupan Usaha : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.



- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- POJK No. 4/
POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No. 2/
POJK.03/2022 : Berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 7/
POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/
POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- POJK No. 11/
POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 12 /
POJK.03/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- POJK No. 12/
POJK.03/2021 : Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
- POJK No. 13/
POJK.03/2021 : Berarti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- POJK No. 15/
POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/
POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 19/
POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/
POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 23/
POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 27 Tahun 2022 : Berarti Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 30/
POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



- POJK No. 33/
POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/
POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/
POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 36/
POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 49/
POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 55/
POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/
POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 58/
POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor POJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
- PADG Nomor 12/2023 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 18/2023 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 23/2021 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/07/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 24/2022 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* : Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan *Write Down* atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi.



- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi beserta denda dan manfaat lain atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 6 Maret 2024 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, dan Akta No. 11 tanggal 6 Maret 2024 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 14 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 27 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 32 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 30 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 39 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 13 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 26 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 31 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 33 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 29 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 34 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-008/OBL/KSEI/2024 tanggal 6 Maret 2024 dan Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan SP-011/OBL/KSEI/2024 tanggal 6 Maret 2024 dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup.



- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan untuk pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek, Nomor: S-03217/BEI.PP1/04-2024 tertanggal 2 April 2024.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 12 tanggal 8 Maret 2024, *unctis* Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 25 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 30 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 32 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 15 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 28 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 33 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, No. 36 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/POJK.04/2017, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/POJK.04/2014 dan POJK No. 58/POJK.04/2017, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Persyaratan Obligasi : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan tingkat Bunga Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Persyaratan Obligasi Subordinasi : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
- Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).



- Pokok Obligasi Subordinasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi dalam jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
- Prospektus** : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK juncto POJK No. 9/POJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/POJK.04/2014.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, tingkat suku Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- RUPS** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPSLB** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016** : Berarti Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, berikut perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari.
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2017** : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.
- Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.



Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi	: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi Subordinasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
Utang Senior	: Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



- VTL : Berarti Votrant No. 1103 Pty, Ltd.
- Wali Amanat : Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
- Write Down : Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan, dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan pemberitahuan tertulis.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Januari 2024 memiliki 518 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan – Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2.Votraint No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Saham Treasuri	6.100.000	610.000.000	0,02
4. Masyarakat < 5%	3.642.681.561	364.268.156.100	15,12
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (*Tier 2*) sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.



4. Keterangan Tentang Obligasi dan Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
Jumlah Nilai Obligasi	: sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun, yang akan jatuh tempo tanggal 5 Juli 2029
Harga Penawaran	: Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
Tingkat Bunga	: Obligasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah)
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (<i>covenants</i>)	: Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab I Prospektus ini.
Hasil Pemeringkatan	: Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No.RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idAA (Double A)

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi Subordinasi	: Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
Jumlah Nilai Obligasi Subordinasi	: sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 7 (tujuh) tahun. Jatuh tempo tanggal 5 Juli 2031
Harga Penawaran	: Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi



- Tingkat Bunga : Obligasi Subordinasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah)
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
- Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*) : Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
- Jaminan : Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang bersifat subordinasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/ POJK.03/2016 juncto POJK No. 34/OJK.03/2016 juncto POJK Nomor 27 Tahun 2022 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (*covenants*) : Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab I Prospektus ini.
- Hasil Pemeringkatan : Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No.RC-174/PEF-DIR/III/ 2024 tanggal 5 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:
- idA (Single A Plus)**
- Sifat-sifat Khusus : POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/ atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016.



5. Risiko Usaha

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

- a. Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:
 - Risiko likuiditas
 - Risiko pasar
 - Risiko suku bunga dan
 - Risiko valuta asing
 - Risiko operasional
 - Risiko hukum
 - Risiko reputasi
 - Risiko strategik
 - Risiko kepatuhan
 - Risiko teknologi
 - Risiko persaingan pangsa pasar
 - Risiko makro ekonomi
 - Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
 - Risiko anak perusahaan
 - Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan
- b. Risiko investasi bagi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi:
 - Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di *Write Down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 angka 1 huruf c. POJK No. 11/POJK.03/2016.
 - Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi KPMM sesuai profil risiko.
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Ketergantungan terhadap perusahaan anak atau kinerja perusahaan anak

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap perusahaan anak atau kinerja perusahaan anak yang akan mempengaruhi kinerja keuangan dari Perseroan.

6. Kegiatan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar. Tujuan utama kegiatan usaha adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Untuk tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit, baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek dan jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.



- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - Obligasi.
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di Bursa Efek.
- k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Prospek Usaha

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy), didukung oleh pertumbuhan sebesar 5,04% pada Q4 2023. Adapun perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin bertumbuh, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5,20% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan stabilitas ekonomi dan politik yang relatif terjaga. Dalam satu dekade terakhir, di luar pandemi Covid-19, ekonomi tumbuh dikisaran 5%-6%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sekitar 3%. Perbaikan kinerja ekonomi secara umum berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Tidak hanya karena pertumbuhan merupakan elemen kunci dalam upaya menekan pengangguran, bank juga jadi memiliki banyak opsi sumber pendanaan untuk dikelola dan didiversifikasi ke dalam aktivitas risk-taking saat ekonomi booming.

Bisnis perbankan nasional masih sangat prospektif. Basis pasar yang besar, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang meningkat, serta ekonomi yang tumbuh positif di atas rata-rata global menjadi pendorongnya. Perseroan optimis kinerja bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan visi: "Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal." Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019 dimana indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Inklusi keuangan ditargetkan dapat mencapai 90% pada tahun 2024. Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan.



8. Strategi Usaha

Dalam konteks keberlanjutan bisnis, Perseroan telah menetapkan rencana strategis lima tahun ke depan yang berfokus pada bagaimana mengoptimalkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk mendorong kinerja bisnis.

Strategi pendanaan difokuskan pada pengembangan beragam produk baru sambil terus memperkuat program tabungan yang sudah ada untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) demi memperkuat struktur *current account saving account* (CASA). Perseroan akan memfokuskan strategi penanaman dana pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*). Perseroan juga terus mendorong sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin untuk mewujudkan ekosistem Panin Grup. Tujuannya antara lain untuk optimalisasi kinerja bisnis serta mewujudkan layanan *omnichannel* yang bisa menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan *customer experience*.

Dengan menerapkan bauran strategi di atas, Perseroan berharap dapat menyediakan solusi keuangan yang lengkap dan beragam kepada para nasabah, serta dapat memperluas basis nasabahnya.

9. Kegiatan Penyertaan

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 31 Desember 2023:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan
Entitas anak					
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Syariah	2008	2009	67,3	7,13%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	1982	1982	51,49	13,38%
Perusahaan Penyertaan					
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	2003	1993	25,06	-
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	2001	1980	7,76	-
PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi	1989	1989	29	-
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan	1990	1973	1	-

Penyertaan PT FAC Sekuritas Indonesia sebesar Rp750,15 juta dan PT Sarana Kal-Sel Ventura sebesar Rp193,07 juta, kurang dari Rp1 miliar, maka tidak terdapat PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Sarana Kal-Sel Ventura dalam struktur.

Kontribusi pendapatan untuk Perusahaan Penyertaan kurang dari 1% terhadap pendapatan Perseroan.

10. Keterangan tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

Obligasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	03 Juli 2018	04 Juli 2018	1.302.000	03 Juli 2025	1.302.000

Maka jumlah Efek Bersifat Utang Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.302.000 juta.

11. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Fony Alimin.

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset	222.010.050	212.431.881
Jumlah Liabilitas	158.149.035	151.844.644
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.530	9.871.143
Jumlah Ekuitas	53.312.485	50.716.094
Jumlah Pendapatan	17.164.670	15.901.781
Jumlah Beban	13.485.322	11.828.848
Laba Bersih	3.005.536	3.273.010
Total Kredit Yang Diberikan	131.498.273	123.269.582
Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	8.491.195	6.818.980
Simpanan	137.510.209	135.231.578
<i>Capital Adequacy Ratio</i> - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional (%)	32,40	30,07
NPL neto (%)	0,57	0,92
LDR(%)	97,51	91,67
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA)	1,57	1,91
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE)	5,42	6,89
BOPO (%)	78,18	74,53

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")**

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2031.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari :
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
AA (Double A) untuk Obligasi dan
A+ (Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I perihal Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus ini.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")



PaninBank

PT BANK PAN INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
www.panin.co.id
Email: panin@panin.co.id

Kantor Cabang

1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang,
459 Kantor Cabang Pembantu,
dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (I) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN 2022, (II) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/ POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN 2022 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (III) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- b. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 13 September 1994.
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2024 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) No. SR124 0001 PIB FA tanggal 7 Maret 2024, yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idAA (*Double A*) untuk Obligasi dan idA+ (*Single A plus*) untuk Obligasi Subordinasi dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/POJK.04/2014.

2. Keterangan Tentang Obligasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu Obligasi, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 5 Juli 2029.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	5 Oktober2024	Bunga Ke-11	:	5 April2027
Bunga Ke-2	:	5 Januari2025	Bunga Ke-12	:	5 Juli2027
Bunga Ke-3	:	5 April2025	Bunga Ke-13	:	5 Oktober2027
Bunga Ke-4	:	5 Juli2025	Bunga Ke-14	:	5 Januari2028
Bunga Ke-5	:	5 Oktober2025	Bunga Ke-15	:	5 April2028
Bunga Ke-6	:	5 Januari2026	Bunga Ke-16	:	5 Juli2028
Bunga Ke-7	:	5 April2026	Bunga Ke-17	:	5 Oktober2028
Bunga Ke-8	:	5 Juli2026	Bunga Ke-18	:	5 Januari2029
Bunga Ke-9	:	5 Oktober2026	Bunga Ke-19	:	5 April2029
Bunga Ke-10	:	5 Januari2027	Bunga Ke-20	:	5 Juli2029

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi. Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan.

Perseroan dilarang, yaitu:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan di bidang usaha.
- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:
 - i. Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.
 - iii. Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).

2. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-selambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Denda yang dibayar Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- b. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- c. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



- e. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan.
 - Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
 - i. 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik.
 - ii. 30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
 - Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera setelah penutupan Laporan Keuangan Tahunan dan/atau Semesteran, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Laporan Keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi.
 - Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.
- g. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.
- h. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas (*outstanding*). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan triwulanan.
- i. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima surat permohonan tertulis dari Wali Amanat dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.
- k. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.
- l. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK Nomor: 49/POJK.04/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.



- iii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material / Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - 2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.
- Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan Peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan Surat No.RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

IdAA (Double A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan (tidak ada hak senioritas) dan hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:



- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
- a. Berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat.
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk menyelenggarakan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- a. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.



- iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - v. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - ii. Perseroan;
 - iii. Wali Amanat; atau
 - iv. Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- d. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - ii. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - iii. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - iv. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
- e. Tata Cara RUPO:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.



- iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - v. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Dalam hal ini Pemegang Obligasi bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Penerbit dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi.
 - ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut; dan
 - xiii. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada angka xii diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - xiv. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- f. Dengan memperhatikan ketentuan huruf e, butir (vii) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iii. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.



- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - (vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (viii) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas.
- g. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - h. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - i. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - k. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.
 - n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.
 - o. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2020.

Kelalaian Perseroan

1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau



- c. Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan “Utang dan Kewajiban” adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2 di bawah ini.
2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - c. Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.
 - d. Poin 1 huruf e:
 - maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.



4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa kondisi akibat *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

3. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tahun 2024

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 5 Juli 2031. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	5 Oktober 2024	Bunga Ke-15	:	5 April 2028
Bunga Ke-2	:	5 Januari 2025	Bunga Ke-16	:	5 Juli 2028
Bunga Ke-3	:	5 April 2025	Bunga Ke-17	:	5 Oktober 2028
Bunga Ke-4	:	5 Juli 2025	Bunga Ke-18	:	5 Januari 2029
Bunga Ke-5	:	5 Oktober 2025	Bunga Ke-19	:	5 April 2029
Bunga Ke-6	:	5 Januari 2026	Bunga Ke-20	:	5 Juli 2029
Bunga Ke-7	:	5 April 2026	Bunga Ke-21	:	5 Oktober 2029
Bunga Ke-8	:	5 Juli 2026	Bunga Ke-22	:	5 Januari 2030
Bunga Ke-9	:	5 Oktober 2026	Bunga Ke-23	:	5 April 2030
Bunga Ke-10	:	5 Januari 2027	Bunga Ke-24	:	5 Juli 2030
Bunga Ke-11	:	5 April 2027	Bunga Ke-25	:	5 Oktober 2030
Bunga Ke-12	:	5 Juli 2027	Bunga Ke-26	:	5 Januari 2031
Bunga Ke-13	:	5 Oktober 2027	Bunga Ke-27	:	5 April 2031
Bunga Ke-14	:	5 Januari 2028	Bunga Ke-28	:	5 Juli 2031

Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan dilarang yaitu:
 - a. Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
 - b. Mengadakan perubahan di bidang usaha.
 - c. Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Otoritas Keuangan yang berwenang.
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Keuangan yang berwenang
 - e. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi Subordinasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - f. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:
 - i. Harta kekayaan yang telah dijaminakan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.



- ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.
 - iii. Harta kekayaan yang dijaminakan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).
2. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotocopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - c. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan.
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
 - iii. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - iv. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - v. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi.
 - g. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.
 - h. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi Subordinasi dan surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas (*outstanding*). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.



- i. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.
- k. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.
- l. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- m. Melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi sesuai dengan POJK Nomor: 49/POJK.04/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeringkatan Tahunan
 - Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terakit dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terakit dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs *website* Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat tahunan peroleh; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - ii. Pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs *website* Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke - 2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
 - Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - iii. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan Penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.



- iv. Pemeringkat ulang
 - a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (Kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam situs website Perseroan dan laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja Ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No.RC-174/PEF-DIR/III/ 2024 tanggal 5 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idA+ (Single A Plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal Perseroan, termasuk para pemegang saham preferen Perseroan.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamentan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang namun Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan *medium term note* dalam mata uang rupiah yang belum dibayar lunas (*outstanding*).



Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:
 - i. Untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau,
 - ii. Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut.
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan.

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari angka 1 ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Subordinasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat Permohonan.



4. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
5. Tata Cara RUPO
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah). Dalam hal ini Pemegang Obligasi Subordinasi bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Perseroan dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi Subordinasi.



- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut; dan
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf l diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - n. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
6. Dengan memperhatikan ketentuan angka 5 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.



- c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - g. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas.
7. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
8. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
10. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.



11. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2020.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang bersifat subordinasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016.
Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi, tidak dapat dibeli oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sumber pendanaan tidak berasal dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam kondisi tertentu apabila dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada diluar cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus diserahkan kepada Perseroan.
Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji terhadap Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tidak ada kecualinya.
- B. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau Likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana



tersebut dalam huruf C di bawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

- C. Dalam proses Likuidasi:
- (i). Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi, maka:
 - i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
 - (ii). Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya paripassu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing.
 - (iii). Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf D dibawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.(i) dan C.(ii) di atas.
 - (iv). Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- D. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- (a). Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
 - (b). Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap



perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

- E. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan dari syarat-syarat Obligasi Subordinasi ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.
- F. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *Point of Non Viability*:
- i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*.
 - ii. Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*), maka Perseroan akan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016.
Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, *Write Down* terhadap modal pelengkap (*Tier 2*) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) modal pelengkap (*Tier 2*) harus dilakukan *Write Down* yaitu dalam hal: (1) rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *Write Down*.
 - iv. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa dalam hal terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usahanya atau *Point of Non Viability*, maka Perseroan berhak dan berwenang melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan *Write Down*. Para Pihak dengan ini sepakat serta mengakui bahwa Otoritas Jasa Keuangan berhak dan berwenang untuk memerintahkan dan/atau menyetujui Perseroan untuk melakukan *Write Down* dan Perseroan akan melakukan *Write Down* yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - v. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat dan Agen Pembayaran paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
 - vi. Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - vii. Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut, maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi



- terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- viii. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dan pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ix. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari, maka Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut yang akan langsung berlaku untuk Pemegang Obligasi Subordinasi bagi penentuan kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dalam Perjanjian ini walaupun Perjanjian ini belum diubah dan akan sesegera mungkin, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi, melakukan perubahan pada Perjanjian ini untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
- G. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan huruf F diatas ini, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.
- H. Para Pihak dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa kewajiban Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau melunasi Nilai Pokok Obligasi Subordinasi tidak berlaku apabila: (i) terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*; atau (ii) pembayaran Bunga dan/atau Nilai Pokok Obligasi Subordinasi tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan (baik secara individu maupun secara konsolidasi) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelalaian Perseroan

1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, atas Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
 - c. Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan "Utang dan Kewajiban" adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan;
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau



- e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2.
2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
 - c. Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 - d. Poin 1 huruf e:
 - Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi atau melindungi Pemegang Obligasi Subordinasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.
4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa kondisi akibat *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

Penyisihan Dana

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini.

Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi

- Obligasi Subordinasi tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok Obligasi Subordinasi.
- Tidak terdapat opsi pembelian kembali (*Buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.
- Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di *write down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha.

Dalam hal terjadinya kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) Bank harus mengkonversi instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) menjadi saham biasa atau *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*, yaitu:

- 1) Rasio modal inti Utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) tidak lebih dari 5,125% dari ATMR.
- 2) Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal pada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- 3) Terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down* mencantumkan fitur yang akan dipilih Bank yaitu dengan dilakukan *Write Down*.

Dalam hal Perseroan memilih fitur untuk dilakukan *Write Down*, Bank dapat memberikan kompensasi kepada pemegang instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) dalam bentuk saham biasa pada saat dilakukan *Write Down*. Pemberian kompensasi tersebut harus dicantumkan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*). Bank harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa konversi menjadi saham biasa dan fitur *Write Down* dapat dilakukan dalam hal terdapat *trigger event* instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) antara lain:

- Meminta opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan yang menyatakan bahwa klausula konversi menjadi saham biasa dan fitur *Write Down* dapat dilakukan pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down*.
- Memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak lainnya termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down* pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down*.

Sebelum menerbitkan instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*), Bank harus menyampaikan usulan fitur yang dipilih disertai dengan analisa dasar pemilihan fitur dan dampak terhadap permodalan Bank, termasuk perhitungan kemungkinan terjadi dilusi dan dampak terhadap struktur pemegang saham Bank.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin tahap I tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah memilih fitur *Write Down*.

Dasar Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.



Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (*Tier 2*) sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Sesuai dengan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrument agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*Point of Non Viability*).

Fitur konversi saham berarti instrumen Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham bank penerbit. Adanya jaminan ini menyebabkan instrument obligasi subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur *Write Down* dengan kompensasi saham. Oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur *Write Down* tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*, dan pilihan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-61/PB.33/2018 tanggal 4 Mei 2018.

4. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:

PT Bank Pan Indonesia Tbk
disingkat PT Bank Panin Tbk
Panin Bank Center
Jl. Jenderal Sudirman. Senayan
Jakarta 10270. Indonesia
Telepon : (021) 2700 545
Faksimili : (021) 2700 340

Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190. Indonesia
Telp. (021) 5268216, 5245161
Faks. (021) 5268201
Situs Internet: www.bankmandiri.co.id
Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

5. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI & OBLIGASI SUBORDINASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (*Tier 2*) sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No.30/POJK.03/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 POJK No. 30/POJK.04/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penerbitan Obligasi adalah kurang lebih setara dengan 3,751% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*) sebesar 0,250%.
- Jasa Penjualan (*Selling Fee*) sebesar 0,100%.
- Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*) sebesar 0,100%.
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 2,755% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,750%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,895% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,110%.
- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,280% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,200% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,080%.
- Biaya lain-lain sebesar 0,266% meliputi antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penerbitan Obligasi Subordinasi adalah kurang lebih setara dengan 3,851% dari nilai emisi Obligasi Subordinasi yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*) sebesar 0,350%.
- Jasa Penjualan (*Selling Fee*) sebesar 0,100%.
- Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*) sebesar 0,100%.
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 2,755% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,750%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,895% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,110%.



- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,280% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,200% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,080%.
- Biaya lain-lain sebesar 0,266% meliputi antara lain biaya biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjatahan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018, yang telah diserahkan kepada OJK melalui surat No. 235/DIR/OJK/18 Tanggal 13 Desember 2018 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018, seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian mempunyai liabilitas sebesar Rp 158.149.035 juta dan liabilitas karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 40.664.528 juta. Jumlah liabilitas ini diambil dari angka-angka dalam laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Fonny Alimin, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	
Kewajiban		
Liabilitas segera		186.926
Simpanan		135.089.481
Simpanan dari bank lain		2.420.728
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		9.761.945
Liabilitas derivatif		16.432
Liabilitas akseptasi		1.641.363
Pinjaman yang diterima		2.803.373
Utang pajak		221.735
Liabilitas imbalan pasca kerja		960.675
Beban yang masih harus dibayar dan Liabilitas lain-lain		1.347.101
Obligasi Subordinasi - Bersih		3.699.276
Jumlah Liabilitas		158.149.035

1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 186.926 juta. Perseroan tidak memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo atau yang belum dilunasi

2. Simpanan

Liabilitas dalam bentuk simpanan sebesar Rp 135.089.481 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Bank			
Giro	186.069	11.535.347	11.721.416
Tabungan	562.937	50.571.593	51.134.530
Deposito Berjangka	728.923	68.986.654	69.715.577
Sub Jumlah	1.477.929	131.093.594	132.571.523
Entitas Anak			
Giro <i>Wadiah</i>	-	289.238	289.238
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	2.228.720	2.228.720
Sub Jumlah	-	2.517.958	2.517.958
Jumlah	1.477.929	133.611.552	135.089.481



Tingkat Bunga efektif rata-rata per tahun:

(dalam persentase)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	1,46%	0,08%
Tabungan	0,72%	0,12%
Deposito Berjangka	4,23%	0,17%

Giro sebesar Rp 16.025 juta, tabungan sebesar Rp 266.479 juta dan deposito berjangka sebesar Rp 5.255.833 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

3. Simpanan Dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Bank			
Giro	-	24.641	24.641
Tabungan	-	-	-
Deposito Berjangka	-	52.986	52.986
Call Money	-	950.000	950.000
Sub Jumlah	-	1.027.627	1.027.627
Entitas Anak			
Giro <i>Wadiah</i>	-	33.958	33.958
PASBI	-	1.359.143	1.359.143
Deposito berjangka Mudharabah	-	-	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	-	-	-
Sub jumlah	-	1.393.101	1.393.101
Jumlah	-	2.420.728	2.420.728

Tingkat Bunga efektif rata-rata per tahun:

(dalam persentase)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	0,24%	0,00%
Tabungan	0,00%	0,00%
Deposito Berjangka	3,76%	0,00%
<i>Call Money</i>	5,81%	0,00%

4. Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	3 Januari 2024	2.357.615
Obligasi Pemerintah Indonesia	17 hari	5 Januari 2024	1.413.061
Obligasi Pemerintah Indonesia	23 hari	5 Januari 2024	1.224.512
Obligasi Pemerintah Indonesia	19 hari	10 Januari 2024	1.142.080
Obligasi Pemerintah Indonesia	19 hari	3 Januari 2024	1.035.647
Obligasi Pemerintah Indonesia	29 hari	19 Januari 2024	471.743
Obligasi Pemerintah Indonesia	30 hari	19 Januari 2024	471.262
Obligasi Pemerintah Indonesia	30 hari	12 Januari 2024	471.035
Obligasi Pemerintah Indonesia	31 hari	8 Januari 2024	469.869
Obligasi Pemerintah Indonesia	31 hari	11 Januari 2024	469.368
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	3 Januari 2024	94.314
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	4 Januari 2024	94.282
Obligasi Pemerintah Indonesia	8 hari	4 Januari 2024	47.157
Jumlah			9.761.945

5. Liabilitas Derivatif

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 16.432 juta yang terdiri dari transaksi swap sebesar Rp 4.978 juta dan transaksi forward sebesar Rp 11.454 juta.



6. Liabilitas Akseptasi

Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.641.363 juta yang terdiri dari liabilitas dalam Rupiah sebesar Rp 930.878 juta dan liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp 710.485 juta.

7. Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Rata-Rata Efektif	Jumlah
CFI			
Rupiah			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3 - 4 tahun	7,31%	417.954
PT Bank Mandiri Tbk	4 tahun	7,82%	414.501
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3 - 4 tahun	6,98%	404.157
PT Bank Danamon Tbk	3 - 4 tahun	7,48%	389.896
PT Bank Victoria International Tbk	1 tahun	6,40%	300.000
PT Bank DKI Tbk	4 - 5 tahun	7,46%	287.564
PT Bank CIM B Niaga Tbk	4 tahun	7,30%	234.290
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	4 tahun	7,50%	185.417
PT Bank Central Asia Tbk	3 - 4 tahun	7,98%	168.969
PT Bank OCBC NISP Tbk	3 - 4 tahun	8,75%	625
Jumlah			2.803.373

CFI

Seluruh pinjaman yang diterima oleh CFI digunakan untuk modal kerja. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

Bank	Fasilitas	Batas Kredit (Rp Juta)	Awal	Akhir	Jaminan
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pinjaman Berjangka V (Term Loan V)	500.000	06-Agu-19	05-Des-23	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka VI
	Pinjaman Berjangka VI (Term Loan VI)	500.000	28-Sep-22	28-Sep-26	
	Modal Kerja 1/ Working Capital 1	500.000	30-Mei-18	14-Mar-23	
PT Bank Mandiri Tbk	Modal Kerja 2/ Working Capital 2	500.000	16-Apr-19	14-Okt-23	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja
	Modal Kerja 3/ Working Capital 3	500.000	09-Des-19	20-Apr-24	
	Modal Kerja 4/ Working Capital 4	500.000	8-Feb-23	22-Mei-27	
PT Bank Danamon Tbk	Pinjaman Berjangka V (Term Loan V)	100.000	17-Jun-19	19-Jul-23	Piutang pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka VII dan modal kerja
	Pinjaman Berjangka VI (Term Loan VI)	100.000	23-Agu-19	21-Okt-23	
	Pinjaman Berjangka VII (Term Loan VII)	500.000	3-Jul-20	22-Mei-27	
	Modal Kerja/Working Capital	150.000	27-Jan-23	27-Jan-24	
PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Permata Tbk	Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loan	1.000.000	5-Mar-21	4-Sep-24	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit sindikasi



Bank	Fasilitas	Batas Kredit (Rp Juta)	Awal	Akhir	Jaminan
PT Bank DKI Tbk	Pinjaman Berjangka III (Term Loan III)	350.000	21-Nov-22	5-Jun-27	Piutang sewa pembiayaan dan/ atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja
PT Bank Central Asia Tbk	Installment Loan 11	650.000	15-Nov-19	1-Jul-25	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit installment, uncommitted money market dan pinjaman rekening koran
	Uncommitted Money Market Line	250.000	17-Agu-23	17-Agu-24	
	Pinjaman Rekening Koran/Overdraft	30.000	17-Agu-23	17-Agu-24	
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	Money Market Line (Uncommitted)	50.000	15-Apr-23	15-Apr-24	Tidak ada agunan untuk money market dan 70% dari jumlah utang pokok fasilitas pinjaman berjangka VII
	Pinjaman Berjangka VII (Term Loan VII)	200.000	16-Agu-23	14-Sep-27	
PT Bank Victoria International Tbk	Demand Loan - Non Revolving (Uncommitted)	300.000	06-Des-23	28-Okt-24	Tidak ada agunan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Kredit Modal Kerja VIII (Working Capital VIII)	300.000	25-Nov-19	20-Mei-24	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 8 dan 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja IX
	Kredit Modal Kerja IX (Working Capital IX)	500.000	23-Agu-23	15-Des-27	
PT Bank OCBC NISP Tbk	Pinjaman Berjangka II (Term Loan II)	500.000	14-Feb-18	13-Jan-24	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit <i>Term Loan</i>
PT Bank Shinhan Indonesia	Modal Kerja I (Working Capital I)	150.000	23-Sep-20	23-Sep-23	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja I

Terkait dengan utang bank tersebut di atas, CFI wajib menjaga *gearing ratio* sebesar 8x - 10x. CFI juga diwajibkan menjaga *rasio non-performing loan* untuk tunggakan lebih dari 30 hari tidak melebihi 5% dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 3% - 5%. CFI diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank terkait dengan perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk CFI, komposisi permodalan dan pembagian laba CFI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, CFI telah memenuhi semua pembatasan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Suku Bunga Efektif	7,22%	7,36%	<i>Effective Interest Rate</i>

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga CFI terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

**8. Utang Pajak***(dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Bank	
Pajak Penghasilan Badan	88.893
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	27.631
Pasal 25	5.324
Pasal 23/26	76.288
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.256
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan Badan	1.428
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	5.926
Pasal 4(2)	6.709
Pasal 23/26	460
Pasal 25	6.444
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.376
Jumlah	221.735

9. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Posisi liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 960.675 juta.

10. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.347.101 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank	
Beban bunga yang masih harus dibayar	223.927
Setoran jaminan	212.687
Pendapatan diterima dimuka	203.084
Liabilitas pada pihak ketiga	197.820
Cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi	75.700
Lainnya	95.024
Entitas anak	
Biaya yang masih harus dibayar	87.648
Liabilitas titipan setoran nasabah	78.803
Liabilitas pada pihak ketiga	67.478
Lainnya	104.930
Jumlah	1.347.101

11. Obligasi Subordinasi – bersih

Posisi Obligasi Subordinasi - Bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.699.276 juta yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017	2.400.000
Obligasi yang beredar	3.702.000
Obligasi yang dibeli kembali	-
Diskonto yang belum diamortisasi	(2.724)
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.699.276



- **Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017**

Pada tanggal 17 Maret 2017, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp2.400 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 berjangka waktu 7 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 17 Juni 2017 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 17 Maret 2024.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 1 April 2024 adalah idA+.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah melakukan pembayaran bunga melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

- **Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018**

Pada tanggal 03 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp1.302.000 juta dan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 berjangka waktu 7 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2025.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 03 Juli 2025.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 1 April 2024 adalah idA+.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah melakukan pembayaran bunga melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

Dalam hal terjadi penutupan usaha atau disolusi atau likuidasi karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan bidang usaha.
- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/ kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Liabilitas komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 40.664.528 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Komitmen	
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	37.861.547
L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	1.415.309
Jumlah liabilitas komitmen	39.276.856
Kontinjensi	
Liabilitas Kontinjensi	
Bank Garansi	1.387.672
Standby L/C	-
Jumlah liabilitas kontinjensi	1.387.672
Jumlah	40.664.528

LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK, SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBatasan-PEMBatasan TERSEBUT.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM GROUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN DAN OBLIGASI SUBORDINASI SETELAH LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.



DENGANADANYAPENGELOLAANYANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Fonny Alimin.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset		
Kas	1.297.547	1.704.409
Giro Pada Bank Indonesia	7.870.438	7.204.803
Giro Pada Bank Lain	1.297.706	1.252.071
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga	6.035.648	7.190.503
Efek-Efek - Pihak Ketiga	39.010.634	33.398.418
Tagihan Derivatif	20.437	29.385
Kredit Yang Diberikan	131.498.273	123.269.582
Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga	44.049	50.420
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga	4.826.791	10.642.145
Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga	528.480	272.141
Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga	8.429.005	6.795.450
Piutang Jual dan Sewa Balik	33.148	55.187
Tagihan Akseptasi	1.630.129	2.125.849
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	766.401	791.410
Biaya Dibayar Dimuka	114.353	124.361
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih	10.002.144	10.176.936
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	747.872	609.846
Aset Tak berwujud	522.482	425.974
Aset Lain-Lain - Bersih	7.334.513	6.312.991
Jumlah Aset	222.010.050	212.431.881
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas Segera	186.926	169.964
Simpanan	135.089.481	132.683.475
Simpanan dari Bank Lain	2.420.728	2.548.103
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga	9.761.945	2.408.299
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	16.432	29.561
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga	1.641.363	2.137.042
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	0	3.999.020
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	2.803.373	2.144.195
Utang Pajak	221.735	222.169
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	960.675	440.481
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain	1.347.101	1.266.865
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.699.276	3.795.470
Jumlah Liabilitas	158.149.035	151.844.644
Dana Syirkah Temporer		
Bank	417.762	710.687
Bukan Bank	10.130.768	9.160.456
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.530	9.871.143



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Ekuitas		
Modal saham	2.408.765	2.408.765
Saham Treasuri	(610)	(610)
Tambahan Modal Disetor	3.440.707	3.440.707
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non pengendali	(269.072)	(269.072)
Penghasilan komprehensif lain	7.373.975	7.621.379
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	140.000	140.000
Tidak ditentukan penggunaannya	36.611.051	34.059.727
Kepentingan non pengendali	3.607.669	3.315.198
Jumlah Ekuitas	53.312.485	50.716.094
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	222.010.050	212.431.881

2. Laporan Laba Rugi

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga		
Bunga yang diperoleh	14.136.964	13.367.323
Provisi dan komisi kredit	451.417	538.887
Jumlah Pendapatan Bunga	14.588.381	13.906.210
Beban Bunga	(5.381.905)	(3.957.460)
Pendapatan Bunga - bersih	9.206.476	9.948.750
Pendapatan Operasional Lainnya		
Keuntungan bersih penjualan efek	142.973	202.790
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	150.059	137.302
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	124.581	115.096
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	38.955	(142.850)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	53.149	87.579
Lainnya	2.066.572	1.595.654
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.576.289	1.995.571
Beban Kerugian Penurunan Nilai		
Aset keuangan	(2.769.587)	(2.819.053)
Aset non keuangan	11.681	28.501
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(2.757.906)	(2.790.552)
Beban Operasional Lainnya		
Umum dan administrasi	(1.979.148)	(2.067.137)
Tenaga kerja	(2.435.356)	(2.274.770)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	(266.458)	(112.705)
Lainnya	(664.549)	(626.224)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(5.345.511)	(5.080.836)
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(2.769.222)	(3.085.265)
Laba Operasional	3.679.348	4.072.933
Pendapatan Non Operasional - bersih	96.378	15.960
Laba Sebelum Beban Pajak	3.775.726	4.088.893
Beban Pajak	(770.190)	(815.883)
Laba Bersih Tahun Berjalan	3.005.536	3.273.010



3. Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	71,24%	71,48%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	296,65%	299,40%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset	59,23%	58,03%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset	104,64%	105,93%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset	61,94%	63,66%
Rasio Usaha		
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	6,28%	6,18%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	4,24%	4,77%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	17,70%	20,05%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Aset Produktif - Bersih	4,03%	4,50%
Laba operasional / Rata - rata Jumlah Aset	1,69%	1,95%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	25,88%	29,40%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	20,60%	23,54%
Laba Bersih / Rata - rata Jumlah Aset Produktif - Bersih	1,31%	1,48%
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan Bunga	4,91%	-3,07%
Pendapatan Operasional - Bersih	-7,46%	4,12%
Laba Bersih	-8,17%	80,14%
Jumlah Aset	4,51%	3,90%
Jumlah Liabilitas	4,15%	-2,61%
Jumlah Ekuitas	5,12%	4,47%
Rasio Perbankan		
Rasio Permodalan		
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	32,40%	30,07%
CAR – Risiko Kredit Dan Pasar	34,43%	32,19%
CAR – Risiko Kredit	35,25%	32,63%
Rasio Kualitas Aset		
NPL Bruto	3,09%	3,53%
NPL Neto	0,57%	0,92%
Rasio Rentabilitas		
Laba Bersih / Jumlah Aset (ROA)	1,57%	1,91%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (ROE)	5,42%	6,89%
Net Interest Margin (NIM)	4,93%	5,53%
BOPO	78,18%	74,53%
Rasio Likuiditas		
LDR	97,51%	91,67%
Rasio Kepatuhan		
GWM Rupiah Primer – Rata rata	7,32%	8,02%
GWM Rupiah Sekunder	34,55%	34,93%
GWM Valas – Rata rata	4,03%	4,03%



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Keuangan

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Fonny Alimin.

(Dalam Jutaan Rupiah)

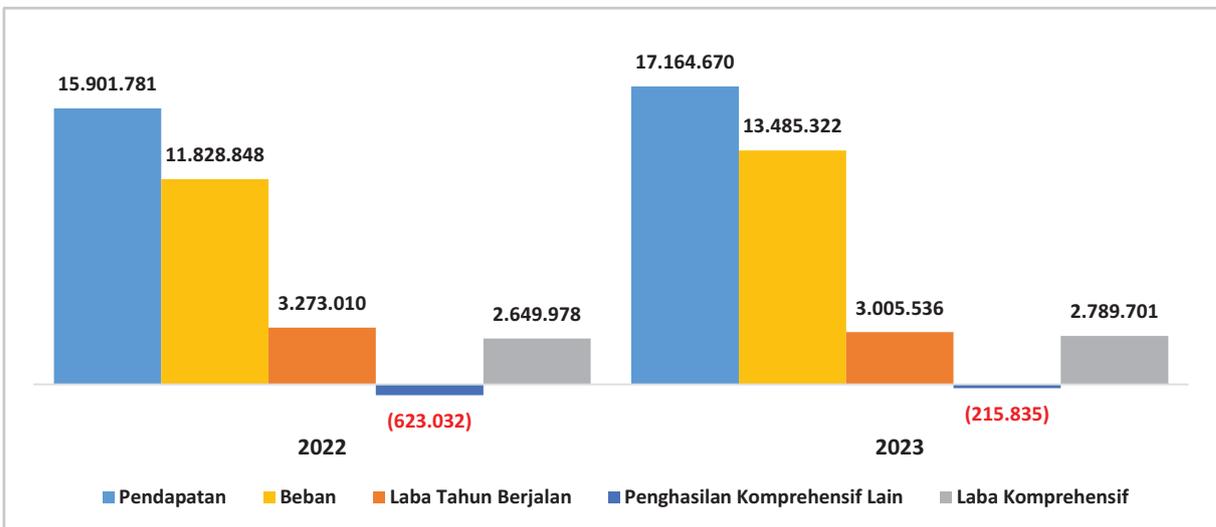
Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Pendapatan Bunga	14.588.381	13.906.210
Beban Bunga	5.381.905	3.957.460
Pendapatan Bunga - Bersih	9.206.476	9.948.750
Pendapatan Operasional Lainnya	2.576.289	1.995.571
Beban - kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan	2.757.906	2.790.552
Beban Operasional Lainnya	5.345.511	5.080.836
Beban Operasional Lainnya - Bersih	5.527.128	5.875.817
Laba Operasional	3.679.348	4.072.933
Pendapatan Non-Operasional - Bersih	96.378	15.960
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.775.726	4.088.893
Beban Pajak	770.190	815.883
Laba Bersih	3.005.536	3.273.010
Jumlah Aset	222.010.050	212.431.881
Jumlah Liabilitas	158.149.035	151.844.644
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.530	9.871.143
Jumlah Ekuitas	53.312.485	50.716.094
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	222.010.050	212.431.881
Jumlah Liabilitas /Jumlah Aset (%)	71,24%	71,48%
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%)	296,65%	299,40%
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih / Jumlah Aset	59,23%	58,03%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah aset (%)	104,64%	105,93%
Jumlah Simpanan / Jumlah aset (%)	61,94%	63,66%
Rasio Usaha		
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	6,28%	6,18%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	4,24%	4,77%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	17,70%	20,05%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif – Bersih	4,03%	4,50%
Laba Operasional / Rata - Rata Jumlah Aset	1,69%	1,95%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	25,88%	29,40%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	20,60%	23,54%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif	1,31%	1,48%
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan Bunga	4,91%	-3,07%
Pendapatan Operasional – Bersih	-7,46%	4,12%
Laba Bersih	-8,17%	80,14%
Jumlah Aset	4,51%	3,90%
Jumlah Liabilitas	4,15%	-2,61%
Jumlah Ekuitas	5,12%	4,47%

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Perbankan		
Rasio Permodalan		
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	32,40%	30,07%
CAR – Risiko Kredit Dan Pasar	34,43%	32,19%
CAR – Risiko Kredit	35,25%	32,63%
Rasio Kualitas Aset		
NPL (Gross)	3,09%	3,53%
NPL (Net)	0,57%	0,92%
Rasio Rentabilitas		
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA)	1,57%	1,91%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE)	5,42%	6,89%
Net Interest Margin (NIM)	4,93%	5,53%
BOPO	78,18%	74,53%
Rasio Likuiditas		
LDR	97,51%	91,67%
Rasio Kepatuhan		
GWM Rupiah Primer	7,32%	8,02%
GWM Rupiah Sekunder	34,55%	34,93%
GWM Valas	4,03%	4,03%

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pertumbuhan Pendapatan, Beban, Laba Tahun Berjalan, Penghasilan Komprehensif lain dan Total Penghasilan Komprehensif
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dalam Jutaan Rupiah)



Pendapatan

Jumlah pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 17.164.670 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.262.889 juta atau 7,94% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.901.781 juta terutama karena meningkatnya Jumlah Pendapatan Bunga sebesar Rp 682.171 juta atau 4,91% dimana peningkatan terbesar dari pendapatan bunga kredit sebesar Rp 451.127 juta dan pendapatan bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 194.494 juta.

**Beban**

Jumlah beban pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13.485.322 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.656.474 juta atau 14,00% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.828.848 juta terutama karena meningkatnya beban bunga sebesar Rp 1.424.445 juta atau 35,99% dimana peningkatan terbesar berasal dari kenaikan biaya bunga simpanan sebesar Rp 1.280.152 juta terutama dari produk deposito.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah Laba bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.005.536 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp 267.474 juta atau 8,17% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.273.010 juta sehubungan dengan meningkatnya beban bunga sebesar Rp 1.424.445 juta atau 35,99%.

Penghasilan Komprehensif Lain dan Total Penghasilan Komprehensif

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain periode Desember 2023 naik sebesar Rp 407.197 juta atau 65,36 % dan Laba Komprehensif naik sebesar Rp 139.723 juta atau 5,27% dibandingkan periode Desember 2022 terutama karena naiknya perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual.

Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga Perseroan berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh dan provisi dan komisi kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

KETERANGAN	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Bunga				
Bunga yang Diperoleh	14.136.964	97%	13.367.323	96%
Provisi dan Komisi Kredit	451.417	3%	538.887	4%
Jumlah	14.588.381	100%	13.906.210	100%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total pendapatan bunga pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 14.588.381 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 682.171 juta atau 4,91% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 13.906.210 Juta. Hal tersebut terutama karena adanya kenaikan pada pendapatan bunga yang diperoleh Perseroan yaitu sebesar Rp 769.641 juta atau 5,76%. Kenaikan tersebut dikarenakan kenaikan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp 8.228.691 juta atau 6,68% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Beban Operasional

Rincian jumlah Beban operasional Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

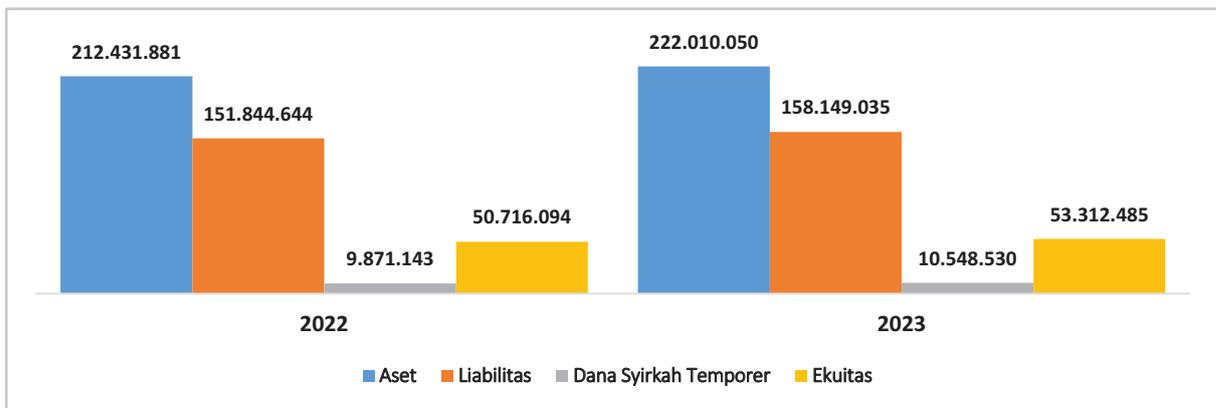
Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	2.757.906	34%	2.790.552	35%
Umum Dan Administrasi	1.979.148	24%	2.067.137	26%
Tenaga Kerja	2.435.356	30%	2.274.770	29%
Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya	266.458	3%	112.705	1%
Lainnya	664.549	8%	626.224	8%
Jumlah	8.103.417	100%	7.871.388	100%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total beban operasional pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 8.103.417 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 232.029 juta atau 2,95% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 7.871.388 Juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada beban tenaga kerja sebesar Rp 160.586 juta atau 7,06%.

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Jutaan Rupiah)



Aset

Rincian jumlah aset operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
Kas	1.297.547	1%	1.704.409	1%
Giro Pada Bank Indonesia	7.870.438	4%	7.204.803	3%
Giro Pada Bank Lain	1.297.706	1%	1.252.071	1%
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	6.035.648	3%	7.190.503	3%
Efek-efek	39.010.634	18%	33.398.418	16%
Tagihan Derivatif - Pihak Ketiga	20.437	0%	29.385	0%
Kredit	131.498.273	59%	123.269.582	58%
Tagihan Anjak Piutang	44.049	0%	50.420	0%
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	4.826.791	2%	10.642.145	5%
Piutang Sewa Pembiayaan	528.480	0%	272.141	0%
Piutang Pembiayaan Konsumen	8.429.005	4%	6.795.450	3%
Piutang Jual dan Sewa Balik	33.148	0%	55.187	0%
Tagihan Akseptasi	1.630.129	1%	2.125.849	1%
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	766.401	0%	791.410	0%
Biaya Dibayar Dimuka	114.353	0%	124.361	0%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih	10.002.144	5%	10.176.936	5%
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	747.872	0%	609.846	0%
Aset Takberwujud	522.482	0%	425.974	0%
Aset Lain-Lain - Bersih	7.334.513	3%	6.312.991	3%
Jumlah Aset	222.010.050	100%	212.431.881	100%

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 222.010.050 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 9.578.169 juta atau 4,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 212.431.881 juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan atas Kredit yang naik sebesar Rp 8.228.691 juta atau 6,68% dibanding periode 31 Desember 2022. Juga diikuti dengan kenaikan Efek-efek sebesar Rp 5.612.216 juta atau 16,80% dan Piutang Pembiayaan Konsumen pihak ketiga sebesar Rp 1.633.555 juta atau 24,04% dibanding periode 31 Desember 2022.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas operasional Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	186.926	0%	169.964	0%
Simpanan	135.089.481	85%	132.683.475	87%
Simpanan dari Bank Lain - Pihak Ketiga	2.420.728	2%	2.548.103	2%
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga	9.761.945	6%	2.408.299	2%
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	16.432	0%	29.561	0%
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga	1.641.363	1%	2.137.042	1%
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	0	0%	3.999.020	3%
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	2.803.373	2%	2.144.195	1%
Utang Pajak	221.735	0%	222.169	0%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	960.675	1%	440.481	0%
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain	1.347.101	1%	1.266.865	1%
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.699.276	2%	3.795.470	2%
Jumlah Liabilitas	158.149.035	100%	151.844.644	100%

Perseroan melakukan pendanaan dalam valuta asing untuk:

- memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pinjaman dalam valuta asing
- transaksi antar bank dalam valuta asing
- investasi dalam obligasi pemerintah dalam valuta asing

Dampak dari aktivitas tersebut, maka Perseroan akan terexpose dalam risiko mata uang (*currency risk*). Perseroan telah memitigasi hal tersebut dengan *natural hedging* dimana mata uang pendanaan disesuaikan dengan pemberian pinjaman maupun pembelian obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama.

Sebagian besar suku bunga pendanaan maupun suku bunga kredit adalah suku bunga variable (*floating*), sehingga dapat disesuaikan dengan cepat. Sedangkan untuk produk pendanaan dengan suku bunga tetap (*fixed*) seperti obligasi, biasanya akan disesuaikan dengan pemberian kredit yang ber suku bunga tetap (*fixed*) juga, seperti KPR.

Dengan demikian dampak perubahan suku bunga dapat dimitigasi, dan Perseroan dapat mendapatkan keuntungan dari margin suku bunga dana dan kredit.

Perseroan selalu memonitor perkembangan suku bunga di pasar dan segera menyesuaikan terhadap produk-produk yang dikeluarkan sehingga senantiasa mendapatkan keuntungan.

Perseroan telah melakukan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing dengan *natural hedge*, yaitu dana valuta asing disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam valuta asing (dalam hal ini nasabah harus mempunyai pendapatan dalam valuta asing yang cukup).

Posisi Devisa Netto (*Net Open Position*) perseroan per posisi Desember 2023 cukup kecil yaitu 0,18% jauh dibawah yang diijinkan otoritas sebesar 20%.

Mengingat Perseroan sudah melakukan kebijakan lindung nilai dalam bentuk *natural hedge* atas sebagian besar pinjaman dan ikatan dalam valuta asing, maka dampak atas risiko mata uang (*currency risk*) dapat diminimalkan. Hanya terhadap Posisi Devisa Netto Perseroan terdapat risiko mata uang. Namun mengingat jumlahnya yang kecil (butir 3), maka dampaknya pun tidak besar terhadap Perseroan.

Sebagian besar sumber dana Perseroan masih berupa dana pihak ketiga berupa Giro, Tabungan dan Deposito yang seperti diketahui berlaku umum di Indonesia suku bunga nya *variable (floating)* sesuai pergerakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia dan suku bunga LPS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 158.149.035 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 6.304.391 juta atau 4,15% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 151.844.644 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp 7.353.646 juta atau 305,35%, serta kenaikan pada simpanan sebesar Rp 2.406.006 juta atau 1,81% dan Pinjaman yang diterima sebesar Rp 659.178 atau 30,74%.

Dana Syirkah Temporer

Rincian jumlah dana syirkah temporer Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
Dana Syirkah Temporer				
Bank	417.762	4%	710.687	7%
Bukan Bank	10.130.768	96%	9.160.456	93%
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.530	100%	9.871.143	100%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total dana syirkah temporer Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.548.530 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 677.387 juta atau 6,86% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.871.143 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan bukan bank sebesar Rp 970.312 juta atau 10,59%.

Ekuitas

Rincian jumlah ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Rp	%	Rp	%
Ekuitas				
Modal saham	2.408.765	5%	2.408.765	5%
Saham Treasuri	(610)	0%	(610)	0%
Tambahan Modal Disetor	3.440.707	6%	3.440.707	7%
Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non Pengendali	(269.072)	-1%	(269.072)	-1%
Penghasilan komprehensif lain	7.373.975	14%	7.621.379	15%
Saldo laba	36.751.051	69%	34.199.727	67%
Kepentingan non pengendali	3.607.669	7%	3.315.198	7%
Jumlah ekuitas	53.312.485	100%	50.716.094	100%



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 53.312.485 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2.596.391 juta atau 5,12% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 50.716.094 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 2.551.324 juta atau 7,46% dan kenaikan Kepentingan non pengendali sebesar Rp 292.471 juta atau 8,82% diimbangi dengan penurunan Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 247.404 juta atau 3,25%.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer Rupiah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 7,32% dan 8,02%. GWM primer valas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 4,03% dan 4,03%. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 24/04/PBI/2022 perihal GWM bank umum. GWM primer rupiah Perseroan yang diwajibkan per posisi 31 Desember 2023 adalah 9%. Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM sebesar 1,7% sesuai PADG Nomor 12 Tahun 2023 sehingga Perseroan telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan GWM sebesar 7,32%.

Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah tercatat sebesar Rp 7.302.084 Juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 740.704 Juta atau 11,29% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah Rp 6.561.380 Juta. Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam Dollar Amerika Serikat pada periode 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 568.354 Juta (setara USD 37 juta dengan kurs Rp 15.397/1 USD).

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (9%-10%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 32,40%, dan 30,07%

Perseroan sampai saat ini memiliki kecukupan modal kerja yang memadai. Beberapa rasio Perseroan yang masih cukup baik, seperti CAR di level 32,40%, LDR di level 97,51% dan lain-lain. Jika terjadi ketidakcukupan modal kerja, Perseroan dapat menggali kembali beberapa sumber pendanaan diatas seperti:

- Pinjaman *money market* antar bank di pasar uang
- Menjual dan/ atau repo surat berharga ke pasar uang dan/atau ke Bank Indonesia
- Menjual Valas atau melakukan *swap sell and buy* ke pasar dan/atau ke Bank Indonesia
- Sekuritisasi
- Melakukan *lending facility* ke BI
- Mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) ke Bank Indonesia (BI)

Memaksimalkan suku Bunga Deposito sampai maksimal yang diijinkan oleh OJK

Imbal Hasil Aset (ROA) dan Ekuitas (ROE)

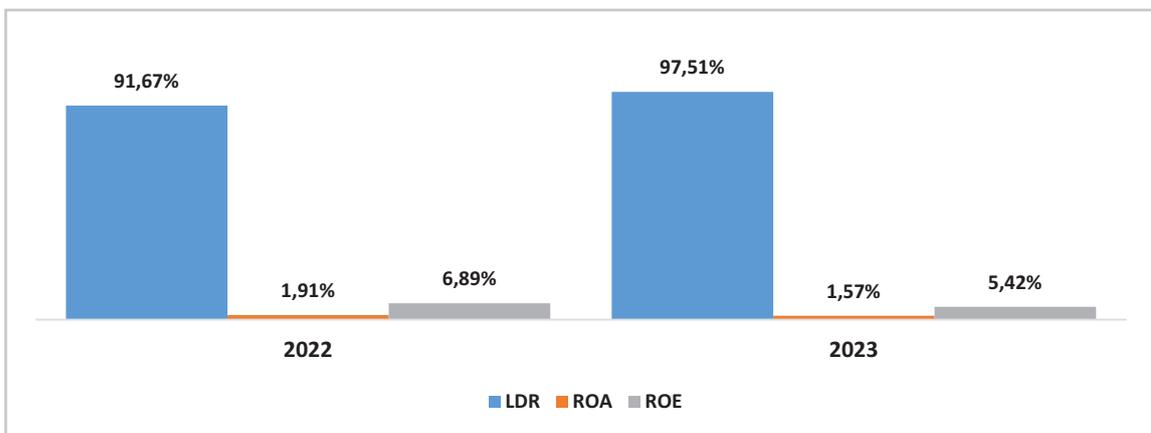
Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 1,57%, dan 1,91%.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 5,42%, dan 6,89%.

Untuk lebih meningkatkan ROA dan ROE dalam tahun 2023 Perseroan telah dan akan melakukan upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan *Net Interest Margin* dengan meningkatkan pemberian kredit dan pembiayaan konsumen serta memperbaiki komposisi pendanaan dengan meningkatkan porsi tabungan dan giro.
- Meningkatkan *fee based income* dari transaksi *trade finance*, kiriman uang, transaksi luar negeri, perdagangan surat-surat berharga dan lain-lain.
- Meningkatkan upaya penagihan dan perbaikan kualitas sistem collection serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan lebih selektif dalam memberikan kredit.

Grafik Pertumbuhan LDR, ROA dan ROE
(Dalam Persentase)



2. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut

Permodalan (*Capital*)

- a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.
- b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang tercantum pada Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.



Rasio KPMM Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah 32,40%, dan 30,07% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut ini adalah Tabel perhitungan KPMM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Modal Inti	47.287.667	45.370.359
Modal Pelengkap	1.948.888	2.371.772
Total Modal	49.236.555	47.742.131
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk risiko kredit	139.667.479	146.316.529
ATMR untuk risiko pasar	3.349.635	1.976.716
ATMR untuk risiko operasional	8.949.435	10.489.207
Total ATMR	151.966.549	158.782.452
Rasio KPMM		
Rasio CET 1 (%)	31,12%	28,57%
Rasio Tier 1 (%)	31,12%	28,57%
Rasio Tier 2 (%)	1,28%	1,49%
Rasio Total (%)	32,40%	30,07%

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian, gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.
- Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.
- Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih baik.

Kualitas Aset (*Asset Quality*)

- Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan CKPN, kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi.
- Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 232.319.315 Juta, meningkat sebesar Rp 7.298.228 Juta atau 3,24% dari 31 Desember 2022, sebesar Rp 225.021.087 Juta. Komposisi aset produktif terbesar merupakan Kredit yaitu sebesar Rp 131.498.273 Juta atau 56,60% dari seluruh total aset produktif lalu diikuti oleh Tagihan Kontijensi sebesar Rp 40.664.528 juta atau 17,50%.

Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
NPL Bruto	3,09	3,53
NPL Neto	0,57	0,92

Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva. Walau NPL bruto masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga NPL neto senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pada periode berakhir 31 Desember 2023 NPL 31 Desember 2023 NPL turun menjadi 3,09% dibandingkan pada tahun 2022 NPL sebesar 3,53%. Kualitas kredit debitur membaik sebagai dampak dari pengaruh makro ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

Manajemen (*Management*)

- a. Komponen-komponen yang menentukan faktor manajemen adalah: manajemen umum, penerapan sistem Manajemen Risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- b. Kemampuan untuk melakukan Manajemen Risiko.

Salah satu proses pelaksanaan prinsip Manajemen Risiko dilakukan melalui rapat *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yang diadakan sekali dalam sebulan. Tim ALCO yang terdiri dari seluruh anggota direksi dan kepala Divisi/Biro terkait mengevaluasi kinerja usaha Perseroan pada periode laporan sebelumnya, seperti kualitas aset, likuiditas, *earnings*, komposisi sumber dan penggunaan dana, kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Perseroan serta melakukan analisa terhadap risiko-risiko potensial, seperti risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko perubahan kurs mata uang asing dan lain-lain. Pada saat yang sama juga dirumuskan sasaran usaha untuk masa mendatang serta memformulasikan strategi pencapaiannya.

Di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang telah dibentuk satuan khusus tim penyelamat kredit bermasalah yang bertugas mengintensifkan penagihan kredit, khususnya atas kredit yang mempunyai potensi bermasalah. Jika penagihan kredit tidak memungkinkan, maka dilakukan upaya restrukturisasi kredit dengan skema yang terbaik bagi kedua belah pihak serta melakukan upaya hukum atas tagihan yang tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, sehingga kualitas aset produktif Perseroan semakin membaik.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Koordinator Penyelesaian Pengaduan Nasabah di Kantor Cabang dan di Kantor Pusat dengan tugas melakukan pemantauan media untuk memonitor setiap pemberitaan yang berkenaan dengan Perseroan, terutama pemberitaan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan. Perseroan mengadministrasikan, memfasilitasi dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang diterima dengan sebaik mungkin. Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penanganan Pengaduan Nasabah dan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 15 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

- c. Jumlah pejabat senior yang melapor pada direktur dan rata-rata lamanya pengalaman dari pejabat senior dibidang perbankan.

Divisi dan Biro yang berjumlah 39 orang melapor. Setiap bulan diadakan Rapat Koordinasi antar Divisi dan Biro untuk membahas strategi yang akan diimplementasikan dalam menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal. Setiap tahun diadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi/Biro. Pimpinan Cabang dan *Staff Senior* di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan diselenggarakan secara bergiliran di kota-kota di mana terdapat Kantor Cabang Perseroan. Pertemuan-pertemuan rutin ini memungkinkan pucuk pimpinan Perseroan dapat mengantisipasi dampak dari perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasikan dengan baik dalam menjalankan Perseroan.



Seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi/Biro dan Pimpinan cabang sudah mempunyai pengalaman rata-rata 10 tahun dalam bidang perbankan dan sebagian besar pejabat senior diangkat dari pegawai yang telah lama bergabung dengan Perseroan dan telah menunjukkan *performance* dan loyalitas yang baik.

d. Kebijakan Perseroan dan metode pengendalian transaksi terhadap pihak-pihak terafiliasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga lainnya dan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh otoritas moneter/Bank Indonesia.

e. Metode yang digunakan *eksekutif senior* Perseroan dalam mengelola risiko khususnya:

- Pengembangan dan penerapan kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan berkenaan dengan standar operasi bank yang hati-hati.

Agar kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan operasi Perseroan dilaksanakan dengan baik dan hati-hati. Perseroan telah membuat suatu Pedoman Sistem Operasi dan Prosedur yang jelas dan seragam dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Beberapa ketentuan Bank Indonesia telah disadur dan diterapkan pemberlakuannya bagi kantor-kantor cabang Perseroan serta dimonitor ketaatannya dalam bentuk laporan ke Kantor Pusat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh cabang akan dikenakan denda/pinalti yang besarnya disesuaikan dengan denda yang diberlakukan oleh Bank Indonesia terhadap Perbankan pada umumnya. Dengan terpenuhinya ketentuan Bank Indonesia oleh cabang-cabang, maka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia oleh Perseroan secara keseluruhan akan lebih mudah dilaksanakan.

- Program audit intern dan lingkungan pengendalian intern.

Pengendalian intern dilakukan dengan menerapkan pola kerja "*Maker - Checker - Approval*", yang dilakukan secara hirarkis guna memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi setiap harinya telah terlaksana seluruhnya secara benar. Sebelum suatu transaksi dijalankan haruslah diperiksa oleh petugas yang lebih tinggi dan mendapat *approval* dari pejabat pada bagian tersebut. Selanjutnya Satuan Kerja Audit Intern Cabang yang tidak terlibat dalam proses transaksi melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan keakuratan pelaksanaan seluruh proses transaksi. Di tingkat pusat terdapat pula Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di bawah Biro Pengawasan dan Pemeriksaan yang menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat. Disamping melakukan pengawasan berdasarkan laporan secara berkala satuan audit intern juga melakukan pemeriksaan langsung ke cabang-cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat.

- Pertimbangan Kredit dan Proses Penelaahannya.

Dalam pemberian kredit Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pertimbangan yang sangat *konservatif*. Semua pengajuan kredit harus disertai studi kelayakan, analisa keuangan dan proyeksi untuk mengetahui prospek perusahaan yang akan dibiayai. Sebelum suatu proposal kredit disetujui harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas wewenangnya. Komite Kredit Cabang hanya berwenang memutuskan pemberian kredit sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Direksi bagi masing-masing cabang, sedangkan untuk proposal kredit yang jumlahnya melampaui wewenang Komite Kredit Cabang, selain telah disetujui oleh Komite Kredit Cabang juga harus dimintakan *approval* dari Komite Kredit Pusat.

- Metode Pengelolaan Risiko dengan Kontrak Derivatif dan Valuta Asing.

Untuk menjaga risiko transaksi kontrak derivatif dan valuta asing, Perseroan senantiasa menjaga Posisi Devisa Netto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing hanya boleh dilakukan oleh Divisi *Treasury* yang memiliki keahlian dan prasarana yang lengkap untuk melakukan transaksi tersebut. Analisa risiko dan pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit Pusat dilakukan oleh *Financial Institution Department* yang khusus bertugas menganalisa risiko transaksi *Treasury*.

Kepada masing-masing *dealer* ditetapkan limit transaksi yang dapat dilakukan sesuai dengan senioritas dan pengalaman yang dimilikinya. Demikian pula posisi valuta asing yang terbuka (*open position*) dalam satu hari dibatasi seminimal mungkin.

- Metode Pengelolaan Risiko Harga.

Penentuan tingkat suku bunga dana maupun kredit dilakukan oleh ALCO melalui rapat ALCO yang dilakukan secara rutin. Suku bunga dana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas Perseroan, suku bunga bank-bank kompetitor, suku bunga SBI dan suku bunga maksimum program penjaminan pemerintah serta *forecast* tim ALCO terhadap arah perkembangan suku bunga pasar uang.

Setelah ditetapkan suku bunga dana yang dikehendaki, maka ditetapkan suku bunga minimum (*prime lending rate*) untuk kredit dengan menambahkan margin tertentu. Cabang-cabang diperkenankan menetapkan suku bunga untuk masing-masing debiturnya sesuai dengan tingkat risiko usaha dan jenis kredit yang diberikan, sepanjang tidak lebih rendah dari *prime lending rate*.

f. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagai implementasi dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 dan terakhir kali oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Perseroan telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat Perseroan dalam program sertifikasi manajemen risiko oleh lembaga yang ditunjuk.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 15 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Rentabilitas (*Earnings*)

- Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional. *Return on Asset* (ROA) dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dalam periode satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah aset dalam periode yang sama. Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.302.085 Juta dan rata-rata aset sebesar Rp 210.458.016 Juta. ROA untuk tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 1,57% dan 1,91%. *Return on equity* (ROE) dihitung dengan membandingkan laba bersih dalam periode satu tahun dengan rata-rata ekuitas (hanya modal inti) dalam periode yang sama. Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.531.895 Juta dan rata-rata modal inti sebesar Rp 46.680.491 Juta. ROE untuk tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 5,42% dan 6,89%.
- Net Interest Margin* (NIM) diperoleh dengan membagi total Pendapatan bunga bersih dalam satu tahun terhadap rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.267.171 Juta dan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga sebesar Rp 187.810.781 Juta. NIM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 4,93% dan 5,53%. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.482.946 Juta dan total pendapatan operasional sebesar Rp 17.245.758 Juta. BOPO Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 78,18% dan 74,53%.



Likuiditas (*Liquidity*)

- a. Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. *Loan to Deposit ratio* (LDR), proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management/ALMA*), kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
- b. Manajemen Perseroan senantiasa menjaga likuiditas Perseroan agar dapat memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum yaitu 9% untuk mata uang Rupiah (untuk posisi per 31 Desember 2023) dan 2% untuk valuta asing.
- c. *Loan to Deposit ratio* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 97,51% dan 91,67%.
- d. *Maturity gap* antara kredit dan simpanan nasabah terjadi *gap* yang negatif pada *maturity* sampai dengan 1 bulan yang dikarenakan struktur pendanaan perbankan yang sebagian besar berada pada simpanan yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan yang terdiri dari Giro. Tabungan dan sebagian besar Deposito kurang 1 bulan. Sedangkan Kredit memiliki jatuh tempo lebih bersifat jangka panjang, sehingga *gap* positif berada pada jatuh tempo diatas 3 bulan hingga 5 tahun.

Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

- a. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan oleh komponen-komponen berikut: modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.
- b. Modal inti pada Desember 2023 yang dialokasikan untuk meng-cover risiko pasar adalah Rp268 miliar. Modal inti yang dimiliki perseroan cukup untuk meng-cover kerugian akibat risiko pasar atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.

Terkait risiko nilai tukar akibat fluktuasi kurs mata uang asing, Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan posisi Desember 2023 hanya sebesar Rp 79.21 miliar (ekuivalen rupiah)/0,18% dari modal Perseoran. Dengan posisi yang cukup rendah tersebut, risiko nilai tukar Perseroan sangatlah kecil (10-days VaR hanya sebesar Rp 462 Juta). Eksposur Perseroan dalam kredit dalam mata uang asing posisi Desember 2023 juga tidak signifikan yaitu dalam mata uang USD adalah sebesar USD 414 juta yaitu 4,94% dari total kredit Perseroan dan dalam mata uang SGD sebesar SGD 3.5 juta atau 0,03% dari total kredit Perseroan.

Penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan secara semesteran. Realisasi penilaian pada tanggal 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Komposit	Peringkat	Analisis
1	Profil Risiko	2.06	Secara keseluruhan trend Risiko Komposit Bank atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko menunjukkan kondisi yang Stabil yaitu berada pada kisaran Low
2	Good Corporate Governance	1.75	Kepatuhan bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang memadai dan efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di Bank. Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik.

No.	Komposit	Peringkat	Analisis
3	Rentabilitas	2.22	<p>Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laba Bank dapat melebihi target yang telah ditetapkan • Laba Bank dapat mendukung permodalan dengan melihat besarnya pertumbuhan Laba Ditahan Bank. • Sumber utama rentabilitas Bank berasal dari pendapatan inti (<i>core earning</i>) yang terdiri dari <i>Net Interest Income</i> (NII) dan <i>net fee income</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earning</i> Bank seperti NII dan <i>net fee income</i> dinilai cukup stabil dan secara umum memiliki prospek meningkat.
4	Permodalan	1.48	<p>Kemampuan Bank dalam mengelola permodalan dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan permodalan Bank disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas usaha Bank. • Tingkat permodalan memadai untuk mengantisipasi semua risiko sesuai dengan profil risiko Bank, serta menunjang kepentingan ekspansi usaha Bank. • Komponen permodalan Bank bersifat permanen, mempunyai kemampuan dalam menyerap kerugian dengan baik. • Bank memiliki manajemen pengelolaan permodalan yang baik yaitu mempunyai prosedur standar dalam menilai kecukupan modalnya, serta telah melakukan <i>stress-test</i> yang hasilnya dapat menutupi kerugian Bank dengan baik. • Bank memiliki akses ke sumber permodalan dengan mudah, baik itu sumber permodalan yang dipupuk dari laba secara internal maupun sumber permodalan yang berasal dari eksternal.

Good Corporate Governance (GCG)

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi bank umum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menggantikan POJK No. 55/POJK.03/2016 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang mana mempengaruhi operasi industri perbankan dan kinerja keuangan. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi peraturan ini dan akan terus bekerja memperbaiki kualitas GCG sehingga memenuhi kewajiban yang ditentukan dan transparansi yang menjadi keharusan.

Dalam bidang kepengurusan, persyaratan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban peraturan tersebut, baik dari sisi jumlah, komposisi, kriteria, independensi, peran dan tanggung jawabnya, Direksi dan Komisaris mengadakan rapat secara berkala dan rapat-rapat yang dilakukan senantiasa dibuat risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Untuk menjamin terlaksananya Manajemen Risiko dan pengendalian yang lebih efektif terhadap operasi Perseroan, beberapa komite kerja telah dibentuk, yaitu:

a. Komite Kredit.

- Komite Kredit Kantor Pusat
Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit yang diajukan ke tingkat Direksi. Dewan Komisaris menentukan wewenang pemberian kredit kepada Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai Komite Kredit Direksi (KKD) melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Komite Kredit Kantor Cabang
Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Pimpinan Cabang yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi. Pemberian kredit yang berjumlah diatas batas wewenang pemberian kredit cabang wajib terlebih dahulu diajukan kepada KKD Kantor Pusat melalui Divisi Perkreditan.

b. Komite Aset & Liability (ALCO).

Komite ALCO terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Divisi/Biro yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memonitor rasio-rasio keuangan penting.



Komite ALCO menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota sedikitnya sekali dalam sebulan untuk membahas kondisi pasar dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keuangan Perseroan, khususnya sumber-sumber dan penggunaan dana, serta rasio-rasio keuangan. Kinerja Keuangan tahun berjalan dianalisa mengacu kepada proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama meliputi hal-hal yang terkait dengan tentang hal-hal yang terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, penyesuaian dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan. Komite Manajemen Risiko (KMR) terdiri dari Anggota Tetap yaitu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Bidang Perkreditan, Direktur *Treasury*, Direktur *International Banking* dan *Operational Support* dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Anggota Tidak Tetap yaitu para Kepala Divisi/Biro terkait.

d. Komite Audit.

Bertanggung jawab untuk mengkaji seluruh aspek pengawasan dan untuk memberikan pendapat serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki independensi dalam mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan *policy* dan mengantisipasi akibat atau risiko yang mungkin timbul sehingga membutuhkan perhatian khusus. Komite Audit juga memastikan bahwa manajemen memahami dan melaksanakan peraturan serta kebijakan yang berlaku termasuk mengawasi persiapan pembuatan laporan keuangan dan independensi dari auditor eksternal. Komite Audit terdiri dari 1 orang ketua yang merupakan Komisaris Independen Perseroan serta 4 orang anggota.

e. Komite Pemantau Risiko.

Bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko bank.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank serta mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

f. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon/ kandidat pengurus Bank.

Komite ini juga berwenang menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.

g. Komite Manajemen Risiko.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling kurang meliputi; Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).

h. Komite Pengarah teknologi Informasi.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; antara lain: kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi; kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*), dan lain-lain.

Terkait Komite Kredit, Komite Aset & Liability, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi, sesuai pasal 25 huruf d angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2017.

Komite-Komite di Bawah Direksi:

1. Komite Kredit Direksi (KKD)

- 1) Landasan Hukum Pengangkatan Komite:
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-DK/21 Tanggal tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) PT Bank Panin Tbk., *juncto* Surat Keputusan Direksi Bank Panin No. 008/SK-DIR/21 tanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Bank Panin.
- 2) Struktur Keanggotaan
Susunan anggota KKD adalah sebagai berikut:
 1. Presiden Direktur
 2. Wakil Presiden Direktur
 3. Direktur Commercial Banking & Mortgage
 4. Direktur Corporate Banking
 5. Direktur Treasury
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab KKD
Tugas KKD:
 1. Mengevaluasi usulan kredit dan memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam memberikan keputusan kredit sesuai wewenang pemberian keputusan atas usulan pemberian fasilitas kredit yang direkomendasikan oleh unit kerja terkait.
 2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit yang diajukan oleh unit kerja terkait.Tanggung Jawab KKD:
 1. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme dan Good Corporate Governance.
- 4) Frekuensi Rapat
Rapat Komite Kredit Direksi tidak dilakukan penjadwalan secara tetap. KKD dapat melakukan rapat sesuai dengan diterimanya usulan pemberian fasilitas kredit baru, usulan pemberian tambahan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, dan usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Unit Kerja terkait, atau kredit yang jumlahnya melampaui Batas Wewenang Pemberian Kredit Cabang.
- 5) Tingkat Kehadiran dalam Rapat
Kehadiran anggota KKD dalam Rapat ditentukan berdasarkan wewenang memutuskan kredit tingkat Direksi yang telah ditetapkan. Wewenang memutuskan kredit ditetapkan berjenjang sesuai dengan jenis fasilitas, jumlah plafond kredit, dan jenis agunan kredit yang akan diputuskan. Wewenang memutuskan usulan kredit dengan jumlah yang lebih kecil dapat dihadiri oleh 1 (satu) anggota KKD, sedangkan usulan kredit dengan jumlah yang lebih besar harus dihadiri oleh 2 (dua) anggota KKD, dengan prinsip semakin besar jumlah plafond kredit dan semakin besar eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, maka jumlah anggota KKD yang hadir harus lebih banyak.
- 6) Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KKD yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Kredit Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari:
 - Proses pemberian kredit dan asset produktif lainnya serta perhitungan risiko telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
 - Proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan efektif.
 - Pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, sehingga risiko kredit dapat dikendalikan dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang terkendali.



2. Komite Aset & Liabilitas / Asset & Liabilities Committee (ALCO)

- 1) Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 006/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liabilities Committee - ALCO*) PT Bank Panin Tbk.
- 2) Struktur dan Keanggotaan:
 1. Presiden Direktur
 2. Wakil Presiden Direktur
 3. Direktur Commercial Banking & Mortgage
 4. Direktur Corporate Banking
 5. Direktur Network & Distribution
 6. Direktur Treasury
 7. Direktur dan Human Resources dan Business & IT Strategic
 8. Direktur Operational & IT
 9. Direktur Compliance & Risk Management
 10. CFO/Finance & Planning
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO:
 - a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan *Asset & Liabilities Management* (ALMA).
 - b. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA:
 - Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
 - Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
 - c. Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi.
 1. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang.
 - Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi).
 - Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi.
 2. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
 3. Kondisi perekonomian internasional.
 - d. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
 1. Penetapan Harga *Asset*
 - Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).
 - Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 2. Penetapan Harga *Liability*
 - Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).
 - Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).
 3. Perubahan Tingkat Suku Bunga
Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
 - e. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
 - f. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi Pasar dan lain-lain.

- 4) Rapat dan Kegiatan Komite ALCO.
Rapat Komite ALCO dilaksanakan secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen aset dan kewajiban.

Rapat Komite ALCO dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite. Sepanjang tahun 2023, Komite ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

- 5) Tingkat Kehadiran dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Komite ALCO telah menghadiri seluruh Rapat yang diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.
- 6) Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.
Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite ALCO dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan rekomendasi mengenai kebijakan, keputusan, dan strategi terkait dengan manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite ALCO.

3. Komite Manajemen Risiko/ Risk Management Committee (RMC)

- 1) Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 008/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Panin Tbk.
- 2) Struktur dan Keanggotaan
 1. Presiden Direktur
 2. Wakil Presiden Direktur
 3. Direktur Compliance & Risk Management
 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage
 5. Direktur Corporate Banking
 6. Direktur Treasury
 7. Direktur Operational & IT
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:
 - a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
 - b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis Bank.
 - c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi *stress*.
 - d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
 - e. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
 - f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
 - g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Perseroan agar sejalan dengan tujuan Perusahaan.



- 4) Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko.
Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali.
- 5) Frekuensi Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Komite ALCO telah menghadiri seluruh Rapat yang diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.
- 6) Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.
Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi/ Information Technology Steering Committee (ITSC)

- 1) Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 004/SK-DIR/24 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Panin Tbk.
- 2) Struktur dan Keanggotaan:
Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua : Wakil Presiden Direktur
Anggota : Direktur Operations dan IT
Anggota : Direktur Compliance & Risk Management
Anggota : Kepala Biro Teknologi Informasi
Anggota : Kepala Biro Manajemen Risiko
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:
 1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi.
 2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical.
 3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI.
 4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 5. Mengevaluasi kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.
 6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*.
 8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.
 9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi, maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI.
 3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.
- 4) Rapat dan Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- 5) Frekuensi Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Pengarah Teknologi Informasi telah menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.
- 6) Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.
Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Komite telah menyampaikan pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI dan melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

Transparansi

Perseroan menyadari pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas, cepat dan konsisten terutama untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, otoritas pasar modal dan Bursa Efek dan otoritas lainnya. Untuk memberikan informasi secara berkala mengenai kinerja, strategi usaha dan data keuangan, Direksi Perseroan menunjuk *Corporate Secretary* dan *Investor Relations Officer* yang melayani pemegang saham publik serta investor asing.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan dipublikasikan secara triwulanan sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk menyelenggarakan *Public Expose* dilakukan sedikitnya sekali dalam setahun. Sebagai bagian dari keterbukaan Perseroan melakukan "Roadshow" secara berkala bersama perusahaan sekuritas terkemuka dalam maupun luar negeri.

Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, Bank dan entitas anak senantiasa mematuhi kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku serta peraturan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak seperti peraturan otoritas jasa keuangan, perpajakan, peraturan Bank Indonesia.

Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya. Realisasi belanja modal selama lima tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini :

Keterangan	<i>(dalam Jutan Rupiah)</i>	
	2023	2022
<i>Capital expenditure</i>	183.736	293.725

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank sepanjang tahun 2024 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 548.840 juta.

Capital expenditure seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi per Desember 2023 sebesar Rp183.736 juta.



Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Investasi dalam perluasan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan per 31 Desember 2023, kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Pendapatan bunga dan provisi dan komisi yang diterima Rp 14.375.601 Juta
- Kenaikan simpanan Rp 2.406.006 Juta
- Kenaikan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp 7.353.646 Juta
- Kenaikan dana syirkah temporer Rp 677.387 Juta

Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasional terutama berasal dari Efek-efek dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.506.903 Juta dan diperoleh dari aktivitas operasional terutama dari kredit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.471.886 Juta.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 159.835 Juta dan Rp 216.043 Juta.

Arus Kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan berasal dari penerima pinjaman yang diterima oleh entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.150.000 Juta dan Rp 2.425.576 Juta.

Sumber likuiditas perseroan dapat berasal dari berbagai sumber dalam menjalankan bisnisnya sebagai bank. Dalam hal ini sebagaimana lazimnya bisnis bank, sumbernya dapat berupa:

- Pendanaan melalui giro, tabungan dan Deposito berjangka.
- Pinjaman *money market* antar bank di pasar uang
- Menjual dan/ atau repo surat berharga ke pasar uang dan/atau Bank Indonesia
- Penerbitan instrumen utang (*Negotiable Certificate of Deposit/ MTN/Obligasi*)
- Menjual Valas atau melakukan *swap Sell and Buy ke pasar dan/atau Bank Indonesia*
- Sekuritisasi
- Melakukan *lending facility* ke BI
- Mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) ke BI

Sumber likuiditas material yang paling utama yang masih belum digunakan secara optimum adalah:

- Penerbitan instrumen utang (*Negotiable Certificate of Deposit/ MTN*)
- Pinjaman antar bank masih jauh dari plafon yang diberikan *counterparties*
- Transaksi Repo dengan Bank lain masih jauh dari plafon yang diberikan *counterparties*
- Pemupukan dana melalui Deposito masih belum memanfaatkan suku bunga maksimal yang diijinkan oleh OJK
- Sekuritisasi

Sejauh pengetahuan Perseroan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan, kecuali terjadinya risiko sistematis di perekonomian Indonesia, seperti krisis.

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/4/PBI/2022 PERIHAL GWM BANK UMUM, RASIO GWM DALAM RUPIAH YANG WAJIB DIPENUHI PADA 31 DESEMBER 2023 ADALAH 9%. BERDASARKAN SURAT DARI BANK INDONESIA PADG NOMOR 12 TAHUN 2023, PERSEROAN MEMPEROLEH INSENTIF SEBESAR 1,7% UNTUK ENTITAS INDUK DAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023, RASIO GWM RATA-RATA PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 7,32%.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan Perseroan menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang ada. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan dan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

1. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Perseroan

Risiko Kredit

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada para debitur. Risiko kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (*Non Performing Loans* atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya pencadangan (CKPN), yang akan menurunkan keuntungan Perseroan. Dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Untuk posisi 31 Desember 2023, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang bidang usaha perdagangan besar dan eceran diikuti dengan bidang usaha rumah tangga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Dengan adanya kesenjangan jangka waktu antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit, maka terdapat Risiko Likuiditas yang menyebabkan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah (deposan) dan pihak lainnya. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (*rush*) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Turunnya kepercayaan Deposan terhadap Perseroan dapat menyebabkan deposan menarik dananya dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen terbesar di kewajiban Perseroan sehingga penarikan sebagian besar DPK dapat menyebabkan kesulitan bagi Perseroan untuk menyediakan dana likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut dimana kredit yang merupakan komponen terbesar di sisi Aset bukan merupakan dana likuid dan memiliki jangka waktu/sampe jatuh tempo tertentu yang umumnya berjangka waktu panjang.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko pasar ini juga mencakup risiko-risiko antara lain:



- a. **Risiko Tingkat Bunga**
Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana bank seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.
- b. **Risiko Valuta Asing**
Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kecurangan hati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, maka dalam mengelola risiko operasional termasuk pula pengelolaan risiko lainnya yaitu:

- a. **Risiko Hukum** adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Adanya risiko hukum yang terjadi pada Perseroan akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.
- b. **Risiko Reputasi** adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Perseroan mengelola risiko reputasi. Sebagai lembaga kepercayaan publik, Perseroan wajib memberikan perhatian khusus terhadap potensi timbulnya risiko reputasi.
- c. **Risiko Strategik** adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, misalnya seperti pada penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.
- d. **Risiko Kepatuhan** adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Perpajakan, dan lain-lain) dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

Ketidakberhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial dapat berupa pengenaan denda oleh regulator, *fraud*, dan tuntutan hukum. Kerugian non finansial dapat berupa menurunnya reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan.

Risiko Teknologi

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu bank. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

Selain itu faktor keamanan sistem (teknologi) juga sangat penting di era saat ini karena semakin banyak pelayanan dan transaksi yang diotomasi sehingga apabila terjadi peretasan/masalah dalam keamanan sistem dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan nasabah.

Risiko Persaingan Pangsa Pasar

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan masuknya investor asing yang menguasai mayoritas saham perbankan Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah dan calon nasabah dalam hal tingkat suku bunga yang ditawarkan dan keunggulan produk-produk lainnya. Kegagalan Perseroan dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah penetapan *pricing* yang kompetitif dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah maupun menarik nasabah baru akan menurunkan portofolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang pada gilirannya akan menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko Makro Ekonomi

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan regulator (Pemerintah/Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, dan lain-lain) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun diperlukannya investasi infrastruktur baru. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performa* Perseroan.

2. Risiko Investasi Bagi Investor Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi

- Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di *Write Down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*Point of Non-Viability*) sesuai dengan pasal 19 angka 1 huruf c. POJK No. 11/POJK.03/2016.
- Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum ("KPMM") secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko.
- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3. Risiko umum

Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan kebijakan di Indonesia. Seluruh kegiatan operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, kebijakan maupun perkembangan global yang memengaruhi Indonesia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, tidak berada dalam pemantauan Perseroan, dan hal tersebut dapat merugikan Perseroan yang pada akhirnya membawa dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.



Tinjauan Ekonomi

Tantangan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan disrupsi pada rantai pasok global dan diperparah dengan faktor perubahan iklim menyebabkan harga komoditas bergejolak yang selanjutnya memicu kenaikan inflasi. Fenomena inflasi yang persisten tinggi kemudian direspons oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menaikkan suku bunga acuan, di samping terbantu oleh harga komoditas energi yang juga menurun.

Perkembangan inflasi yang merendah, suku bunga acuan tidak serta merta menurun. The Fed AS masih menahan suku bunga acuan di level 5,25-5,50% pada Desember 2023. Tingkat inflasi dan suku bunga acuan yang “*higher for longer*” menjadi salah satu pemicu utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi dunia. Sejalan dengan kenaikan suku bunga AS, Bank Indonesia pun tetap mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI rate*) di level 6,00% pada Desember 2023.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang terjadi, kita patut bersyukur melihat perekonomian Indonesia yang tetap berdaya tahan dan konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas atau sekitar 5% sepanjang tahun 2023 dan bahkan secara *full year* tetap tumbuh solid sebesar 5,05% (*yoy*), meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menyentuh 5,31% (*yoy*). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas ekspor unggulan, dan fenomena El Nino yang membuat lapangan usaha pertanian tumbuh melambat dibandingkan tahun 2023, terutama pada paruh kedua tahun lalu.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 seiring terkendalinya inflasi, daya beli masyarakat yang terjaga, dan kegiatan wisata yang meningkat. Sebaliknya kinerja ekspor dan impor belum dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia karena perlambatan ekonomi global yang masih berkepanjangan. Ditambah, harga komoditas andalan yang pada tahun 2023 sempat menjadi motor pendorong ekonomi kini berangsur-angsur semakin melandai.

Meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan di tahun 2023, namun kinerjanya tetap kuat sebagaimana dapat dilihat dari posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang terus membaik ditopang oleh kinerja transaksi berjalan yang sehat dan neraca modal dan finansial yang mencatat surplus, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia (BI), di tengah kuatnya dolar AS.

Pertumbuhan kredit meningkat dengan ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, ditopang likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah.

Berkat bauran kebijakan moneter dan sinergi dengan Pemerintah yang tepat, Indonesia tetap berdaya tahan dan termasuk sebagai negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi dilingkungan ASEAN dan di lingkungan G20.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional tahun 2023 yang terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang semakin positif dan terus berlanjut, industry perbankan nasional pun tetap resilien dan berdaya saing didukung oleh permodalan yang kuat dan profil risiko yang terkendali. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) tahun 2023 di level yang tinggi sebesar 27,69% dengan risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) sebesar 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto) pada Desember 2023.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 28 Mei 2024 atas laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini audit tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin yang ditandatangani oleh Fonny Alimin, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("Perseroan") suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., dahulu Notaris di Jakarta junctis akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan sebelumnya telah disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta menyusun kembali anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 ("**Akta No. 22/2021**").

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, Perseroan memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-205/DDK/II/8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir, tanggal 21 April 1972.

Berdasarkan Akta No. 22/2021, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha sebagai bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;



4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
11. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
14. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
17. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
18. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

A Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;



- kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

B Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur Permodalan pada saat Perseroan Didirikan

Tahun 1972

Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd, Akta No. 85 tanggal 17 Agustus 1971, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja namora, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan akta No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adiran Jimmie Tumanggor, S.H., KN, pada waktu itu pengganti Juliaan Nimrod Siregar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A. 5/18/24 tanggal 19 April 1972, didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1123 tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 45 tanggal 6 Juni 1972, Tambahan No. 201, struktur persahaman Perseroan sebagai berikut:



Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.000,00.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. Mochtar Riady	1.725	172.500.000,-	23,00
2. Mu'min Ali Gunawan	1.725	172.500.000,-	23,00
3. Gunadi Gunawan	1.725	172.500.000,-	23,00
4. Tidjan Ananto	1.035	103.500.000,-	13,80
5. Jasid Kadiman	690	69.000.000,-	9,20
6. Muljadi Kusumo	505	50.500.000,-	6,73
7. Andi Gappa	75	7.500.000,-	1,00
8. Achmad Danuningrat	20	2.000.000,-	0,27
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	7.500	750.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	12.500	1.250.000.000,-	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Pada tahun 2022, struktur permodalan Perseroan sama dengan tahun 2024.

Tahun 2023

Pada tahun 2023, struktur permodalan Perseroan sama dengan tahun 2024.

Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan struktur permodalan Perseroan *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votraint No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Saham Treasuri	6.100.000	610.000.000	0,02
4. Masyarakat < 5%	3.642.681.561	364.268.156.100	15,12
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

3. Kepengurusan dan Kepengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 69 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ Independen	:	Nelson Tampubolon
Wakil Presiden Komisaris/ Independen	:	Lintang Nugroho
Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan
Komisaris	:	Johnny
Komisaris	:	Gregory James Terry
Komisaris/ Independen	:	Drs. H. Riyanto

Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur	:	Edy Heryanto
Direktur	:	Januar Hardi
Direktur	:	Gunawan Santoso
Direktur	:	Lionto Gunawan
Direktur	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	:	Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	:	Haryono Wongsonegoro

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Nelson Tampubolon, Presiden Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun.

Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta di Bandung (1977-1980), dan Direktur Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota Dewan Komisiner *ex officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia (2018-2019). Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004).



Lintang Nugroho, Wakil Presiden Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 67 tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1 September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga Tbk., pada Februari 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999-2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005), Mercy Corps Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009-2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).



Chandra Rahardja Gunawan, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Panin Bank sejak 01 Juni 2015. Beliau memulai karir perbankan di Crocker National Bank, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1980, dan pernah menjabat sebagai Vice President pada Chase Manhattan Bank pada periode 1985-1989, dan di beberapa Bank swasta lainnya sampai akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada 26 Juni 1993 sebagai Direktur. Lulus dari jurusan Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1979.



Johnny, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007. Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.



Gregory James Terry, Komisaris
Warga Negara Australia, 79 tahun.

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Panin Bank berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 58 tanggal 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Diplomat di Departemen Luar Negeri - Australia (1966-1973). Mulai menggeluti industri keuangan sebagai Direktur Jardine Matheson Holdings Limited (1987-1997) dan Country Manager Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999). Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasional di Brierley Investments Limited (2000-2003), dan General Counsel, Chief Operating Officer and Chairman, South East Asia di Morgan Stanley Asia (2006-2009), serta Executive Vice Chairman di JM Financial Limited (2012-2015). Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau berkarir sebagai Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners (2018-2020). Lulus dari Fakultas Hukum University of Melbourne, Australia, dan *Master of Arts* dari *Tufts University*, Chicago, Amerika Serikat.



Drs. H. Riyanto, Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 78 tahun.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1971.



Direksi



Herwidayatmo, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 67 tahun.

Ditunjuk sebagai Presiden Direktur sesuai hasil RUPSLB Bank Panin tanggal 1 September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1982 ketika bergabung dengan Bapepam, Departemen Keuangan RI, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Ketua Bapepam pada Januari 2000-November 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi pada April 1998-Januari 2000, dan sebagai Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara, berkedudukan di Washington, DC, USA, pada November 2004–Oktober 2006, Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata Tbk., pada Agustus 2008-Agustus 2009, dan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk., Agustus 2009-April 2014.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981 dan Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 1992.



Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Panin Bank sejak 13 Desember 2022. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Perbankan Institutional tahun 2007-2022, Vice President Divisi Internasional dari tahun 1996-2007.

Pernah menjadi Komisaris PT Clipan Finance Indonesia Tbk., Direktur Correspondent Banking di American Express Bank, Jakarta dan di Sumitomo Niaga, Jakarta. Lulus dari University of Technology, Sydney, Australia Jurusan Computer Science pada tahun 1988.



Edy Heryanto, Direktur
Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Komersial Panin Bank sejak 28 Mei 2004.

Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1990, beliau sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin KCU Jakarta Palmerah pada periode 1994 sampai dengan 2004. Pengalaman perbankan beliau dimulai sejak tahun 1988 di Bank Universal sebagai *Credit Analyst*.

Lulus dari Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Padang tahun 1986 dan Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Jakarta tahun 1988.



Januar Hardi, Direktur
Warga Negara Indonesia, 60 Tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin sejak 13 Desember 2022.

Bergabung dengan Bank Panin sejak tahun 1990 sebagai Junior Officer Consumer Banking, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President - Head Of Corporate Banking Group, sejak tahun 2012. Lulus dari Fakultas Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 1989.



Gunawan Santoso, Direktur
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Menjabat Sebagai Direktur Tresuri Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1989. Sebelumnya pernah menjadi Komisaris di PT Verena Multi Finance sejak tahun 2011-2022, dan Komisaris di PT Clipan Finance Indonesia Tbk., dari tahun 2000 hingga 2007. Lulus dari Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1989.



Lianto Gunawan, Direktur
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur sejak 09 Juni 1997. Sebelumnya, beliau adalah Direktur di ANZ Panin Bank periode 1993-1997 dan Manager di Westpac Panin Bank periode 1991-1993 sebelum akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada tahun 1997. Lulusan San Francisco State University, Amerika Serikat Jurusan Finance tahun 1990.



Anthonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Bank berdasarkan Akta BA RUPSLB I No. 08 tanggal 8 September 2009. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Biro Compliance periode 2001-2009. Pernah bekerja di Bank CIC sejak tahun 1992 hingga 1999 sebagai Account Officer hingga Branch Manager.

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta tahun 1990, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 1992. Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat tahun 1999. Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 2000, Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan tahun 2008 dan Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 2013.



Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Menjabat Sebagai Direktur Panin Bank sejak 29 Mei 2015. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 2006, sebagai Branch Banking Division Head, dengan jabatan terakhir sebagai Branch Network & Operations Group Head. Pengalaman pekerjaan sebelumnya adalah pernah bekerja di Citibank tahun 1990 hingga 1992, dan Lippo Bank, dari tahun 1992 hingga 2005, dengan posisi antara lain sebagai Pemimpin Cabang, Quality Assets Team Leader, Regional Office Head, Branch Network Group Head, Operations Group Head dan Marketing Coordinator Jabotabek I.

Lulus dari Universitas Surabaya pada tahun 1989 dan Master bidang Ekonomi/Marketing dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, tahun 2003.



Haryono Wongsonegoro, Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 Tahun.

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Bank Panin sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta No. 58 tanggal 26 Juni 2020. Memulai karir perbankan sebagai Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005), Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, (2005-2009), dan Kepala Divisi Bisnis Kecil & Menengah (SME) dan Bisnis Komersial (2009-2011). Sebelum bergabung dengan Bank Panin beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta, Bank Central Asia (2011-2019).

Lulus dari Magister Manajemen, Universitas Udayana, Bali (2004)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Tata Kelola Perseroan

Secara umum, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparency

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan terkait kondisi keuangan dan non-keuangan bank serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparansi ini diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan *Public Expose* untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik GCG. Akan tetapi, penerapan prinsip ini tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban bagi bank untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis.

Accountability

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Penerapan Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Dalam mencapai akuntabilitas ini, Perseroan secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan mekanisme *check and balance*. Tidak hanya itu, Perseroan berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Penerapan akuntabilitas dilakukan dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ bank menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangannya.

Responsibility

Merupakan kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.

Independency

Merupakan kondisi pengelolaan Perseroan secara professional tanpa benturan kepentingan, dominasi, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi Prinsip Kemandirian secara optimal, seluruh organ dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik.

Fairness

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan tanpa adanya perbedaan perlakuan. Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, juga akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau karena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 010/SK-DIR/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)
2. Anggota : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
Lukman Abdullah (Pihak Independen)
Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite dalam membantu tugas Dewan Komisaris, sebagai berikut :

1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pelaksanaan Audit Intern.

Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi audit intern maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1.1. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern bank.
- 1.1.2. Mengevaluasi kinerja SKAI.
- 1.1.3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.4. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- 1.1.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
- 1.1.6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.



- 1.1.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 1.1.8. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- 1.1.9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan audit intern yang harus ditandatangani Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- 1.1.10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Laporan pengangkatan dan penghentian kepala SKAI.
- 1.1.11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
Penunjukan *quality assurance* independen untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. Dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.

1.2. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pelaksanaan *Audit Ekstern*.

Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi audit ekstern, maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 1.2.2. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS, meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan KAP dengan standard yang berlaku.
 - b. kecukupan cakupan pemeriksaan dan uji petik yang dilakukan
 - c. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP.
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Management Letter dan Final Audit Report.
- 1.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris (DEKOM) untuk disampaikan kepada RUPS.
Faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris meliputi : Independensi, Scope pemeriksaan, audit fee, kompetensi, metodologi, teknik dan sarana, fresh eye perspective, potensi risiko dan hasil evaluasi atas hasil pemeriksaan sebelumnya.
- 1.2.4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia maupun regulator lainnya.

1.3. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pengendalian Intern

Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan **pengendalian intern** maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI maupun auditor ekstern, untuk meyakini bahwa Bank telah memiliki rancangan pengendalian yang efektif serta kecukupan pengendalian intern dalam memitigasi risiko-risiko yang signifikan, dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Bank dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 1.3.2. Meyakini bahwa Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi dan memutakhirkan kebijakan dan prosedur tersebut untuk disesuaikan terhadap standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 1.3.3. Mengevaluasi penghitungan estimasi yang signifikan, termasuk asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- 1.3.4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank.

1.4. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Laporan Keuangan.

Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait **Laporan Keuangan** maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1.4.1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 1.4.2. Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 1.4.3. Meyakini bahwa laporan keuangan tahunan Bank disajikan secara wajar, didasarkan pada materialitas dan risiko yang signifikan, serta bebas dari salah saji material.
- 1.4.4. Menelaah pengaduan, termasuk yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 1.4.5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik dan KAP.

1.5. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Memantau penerapan GCG melalui notulen (risalah rapat) Komite GCG secara periodik.

1.6. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah sebagai berikut:

- 1.6.1. Menyusun program kerja tahunan Komite.
Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite beserta target kinerja. Program kerja ini wajib diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan disetujui sebelum tahun buku Bank disahkan.
- 1.6.2. Melakukan reviu terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala, Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- 1.6.3. Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Wewenang

- 2.2.1 Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2.2.2 Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Bank.
- 2.2.3 Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.
- 2.2.4 Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko.
- 2.2.5 Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Audit:

Nelson Tampubolon, Ketua
Warga negara Indonesia, 69 Tahun.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004).



Menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta di Bandung (1977-1980), dan Direktur Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota Dewan Komisiner *ex officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia (2018-2019).

Drs. H. Riyanto, Ketua

Warga negara Indonesia, 78 Tahun.

Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1971.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari tahun 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Lintang Nugroho, Anggota

Warga Negara Indonesia, 67 Tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1 September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga Tbk pada Februari 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999-2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005), Mercy Corps Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009-2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).

Lukman Abdullah, Anggota

Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1984.

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2009. Saat ini yang bersangkutan adalah Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk., (sejak 2009) dan Komisaris Independen PT Panin Insurance Tbk., (sejak 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Asuransi Ramayana Tbk., (2004-2008), Partner Kantor Akuntan Publik Drs. Hans Tuanakotta & Mustofa (1991-2002), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs Capelle Tuanakotta (1979-1990) dan Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs Utomo Mulia & Co (1973-1979).

Bambang Setyoko, Anggota

Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulus dari Akademi Uang dan Bank Yogyakarta tahun 1978, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta tahun 2005.

Menjadi Anggota Komite Audit Bank Panin sejak tahun 2020. Juga menjabat sebagai anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Bank J Trust Indonesia sejak tahun 2019, dan anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Resona Bank Perdania (2014-2018). Berkarir di Bank Indonesia selama 34 tahun, diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.

Rapat Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/2015, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Audit telah melakukan 7 (tujuh) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran
Nelson Tampubolon	Ketua	7	100%
Drs. H. Riyanto	Anggota	7	100%
Lintang Nugroho	Anggota	7	100%
Lukman Abdullah	Anggota	7	100%
Bambang Setyoko	Anggota	7	100%

Laporan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal secara bulanan.
2. Melakukan pemantauan perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan OJK dan Audit Internal.
3. Menyelesaikan pembahasan Rekomendasi Penunjukkan Akuntansi Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan Posisi 31 Desember 2023.
4. Menyelesaikan Pembahasan Draft Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) BPP 2024 dan progress tindaklanjut QAR oleh PWC.
5. Pemaparan Hasil Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan (General audit) Perseroan per 31 Desember 2022 bersama KAP Imelda & Rekan Delloite.
6. Pembahasan pencantuman Audit Rating dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama Satuan Kerja Audit Internal.
7. Kick off meeting kaji ulang/ Quality Assurance Review (QAR) oleh PwC bersama Konsultan PwC dan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.
8. Laporan Ringkasan Hasil Kaji Ulang Kesesuaian Praktik Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Panin Tbk. (Agustus 2023) bersama Konsultan PwC dan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.

6. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-DIR/20 tanggal 17 Juli 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Anggota : Nelson Tampubolon (Presiden Komisaris)
Johnny (Komisaris)
Akijat Lukito (Anggota)
Yusak Zefanya (Anggota)

Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi:

Drs. H. Riyanto, Ketua

Warga Negara Indonesia, 78 tahun.

Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1971.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari tahun 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Nelson Tampubolon, Ketua

Warga negara Indonesia, 69 Tahun.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004).

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta di Bandung (1977-1980), dan Direktur Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris *ex officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia (2018-2019).

Johnny, Anggota

Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Bank Panin sejak 22 Juni 2021, dan Presiden Komisaris Bank Panin sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.

Akijat Lukito, Anggota

Warga Negara Indonesia, 71 tahun.

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 September 2013. Bergabung dengan Bank Panin sejak tahun 1973, Pemimpin Cabang Cirebon Panin Bank (1973-1997), Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan (1997-2005) terakhir 2005-April 2013 sebagai Staf Direksi dan pernah menjabat sebagai Komisaris PT Panin Insurance Tbk., (1984-2010).

Yusak Zefanya, Anggota

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Meraih gelar Master of Art di bidang Leadership dari STT International Harvest, pada tahun 2007.

Mengawali karirnya dengan bekerja di PT Masa Ponko Corporation (1980) dan PT Gunung Agung (1982). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Staf Bagian Umum dan Bagian Personalia (1982-1991). Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia (1991-2005) dan menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Personalia (2005-sekarang).

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

- A. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual
 - Kewajaran dengan *Peer Group*
 - Pertimbangan sasaran dengan strategi jangka panjang Perseroan.
- B. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 3 (tiga) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran
Drs. H. Riyanto	Ketua	3	100%
Nelson Tampubolon	Anggota	3	100%
Johnny	Anggota	3	100%
Akijat Lukito	Anggota	3	100%
Yusak Zefanya	Anggota	3	100%

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2023 dan gratifikasi tahun buku 2022, antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. Prestasi Kerja Individual.
 - b. Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
 - c. Perbandingan Industri Perbankan dan UMR.
 - d. Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
 - e. Faktor inflasi.
2. Memonitor Informasi tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2023.
3. Melakukan Review Peraturan bidang Sumber Daya Manusia dan data Kepegawaian.

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



7. Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No.56 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Internal Audit di PT Bank Panin Tbk., dilakukan oleh Divisi Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Divisi Internal Audit juga memiliki akses langsung ke Komite Audit, untuk mengkoordinasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil audit. Divisi Internal Audit memiliki peran strategik dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan melalui proses audit berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK, Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Mulai 24 Desember 2008 Kepala Divisi Internal Audit adalah Herbert J. S. Sibeua, sebagaimana termaktub dalam Surat Direksi No.008/DIR/JAP/SJ/08, Perihal: Surat Penunjukan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai:

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi - Jurusan Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

- PT Bank Panin Tbk; Centralized Processing Head Kantor Cabang Utama Palmerah, Jakarta (2005-2008)
- PT Bank Panin Tbk; Koordinator Audit (2000-2005)
- PT Bank Panin Tbk; Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), 2008 – sekarang.

Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015, dengan nama Piagam Audit Internal PT Bank Bank Panin Tbk., yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DIR/JAP/SJ tanggal 24 Desember 2008, yang dievaluasi secara berkala dan disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Piagam Audit Internal tersebut menguraikan Visi, Misi, Ruang Lingkup Pekerjaan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit.

Ruang Lingkup Pekerjaan Internal Audit adalah:

1. *Assurance*.

Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit adalah untuk memberikan keyakinan, namun tidak mutlak kepada Komite Audit dan Direksi bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Perseroan dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi telah memadai dan efektif.

2. *Consulting*.

Internal Audit juga menyediakan jasa konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perseroan, manajemen risiko, dan proses pengendalian.

Pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas Divisi Audit Internal, termasuk bilamana Audit Internal kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan.

Kepala Divisi Internal Audit dan semua staf Internal Audit berwenang untuk:

- Memiliki akses tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, properti, dan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak *outsorce*.
- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, subyek, ruang lingkup kerja, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- Memiliki akses penuh kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Kepala Divisi Internal Audit dan semua staf Internal Audit memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyusun Rencana Audit Tahunan.
- Menjaga profesionalisme dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang memadai.
- Menerbitkan laporan berkala mengenai hasil kesimpulan aktivitas Audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal, efektif dan efisien kepada Perseroan.

Pelaksanaan Audit Internal Perseroan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan standar praktik *professional internal audit* yang ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi atau bahkan melampaui kedua standar ini.

Internal Audit melakukan pertemuan dengan Komite Audit dan Direksi secara berkala untuk melaporkan hasil dan temuan audit. Komite Audit dan Direksi memastikan bahwa seluruh temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Menyelesaikan Pemeriksaan SKAI di Kantor Cabang terhadap 184 Aktivitas di Kantor Cabang Utama dan, 368 Aktivitas di Kantor Cabang Pembantu.
2. Menyelesaikan 9 pemeriksaan Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
3. Menyelesaikan 9 pemeriksaan dan penilaian Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
4. Menyelesaikan 42 pemeriksaan Aktivitas Kantor Cabang dan *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat.

8. Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Lintang Nugroho (Wakil Presiden Komisaris) |
| 2. Anggota | : | Chandra R. Gunawan (Komisaris) |
| | | Johnny (Komisaris) |
| | | Gregory James Terry (Komisaris) |
| | | Lukman Abdullah (Pihak Independen) |
| | | Usep Ekadaya (Pihak Independen) |
| | | Bambang Setyoko (Pihak Independen) |

Komite Pemantau Risiko dibentuk sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Audit:

Lintang Nugroho, Ketua

Warga Negara Indonesia, 67 Tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1 September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga Tbk pada Februari 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999-2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005), Mercy Corps Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009-2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).

Chandra Rahardja Gunawan, Anggota

Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Lulus dari jurusan Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Panin Bank sejak 01 Juni 2015. Beliau memulai karir perbankan di Crocker National Bank, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1980, dan pernah menjabat sebagai Vice President pada Chase Manhattan Bank pada periode 1985-1989, dan di beberapa Bank swasta lainnya sampai akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada 26 Juni 1993 sebagai Direktur.

Johnny, Anggota

Warga Negara Indonesia, 70 tahun

Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Bank Panin sejak 22 Juni 2021, dan Presiden Komisaris Bank Panin sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.

Gregory James Terry, Anggota

Warga Negara Australia, 79 tahun

Lulus dari Fakultas Hukum University of Melbourne, Australia, dan *Master of Arts* dari *Tufts University*, Chicago, Amerika Serikat.

Diangkat sebagai Komisaris Panin Bank berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 58 tanggal 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Diplomat di Departemen Luar Negeri - Australia (1966-1973). Mulai menggeluti industri keuangan sebagai Direktur Jardine Matheson Holdings Limited (1987-1997) dan Country Manager Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999). Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasional di Brierley Investments Limited (2000-2003), dan General Counsel, Chief Operating Officer and Chairman, South East Asia di Morgan Stanley Asia (2006-2009), serta Executive Vice Chairman di JM Financial Limited (2012-2015). Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau berkarir sebagai Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners (2018-2020).

Lukman Abdullah, Anggota

Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1984.

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2009. Saat ini yang bersangkutan adalah Komisariss Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk., (sejak 2009) dan Komisariss Independen PT Panin Insurance Tbk., (sejak 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Asuransi Ramayana Tbk., (2004-2008), Partner Kantor Akuntan Publik Drs. Hans Tuanakotta & Mustofa (1991-2002), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs Capelle Tuanakotta (1979-1990) dan Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs Utomo Mulia & Co (1973-1979).

Usep Ekadaya, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 54 tahun

Lulusan dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1989

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak November 2023. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1995, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Bagian pada Biro Manajemen Risiko. Pernah bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1990 hingga 1991 dan Kantor Akuntan Publik KPMG Indonesia (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*) dari tahun 1991 hingga 1995.

Bambang Setyoko, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulus dari Akademi Uang dan Bank Yogyakarta tahun 1978, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta tahun 2005.

Menjadi Anggota Komite Audit Bank Panin sejak tahun 2020. Juga menjabat sebagai anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Bank J Trust Indonesia sejak tahun 2019, dan anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Resona Bank Perdania (2014-2018). Berkarir di Bank Indonesia selama 34 tahun, diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6 (enam) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran
Lintang Nugroho	Ketua	6	100%
Chandra R. Gunawan	Anggota	4	67%
Johnny	Anggota	4	67%
Gregory James Terry	Anggota	5	83%
Lukman Abdullah	Anggota	6	100%
Usep Ekadaya	Anggota	6	100%
Bambang Setyoko	Anggota	6	100%

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Melakukan pemantauan pemenuhan Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Perseroan.
2. Melakukan pemantauan Profil Risk Perseroan.
3. Memantau Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) terkait Penerapan Manajemen Risiko.
4. Melakukan pemantauan Portofolio Kredit, Market, Likuiditas, Operasional & lainnya.
5. Memberikan Respon atas diberlakukannya POJK No. 17 Tahun 2023 bersama Biro Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan:
 - a. Penyesuaian Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
 - b. Penyesuaian Buku Pedoman Operasi (BPO) Manajemen Risiko Umum, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan risiko lainnya.
 - c. Memperhatikan hal-hal yang belum dapat dipenuhi sesuai POJK di atas (bila ada).



9. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sebagaimana termaktub dalam Memorandum dari Direksi Perseroan tanggal 23 Januari 1997. Direksi Perseroan menunjuk Jasman Ginting Munthe sebagai *Corporate Secretary* Perseroan terhitung sejak tanggal memorandum tersebut ditandatangani.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2018. Sebagai *Corporate Secretary* Perseroan telah memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*):

Jasman Ginting Munthe, Sekretaris Perusahaan
Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun.

Lulusan dari Universitas Padjadjaran, Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas dan Lulusan Universitas Indonesia, Magister Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam.

Memulai kariernya sebagai Management Trainee (*Officer Development Program*) di PT Panin Bank tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai Marketing Treasury Produk (1992-1993), ALCO Support Group (1993-1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (1995-1996,) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (1996-2009). Komisararis PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., (2009-2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai Corporate Secretary Panin Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*):

Sesuai dengan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

Bidang *Corporate Affairs*

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. Penyelenggarakan RUPS;
- c. Memenuhi kewajiban pelaporan keterbukaan informasi;
- d. Penyelenggarakan *public expose*;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain;
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu;
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*);
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*;
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan;
- j. Mengadakan *press conference*;



- k. Memelihara dan menjaga situs perseroan khususnya konten yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*;
- l. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha, baik yang terbit di media cetak, media *on-line*, dan media elektronik lainnya;
- m. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di media massa (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun Perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin Group yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi Perseroan;
- n. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di media massa;
- o. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting, dan kebijakan-kebijakan manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf, dan karyawan Perseroan;
- p. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Program Pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Membuka Peluang Melalui Peningkatan ESG Rating	PWC - IDX	19 Januari 2023	Jakarta
Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	OJK	14 Maret 2023	Jakarta
Webinar Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI	KSEI-ICSA	14 Maret 2023	Jakarta
Seminar Master Class Environmental Reporting	IDX-GRI-CDP	30 Maret 2023	Jakarta
Sosialisasi Penyelenggaraan Annual Report Award Tahun 2022	ARA	12 April 2023	Jakarta
Sosialisasi EASY KSEI 2023	KSEI	19 Mei 2023	Jakarta
Pendalaman Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	ICSA	08 Juni 2023	Jakarta
Sosialisasi Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	IDX	24 Juni 2023	Jakarta
Sosialisasi Compliance Refreshment Perseroan dan Perusahaan Public 2023	IDX	22 Agustus 2023	Jakarta
How to Manage Crisis Communication in Banking Industry	Infobank - LPS	12 September 2023	Jakarta
Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran OJK; Nomor 14/POJK.04/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon	OJK	14 Oktober 2023	Jakarta
Sosialisasi PUG BMKI "Assuring Family Owned Business Sustainability By Building Trust Through Governance"	KNKG	2 November 2023	Jakarta

10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama

PT Panin Financial Tbk (“Panin Financial/PF”) d/h PT Panin Life Tbk

Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974, yang kemudian diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6. tanggal 4 April 1975, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197, tanggal 14 April 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30. tanggal 15 April 1975. Tambahan No. 203.



Anggaran dasar Panin Financial telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. No. 27 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0093497 tanggal 17 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136095.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023 (“**Akta No. 111/2015**”).

PF berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Lt. 6. Kota Jakarta Barat.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk No. 41 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-0066435.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0161694.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 (“**Akta No. 41/2020**”), maksud dan tujuan Panin Financial ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasihat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha utama Panin Financial adalah menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum. (KBLI No. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas Panin Financial dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PF

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41/2020 *juncto* Laporan Komposisi Kepemilikan Saham PT Panin Financial Tbk., per 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Panin Financial adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 125,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	95.850.000.000	11.981.250.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Paninvest Tbk.	21.728.799.460	2.716.099.932.500,-	67,86
2. Masyarakat	10.293.273.833	1.286.659.229.125,-	32,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	32.022.073.293	4.002.759.161.625,-	100,00
Saham Dalam Portepel	42.315.347.126	5.289.418.390.750,-	

Pengurus dan Pengawasan PF

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. Akta Pernyataan Rapat PT Panin Financial Tbk., No. 43 tanggal 30 Juni 2022 Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.09-0038081 tanggal 28 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146276.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris	:	Richard Budi Gunawan
Komisaris / Komisaris Independen	:	Sugeng Purwanto

Direksi

Presiden Direktur / Direktur Independen	:	Marwan Noor
Wakil Presiden Direktur	:	Bhindawati Gunawan
Direktur	:	Priskila Gabriela Ciahaya

Votrant No. 1103 Pty. Ltd. ("VTL")

Riwayat Singkat

VTL adalah suatu perusahaan terbatas dengan saham (*Company Limited By Shares*) yang sah didirikan berdasarkan *Articles of Association of Votrانت No. 1103 Pty Limited*.

Anggaran dasar VTL yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam *Constitution of Votrانت No. 1103 Pty Ltd ACN 082 564 369 (constitution adopted by the Company's Shareholder(s) by Special Resolution dated 5 February 2014)*.

Berdasarkan *Certificate of Registration of a Company* tanggal 8 Mei 1998 yang diterbitkan oleh *Australian Securities Commission*:

- VTL dengan *Australian Company Number* 082 564 369 adalah suatu perusahaan terdaftar berdasarkan Divisi 1 dari Bagian 2.2 dari Undang-Undang Perusahaan New South Wales dan karena pendaftarannya tersebut merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum (*incorporated company*).
- VTL terbatas dengan saham (*limited by shares*).
- VTL adalah suatu perusahaan tertutup (*proprietary company*).

Berdasarkan dokumen *Forms Manager* yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investment Commission*, VTL terdaftar dan berkantor di ANZ Centre Melbourne Level 9, 833 Collins Street, Docklands Vic 3008.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Laporan Tahunan Votrانت untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 kegiatan Utama *Votrانت No. 1103 Pty Ltd* adalah kepemilikan saham sebesar 38,8% pada PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham VTL

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investments Commission (ASIC)*, tanggal 23 Mei 2016, struktur permodalan dan Pemegang Saham Votrانت No. 1103 Pty Ltd adalah sebagai berikut;

- *Share Capital* VTL terdiri dari 502,854,334 saham biasa, dengan Jumlah Modal Disetor (*Total Paid Amount*) adalah AU\$ 502,854,334.00;
- VTL dimiliki 100% oleh ANZ Funds Pty Ltd.; dan
- Perusahaan Induk Paling Atas (*Ultimate parent entity*) dari VTL adalah Australian and New Zealand Banking Group Limited (ANZGHL).



Pengurus dan Pengawasan VTL

Berdasarkan dokumen *Notice of Appointment of Director*, susunan pengurus Votrait per tanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Jonathan Noel Berry (Direktur)
- Tristan Cleeve (Direktur)
- Kylie Melissa Bundrock (Direktur)

11. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan

PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (“CFI”)

Riwayat Singkat

CFI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. CFI didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Clipan Leasing Corporation No. 47, tanggal 15 Januari 1982 *juncto* Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 363 tanggal 29 Juni 1982 yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-396-HT01.01.TH.82 tanggal 2 Agustus 1982, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 79, tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.

Anggaran dasar CFI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043416.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, serta telah pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.0097756 tanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143169.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.1402/KMK.013/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

Visi CFI adalah menjadi Perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industry pembiayaan nasional.

Sedangkan misi CFI adalah:

- Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini.
- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CFI berkedudukan di Jakarta dan per 31 Desember 2023 Perseroan memiliki 83 kantor cabang dan 40 kantor pemasaran yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebanyak 2.741 karyawan dan 2.580 karyawan.

Alamat Kantor Pusat CFI
 PT Clipan Finance Indonesia Tbk
 Wisma Slipi lantai 6
 Jl. Letjen S. Parman Kav 12
 Jakarta 11480
 Telepon: (021) 530 8005
 Faksimili: (021) 530 8026, 530 8027
 Email: corporate_secretary@clipan.co.id
 Website: www.clipan.co.id

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CFI

Sebagaimana termaktub dalam akta No. 43 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sesuai Laporan Kepemilikan Saham CFI per 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh CFI, susunan pemegang saham CFI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.412.000.000	2.603.000.000.000,-	-
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.051.431.264	512.857.816.000,-	51,49
2. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD	327.759.425	81.939.856.250,-	8,23
3. Jahja Anwar (Direktur)	60.000	15.000.000,-	0,00
4. Masyarakat < 5%	1.605.269.768	401.317.442.000,-	40,28
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	3.984.520.457	996.130.114.250,-	100,00
Saham Dalam Portepel	6.427.479.543	1.606.869.885.750,-	-

Pengurus dan Pengawasan CFI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat pada database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0142759 tanggal 20 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0138422.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 juncto Surat Keterangan Notaris No 70/KTW.N/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan
 Komisaris : Murwanto *)
 Komisaris Independen : Lukman Abdullah

*) Efektif setelah memperoleh hasil fit & proper test dari OJK

Dewan Direksi

Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo
 Direktur : Jahja Anwar
 Direktur : Engelbert Rorong JR
 Direktur : Yimmy Weddianto

**Laporan Keuangan CFI***(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset	9.911.254	8.049.256
Jumlah Liabilitas	4.384.496	2.938.173
Jumlah Ekuitas	5.526.758	5.111.083
Jumlah Pendapatan	2.296.383	1.509.403
Jumlah Beban	1.261.373	1.109.902
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	815.005	310.722
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	814.128	304.963

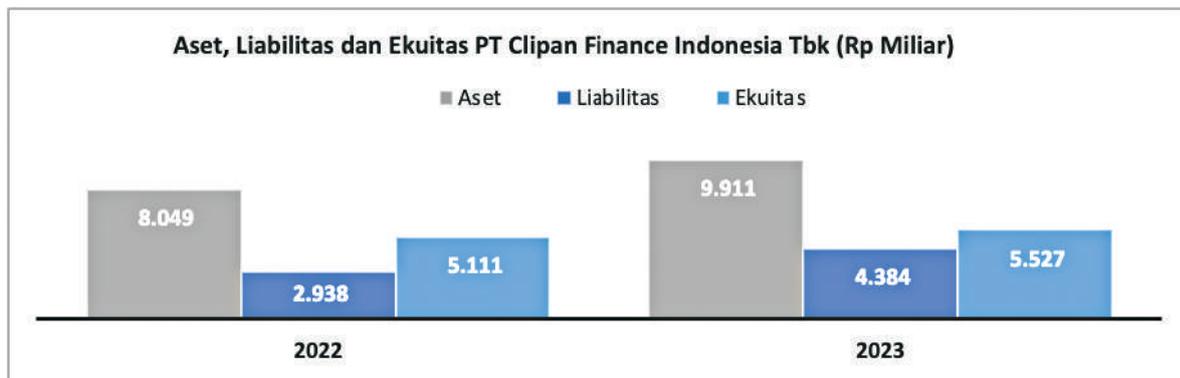
Tahun 2023 CFI masih membukukan kinerja positif, dilihat dari Total Aset per 31 Desember 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 23,13% (yoy) menjadi sebesar Rp9.911 miliar dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp8.049 miliar atau hanya naik 12,99% (yoy).

Kenaikan Total Aset tahun 2023 ditopang oleh peningkatan Piutang Pembiayaan Konsumen dan Piutang Sewa Pembiayaan. Piutang Pembiayaan Konsumen naik sebesar Rp1.700 miliar atau 24,59% (yoy) dan Piutang Sewa Pembiayaan juga naik sebesar Rp248 miliar atau 87,83% (yoy) dimana kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan produksi baru di tahun 2023.

Tahun 2022 Total Aset CFI tumbuh sebesar 12,99% (yoy) juga didorong oleh naiknya Piutang Pembiayaan Konsumen dan Piutang Sewa Pembiayaan. Piutang Pembiayaan Konsumen naik 20,00% atau Rp1.152 miliar dimana pada tahun 2022 Piutang Pembiayaan Konsumen tercatat sebesar Rp6.914 miliar. Piutang Sewa Pembiayaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp282 miliar atau naik 28,64% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp219 miliar. Peningkatan keduanya disebabkan karena adanya penambahan produksi baru, dimana hal tersebut juga berdampak pada penurunan Kas dan bank sebesar 75,29% atau sebesar Rp95 miliar.

Liabilitas CFI per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.446 miliar atau 49,23% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan Utang Bank menjadi sebesar Rp1.537 miliar atau 62,22% (yoy) yang disebabkan oleh adanya penambahan hutang bank yang baru. Sedangkan Utang lainnya turun sebesar Rp12 miliar atau 11,35% (yoy).

Posisi Liabilitas CFI pada tanggal 31 Desember 2022 naik 26,77% (yoy) menjadi Rp2.938 miliar dari Rp2.318 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga didorong oleh naiknya Utang Bank sebesar 24,00%, yaitu dari Rp1.992 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.471 miliar, yang dikarenakan adanya penambahan Utang Bank yang baru.



Ekuitas CFI tahun 2023 naik sebesar 8,13% (yoy) menjadi Rp 5.527 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya Saldo Laba sebesar 11,28% (yoy) menjadi sebesar Rp 4.144 miliar. Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 juga naik sebesar Rp 305 miliar atau 6,35% (yoy) dikarenakan naiknya saldo laba pada periode tersebut sebesar 9,11% (yoy).

Naiknya produksi CFI juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada peningkatan Pendapatan CFI tahun 2023, dimana Total Pendapatan Usaha meningkat sebesar 52,14% (yoy) menjadi Rp 2.296 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,43% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh naiknya Pendapatan Lainnya, Pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Pendapatan Sewa Pembiayaan yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 129,29% (yoy), 18,75% (yoy) dan 132,45% (yoy). Kenaikan Pendapatan Lainnya disebabkan oleh kenaikan penerimaan admin kontrak baru dan penerimaan denda keterlambatan. Pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Pendapatan Sewa Pembiayaan mengalami kenaikan karena adanya pengakuan *interest* atas pelunasan kontrak.

Pendapatan CFI tahun 2022 tercatat sebesar Rp 1.509 miliar atau naik 2,43% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 1.474 miliar. Kenaikan terjadi pada Pendapatan Lainnya sebesar 21,41% (yoy) karena adanya penerimaan admin kontrak baru dan penerimaan denda keterlambatan. Sedangkan Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar Rp 33 miliar atau 93,28% (yoy) seiring dengan berkurangnya saldo kas dan bank.



Laba Komprehensif CFI pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar Rp 509 miliar atau 166,96% (yoy). Tahun 2023 Beban Usaha CFI meningkat, namun diimbangi dengan naiknya Pendapatan Usaha sehingga Laba Komprehensif CFI masih dapat tumbuh. Peningkatan di sisi Beban Usaha CFI meliputi Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya dan Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan masing-masing sebesar 46,94% (yoy) dan 29,02% (yoy). Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya naik seiring dengan kenaikan Hutang Bank pada periode tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan mengalami kenaikan karena CFI melakukan penambahan penyisihan pencadangan dikarenakan menurunnya kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Laba Komprehensif CFI pada tahun 2022 naik sebesar 400,51% (yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan Beban Usaha CFI dan Pendapatannya mengalami kenaikan. Beban Usaha CFI yang menurun didorong oleh penurunan Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan sebesar 51,34% (yoy) karena semakin membaiknya kualitas pembiayaan. Pendapatan Usaha CFI pada tahun 2022 menalami kenaikan sebesar Rp 36 miliar atau 2,43% (yoy) yang didorong oleh kenaikan Pendapatan Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp77 miliar karena kenaikan penerimaan admin kontrak baru dan penerimaan denda keterlambatan. Sedangkan Pendapatan Anjak Piutang mengalami penurunan sebesar Rp34 miliar seiring dengan berkurangnya kontrak *factoring*.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (“BPS”)

Riwayat Singkat BPS

BPS didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dengan Akta No. 12 tanggal 08 Januari 1972, yang kemudian diubah dengan Akta No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Akta No. 17 tanggal 11 April 1979 dan Akta No. 28 tanggal 30 Agustus 1979, yang seluruhnya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 11 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 03 Juli 1980 nomor 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 61 tanggal 26 November 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Maret 2008 nomor AHU-11913.AH.01.02 Tahun 2008. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Mei 2016 nomor AHU-0008935.AH.01.02 tahun 2016.

Anggaran Dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 70 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH-01.03.0443471 tanggal 2 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0149325.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 ("**Akta No. 70/2021**").

Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Setiap pemegang waran seri I berhak membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp110,- per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kadaluarsa, jumlah waran yang kadaluarsa sebesar 504.664.744 waran.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Maret 2018, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0229648 tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 23.959.037.851 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.395.903.785.100.

Pada tanggal 31 Desember 2018, sejumlah 23.714.400.825 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 244.637.026 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 November 2020, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 38.813.641.319 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.881.364.131.900.

Pada tanggal 31 Desember 2023, sejumlah 38.425.504.906 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 388.136.413 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

BPS berkedudukan di Jakarta dan per 31 Desember 2023 BPS memiliki 10 kantor cabang, 40 kantor fungsional operasional dan 60 layanan syariah bank umum/sinergi perbankan. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebanyak 486 dan 414 karyawan.

Visi Bank adalah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi Bank antara lain:

1. Peran aktif Bank dalam bekerjasama dengan regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai Bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan bagi para profesional, kesempatan yang memberikan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.
6. Untuk lima tahun ke depan, Perseroan akan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasi, sumber daya manusia, kebijakan pembiayaan, produk dan layanan, dan manajemen risiko.

Alamat Kantor Pusat BPS

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
 Gedung Panin Life Center
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 91
 Slipi - Jakarta Barat 11420
 Telepon : (021) 5695 6100
 Faksimili : (021) 5695 6105
 Email: corsec@paninbanksyariah.co.id
 Website : www.paninbanksyariah.co.id
 PBS Call 24 Jam : (021) 6313 700

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BPS

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 70/2021 *juncto* Laporan Kepemilikan Saham BPS per 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BPS, susunan pemegang saham BPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000,-	
Pemegang Saham :			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	26.121.527.033	2.612.152.703.300,-	67,30
2. Dubai Islamic Bank PJSC	9.742.223.971	974.222.397.100,-	25,10
3. Masyarakat < 5%	2.949.890.315	294.989.031.500,-	7,60
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	38.813.641.319	3.881.364.131.900,-	100,00
Saham Dalam Portepel	186.358.681	18.635.868.100,-	

**Pengurus dan Pengawas BPS**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 5, tanggal 5 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0214746 tanggal 16 Juni 2024 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119079. AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Tantry Soetjipto S.
 Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
 Komisaris : Sindbad R. Hardjodipuro

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bratha
 Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso
 Direktur : Shandra Noraya Laksmi
 Direktur : Erick

Dewan Pengawas Syariah

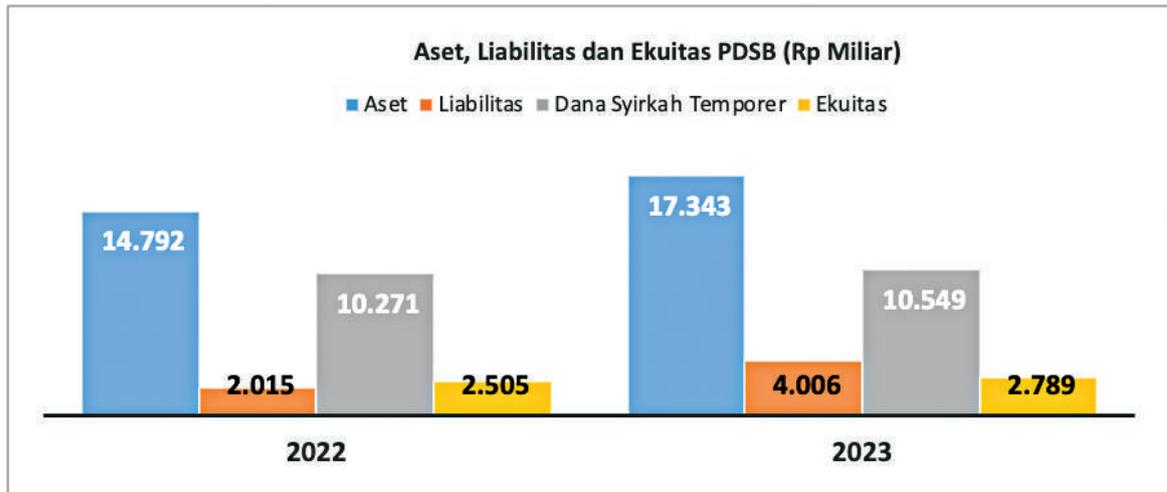
Direktur Utama : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.
 Direktur Independen : Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

Laporan Keuangan BPS*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset	17.343.247	14.791.738
Jumlah Liabilitas	4.006.195	2.015.192
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.529	10.271.142
Jumlah Ekuitas	2.788.523	2.505.404
Jumlah Pendapatan	1.223.347	1.040.314
Jumlah Beban	985.405	786.464
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	244.690	250.532
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	283.119	203.145

Total Aset Bank Panin Dubai Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 naik 17,25% (yoy). Kenaikan terutama terjadi pada Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 923 miliar atau 77,50% (yoy) terutama karena kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) sebesar Rp 1.016 miliar. Piutang Mudharabah naik sebesar Rp 619 miliar atau 64,77% (yoy) dan Piutang Musyarakah naik sebesar Rp 565 miliar atau 6,39% (yoy). Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp 553 miliar atau 80,94% (yoy) terutama karena kenaikan Agunan yang diambil alih sebesar Rp 535 miliar. Tahun 2022 Total Aset Bank mengalami peningkatan sebesar Rp 366 miliar atau 2,54% (yoy), dimana pada tahun tersebut Piutang Murabahah dan Piutang Musyarakah naik masing-masing sebesar 282,24% (yoy) dan 17,25% (yoy). Pada tahun 2022 Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia serta Investasi pada Surat Berharga mengalami penurunan masing-masing sebesar 29,36% (yoy) dan 31,68% (yoy).

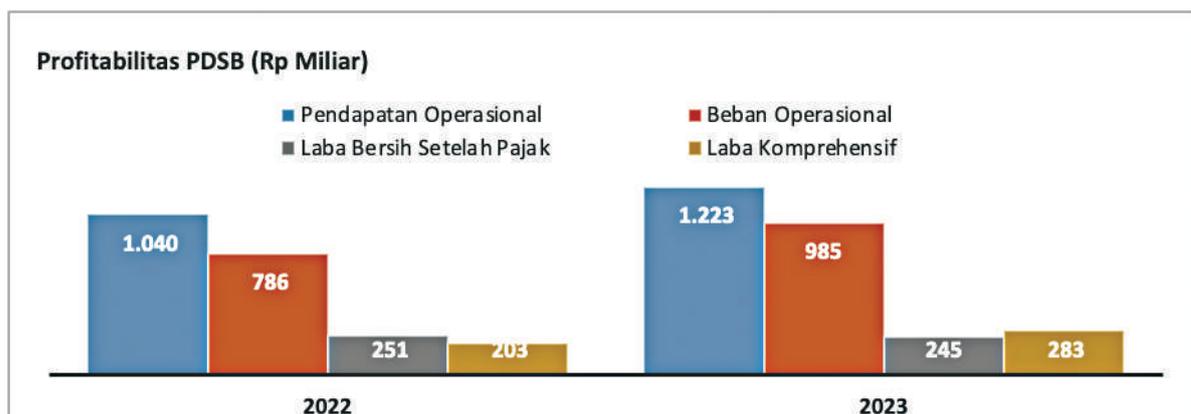
Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.006 miliar, mengalami peningkatan sebesar 98,80% (yoy), karena adanya peningkatan pada Simpanan dan Liabilitas kepada Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp1.062 miliar atau 71,30% (yoy) dan Rp 924 miliar atau 212,07% (yoy). Di tahun 2022 Jumlah Liabilitas naik sebesar Rp 1.288 miliar atau 177,12% (yoy), dimana Simpanan dan Liabilitas kepada Bank Indonesia masing-masing naik sebesar Rp 817 miliar dan Rp 436 miliar.



Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.549 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,70% (yoy), karena adanya peningkatan pada Tabungan dan Deposito Mudharabah bukan bank sebesar Rp114 miliar atau 41,03% (yoy) dan Rp 852 miliar atau 9,59% (yoy). Di tahun 2022 Sertifikat Investasi Mudharabah turun sebesar Rp 3.170 miliar, sedangkan Deposito Mudharabah bukan bank naik sebesar Rp 2.127 miliar atau 31,47% (yoy) sehingga Jumlah Dana Syirkah Temporer mengalami penurunan sebesar Rp 1.126 miliar atau 9,88% (yoy) pada tahun tersebut.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.789 miliar, jumlah tersebut lebih tinggi Rp 283 miliar dibandingkan tahun sebelumnya atau naik 11,30% (yoy). Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan Saldo Laba BPS sebesar Rp 245 miliar atau 18,38% (yoy). Sedangkan jumlah Ekuitas tahun 2022 masih mampu tumbuh sebesar 8,84% (yoy) menjadi sebesar Rp 2.505 miliar. Tahun 2022 Saldo Laba naik Rp 251 miliar atau 15,86% (yoy).

Pendapatan Usaha BPS pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar 17,59% (yoy), yang terutama disebabkan oleh naiknya Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib sebesar Rp 178 miliar atau naik 18,86% (yoy). Di tahun 2022 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib mengalami kenaikan sebesar Rp 213 miliar atau 29,11% (yoy), sehingga mendorong kenaikan Pendapatan Usaha BPS sebesar 32,36% (yoy) pada tahun tersebut.



Tahun 2023 BPS mencatatkan Laba Komprehensif sebesar Rp 283 miliar atau naik 39,37% (yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 86 miliar atau 181,09% (yoy). Tahun 2022 Laba Komprehensif BPS naik 124,94% (yoy), BPS masih mampu mencatatkan Laba Komprehensif sebesar Rp 203 miliar dimana jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian mencapai Rp 815 miliar.



Berikut kontribusi pendapatan Anak Perusahaan kepada Perseroan

Miliar Rupiah

Keterangan	2023	
	Pendapatan	Kontribusi
Clipan Finance	2.296	13,38%
Bank Panin Dubai Syariah	1.223	7,13%

Tahun dimulainya investasi Perseroan ke Anak Perusahaan

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak
Entitas anak		
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Syariah	2008
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	1982

Tabel penyertaan Perseroan

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Jumlah Penyertaan (Rp Juta)
Entitas Asosiasi					
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	2003	1993	25,06	154.712
PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi	1989	1989	29	26.560

12. Sumber Daya Manusia

Jumlah rata-rata karyawan tetap Bank dan entitas anak selanjutnya disebut ("Grup") masing-masing 10.847 dan 10.788 orang karyawan pada tahun 2023 dan 2022.

Jumlah karyawan tetap dan kontrak per 31 Desember 2023 tercatat sejumlah 8.875 orang atau mengalami kenaikan 0,66% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2022 yang berjumlah 8.817 orang.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2023 menurut jenjang manajemen, jenjang pendidikan, status karyawan, lokasi dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Manajemen Puncak	17	18
2	Manajemen Madya	2.118	2.113
3	Pelaksana	6.740	6.686
Jumlah		8.875	8.817

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	SD	2	2
2	SLTP	3	9
3	SLTA	290	301
4	Akademi/D3	549	568
5	Sarjana	7.786	7.695
6	Pasca Sarjana	245	242
Jumlah		8.875	8.817

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Kontrak	1.504	1.372
2	Tetap	7.371	7.445
Jumlah		8.875	8.817



No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	4.148	4.085
2	Sumatera	1.241	1.244
3	Jawa diluar Jakarta	2.278	2.287
4	Bali dan Nusa Tenggara	150	155
5	Kalimantan	374	361
6	Sulawesi	561	563
7	Papua dan Maluku	123	122
Jumlah		8.875	8.817

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	18 - 25 tahun	853	480
2	26 - 35 tahun	3.326	3.465
3	36 - 45 tahun	3.340	3.435
4	46 - 55 tahun	1.056	1.097
5	> 55 tahun	300	340
Jumlah		8.875	8.817

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	BOD & BOC	15	16
2	Supporting	2.843	2.866
3	Bisnis Utama	2.548	2.485
4	Operasion	3.469	3.450
Jumlah		8.875	8.817

Dari jumlah 8.875 orang karyawan tersebut per 31 Desember 2023 terdiri dari 7.371 orang karyawan tetap dan sisanya adalah karyawan kontrak.

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Surat Izin	Berlaku Hingga
Gregory James Terry	Australia	Komisaris	Dari Keimigrasian e-KITAP No: 2D21AF0031-V	27 April 2026

Komposisi karyawan Anak Perusahaan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2023 menurut jenjang manajemen, jenjang pendidikan, status karyawan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

PT Clipan Finance Indonesia Tbk "CFI"

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Manajemen Puncak	9	8
2	Manajemen Madya	211	198
3	Pelaksana	2.521	2,373
Jumlah		2,741	2,579

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	SD, SMP & SMA	312	263
2	Akademi/D3	262	237
3	Sarjana	913	854
4	Pasca Sarjana	8	8
Jumlah		2,741	2,579

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Kontrak	1,246	1,217
2	Tetap	1,495	1,362
Jumlah		2,741	2,579



No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	1,154	1,083
2	Sumatera	506	474
3	Jawa diluar Jakarta	616	583
4	Bali dan Nusa Tenggara	58	61
5	Kalimantan	170	150
6	Sulawesi	237	228
7	Papua dan Maluku	-	-
Jumlah		2,741	2,579

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	18 - 25 tahun	206	178
2	26 - 35 tahun	1,161	1,156
3	36 - 45 tahun	1,163	1,064
4	46 - 55 tahun	204	171
5	> 55 tahun	7	10
Jumlah		2,741	2,579

PT Bank Panin Dubay Syariah Tbk “BPS”

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Manajemen Puncak	21	21
2	Manajemen Madya	113	100
3	Pelaksana	352	293
Jumlah		486	414

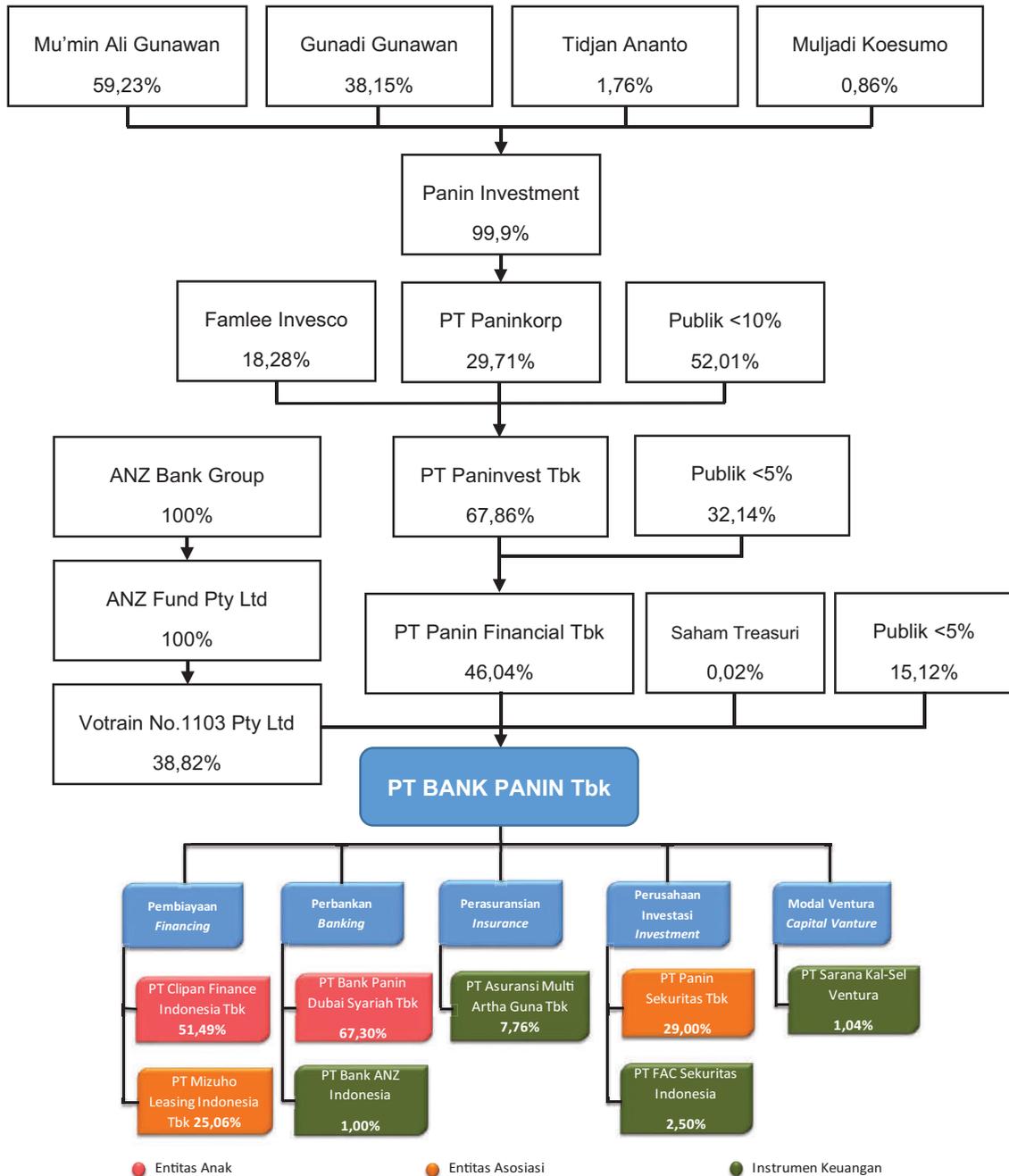
No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	1	1
4	Akademi/D3	23	21
5	Sarjana	416	352
6	Pasca Sarjana	44	38
7	Doktor	2	2
Jumlah		486	414

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Kontrak	103	72
2	Tetap	383	342
Jumlah		486	414

No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	0	0
2	Sumatera	0	0
3	Jawa diluar Jakarta	1	1
4	Bali dan Nusa Tenggara	23	21
5	Kalimantan	416	352
6	Sulawesi	44	38
7	Papua dan Maluku	2	2
Jumlah		486	414

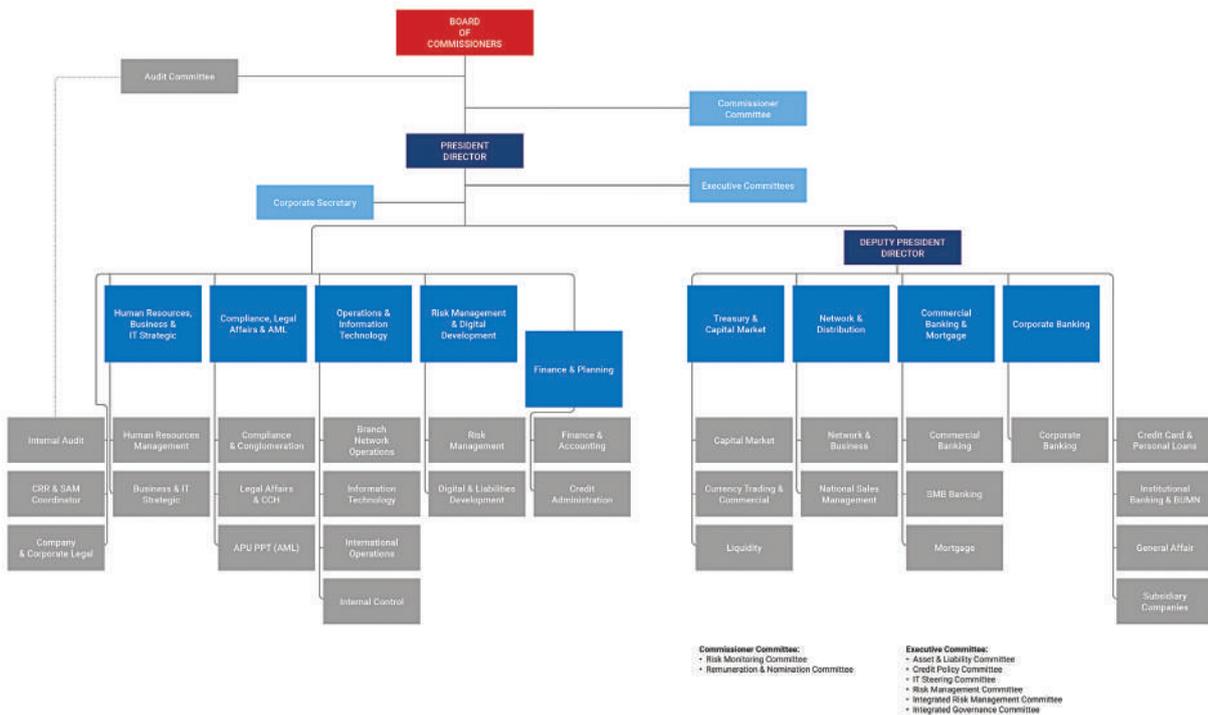
No.	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1	18 - 25 tahun	38	16
2	26 - 35 tahun	167	144
3	36 - 45 tahun	176	153
4	46 - 55 tahun	75	78
5	> 55 tahun	30	23
Jumlah		486	414

13. Struktur Kepemilikan Saham dan Kelompok Usaha Perseroan



Pengendali Perseroan saat ini sebagai: *Ultimate Shareholder* PT Panin Financial Tbk., adalah Mu'min Ali Gunawan,. *Ultimate Shareholder* Votraint No. 1103 Pty Limited, adalah ANZ Banking Group.

Struktur Organisasi



14. Keterangan tentang Aset Tetap

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (“HMSRS”) serta hak penguasaan lainnya, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Berikut adalah rincian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan:

Wilayah	SHGB	SHMSRS	Lainnya	Total	Luas m2
Sumatera	132	-	1	133	34.753
Kalimantan	34	3	-	37	23.168,24
Bali & Nusa Tenggara	14	-	-	14	3.358
Jawa	515	64	12	591	170.251,81
Kep.Riau	12	-	-	12	2.353
Maluku	3	-	-	3	188
Papua	7	-	-	7	1.914
Sulawesi	59	2	-	61	18.558,84
Total	776	69	13	858	254.544,89

15. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa *outsourcing*, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk *bancassurance*, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem *channeling* dan lain-lain.

Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No. 44 tanggal 16 April 2018 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No.15** tanggal 8 Mei 2018 dan **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No. 104** tanggal 31 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp1.302.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018.

16. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak sebagaimana didukung surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak.

Adapun hingga saat ini Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara, di mana dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko di bidang Profil Risiko Hukum, Perseroan telah memiliki pedoman Surat Edaran Direksi No. 036/DIR/SDB/18 tanggal 7 Juni 2018 perihal Penetapan Nilai Kerugian Materialitas Perkara Hukum Perseroan, dimana Direksi Perseroan telah menetapkan nilai materialitas suatu perkara hukum dengan nilai gugatan atau potensi kerugian hukum yang terjadi pada Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara *high risk* dan akan terus dipantau perkembangannya oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan atau potensi kerugian hukum sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih yang menjadi perhatian Perseroan, dimana perkara-perkara tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan ataupun kewajibannya sehubungan dengan penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi, sebagai berikut :

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	a. Nomor Perkara	: No. 925/PDT.G /2023/PN Dps
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Denpasar
	c. Para Pihak	: 1. PT Unipro Konstruksi Indonesia selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat"); 2. Chan Peter Ho Kwan selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat I") 3. Perseroan cq Kantor Cabang Utama cq Kantor Cabang Pembantu Gatot Subroto selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat II"); dan 4. PT Global Buana Premium selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat").
	d. Deskripsi Singkat	: Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat I melakukan hubungan hukum perdata (dalam bentuk tidak tertulis) untuk mengerjakan pelaksanaan kegiatan <i>design & build of the F&B outlet</i> di 3 lokasi yaitu: (a) <i>design & build of the F&B outlet</i> in Bali; (b) <i>design & build of the F&B outlet</i> in Balikpapan root 98; dan (c) <i>design & build of the F&B outlet</i> in Semarang FC senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ("Kegiatan Design & Build").



NO. PERIHAL	KETERANGAN
	<p>Dalam pelaksanaan Kegiatan Design & Build tersebut Penggugat telah membuat dan membuka rekening (Giro) pada Tergugat II dan Tergugat II telah memberikan Penggugat fasilitas berupa 1 buah token maker dan 1 buah token releaser ("Token"). Dalam pelaksanaan Kegiatan Design & Built Penggugat atas perintah Tergugat I meminta untuk melayangkan <i>invoice</i> kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).</p> <p>Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi <i>invoice</i> yang dikirimkan oleh Penggugat, dan pada sekitar tanggal 16 Januari 2023 dengan cara yang bersifat paksaan dan/atau setidaknya melalui keadaan yang memaksa, Penggugat menyerahkan Token, berikut dengan buku cek dengan seri warkat kepada Tergugat I di hadapan Tergugat II. Bahwa Tergugat II menyaksikan pemindahtanganan Token dari Penggugat ke Tergugat I, namun Tergugat II membiarkan Token tersebut dikuasai dan ditransaksikan oleh orang lain yaitu Tergugat I yang bukan nasabah Tergugat II.</p> <p>Dalam hal ini Penggugat menyalahkan Tergugat II karena pihaknya tidak dapat melakukan pemblokiran atas Token tersebut.</p> <p>Lebih lanjut, Penggugat menyatakan bahwa dari uang milik Penggugat tersebut, saat ini tersisa senilai Rp3.726.586.169.12,- sedangkan yang tidak ada di rekening milik Penggugat adalah sebesar Rp7.863.807.840,99</p>
	<p>Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II; 3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan kegiatan <i>design</i>; 4. Menyatakan hukum tabungan dengan rekening No. 8075000279 atas nama PT Unipro Konstruksi Indonesia adalah sah milik Penggugat; 5. Menyatakan sah menurut hukum <i>invoice</i> yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- sebagai milik Penggugat; 6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp11.585.827.191,34 7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp7.863.807.840,99 yang digunakan Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II melalui token elektronik milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp8.863.807.840,99 dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian materiil: Rp7.863.807.840,99 b. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- 9. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar Rp7.863.807.840,99. ke rekening milik Penggugat; 10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik Penggugat sebesar Rp7.863.807.840,99. secara sukarela, seketika dan lunas dan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 209 B Denpasar Bali Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Raya Legian 80 x Kuta Denpasar Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.
e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
2. a. Nomor Perkara	: No. 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst
b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Andrew Wirantana selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat"); 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat I") 3. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat II"); dan 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat ("Turut Tergugat").
d. Deskripsi Singkat	: Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat II sebagaimana telah dibuat Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 26 Mei 2014 <i>jo.</i> Addendum Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 26 Januari 2016 tentang Fasilitas Kredit Multi Retail dengan jangka waktu hingga tanggal 26 Mei 2031 (" Perjanjian Kredit "). Atas Perjanjian Kredit, Turut Tergugat membuat Sertifikat Hak Tanggungan No. 37/SENEN/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Des Rishal Boestamam, S.H., PPAT di Jakarta Pusat, dimana sertifikat yang di jaminan telah dibebankan Hak Tanggungan, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 688 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 atas nama Penggugat (" Jaminan ").



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		<p>Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2017 Tergugat II telah mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap Jaminan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Tergugat II, Penggugat telah memenuhi kewajibannya padahal telah disepakati jangka waktu hingga 26 Mei 2031, dan atas permohonan sita eksekusi tersebut, pada tanggal 9 Juni 2017, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita eksekusi yang diajukan Tergugat II dengan menerbitkan penetapannya.</p> <p>Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mendapat surat dari Tergugat II perihal pelaksanaan Pelelangan/Penjualan dimuka umum atas Jaminan pada tanggal 28 November 2019 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I. Kemudian pada tanggal 7 November 2019 Penggugat menyatakan keberatannya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Jaminan berstatus sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat I membatalkan rencana pelelangan tanggal 28 November 2019 dikarenakan terdapat penetapan sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Adapun dalam petitemnya Penggugat meminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;2. Menyatakan setiap pihak yang menjadi Pembeli Objek Lelang yang dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II melalui website/aplikasi lelang https://lelang.go.id Jaminan tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan nilai pasar yang sah atas Jaminan adalah sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
3.	a. Nomor Perkara	: No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	c. Para Pihak	: 1. Tuty Surjawijaya selanjutnya disebut sebagai (" Penggugat "); 2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (" Tergugat 1 "); dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya disebut sebagai (" Tergugat 2 ").
	d. Deskripsi Singkat	: Penggugat mendalihkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan pelelangan objek hak tanggungan pada Tergugat 2 berupa suatu Sertipikat Hak Milik seluas 400 m ² (" SHM ") dimana Penggugat merasa bahwa harga pelelangan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
		<p>Adapun dalam petitemnya Penggugat meminta antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara;3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.4. Menyatakan bahwa pelelangan SHM melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku berkaitan dengan lelang;5. Menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara materil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Tergugat membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
4.	a. Nomor Perkara	: Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby juncto Putusan No. 567/PDT/2023/PT SBY
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Tinggi Surabaya
	c. Para Pihak	: 1. Djoko Lendiarto selanjutnya disebut sebagai (" Pembanding/Penggugat "); 2. Perseroan KCU Surabaya Coklat selanjutnya disebut sebagai (" Terbanding/Tergugat "); 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai (" Turut Terbanding I/Turut Tergugat I "); 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selanjutnya disebut sebagai (" Turut Terbanding II/Turut Tergugat II "); dan 5. Notaris Felicia Imantaka selanjutnya disebut sebagai (" Turut Terbanding III/Turut Tergugat III ").
	d. Deskripsi Singkat	: Perkara ini merupakan gugatan wanprestasi, dimana Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2014 mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat dengan adanya Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No. 80 yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Penggugat memberikan jaminan pelunasan pinjaman dengan adanya 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan yaitu (i) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8064; (ii) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8200.



NO. PERIHAL	KETERANGAN
	<p>Adapun kemudian pada tahun 2019 Penggugat mengajukan restrukturisasi kredit guna mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian kredit dengan langsung menghadap kepada Tergugat, kemudian Tergugat setuju untuk memberikan perpanjangan masa jatuh tempo keempat menjadi tanggal 29 Maret 2026 secara lisan dikarenakan mempertimbangkan adanya kecukupan nilai 2 (dua) buah jaminan tanah dan/atau bangunan. Bahwa kesepakatan lisan tersebut tidak dibuat dengan Akta Turut Tergugat III dengan adanya keyakinan, itikad baik dan asas kepercayaan diantara Penggugat dan Tergugat.</p> <p>Bahwa kemudian tahun 2020-2021 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan, pertimbangan maupun persetujuan dari Penggugat telah melakukan lelang atas kedua objek tanah dan/atau bangunan jaminan milik Penggugat dengan bantuan Turut Tergugat I.</p> <p>Sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya hukum dalam Perkara No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 26 Juni 2023 atas hal ini dan Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan lisan diantara Penggugat dan Tergugat tahun 2019 sah dan mengikat, dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan lisan diantara Penggugat dan Tergugat tahun 2019. Pengadilan Negeri telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak provisi Penggugat 2. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; 3. Menolak gugatan Penggugat; <p>Selanjutnya pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. menguatkan putusan Nomor Pengadilan Negeri Surabaya 135/Pdt.G/ 2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini dalam proses Kasasi.
5.	<p>a. Nomor Perkara : Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PN Bdg</p> <p>b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Bandung</p> <p>c. Para Pihak : 1. Perry Utama Saputra dan Eddy Saputra (selaku Direktur PT Berkat Jaya Baru) selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat"); 2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat I"); 3. Departemen Keuangan RI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat II"); 4. Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat").</p> <p>d. Deskripsi Singkat : Perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan pada tanggal 21 November 2021 menerima Berita Acara Sita Eksekusi dari Kelurahan Paledang, Bandung mengenai tanah dan bangunannya di Jl Kaca Kaca Wetan No. 16 RT. 009 RW. 004, Paledang, Lengkong, Kota Bandung yang telah diletakkan Sita Eksekusi. Bahwa tindakan Tergugat I memohon Sita Eksekusi pada Ketua Pengadilan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.</p> <p>Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu Para Penggugat menuntut ganti rugi baik kerugian materil maupun immateril yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- kepada Tergugat dan Majelis Hakim telah memutuskan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Onvankelike verklaard</i>).
e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara sedang dalam proses Banding.
6.	<p>a. Nomor Perkara : No. 500/Pdt.G/2023/PN Bdg</p> <p>b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Bandung</p> <p>c. Para Pihak : 1. PT Berkat Jaya Baru selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat"); 2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat I"); 3. Okto Rianto Hostiadi selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat II"); Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai ("Para Tergugat") 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat Tergugat I"); dan 5. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat II").</p>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
d.	Deskripsi Singkat	<p>Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dimana pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat I melakukan Perjanjian Kredit sebesar Rp18.000.000.000,- dan Penggugat menjaminkan 2 (dua) sertifikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Hak Milik No. 1938/Paledang atas nama Eddy Saputra ("SHM 1938") yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017: SHM No. 1939/Paledang Atas Nama Eddy Saputra ("SHM 1939") yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017. <p>Dalam perjalanannya, terjadi permasalahan bisnis yang dialami oleh Penggugat yang mempengaruhi kemampuan Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap Perjanjian Kredit tersebut sehingga pembayaran atas Perjanjian Kredit yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I melakukan eksekusi terhadap SHM 1938 dan SHM 1939 yang merupakan jaminan sebagai pelunasan Perjanjian Kredit. Adapun barang jaminan berhasil dilelang kepada Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2023 dengan harga limit lelang sebesar Rp17.000.000.000,- pada pelaksanaan lelang ketiga berdasarkan risalah lelang Nomor 1154/30/2023.</p> <p>Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang pada SHM 1938 dan SHM 1939 dengan harga limit yang jauh dibawah harga pasar melanggar ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 yang mengatur bahwa harga limit lelang harus ditetapkan berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai. Berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Firman Azis & Rekan tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor 00020/2.0069-10/PI/12/PS.00267/0/X/2023 diperoleh hasil penilaian terhadap harga pasar yaitu sebesar Rp22.687.120.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu Rupiah).</p> <p>Lebih lanjut, dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa proses lelang dilakukan dengan penjual lelang yaitu Tergugat I dan pembeli lelang yaitu Tergugat II yang memiliki hubungan pekerjaan dan secara jelas dan nyata terafiliasi, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.</p> <p>Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutus antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechsmatige daad</i>) yang merugikan Penggugat. Menyatakan risalah lelang nomor 1154/30/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.687.120.000,-. menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa sah dan berharga. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan <i>a quo</i>.
e.	Status Terakhir	Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
7.	a. Nomor Perkara	Putusan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn juncto. Putusan No. 359/Pdt/2022/PT MDN
	b. Yurisdiksi	Pengadilan Tinggi Medan
	c. Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Jusuf Halim Yati selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat/Pemanding"); Perseroan Kantor Cabang Medan ("Terbanding I/Tergugat I"); Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Medan ("TerbandingII /Tergugat II").
d.	Deskripsi Singkat	<p>Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan dan membuat perjanjian Akad/Akta Perjanjian Kredit berupa fasilitas Rekening Koran dengan nilai total maksimum sebesar Rp5.500.000.000,-. Bahwa atas fasilitas tersebut, diberikan jaminan berupa dua bidang tanah yaitu (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 80 dengan luas tanah 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan (ii) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 688 dengan luas tanah 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang keduanya terdaftar atas nama Penggugat.</p> <p>Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk dan ditambah dengan dampak Covid-19, Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat I, namun Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai.</p> <p>Bahwa kemudian Tergugat I memberikan surat perihal berupa Pemberitahuan Lelang Eksekusi dengan No. 2932/MED/EXT/21 tanggal 15 Oktober 2021. Dengan pemberian surat tersebut, dimana Tergugat I tanpa ada memberikan solusi sebagai tindakan-tindakan dalam hal upaya penyelamatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.</p>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		<p>Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat I; dan 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. <p>Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; dan 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 April 2022 dengan Perkara No. 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses Kasasi.
8.	a. Nomor Perkara	: Putusan No. 281/Pdt.G/2022/PN Pbr juncto Putusan No. 66/Pdt.G/2023/PT Pbr
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Tinggi Pekanbaru
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Edy Suprianto selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat I/Pembanding I"); 2. Susi Sri Ayu Nainggolan selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat II/ Pembanding II"); 3. Perseroan Cabang Pekanbaru ("Terbanding I/Tergugat I"); 4. Agusti Notaris/PPAT ("Terbanding II/Tergugat II").
	d. Deskripsi Singkat	: <p>Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Para Penggugat pada tanggal 1 Juni 2011 menerima Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Kredit Serba Guna (PRK-KSG) dengan total fasilitas sebesar Rp900.000.000,- yang tertuang dalam Pengakuan Hutang dengan Kuasa berikut dengan addendumnya. Terhadap pinjaman ini, Para Penggugat telah menyerahkan aset milik Para Penggugat sendiri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2341 dengan luas 160 m² yang di atasnya telah berdiri satu (1) unit bangunan rumah atas nama Penggugat I; 2. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 15948 dengan luas 80 m² atas nama Penggugat II; dan 3. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 405 dengan luas 260 m² atas nama Tjing kiok Hong alias Rusmiati. <p>Seluruhnya dibebankan Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pengembalian uang pinjaman tersebut.</p> <p>Lebih lanjut, akibat dari Pandemi Covid-19 Para Penggugat tidak mampu untuk membayar angsuran kepada Tergugat I. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran, Tergugat I telah melakukan teguran melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 November 2020 dan mengajukan Surat Permohonan Sita Eksekusi terhadap aset yang dijamin pada tanggal 28 Juli 2022.</p> <p>Pada petitumnya Penggugat menyatakan bahwa lelang tersebut tidak sah dan batal demi Hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa berikut addendum-addendumnya, menyatakan sita eksekusi atas jaminan tidak sah dan batal demi hukum dan meminta agar Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp18.480.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) berikut dengan kerugian moril sebesar Rp1.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan bunga sebesar 13% perbulan dan denda 4% dari tahun 2011 sampai didaftarkannya gugatan. Adapun Pengadilan Negeri pada putusannya telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat; 2. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan 3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. <p>Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding Para Pembanding / Para Penggugat; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 281/Pdt. G/2022/PN Pbr tanggal 06 Maret 2023 yang dimohonkan banding.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara sedang dalam proses Kasasi.
9.	a. Nomor Perkara	: Putusan No. 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr junctis Putusan No. 588/PDT/2020/PT.SBY, Putusan No. 2648 K/PDT/2021 dan Putusan No. 1220/PK/PDT/2022
	b. Yurisdiksi	: Mahkamah Agung
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Tergugat I"); 2. Perseroan Kantor Cabang Kediri ("Tergugat II"); 3. Bambang Suprihadi ("Tergugat III"); 4. Eka Marifatul Auliani ("Tergugat IV"); <p>(selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Peninjauan Kembali")</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sony Sandra ("Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali"); 6. Sri Mulyati ("Turut Tergugat I") 7. Thomas Hady Soewito ("Turut Tergugat II") <p>(selanjutnya secara bersama-sama disebut "Turut Termohon Peninjauan Kembali")</p>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
	d. Deskripsi Singkat	<p>: Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum, dimana Penggugat merupakan nasabah pada Tergugat II sejak tahun 2012 yang masih mempunyai dana Tergugat sebesar Rp35.000.000.000,- (Obyek Sengketa). Adapun sejak tahun 2015, Penggugat menjadi terdakwa dan mendekam di lembaga permasyarakatan dan ditawarkan oleh Tergugat IV untuk melakukan dana blokir tabungan yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa yang disepakati oleh Penggugat dimana selanjutnya Penggugat pada akhirnya menyepakati untuk menaruh dana dalam bentuk investasi sehingga dana yang seluruhnya mengendap totalnya adalah sebesar Rp35.000.000.000,- di Tergugat II.</p> <p>Adapun Para Tergugat mendalilkan bahwa dana tersebut diinvestasikan pada Surat Utang PT Sunprima Nusantara yang telah pailit sehingga kerugian tersebut tidak terhindarkan. Adapun majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri telah memutuskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melawan hukum; 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat; 3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat; 4. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Obyek Sengketa; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat untuk membayar Rp2.800.000.000,- <p>Selanjutnya pada putusan tingkat Pengadilan Tinggi, majelis hakim telah memutuskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melawan hukum; 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat; 3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat; 4. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Obyek Sengketa; 5. Menyatakan menghukum Para Pembanding I, II/Para Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat dengan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila bunga dihitung per setahun sekali, maka $8\% \times \text{Rp}35.000.000.000,- = \text{Rp}2.800.000.000,-$ b. Apabila perhitungannya setiap bulan, maka $8\% \times \text{Rp}35.000.000.000,-$ dibagi 12 bulan = $\text{Rp}233.333.333,33$ c. Bahwa ganti rugi dan bunga diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan Para Tergugat I, II telah melaksanakan isi putusan. <p>Pada tingkat Mahkamah Agung, majelis hakim telah memutuskan untuk membatalkan Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan tingkat Pengadilan Negeri.</p> <p>Akhirnya pada tingkat proses Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali.</p>
	e. Status Terakhir	<p>: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses permohonan sita eksekusi oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Aanmaning No. 7/Pdt.Eks/2023/PN Kdr tanggal 4 Oktober 2023.</p> <p>Adapun sehubungan dengan Aanmaning tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bantahan yang didaftarkan di bawah Perkara No. 83/Pdt.Bth/2023/PN Kdr pada Pengadilan Negeri Kediri.</p>
10.	a. Nomor Perkara	No. 355/Pdt.Bth/2024/PN.JKT.BRT
	b. Yurisdiksi	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	c. Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuty Surjawijaya (“Pelawan”); 2. Perseroan (“Terlawan 1”); 3. KPKNL Jakarta V (“Terlawan 2”); 4. Arif Suhardiman (“Terlawan 3”)
	d. Deskripsi Singkat	<p>: Bahwa Penggugat melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Riil kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sertipikat Hak Milik seluas 400 m² (“SHM”) yang dianggap melanggar hukum, khususnya PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020. Adapun dalam petitumnya Pelawan meminta antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan 2 dalam pengajuan permohonan eksekusi riil atas SHM telah melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku; 3. Menyatakan bahwa Pelawan telah dirugikan secara materiil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Terlawan membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.



Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. Perkara No. 001601.25/2021/PP sehubungan dengan sengketa Pajak SKPKB PPh 4 (2) Tahun 2017, yang sampai dengan tanggal LPSH ini, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak Jakarta;
- b. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

17. Kegiatan Usaha

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (*fee based income*) kepada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Januari 2024 memiliki memiliki 518 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
AMBON				
1	Jl. Diponegoro No. 20, Ambon	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	01/12/18 sd 30/11/28
2	Jl. Citraland Utama, Kompleks Pertokoan East Arcade Blok C No. 8 - 9, Ambon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Mutiara, Komplek Ruko Mutiara Superblok No. 5, Mardika	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
BALI				
1	Jl. Legian 80 X, Kuta, Denpasar	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Diponegoro 150 A1/4-6, Denpasar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Shopping Centre Nusa Dua Blok E 28, Denpasar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Danau Tamblingan No. 67 A, Sanur, Denpasar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Imam Bonjol No. 338 C, Denpasar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 279, Denpasar	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	10/11/20 sd 10/11/25



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
7	Kompleks Pertokoan Duta Permai Blok I D - E, Jl. Dewi Sartika, Denpasar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Gatot Subroto Timur No. 209, Denpasar	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/03/21 sd 28/02/26
9	Jl. Patih Jelantik, Kompleks Pertokoan Kuta Galeria Blok Valet I No.7, Badung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
BALIKPAPAN				
1	Panin Tower, Kompleks Grand Sudirman, Jl. Jendral Sudirman No. 7, Balikpapan	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Letjen. Suprpto, Plaza Kebun Sayur No. T 15, Balikpapan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, Balikpapan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Kompleks Ruko J Square, Jl. Ruhui Rahayu, Balikpapan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
BANDAR LAMPUNG				
1	Jl. R.A. Kartini 97 - 99, Bandar Lampung	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Ikan Lemuru No. 12, Teluk Betung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Proklamator No. 63, Bandar Jaya, Terbangi Besar	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/03/24 sd 28/02/29
4	Jl. Ryamizard Ryacudu No. 10 A - B, Metro	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Gajah Mada No. 71 C - D, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
BANDUNG				
1	Jl. Banceuy No. 8 - 10, Braga, Sumur Bandung	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Jendral Sudirman 462, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Otto Iskandardinata 233, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 6 A, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Gardujati No. 66, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. H. Juanda No. 110, Bandung	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/05/24 sd 30/04/29
7	Jl. Asia Afrika No. 166 - 170, Bandung	Cabang Pembantu	Sewa Grup	01/04/22 sd 31/03/26
8	Komplek Kopo Mas Regency Blok N 1 A, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Dr. Setiabudi No. 167 A, Gegerkalong, Sukasari, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	IBCC A I No. 3 A-5-6-7, Jl. A. Yani, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Buah Batu No. 238, Cijagra, Lengkong, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Arteri Komplek Taman Kopo Indah II Ruko 1 B No. 22, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Abdurahman Saleh No. 37, Bandung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Gedung Festival City Link, Ground Floor No. 27, Jl. Peta No. 241, Bandung	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	26/01/21 sd 26/01/26
BANJARMASIN				
1	Jl. H. Anang Adenansi No. 1, Banjarmasin	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	02/05/23 sd 02/05/28
2	Jl. Jendral A.Yani KM 4.5 No. 31, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Banjarmasin	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Pasar Baru Indah Blok B IV, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/12/23 sd 30/11/24
4	Jl. Kuripan Gg. IV No. 17, Banjarmasin	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Jendral A. Yani KM. 35, Loktabat Utara, Banjarbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Kramat Muka No. 38 - 39, Barabai Utara, Hulu Sungai Tengah	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/11/22 sd 31/10/32
7	Jl. Transmigrasi No. 50, Kel. Kampung baru, Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
BATAM				
1	Jl. Sultan Abdul Rahman, Kompleks Lumbung Rejeki Blok A No. 1 - 4, Batam	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	1/11/15 sd 31/10/25
2	Jl. Setiabudi No. 307, Tanjung Balai Karimun	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Penuin Blok K No. 1, Batam	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
4	Jl. Merdeka No. 1 - 3, Tanjung Pinang Kota	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Kompleks Nagoya Bussiness Center Blok V No. 28, Lubuk Baja Kota, Batam	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Komplek Ruko Palm Spring Blok B 2 No. 9, Taman Balo, Batam	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Kompleks Pertokoan Perumnas Fanindo Blok D No. 8 - 9, Batam	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Batam City Condominium Hotel & Residence, Jl. Bunga Mawar No. 5, Batam	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	15/02/11 sd 15/02/41
10	Kompleks Perum Botania Garden Tahap III Blok A 6 No. 1, Batam Center, Batam	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

BEKASI SQUARE

1	Bekasi Square Ruko Unit No. 57 - 58, Kios UG 182 - 183, Jl. Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Cut Meutia 3, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 47, Grand Wisata, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Cikarang Plaza Unit B 15, Cikarang, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Komplek Ruko Bekasi Mas Kav. D 2 B, Jl. Jendral Ahmad Yani, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Jalan Raya Jatiwaringin No. 335, Pondok Gede, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Sentra Niaga Bulevar Hijau Blok A No. 9, Taman Harapan Indah, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Ruko Metro Boulevard 2 No. B 18, Jl. Niaga Raya, Cikarang, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Grand Mall Bekasi Lt. Dasar, I, II / Ruko B No. 60 dan Kios No. 40, Bekasi, Jawa Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Plaza Pondok Gede Blok A No. 16 - 17, Jl. Raya Pondok Gede, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ketiga	27/06/20 sd 27/06/26
11	Jl. Cut Mutiah Kav. A II/5A, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Kompleks Ruko Kalimas Kav. No. A 26, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Karawang Resinda Blok F No. 23, Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Karawang Plaza No. 32, Jl. Tuparev, Nagasari, Karawang Barat, Karawang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Ahmad Yani Kav. 89, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Kompleks Ruko Union Blok C 10, Bekasi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Ruko Sapphire Hook BC/001, Jln Lingkar Tanjungpura, Kondangjaya, Karawang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

BENGKULU

1	Jl. Letjen. Suprpto No. 30, Bengkulu	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	01/01/21 sd 31/12/30
---	--------------------------------------	--------------	-------------------	----------------------

BOGOR

1	Jl. Pakuan No. 14, Bogor	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Parung, Ruko Bintang Parung Blok A 1 No. 4, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Lawang Seketeng 94-96	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Raya Tajur No. 67, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Margonda Raya No. 88, Depok Mall Blok B 1 No. 49, Depok	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. R. Dewi Sartika Kav. 7, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Kompleks Ruko 24 No. 2 R - S, Jl. K.H. Soleh Iskandar, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Kompleks Pertokoan Moderen, Jl. Raya Alternatif Cibubur 79, Jatikarya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Depok Town Square Blok GE No. 1, Jl. Raya Margonda, Depok	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
10	Jl. Raya Pajajaran No. 12 A, Bantarjati, Bogor Utara, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Kompleks Ruko Mayor Oking II Blok A1 No. 1, Cibinong,	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Kompleks Ruko Perumahan Kota Wisata Blok SEA No. 16, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Pahlawan No. 68/102, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Raya Kedung Halang No. 134, Kampung Cibuluh, Bogor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Ruko Plaza Niaga II Blok G No. 23. Sentul City	Cabang Pembantu		
BOJONEGORO				
1	Jl. Untung Suropati 28, Bojonegoro	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya No. 219, Babat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
CIREBON				
1	Jl. Yos Sudarso 17, Cirebon	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pulasaren 93, Cirebon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi 34, Cirebon	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	05/01/22 sd 04/01/25
4	Jl. Raya Kadipaten 27, Kadipaten	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Mayor Dasuki 102, Jatibarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Kolonel S. Sukani 27, Jatiwangi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Raya Plered 88 Plered, Cirebon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Merdeka Barat 38 Ciledug, Cirebon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Siliwangi 91, Kuningan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Losari 138, Losari	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Jendral Sudirman No. 195, Indramayu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Cherbon Grand Centre Blok D No. 15, Jl.Karanggetas, Cirebon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
GADING SERPONG				
1	Ruko Fifth Avenue Blok A No. 1 - 3, Gading Serpong, Tangerang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Malibu Sektor VII Blok B 15 - 16, Jl. Raya Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	WTC Serpong, Jl. Raya Serpong, Pondok Jagung, Serpong, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Rukan Golden Boulevard Blok M No. 3 & 5, BSD City, Serpong, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Ruko Golden Madrid Blok E No. 3-5-6-7, BSD City, Serpong, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Merdeka 140, Tangerang	Cabang Pembantu	Sewa group	April 1989 sd sekarang
7	Metropolis Town Square, Ruko Blok GM 6 No. 6 - 7 dan Kios Blok GA 5 No. 11 - 12, Kelapa Indah, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. M.H. Thamrin Raya A 7, Cikokol, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Kompleks Ruko Bintaro Jaya Blok C No. 6 - 7, Sektor 9, Bintaro, Pondok Aren, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Pamulang Raya No. 3 Blok SH 18/4, Pamulang, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Kompleks Ruko Pinangsia Blok I No. 38 - 39, Lippo Karawaci, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Ruko Business Park Tangerang City Blok B 8 - B 9, Jl. Jenderal Sudirman, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Ruko Jalur Alam Sutera 29 A No. 1, Serpong Utara, Tangerang Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Ruko Royal Poin, Jl. Majapahit Timur No. 4, Cipondoh, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Daan Mogot KM. 21 Blok E 1 No. 26, Batu Ceper, Tangerang Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
16	Ruko Bidex Blok C No. 16, BSD City, Serpong, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Imam Bonjol Blok A No. 1 - 2, Karawaci, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Jl. Kisamaun 195, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
19	Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 30, Curug Sangereng, Kelapa dua, Tangerang	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ke 3	01/01/24 sd 31/12/24
20	Ruko Foresta Business Loft 1 No. 29, Jl BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
GARUT				
1	Jl. Ciledug 113 - 115, Garut	Cabang Utama	Milik sendiri	
GORONTALO				
1	Jl. Nani Watabone No. 32 D, Gorontalo	Cabang Utama	Milik sendiri	
JAKARTA CBD PLUIT				
1	CBD Pluit Boutique Office Blok S No.9, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pluit Karang Timur 51 - 52, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Apartment Muara Indah, Menara 2B Lt. 1 No. 1-6 dan 1-7, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Pluit Karang Jelita I, Muara Karang Blok Z8 No. 10 dan 12, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Pluit Sakti Blok A Kav.1, Penjaringan, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Megamal Pluit Blok R No. 25 - 26, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Ruko Manyar Blok A No. 16-17-18, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indak Kapuk, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Kompleks Taman Grisenda GE No. 18 - 19, Kapuk Muara, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Ruko Kompleks Duta Mas A 3 No. 29, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Ruko Cordoba Blok B No. 1-2-3, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Taman Resor Mediterania Blok X 3 Kav. C, Jl. Galeri Niaga, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Ruko Kompleks Duta Harapan Indah Blok L No. 1 - 2, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Pluit Selatan I No. 75 Blok D Kav. 13, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Blok N 10 No. 33, Kompleks Ruko Villa Taman Bandara, Dadap, Kosambi, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Kompleks City Resort Residences Blok B No. 28, Cengkareng, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Ruko Mutiara Taman Palem Blok D 01 No. 17, Cengkareng, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, Perum Perumnas Blok A 2, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Jln Pantai Indah Kapuk Boulevard Lat Dasar Lobby Tzu Chi Hospital Unit No. 1.5	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ke 3	01/10/21 sd 01/10/26
19	RS Atma Jaya Lobby Pavillion Bonaventura Unit 6 & 7, Jl. Pluit Raya No. 2	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ke 3	17/05/22 sd 17/10/27
JAKARTA SULTAN ISKANDAR MUDA				
1	Kompleks Sentra Arteri Mas, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 10 D - E, Jakarta Selatan	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Metro Duta I/UA - 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. R.S. Fatmawati Kompleks DEPLU Sektor V/1, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
4	Jl. Terogong Raya 33 Cilandak, Jakarta International School, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	Oktober 2000 sd sekarang
5	Perkantoran Hijau Arcadia, Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/07/24 sd 30/06/27
6	Jl. Kemang Raya No. 112 A, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Fatmawati No. 63 A, B, C, Cipete Selatan, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Cilandak (KKO) No. 9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Radio Dalam Raya No. 52 A, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Cinere Blok A No. 40, Cinere, Depok	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Kompleks Pertokoan Duta Mas Blok B 2 No. 27, Kel. Cipete Utara, kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. R.S. Fatmawati No. 37 D, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. 30, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Ruko Botanical Junction Blok H 9 No. 15, Jl. Meruya Selatan, Kompleks Puri Botanical, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Ruko Intercon Megah Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok W IV No. 31, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
JAKARTA KOPI				
1	Jl. Kopi 52, Jakarta Barat	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. R.E. Martadinata 1 B - C, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Mangga Dua Raya Blok I No. 5 A - B, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/12/20 sd 30/11/25
4	Ruko Mangga Dua Mal No. RM/42, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
5	Ruko Robinson No. 82, Jembatan Dua, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/04/22 sd 31/03/27
6	Jl. Jembatan Tiga 36 F Q, Penjaringan, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Rukan Bandengan Indah, Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok A - 38, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Apartemen Robinson, Jl. Jembatan Dua No. 2 Q, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Grand Boutique Center, Jl. Mangga Dua Raya Blok C Kav. 2, Ancol, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	11/01/23 sd 10/12/24
10	Ruko Permata Kota Blok I No. 16 - 17, Jl. Tubagus Angke 170, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Wisma Eka Jiwa Unit B No. 10, Mangga Dua, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/02/23 sd 31/01/28
12	Jl. Jelambar Baru Raya, Blok B Kav. No. 1 SEB No 37 B, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Season City Blok B No. 29 - 30, Jl. Jembatan Besi, Latumeten, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. K.H. Mas Mansyur No. 150 - 152, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/10/15 sd 01/10/25
15	Jl. K.H. Mansyur No. 183 C, Tambora, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
JAKARTA MENARA IMPERIUM				
1	Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Pasar Minggu No. 19 B - C, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Pertokoan Prada Blok 7 E Lt. 1, Jl. Pegangsaan Timur 15 A, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Gedung Kantor Pusat Borobudur, Jl. Johar No. 1, Menteng, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/10/23 sd 30/09/33
5	Kompleks Rukan Buncit Mas Blok BB 7 - 8, Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
6	Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No. 1 - 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Tebet Timur Dalam Raya 2, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 56 C, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Dr. Saharjo No. 244 C, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Salemba Tengah No. 35, Senen, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Raya Rawa Bambu No. 88 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Dewi Sartika No. 210, Cawang, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Panin Life Building, Jl. Jatinegara Barat 54 E Blok B 3 - 4, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Sewa group	01/04/22 sd 31/03/32
14	Jl. Jatinegara Barat 41, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Raya Matraman Blok A I No. 3, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

JAKARTA PALMERAH

1	Jl. Palmerah Utara 52, Kemanggisan, Jakarta Barat	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Meruya Ilir Raya, Ruko Intercon Plaza Blok E 21-22, Kebun Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Green Garden Blok I 9 No. 36, Kedoya Utara, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Kompleks Green Ville Blok AW No. 55, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Surya Wijaya 33 A, Sunrise, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Kedoya Raya No. 27 F, Kompleks Cosmos, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Kompleks Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav. 30, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Kompleks Graha Kencana, Jl. Perjuangan No. 88 CJ, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Kompleks Perumahan Green Garden Blok Z 4 No. 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Kedoya Angsana Blok II No. 46, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Pesanggrahan No. 3 A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Mangga Raya No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Letjend S Parman Kav 12, Kemanggisan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	1/10/21 sd 30/09/26

JAKARTA PECENONGAN

1	Jl. Pecenongan 84, Jakarta Pusat	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Krekot Bunder 7, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Pintu Besar Selatan 52, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Sukarjo Wirjopranoto No. 2 R, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Ir. Juanda III 6, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/07/15 sd 30/06/25
6	Lindeteves Trade Center, Ground Floor No. RB 55 - 56, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Pintu Besar Selatan No. 62, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Gunung Sahari No. 60-63. Blok B4-B5 Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Garuda No. 26 - 26 A, Kemayoran, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Ruko Karang Anyar Permai Blok A No. 21, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/01/21 sd 31/12/30
11	Ruko Glodok Plaza Blok F No. 3, Jl. Pinangisia, Taman Sari, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. P. Jayakarta No. 24 / 4, Mangga Besar Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
13	Ruko Segi Tiga Senen Blok F No. 32, Senen, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/04/22 sd 31/03/27
14	Kem Tower Lt. 1 Unit A, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B No. 10 Kav. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Mangga Besar Raya No. 90, Taman Sari, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Kartini Raya No. 55 E, Sawah besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Lau Tze No. 109, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/11/19 sd 31/10/24

JAKARTA PLAZA PASIFIK

1	Kompleks Plaza Pasifik Blok B 4 No. 83-85-87, Jakarta Utara	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Boulevard Barat LC 7 No. 61, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kelapa Gading Boulevard Blok CN 2 Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Perumahan Gading Kirana Blok B 10 Kav. 31, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Sunter Paradise Raya II Blok C 17 - 18, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Danau Sunter Utara F 21 No. 3, Sunter Agung, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Danau Sunter Utara Blok B Kav. 12, Sunter Jaya, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Ruko Enggano Megah Blok B No. 9 E - F, Jl. Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Sewa Pihak Ketiga	01/09/23 sd 31/09/25
9	Jl. Metro Kencana VII Blok Q No. 12 - 12A, Sunter, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok A 3, Jl. Letjen. Suprpto, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Rusun Graha Cempaka Mas, Jl. Letjen. Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. C 26, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Pulo Gadung Trade Center, Jl. Bekasi Raya Blok B - H Kav. 1, Cakung, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok A No. 22, Jl. Bekasi Raya KM. 25 A - 22, Cakung, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Kompleks Kelapa Gading Boulevard Blok RA I No. 32, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Graha Boulevard Blok KGC No. A 6, Jakarta Utara	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Raya Buaran Perumnas Blok I No. 9, Duren Sawit, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Balai Pustaka Timur Blok B No. 17, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Jl. Kalimalang, Kompleks Billy & Moons Blok M I BZ No. 2. SEB/2E, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

JAKARTA PURI TIRTA

1	Kompleks Puri Kencana Blok L 6 No. 88 M-N-O, Kembangan, Jakarta Barat	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Puri Indah Raya Blok I/12A, Kompleks Perumahan Puri Indah Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Sentra Niaga Puri Indah Raya Blok T3/17 - 18 A, Kembangan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Bira Blok D 1 Kav. 21, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Kompleks Taman Semanan, Jl. Dharma Kencana Blok D No. 16 - 18, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Kompleks Perumahan Bojong Indah, Jl. Pakis Raya No. 88 O, Cengkareng, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
7	Perumahan Daan Mogot Baru, Jl. Jimbaran Blok B No. 2-3, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Taman Palem Lestari Blok C 1/19, Cengkareng Barat, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Utan Jati, Kompleks Rukan Citra Niaga Blok A No. 33, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Dian Kasih International School, Kompleks Citra Garden 5, Kalideres, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	27/09/19 sd 26/09/24
11	Kompleks Perumahan Citra 2 A Blok BG 3 B Persil No. 29 - 30, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Rukan Kencana Niaga Blok D I - 21, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan Selatan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Puri Mansion Blok B No. 27, Kembangan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Kompleks Citra Business Park Blok B No. 7 - 8, Kalideres, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Kompleks Perum Permata Taman Palem Blok A 1 No. 1, Kalideres, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Kompleks Duta Garden Business Park Blok C No. 53 dan 55, Sumber Jaya, Jurumudi Baru, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Raden Saleh Raya Blok R1 12, Karang Tengah, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

JAKARTA SANGAJI

1	Jl. A.M. Sangaji Raya No. 15-15A-17, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Cideng Timur 80 B, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Pusat Niaga Roxy Mas, Roxy Mas Blok E 2 No. 1 - 2, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Tomang Raya No. 53, Wisma Lumbini Lantai Dasar, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/11/19 sd 31/10/24
5	Jl. Suryopranoto No. 81, Petojo, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Gajah Mada No. 93, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 A, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Gajah Mada No. 3 - 5 Blok B 19, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Dr. Muwardi I No. 35 C, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Petojo Binatu III No. 1, Gambir, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Biak No. 14 - B 2, Gambir, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Fachrudin, Pasar Tanah Abang Blok B Lt. 5 No.7 dan 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
13	Jl. Fachrudin 47 - 49, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Blok A No. 14/36, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Apartemen Mediterania Garden Residences I, Blok Dahlia Lantai GF No. SH/D/GDD, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5 - 9, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Podomoro City, Garden Shopping Arcade Unit 8/08/ EA-EB, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
17	Jl. Tanjung Duren Raya No. 15 B, Jakarta Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

JAKARTA SENAYAN

1	Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	01/12/24 sd 31/12/24
2	Jl. Darmawangsa III Blok D 15, Wijaya Grand Centre, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Permata Hijau Blok D 17 - 18, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Sewa group	20/04/20 sd 20/04/30
4	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Suite 107 B, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	15/03/20 sd 14/03/25



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
5	Jl. Sungai Sambas VI 189 H, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Permata Senayan Unit E 62 - 63, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Tamini Square GF Unit GB/3, Jl. Taman Mini Raya, Kampung Makassar, Jakarta Timur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Sudirman Park, Rukan Hook Blok A No. 1, Jl. K.H. Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Panin Plaza Unit 6-05, 6-06 & 6-07, Jl. Permata Hijau Blok CC No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Teuku Nyak Arif No. 10, Jakarta Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
JAMBI				
1	Jl. Hayam Wuruk No. 143 B C D, Jambi	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Kompleks Wiltop Plaza, Jl. Prof. M. Yamin No. 36 - 37, Muara Bungo, Jambi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Sultan Thaha Blok A No. 32 - 33, Jambi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Lintas Sumatera KM 1, Kompleks Sentral Bisnis Ceria Blok C No. 7 - 8, Pasar Sarolangun, Sarolangun, Jambi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Orang Kayo Pingai No. 171, Kota Jambi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Kemakmuran No. 30, Tanjung Jabung Barat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
JAYAPURA				
1	Jl. Sam Ratulangi No. 1, Desa Gurabesi, Jayapura	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Abepura, Abepura, Jayapura	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Raya Sentani, Sentani, Jayapura	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Budi Utomo, Mimika Baru, Mimika	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
JEMBER				
1	Jl. Sultan Agung No. 64, Kaliwates, Jember	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Ahmad Yani No. 50 B, Banyuwangi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Letjen. Suprpto No.22, Lumajang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
KEDIRI				
1	Jl. Brawijaya No. 50, Kediri, Jawa Timur	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Letjen. S. Parman, Madiun	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Merdeka No. 28 Kav. I - II, Blitar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Panglima Sudirman No. 45 I, Tulung Agung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Ahmad Yani No. 14 B - C, Magetan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Harly Square Blok D5 - D6, Jl. Yos Sudarso No. 12, Nganjuk	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
KENDARI				
1	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 30 E, Kendari	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Bataraguru No. 60, Waj0, Bau-Bau	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Chairil Anwar No. 20, Lamokota, Kolaka	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. MT. Haryono No. 42, Kendari	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Kompleks Citraland Ruko Imperium Blok A 1 Kav. 2, Kendari	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Abdullah Silondae No. 50, Mandonga	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/10/14 sd 30/09/24
7	Kompleks Golden Trade Center Blok B No. 5, Jl. Kongoasa, Kendari	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
KUPANG				
1	Jl. Tompelo No. 9, Oebobo, Kupang	Cabang Utama	Milik sendiri	
MAKASSAR				
1	Jl. Dr. Sam Ratulangi 20, Makassar	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Veteran No. 78, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Ruko Pasar Mirah, Jl. Pengayoman Blok D 9 Panakukang Mas, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
4	Jl. Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permatasari No. 2, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Tentara Pelajar 157 A, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Puri Kencana Sari Blok D No. 9 - 10, Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamanlarea Indah, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Sulawesi No. 151, Pattunuang, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Sungai Saddang Baru No. B 2, Balla Parang, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Andi Makkassau No. 59 E, Kampung Pisang, Soreang, Pare-pare	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Kelapa No. 11 D, Tompotika, Palopo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. KH Wahid Hasyim 185C, Gowa	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks Cendrawasih Square Blok A 7, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Abdul Syakur Blok B 5 - 6, Mamuju	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Gunung Latimojong LR 61/5, Lariang Bangi, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Metro Tanjung Bunga 27, Tanjung Merdeka, Tamalate, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Makmur No. 37, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Veteran Selatan, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Kompleks Kima Square Blok A 26, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
19	Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
20	Jl. Sam Ratulangi No. 15 A	Kantor Wilayah Non Operasional	Milik sendiri	
MALANG				
1	Jl. Sultan Agung 14, Malang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Kyai Tamin, Kompleks Pasar Besar KT No. 1, Malang	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ketiga	22/12/23 sd 22/12/25
3	Jl. Terusan Borobudur No. 47 A, Lowokwaru, Malang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Thamrin No. 19 D, Lawang, Malang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Ruko Sentral Niaga Pandaan Blok B - 01, Jl. Raya A. Yani 321, Petungasri, Pandaan, Pasuruan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Dewi Sartika No. 4, Batu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Panglima Sudirman No. 266, Probolinggo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
MANADO				
1	Kompleks ITC Marina Plaza Blok Bunaken No. 24 - 26, Jl. Piere Tendean, Manado	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Dotulolong Lasut No. 9, Manado	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ketiga	01/07/23 sd 30/06/24
3	Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall Blok S No. 11, Manado	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Yos Sudarso No. 52, Maesa, Bitung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Yos Sudarso No. 12, Kompleks Pasar Segar, Paal Dua, Manado	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jln Arnold Mononutu No. 141, Ternate Tengah, Manado	Cabang pembantu	Milik Sendiri	
MATARAM				
1	Kompleks Pertokoan Sweta Indah, Jl. Sandubaya No. 18 - 21, Mataram	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pejanggik No. 11, Cakranegara, Mataram	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
MEDAN				
1	Jl. Pemuda 16 - 22, Medan	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Sutomo 32, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
4	Komplek Taman Setia Budi Indah Blok UU No. 47, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Pahlawan 17 C, Tanjung Morawa, Deli Serdang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Bandung No. 38, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Krakatau No. 14 B, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Zainul Arifin No. 63, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Yos Sudarso No. 197 D, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Kota Baru III No. 46, Medan	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/09/15 sd 31/08/25
11	Jl. Asia No. 115C, Sei Rengas II, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Zein Hamid No. 809 B - C, Kampung Baru, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Iskandar Muda No. 99 B-C-D, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Pulau Pinang 6, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Sutomo No. 190/566 Sudut Jalan veteran, Medan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Jendral Sudirman No. 382, Pekan Binjai, Binjai Kota, Binjai	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jln. Sutomo Ujung No. 21 E , Medan Timur, Deli Serdang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PADANG				
1	Jl. Belakang Olo No. 61, Padang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pondok No. 92, Belakang Pondok, Padang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PALANGKA RAYA				
1	Jl. Tjilik Riwut KM 02, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya	Cabang Utama	Milik Sendiri	
PALEMBANG				
1	Jl. Brigjend H.Kasim, Basilika Kav 03 RT.044 RW.09, Palembang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Mesjid Lama 97 - 99, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Rajawali No. 11 - 12, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Kolonel Atmo No. 863, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Jenderal Sudirman 48, Karang Raja, Prabumulih, Sumatera Selatan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Raya Palembang, Betung KM. 12, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Yos Sudarso No. 5 A - B, Lubuk Linggau	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Mayor Salim Batubara, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 1 - 2, Ogan Komerling Ulu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. M.P. Mangkunegara No. 1, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl Demang Lebar Daun RT.039 RW.012, Ilir Barat I, Palembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PALU				
1	Jl. Sam Ratulangi No. 82, Palu	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Luwuk Trade Centre Kav. 12 - 13, Jl. DR. Sutomo, Luwuk, Banggai	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Danau Poso, Kompleks Pertokoan Palu Plaza No. A1 / B1, Palu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Emmy Saelan No. 11 D, Palu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PANGKAL PINANG				
1	Ruko Harmoni City Blok C No. 9 - 11, Jl. Soekarno Hatta, Bukit Intan, Pangkal Pinang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Muhidin, Sungailiat, Bangka	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Sekolah No. 18, Tanjung Pandan, Belitung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
PEKANBARU				
1	Jl. Jendral Sudirman No. 335, Pekanbaru	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	01/12/18 sd 30/11/28
2	Jl. Nangka / Tuanku Tambusai No. 425, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Jendral Sudirman No. 62, Duri, Bengkalis	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Bupati Tulus No. 32, Rengat, Indragiri Hulu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Teuku Umar no.8 D, Selat Panjang, Bengkalis	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Riau, Kompleks Riau Business Center Blok B No. 4, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Harapan Raya / Jl. H. Imam Munandar No. 247 E, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Jendral Sudirman Atas 415, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. M.Boya No. 231 - 232, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Jendral Sudirman No. 171, Bagan Batu, Bagan Sinembah, Rokan Hilir	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Jendral Sudirman No. 145, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. H.R. Subrantas, Delima, Tampan, Pekanbaru	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu, Rokan Hulu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Sultan Syarif Kasim, Dumai Timur, Dumai	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bengkalis	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Raya Perawang KM. 6, Tualang, Siak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PEMATANG SIANTAR				
1	Jl. Merdeka 69 - 71, Pematang Siantar	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Sisingamangaraja No. 551, Perdagangan, Simalungun	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Soa Sio No. 22 A - B, Pematang Siantar	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Jendral A. Yani No. 119 dan 117, Tebing Tinggi	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/08/23 sd 31/07/25
5	Jl. Imam Bonjol No. 28, Kisaran Barat, Asahan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Ahmad Yani No. 175, Labuhan Batu	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Tanjungbalai	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PONTIANAK				
1	Jl. Imam Bonjol 44, Pontianak	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Sidas No. 3, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Ruko A. Yani Mall, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Sultan Muhammad 71 - 73, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Yos Sudarso No. 88, Singkawang Barat, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. M.T. Haryono, Sintang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Ahmad Yani, Sanggau Kapuas, Sanggau	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Suprpto No. 44, Matan Hilir Utara, Ketapang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Jendral A. Yani No. 7 - 8, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Sultan Syarif Abdurrachman, Pontianak Selatan, Pontianak	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
PURWOKERTO				
1	Ruko Nusantara, Jl. Jendral Sudirman No. 786, Kranji, Purwokerto Timur	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Jendral Sudirman 45, Purbalingga	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/01/21 sd 31/12/30
4	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 38, Cilacap	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
SAMARINDA				
1	Jl. Jendral Sudirman No. 35, Samarinda	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Kompleks Ruko Mall Lembuswana Blok D No. 1 - 2, Jl. S. Parman, Samarinda	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
SEMARANG				
1	Gedung Panin Bank, Jl. Pandanaran 6 - 8, Semarang	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Suari 27, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
3	Jl. Telaga Mas Raya Blok B No. 18 - 19, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Industri Raya Timur Kav. 3, Kaligawe KM. 4, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Majapahit No. 225 A, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Dargo Plaza, Jl.Dargo A 10 - 11, Semarang	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/10/23 sd 30/09/28
7	Jl. Ahmad Yani 195 B, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Diponegoro 772 A, Ungaran	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Raya Weleri 222, Weleri	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Diponegoro 49, Salatiga	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Letjen. Suprpto No. 31 - 33, Purwodadi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Sultan Agung No. 55 E - F, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Kompleks Ruko Ahmad Yani No. 7, Jl. Jendral A. Yani, Kudus	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Jl. Gang Besen No. 92, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Jendral Gatot Subroto No. 7 - 8, Blora	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	02/01/24 sd 02/01/25
16	Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto F 1 No. 16, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Komplek Ruko Plaza Puri Blok A No. 16 - 17, Pati	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Jl. Jendral Sudirman No. 148, Semarang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
19	Jl. Dr Wahidin No. 65, Rembang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

SERANG

1	Kompleks Pertokoan Serang Plaza Blok II No. 1, Jl. Maulana Hasanuddin, Serang	Cabang Utama	Sewa Pihak Ketiga	01/11/21 sd 31/10/26
2	Jl. S.A. Tirtayasa No 7, Jombang Kali, Cilegon	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Kompleks Citra Raya Sektor 1 2, Blok L 01 No. 9 R - 10 R, Cikupa, Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	JL. Jendral Ahmad Yani No. 157, Serang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Boulevard Bizpoint, Ruko Bizpoint Blok R 1 No. 02, Cikupa ,Tangerang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

SOLO

1	Jl. Gatot Subroto 91 F, Solo	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. A. Yani 136 A Blok D 04, Kartasura, Sukoharjo, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Pemuda Utara 19, Barend Lor	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Pandanaran 82, Boyolali	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Raya Wonogiri 187, Wonogiri	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Mayor Kusmanto No. 7, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Raya Palur, Karang Anyar, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. S. Parman No. 89, Kestalan, Banjarsari, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Raya Solo Baru HH 14, Madegondo, Grogol, Sukoharjo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Sukowati No. 199, Sragen	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Slamet Riyadi No. 373, Kompleks Center Point Ruko A 19, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Kapten Pierre Tendean No. 173, Solo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

SORONG

1	Jl. Jendral Sudirman No. 41, Sorong Manoi, Sorong	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Merdeka No. 38, Manokwari Barat, Manokwari	Cabang Pembantu	Milik sendiri	

SUKABUMI

1	Jl. Jenderal Sudirman No. 102, Sukabumi	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pasar No 78, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi	Cabang Pembantu	Sewa Pihak ketiga	12/07/21 sd 12/07/26
4	Jl. Pasar Baru Kav 7 - 8, Cianjur	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Siliwangi, Cibadak, Sukabumi	Cabang Pembantu	Milik sendiri	



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
SUMEDANG				
1	Jl. Mayor Abdulrachman 180, Sumedang	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	28/04/23 sd 28/04/25
SURABAYA CENDANA				
1	Jl. Kombes. Polisi M. Duryat 25, Surabaya	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Tambak Langon 15, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. R.A. Kartini 218, Gresik	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. HOS Cokroaminoto 60, Mojokerto	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. K.H. Mukmin 11 B 4, Sidoarjo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Panglima Sudirman 146, Tuban	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Wiyung Indah A 40, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Ahmad Yani No. 40, Sidoarjo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Basuki Rahmat No. 40, Sukorejo, Lamongan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Tropodo No. 29 B, Sidoarjo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 195, Jombang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
12	Jl. Airlangga No. 109, Desa Kauman, Mojosari, Mojokerto	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
13	Jl. Imam Bonjol No. 94, Kauman, Krian	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Pusat Grosir Surabaya Lantai 4 Blok C 5 No. 5 - 6, Jl. Dupak No. 1, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Jl. Nginden Semolowaru No.101/31, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Komplek Kenjeran Palace, Jl. Putro Agung Timur Blok C-01 dan C-02, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
SURABAYA COKLAT				
1	Jl. Coklat 16, Surabaya	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Tunjungan 92, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Darmo 139, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Kusuma Bangsa 39, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Jl. Dharmahusada No. 121 A - B, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Kutisari 58 A, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Demak 167, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
8	Jl. Arief Rahman Hakim 55 - 55 A, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Semarang No. 108 D Blok A 12, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa Pihak Ketiga	26/04/22 sd 25/04/27
10	Komplek Pertokoan Ruko Taman Graha Asri Blok K1 - K2, Jl. Raya Ngagel No. 179 - 183, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
11	Jl. Tanjung Perak Timur 242, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/01/22 sd 31/12/24
12	Jl. Mayjen Sungkono 100, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/07/21 sd 30/06/26
13	Kompleks Pertokoan Mulyosari, Jl. Raya Mulyosari No. 362 Blok Z No. 51 - 52, Sutorejo, Sukolilo, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
14	Kompleks Perumahan dan Pertokoan Galaxy, Bumi Permai Blok I - 1 No. 1 - 2, Jl. Sukosemolo, Sukolilo, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
15	Kompleks Rukun Makmur Indah Blok B 5 dan B 7, Gubeng, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
16	Jl. Pucang Anom No. 35 A, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
17	Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Satellite, Satellite Town Square, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
18	Jl. Kapas Kerampung No. 30, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
19	ITC Mega Grosir, Jl. Gembong No. 20 - 30, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	31/10/06 sd 31/01/32
20	Gedung Bank Harfa, H.R. Muhammad Square, Jl. H.R. Muhammad Blok C 19 - 20 & C 29 - 30, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/10/22 sd 30/09/24
21	Jl. Darmo Indah Timur SS 3, Tandes, Kidul, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
22	Ruko Sentra Taman Gapura Blok J 3 & J 5 (Citriland), Lontar, Lakarsantri, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
23	Pasar Atum Mall Stand Lantai II Blok BA 20, Jl. Bunguran 45, Surabaya	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	10/07/22 sd 31/07/31



NO	LOKASI	STATUS OPERASIONAL	KEPEMILIKAN	JANGKA WAKTU SEWA
24	Komplek Ruko Gateway Sidoarjo Blok B No. 8, Jl. Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
25	Kompleks Ruko 21, Gubeng I Type Diamond Kaveling C, Jl. Raya Gubeng No. 68, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
26	Kompleks Ruko Pakuwon City, Jl. Pakuwon Boulevard II Blok AA 15, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
27	Jl. Raya Rungkut No. 5 Blok E 1, Surabaya	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
TASIKMALAYA				
1	Jl. K.H. Z. Mustafa 372 B, Tasikmalaya	Cabang Utama	Milik sendiri	
TEGAL				
1	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 78 - 80, Mintaragen, Tegal	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Utara No. 15, Adiwerna, Tegal	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
3	Jl. Jendral Sudirman Tengah No. 94, Brebes	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/07/21 sd 30/06/24
4	Jl. Jendral Sudirman No. 254, Batang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	JL. KH Mas Mansyur No. 30 C - D, Pekalongan	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
YOGYAKARTA				
1	Jl. Gejayan CT X No. 10, Catur Tunggal, Depok, Yogyakarta	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Mall Jogja Tronik, Jl. Brigjen. Katamso, Yogyakarta	Cabang Pembantu	Sewa pihak ketiga	01/01/05 sd 01/01/30
3	Jl. C. Simanjuntak No. 75, Yogyakarta	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
4	Jl. Godean KM. 4, Bantul	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
5	Ruko Yellow Square No. 135, Bantul	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
6	Jl. Letjen. Suprpto 5, Temanggung	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
7	Jl. Diponegoro 91, Parakan	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
8	Kompleks Ruko Rejotumoto No. 10, Jl. Tidar, Magelang	Cabang Pembantu	Milik sendiri	
9	Jl. Let Jend Ahmad Yani Rt/Rw.: 1/1, Jogonegoro, Wonosobo	Cabang Pembantu	Milik Sendiri	
SINGAPURA				
1	149 Rochor Road #04-04, Singapore	Perwakilan Luar Negeri	Milik sendiri	

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 2.287 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 807 (delapan ratus tujuh) unit Mobil, 129 (seratus dua puluh sembilan) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 848 (per Desember 2023) buah ATM (*Automated Teller Machine*). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 90.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.



Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 2 tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kantor Wilayah	1	1
Kantor Cabang	57	57
Kantor Cabang Pembantu	459	458
Kantor Kas	0	0*
Kantor Cabang Luar Negeri	0	0
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1
Sub Total	518	517
ATM	848	855

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Bank melakukan perubahan status seluruh Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu per Oktober 2021

18. Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 7,3% untuk Rupiah dan mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2023			2022		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	9.016.444	2.994.210	12.010.654	9.181.558	3.367.287	12.548.845
Tabungan	46.515.290	6.847.960	53.363.250	42.854.972	7.827.797	50.682.769
Deposito	67.463.574	2.252.003	69.715.577	66.684.486	2.767.375	69.451.861
Jumlah	122.995.308	12.094.173	135.089.481	118.721.016	13.962.459	132.683.475

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2023			2022		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	42.742.665	1.690.720	44.433.385	43.928.310	1.810.622	45.738.932
3 bulan	14.608.486	228.794	14.837.280	14.100.772	416.656	14.517.428
6 bulan	4.411.048	275.514	4.686.562	3.589.534	397.506	3.987.040
12 bulan	4.904.782	56.975	4.961.757	4.116.527	142.591	4.259.118
Lebih dari 12 bulan	796.593	-	796.593	949.343	-	949.343
Jumlah	67.463.574	2.252.003	69.715.577	66.684.486	2.767.375	69.451.861

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan 31 Desember 2023 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

19. Penempatan atau Penyaluran Dana

Sejalan dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan, terjadi peningkatan pula pada penempatan atau penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan dana sebagian besar adalah dalam bentuk kredit. Perseroan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk *interbank call money*, pembelian surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi Pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh korporasi serta untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek.

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai bidang perkreditan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan.

Jenis-Jenis Fasilitas Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kredit Konsumen	26.687.544	23.773.380
Kredit Komersial	47.762.368	42.353.734
Kredit Korporasi	65.251.229	63.751.185
Jumlah Kredit	139.701.141	129.878.299

Perseroan menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit dan jasa-jasa terkait kepada nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan dibedakan menjadi cash loan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi, dan *non-cash loan* seperti LC dan Bank Garansi.

Fasilitas kredit modal kerja memiliki jangka waktu pendek dapat bersifat *revolving* atau *non-revolving*. Fasilitas kredit investasi atau kredit berjangka adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang bersifat *non revolving*.

Fasilitas kredit konsumen adalah kredit untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumsi meliputi kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit. Jangka waktu kredit kepemilikan rumah maksimum 20 tahun, sedangkan kredit kepemilikan mobil maksimum 5 tahun. Perseroan menyediakan berbagai fasilitas kredit.

Penetapan Tingkat Bunga Kredit

Penetapan tingkat suku bunga kredit merupakan tanggung jawab ALCO. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, risiko kredit serta suku bunga kredit bank-bank pesaing.

Tingkat suku bunga ditentukan dengan memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh, sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan mencerminkan risiko implisit masing-masing debitur. Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, Perseroan tidak membedakan penentuan tingkat suku bunga kredit antara pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.

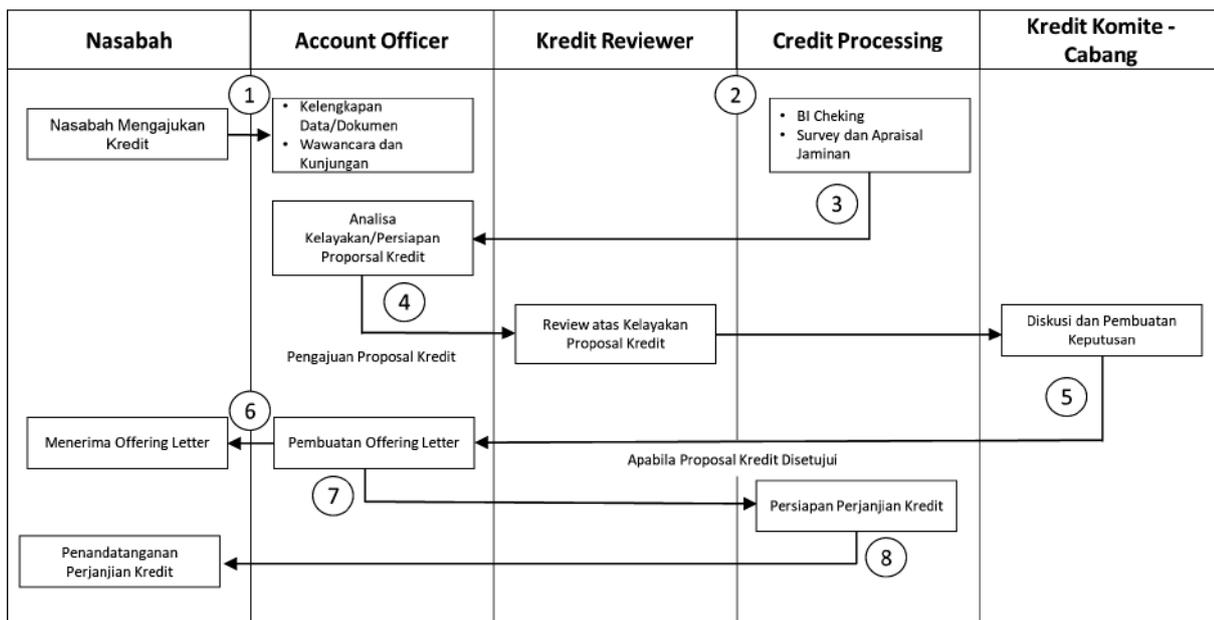
Kredit yang diberikan Perseroan mempunyai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang. Tingkat bunga Tetap diberlakukan untuk produk Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Kredit-kredit lainnya umumnya mempunyai tingkat suku bunga mengambang. Pembebanan bunga dilakukan setiap bulan

dan Perseroan memiliki opsi untuk meninjau tingkat bunga per debitur setiap saat. ALCO melakukan perubahan tingkat bunga sesuai dengan perkembangan industri perbankan. ALCO beranggotakan para direksi dan kepala divisi terkait.

Persetujuan Kredit

Proses kredit dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi, analisa data keuangan, penilaian risiko, jaminan, menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan prinsip *four eyes*, sebelum disetujui oleh Komite Kredit, proposal kredit direview oleh unit Kredit Review. Untuk kredit dalam jumlah besar perlu mendapatkan opini dari Biro Kepatuhan dan Biro Manajemen Risiko. Setiap kredit diputus oleh Komite Kredit baik yang berada di Cabang hingga Pusat (jika melampaui wewenang Cabang).

Skema Proses Pemberian Kredit kepada Nasabah:



Kredit kepada Nasabah Korporasi

Jumlah kredit nasabah korporasi dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sekitar 46,71% dari portofolio kredit dalam neraca Perseroan. Perseroan selama ini lebih menghususkan diri dalam pembiayaan di sektor Real Estate (Rp9.9T), Industri Pengolahan (Rp8.5T), Penyediaan akomodasi makanan dan minuman (Rp2.1T), Pengadaan listrik (Rp1.8T) serta Pengangkutan & Pergudangan (Rp1.3T). Nasabah korporasi pada dasarnya terdiri dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit lebih dari Rp90 miliar.

Kredit Kepada Nasabah Komersial

Jumlah kredit kepada segmen ini sekitar 34,19% dari portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2023. Segmen nasabah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan industri pengolahan yang memiliki fasilitas kredit hingga Rp90 miliar. Segmen ini memiliki pertumbuhan kedua tertinggi setelah segmen retail KPR, terutama karena pemberdayaan yang lebih tinggi atas tenaga penjualan dan diluncurkannya banyak credit program.

Kredit Kepada Nasabah Konsumen

Jumlah kredit untuk segmen ini adalah sebesar 19,10% dari portofolio kredit dalam negeri Perseroan per 31 Desember 2023. Kegiatan penyaluran kredit untuk segmen ini difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit.

Konsentrasi Industri

Portofolio kredit Perseroan beraneka ragam dan terdiri dari berbagai sektor dan kelompok usaha. Kebijakan Manajemen adalah untuk menjaga diversifikasi portofolio kredit dengan baik sehingga konsentrasi yang berlebihan pada suatu kelompok nasabah tertentu atau sektor industri dapat dihindari. Namun demikian, portofolio kredit Perseroan lebih terfokus pada tiga sektor usaha, yaitu sektor jasa, industri dan perdagangan. Selain dunia usaha, Perseroan juga aktif dalam pembiayaan kredit konsumen, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia) per 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jasa	39.879.922	36.294.590
Perdagangan	22.458.321	20.332.292
Konstruksi	25.355.333	24.917.439
Industri	25.340.734	24.972.840
Lain-lain	26.666.831	23.361.138
Jumlah Kredit	139.701.141	129.878.299

Struktur Jatuh Tempo Kredit

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus kepada sektor ritel dan konsumen, porsi KPR yang umumnya berjangka waktu menengah menunjukkan peningkatan. Selama 2 (dua) tahun terakhir ini kredit jangka menengah yaitu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang berhasil disalurkan oleh Perseroan memberikan kontribusi sebesar 42,91% dari jumlah kredit yang diberikan.

Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kurang dari 1 tahun	19.971.030	32.871.078
1 - 5 tahun	59.948.622	43.811.797
Lebih dari 5 tahun	59.781.489	53.195.424
Jumlah Kredit	139.701.141	129.878.299

Kebijakan Kredit

Melalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas aset produktif melalui proses analisis kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasi portofolio, kecukupan agunan kredit dan pengendalian internal. Untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian atas kredit yang diberikan, kebijakan Perseroan mensyaratkan agunan yang mencukupi baik yang berupa agunan yang dapat dikuasai (seperti tanah, bangunan atau aset tetap), maupun agunan yang tidak dapat dikuasai (seperti benda bergerak, piutang dan benda tidak terwujud) sebagai agunan tambahan.

**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit**

Berikut ini adalah tabel komponen cadangan kerugian penurunan nilai kredit per 31 Desember 2023 dan 2022:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Saldo Awal Tahun	6.608.717	5.667.537
Total saldo awal setelah pengalihan	6.608.717	5.667.537
Pengukuran kembali cadangan kerugian penurunan nilai	3.768.635	2.785.317
Aset keuangan baru yang diterbitkan	330.289	451.436
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.504.773)	(2.295.573)
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	1.594.151	941.180
Saldo akhir tahun	8.202.868	6.608.717

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk diantaranya sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengukuran risiko kredit ini merupakan estimasi berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi sebagai komponen *forward-looking/predictor*. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Grup harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* ("RA") – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Grup mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Grup apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Exposure at default* ("EAD") – Grup mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debit fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan Instrumen Utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) dianggap menurun nilainya, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jika efek hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Dalam hal efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba.

Cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2022, untuk entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah, kecuali piutang Murabahah dan aset keuangan lainnya, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu untuk tahun 2023 mengacu kepada POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, aset tertentu (kredit) ditelaah berdasarkan kulaitasnya dan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Lancar	Minimum	1%
Dalam Perhatian Khusus	Minimum	5%
Kurang Lancar	Minimum	15%
Diragukan	Minimum	50%
Macet	Minimum	100%

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.



Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan.

Berikut ini adalah tingkat kolektibilitas kredit per 31 Desember 2023 dan 2022:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Lancar	123.109.832	115.681.506
Dalam Perhatian Khusus	12.316.229	9.551.089
Kurang Lancar	210.598	498.096
Diragukan	526.057	542.843
Macet	3.538.425	3.604.765
Jumlah Kredit	139.701.141	129.878.299

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif netto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – NETTO

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro pada Bank Lain	1.297.706	1.252.071
Penempatan Bank Lain	3.569.734	4.952.837
Efek-efek	39.010.634	33.398.418
Tagihan Derivatif	20.437	29.385
Kredit	131.498.273	123.269.582
Tagihan Anjak Piutang	44.049	50.420
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	4.826.791	10.642.145
Piutang Sewa Pembiayaan	528.480	272.141
Piutang Pembiayaan Konsumen	8.429.005	6.795.450
Piutang Jual dan Sewa Balik	33.148	55.187
Tagihan Akseptasi	1.630.129	2.125.849
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	766.401	791.410
Tagihan Kontinjensi	40.664.528	41.386.192
Jumlah	232.319.315	225.021.087

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif bruto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – BRUTO

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro pada Bank Lain	1.297.741	1.252.121
Penempatan Bank Lain	3.572.422	4.954.470
Efek-efek	39.010.673	33.398.471
Tagihan Derivatif	20.437	29.385
Kredit	139.701.141	129.878.299
Tagihan Anjak Piutang	75.000	100.000
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	4.827.120	10.642.145
Piutang Sewa Pembiayaan	529.433	281.868



(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Piutang Pembiayaan Konsumen	8.614.493	6.914.427
Piutang Jual dan Sewa Balik	93.334	78.778
Tagihan Akseptasi	1.637.787	2.132.501
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	766.401	791.410
Tagihan Kontinjensi	40.664.528	41.386.192
Jumlah	240.810.510	231.840.067

Strategi Perbaikan Kualitas Kredit

Sebagai bagian dari upaya mengelola risiko kredit, manajemen telah mengambil langkah penanganan kredit bermasalah yang lebih fokus dan terstruktur. Untuk itu, telah dibentuk unit kerja tersendiri yaitu *Divisi Special Asset Management (SAM)* yang bertanggung jawab menangani penyelesaian kredit bermasalah mulai dari Kantor Pusat hingga Cabang-Cabang. Secara berkala juga telah dilakukan pengkinian atas prosedur atau kebijakan terkait guna memastikan tata kelola penanganan kredit bermasalah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya pengelolaan kredit bermasalah dilakukan secara intensif terhadap kredit yang berpotensi menjadi bermasalah dan/atau yang telah bermasalah secara berkesinambungan sebagai berikut :

- a. Segmen *Corporate, FI & BUMN*:
 - Bekerjasama dengan Unit Bisnis dalam memantau kredit yang berpotensi menjadi bermasalah.
 - Restrukturisasi kredit bagi debitur yang kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, namun pada saat ini kemampuan membayarnya menurun.
 - Likuidasi jaminan kredit dengan eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia/Gadai/Hipotik melalui Pengadilan dan/atau proses lelang KPKNL.
 - Negosiasi untuk dapat dilakukan *refinancing* atau *take-over* oleh Bank/institusi keuangan lainnya untuk percepatan penyelesaian kredit.
 - Pengambilalihan agunan melalui proses lelang maupun penyerahan secara sukarela oleh debitur. Pengambilalihan agunan dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan kebijakan Bank mengenai pengelolaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
- b. Segmen *Commercial Banking & Mortgage*:
 - Bekerjasama dengan Unit Bisnis melakukan deteksi dini terhadap debitur yang mulai berpotensi bermasalah dan berupaya mencari alternatif solusi penyelamatan kredit.
 - Melakukan reminder atau penagihan melalui SMS dan Telepon yang tersentralisasi di Kantor Pusat.
 - Melakukan restrukturisasi kredit terhadap Debitur yang memiliki itikad baik atau kooperatif dan masih memiliki prospek usaha namun pada saat ini mengalami penurunan kemampuan bayar.
 - Melakukan koordinasi secara berkala dengan SAM Cabang untuk mengevaluasi dan melaporkan tindak lanjut perkembangan penanganan Debitur bermasalah dan penyelesaian AYDA.
 - Melakukan Zoom Meeting secara rutin dengan SAM Cabang untuk membahas kredit-kredit bermasalah, prioritas penanganan/penagihan debitur dan memberikan masukan serta strategi untuk mendapatkan solusi penyehatan, penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah.
 - Memaksimalkan penggunaan *Collection System* dalam rangka mengadministrasikan aktivitas penanganan kredit bermasalah.
 - Melakukan aktivitas kunjungan dan telepon *team collection* Mikro melalui *Mobile Collection* dan *Collection System* sehingga cabang dapat mengetahui debitur-debitur yang sudah dan yang belum tertangani dengan optimal.
 - Melakukan pelatihan/*workshop/team building* dalam hal berbagi pengalaman mengenai penanganan kredit bermasalah sehingga SAM Cabang memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan kredit bermasalah.



20. Kebijakan Pendanaan

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sebagian dari investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang, seperti pemberian kredit kepada sektor infrastruktur. Kredit Pemilikan Rumah dan kredit investasi lainnya.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut sebagian besar berasal dari Giro, Tabungan serta dari Deposito Berjangka yang sebagian besar berjangka waktu pendek, yaitu 1 bulan dan 3 bulan.

Penerbitan obligasi bertujuan untuk memperbaiki komposisi sumber pendanaan jangka panjang dan mengurangi *mismatch* atau ketidak-sesuaian jumlah aset jangka panjang dengan sumber dana jangka panjang dalam rangka pengendalian risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perseroan memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda, agar tidak terlalu membebani arus kas Perseroan.

Untuk pembayaran pokok utang pada saat jatuh tempo akan dilakukan dengan dana yang berasal dari pelunasan SBN atau penjualan Surat Berharga yang dimiliki.

21. Pendapatan Imbal Jasa (*Fee Based Income*)

Perseroan menyadari bahwa pendapatan bunga bersih di masa mendatang akan mengalami koreksi yang cukup berarti sebagai akibat langsung dari ketatnya persaingan, oleh sebab itu Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan non-bunga atau imbal jasa (*fee based income*).

Berikut diuraikan beberapa kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa:

a. *Treasury*

Divisi *Treasury* selain bertanggung jawab dalam pengelolaan dana atau likuiditas bank, juga menyediakan jasa pengembangan transaksi valuta asing, khususnya kepada nasabah yang sering melakukan transaksi keuangan luar negeri dan menyediakan pula fasilitas pengadaan transaksi pasar uang, seperti jual beli surat berharga berupa Obligasi dan instrumen-instrumen *Fixed Income* lainnya. Jenis transaksi valuta asing yang ditawarkan antara lain dalam bentuk *Bank Note*, *Spot*, *Swap* dan *Forward*.

Produk-produk *treasury* disediakan untuk kepentingan nasabah terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan *hedging* maupun perdagangan (*trading*). Mengingat sifat produk *treasury* yang sangat rumit dan memiliki risiko yang tinggi, Perseroan senantiasa menetapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Demikian pula dengan nasabah yang akan melakukan transaksi, mereka harus terlebih dahulu mendapat fasilitas atas transaksi tersebut dari Komite Kredit. Untuk memperoleh fasilitas, nasabah juga diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat secara khusus.

b. *Trade Finance*

Untuk membantu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan pembiayaan perdagangan luar negeri, terutama dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C).

c. Jasa – Jasa Perbankan Lainnya

Perseroan juga menyediakan berbagai jasa untuk memperlancar arus pembayaran nasabah dengan didukung oleh jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: *Cash Management*, Jasa Kiriman Uang (dalam dan luar negeri), Pembayaran Pajak, Rekening Listrik dan Telepon. Untuk penitipan barang berharga milik nasabah, Perseroan menyediakan jasa *Safe Deposit Box* yang terjamin keamanannya.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terkonsentrasi kepada satu Debitur atau kelompok peminjam tertentu, Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Berdasarkan Peraturan OJK nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, BMPK kepada Pihak yang Terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari Total Modal Bank dan kepada Pihak yang Tidak Terkait setinggi-tingginya 25% dari Modal Inti Bank (*tier 1*), dan Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Berikut adalah rasio pemberian kredit terhadap modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan		31 Desember	
		2023	2022
Pihak Terkait	Ketentuan POJK	10%	10%
	Rasio BMPK Perseroan	3.37%	3.20%
Pihak tidak terkait	Ketentuan POJK	25%	25%
	Rasio BMPK Perseroan	13.40%	18.38%

Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan PADG Nomor 24/2022, maka GWM Primer dalam rupiah bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sejak 1 September 2022 secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 9%. Sedangkan GWM dalam valuta asing bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sejak 1 Juli 2022 secara harian sebesar 2% dan secara rata-rata sebesar 2%.

Pada PADG Nomor 12/2023, untuk implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), maka besaran total insentif paling besar ditetapkan sebesar 4% yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2023.

Pada PADG Nomor 18/2023, maka besaran GWM Sekunder (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) ditetapkan sebesar 5% sejak 1 Desember 2023.

Pada PADG Nomor 23/2021, ditetapkan besarnya batas bawah RIM target ditetapkan sebesar 84% dan batas atas RIM target ditetapkan sebesar 94% dan KPMM insentif sebesar 14%.

Berdasarkan ketentuan tersebut besarnya GWM bagi setiap bank dibedakan berdasarkan 3 kriteria utama yaitu:

1. GWM Primer yang ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dan besarnya insentif.
2. GWM sekunder yang ditentukan berdasarkan persentase terhadap surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia tertentu dan surat berharga repo.
3. Giro RIM yang ditentukan oleh batas atas dan bawah RIM Target, serta KPMM Insentif.



Berikut adalah tingkat GWM Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Ketentuan BI	9%	9%
GWM Primer Perseroan	7.3% dengan insentif 1.7%	8% dengan insentif 1%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 27 tahun 2022, bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan *Tier 1* sebesar 6,00% dan *CET 1* sebesar 4,50% dari ATMR. Berdasarkan Peraturan ini, bank yang memiliki total asset Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) atau lebih, bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih, dan bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih wajib memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung dengan cara membagi modal dengan ATMR. Pengertian modal menurut Peraturan Bank Indonesia ini meliputi Modal Inti (*Tier 1*) yang terdiri atas Modal Inti Utama (*CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*additional tier 1*) serta Modal Pelengkap (*Tier 2*). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti.

ATMR terdiri dari aset neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aset ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila suatu Bank tidak dapat memenuhi KPMM sesuai profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan penetapan status bank. Jika berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, CAR suatu Bank Umum berada di bawah KPMM Profil Risiko bank dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank. Adapun sanksi administratif yang dikenakan adalah:

- a. Teguran tertulis;
- b. Larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. Larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. Penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

Adapun CAR Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Modal	49.236.555	47.742.131
ATMR untuk risiko kredit	139.667.479	146.316.529
ATMR untuk risiko pasar	3.349.635	1.976.716
ATMR untuk risiko operasional	8.949.435	10.489.207
Modal Inti	47.287.667	45.370.359
Rasio Kecukupan Modal (CAR) Kredit, Pasar dan Operasional	32,40%	30,07%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) Kredit dan Pasar	34,43%	32,19%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) Kredit	35,25%	32,63%

Posisi CAR yang cukup tinggi dan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu lebih besar dari KPMM Profil Risiko membuktikan bahwa Perseroan mempunyai dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan kegiatan usahanya.

Non Performing Loans (NPL)

Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aktiva produktif (*Non Performing Loans*) selalu dibawah 5%. Berikut adalah tabel posisi *Non Performing Loans* (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
NPL Bruto	3,09	3,53
NPL Neto	0,57	0,92

Rasio-rasio Rentabilitas

Berikut ini adalah rasio-rasio rentabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata jumlah aset	1,74%	1,96%
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas	5,78%	6,59%
Laba operasional / rata-rata jumlah aset profuktif gross	1,56%	1,79%
Biaya operasional / pendapatan gross	78,18%	74,53%

Peringkat Bank

Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017, mewajibkan bank-bank untuk mendasarkan usaha mereka pada prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat bank mereka dan untuk melakukan penilaian sendiri atas peringkat bank setiap semester. Peringkat bank adalah peringkat kualitatif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keadaan atau pelaksanaan bank dengan peringkat kuantitatif dan atau kualitatif atas faktor-faktor berikut:

- Profil Risiko;
- *Good corporate governance*;
- Permodalan; dan
- Rentabilitas.

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan penilaian atas masing-masing faktor di atas. Terdapat lima peringkat komposit:

- Peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi cukup sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi kurang sehat dan kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya; dan
- Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi tidak sehat dan diyakini tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.



Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan yang dilakukan secara *self assessment*, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

22. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan secara memadai seluruh kekayaannya yaitu gedung dan inventaris kantor, mesin ATM beserta uang tunai dalam mesin ATM, *Cash in Safe*, *Cash in Cashier Box* dan *Cash in Transit* serta kendaraan bermotor. Perseroan mengasuransikan seluruh asetnya pada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., dengan Perjanjian No. 141/PKS-MAG/XII/2018 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024, yang merupakan perusahaan penyertaan. Terdapat 1 (satu) lokasi gedung yang diasuransikan pada pihak ketiga. Gedung yang berlokasi di Plaza Mutiara, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.B I 2 No. 1-2, Jakarta diasuransikan pada PT Asuransi Central Asia dengan No. Polis 200010323100000473, 200010623100000454, 100010723100000011, 100100123090000104 yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2024. Penutupan asuransi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing polis secara berkala setiap tahunnya, dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan tidak ada hubungan afiliasi dengan pihak asuransi.

Berikut adalah daftar aset yang diasuransikan per tanggal 31 Desember 2023:

a. **Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.**

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungkan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	129 Unit Sepeda Motor	Rp 655.000.000
	807 Unit Mobil	Rp 141.677.550.000

b. **Gedung yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.**

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungkan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	657 Unit Gedung	Rp 3.905.178.789.735
PT Asuransi Central Asia	1 Unit Gedung	Rp 3.650.000.000
China Taiping Insurance Pte, Ltd	1 Unit Gedung	SGD 280.000

c. **Inventaris yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan.**

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungkan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	830 Lokasi Inventaris	Rp 2.118.164.538.192

d. **Cash in safe, cash in cashier box dan cash in transit.**

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungkan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	515 Cash in Safe	Rp 697.025.000.000
	505 Cash in Cashier Box	Rp 499.650.000.000
	223 Cash in Transit	Rp 124.970.000.000

e. **Mesin ATM & Uang di Mesin ATM**

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungkan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	848 Unit Mesin ATM	Rp 103.187.328.664
	848 Lokasi Uang di Mesin ATM	Rp 338.550.000.000

Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran seluruh premi asuransi sesuai dengan nilai pertanggungkan tersebut di atas. Asuransi yang dimiliki Perseroan memiliki nilai pertanggungkan yang mencukupi untuk mengganti aset yang diasuransikan dan menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Asuransi MultiArthaGuna Tbk., tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

23. Manajemen Risiko, Kepatuhan Dan Pengendalian Intern

Berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bank Panin Tbk., No. 008/DIR/JAP/SJ/08 tanggal 24 Desember 2008 menunjuk Herbert J.S. Sibuea sebagai ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dalam Perseroan dan bertugas untuk memastikan bahwa proses-proses terkait pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan memadai dan berfungsi secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan disusun untuk menegaskan visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, ketidakberpihakan dan kode etik dari Audit Intern. SKAI mendukung operasional untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pendekatan yang sistematis dan disiplin termasuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Perseroan memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

24. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan, yaitu PT Bank ANZ Indonesia, PT Panin Financial Tbk., ANZ National Bank Ltd., PT Paninvest Tbk., PT Panin Dai-Ichi Life Tbk., PT Clipan Finance Indonesia Tbk., PT Panin Sekuritas Tbk., PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk., PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., (PT Bank Panin Syariah Tbk.), PT Amana Jaya, PT Terminal Builders dan Dana Pensiun Karyawan Panin Bank.

Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Tunjangan untuk kelompok manajemen kunci
2. Dana Pensiun, dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan Panin Bank
3. Giro pada bank lain
4. Pemberian kredit
5. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi
6. Tagihan Derivatif
7. Penempatan dana dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan
8. Sewa menyewa ruangan kantor
9. *Operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi) kendaraan bermotor dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk
10. Kerjasama penyaluran pembiayaan (*chanelling*) dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk., dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
11. Asuransi atas aset tetap Perseroan dan anak perusahaan, "*Cash-In-Transit*" dan "*Cash-In-Safe*", asuransi *cash in safety box*, asuransi dana pada mesin-mesin ATM, asuransi kendaran bermotor, asuransi *property all risks* terhadap bangunan-bangunan, mesin-mesin ATM dan inventaris kantor.

Jumlah giro pada bank lain, kredit, dan penyertaan dari pihak berafiliasi bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Pihak Berelasi	Hubungan dengan Bank	Nilai (Rp juta)
Giro pada Bank Lain	ANZ National Bank, Ltd., Melbourne	Pemegang Saham	198.052
	ANZ National Bank, Ltd., Wellington	Pemegang Saham	23.059
Kredit	Entitas Anak	Entitas Anak	1.204.372
	Hubungan Keuangan	Hubungan Keuangan	720.064
	Keluarga Pengendali Bank	Keluarga Pengendali Bank	242.148
	Penjaminan	Penjaminan	205.697
	Pengurus Bank sebagai Pengendali	Pengurus Bank sebagai Pengendali	146.133
	Pengurus Bank	Pengurus Bank	30.648
	Entitas Asosiasi	Entitas Asosiasi	5.089
	Keluarga Pengurus Bank	Keluarga Pengurus Bank	3.661
	Pengurus Grup Perusahaan	Pengurus Grup Perusahaan	1.712
	Bank Bertindak sebagai Pengendali	Bank Bertindak sebagai Pengendali	38
	Pengendali Bank sebagai Pengendali	Pengendali Bank sebagai Pengendali	6



Jenis Transaksi	Pihak Berelasi	Hubungan dengan Bank	Nilai (Rp juta)
Penyertaan	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Entitas Anak	708.361
	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Entitas Anak	2.605.822
	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Entitas Asosiasi	154.712
	PT Panin Sekuritas Tbk	Entitas Asosiasi	26.560
	PT Bank ANZ Indonesia	Pengendali Bank sebagai Pengendali	16.500

Persentase giro pada bank lain, kredit, dan aset lain-lain dari pihak berafiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro pada Bank Lain	0,099	0,066
Kredit	0,608	0,624
Aset lain-lain	0,003	0,003
Jumlah	0,710	0,693

Persentase simpanan, surat berharga diterbitkan, obligasi subordinasi, setoran jaminan dan pendapatan diterima dimuka dari pihak berafiliasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Simpanan	0,935	0,940
Surat Berharga Diterbitkan	0,000	0,032
Obligasi Subordinasi	0,012	0,056
Setoran Jaminan	0,000	0,000
Pendapatan diterima dimuka	0,078	0,091
Jumlah	1,025	1,119

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, diberlakukan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga dan sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi dengan pihak afiliasi telah diselesaikan dengan wajar. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, diberlakukan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Perseroan telah mengungkapkan semua transaksi dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut di atas tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dan tidak terdapat transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan selama 2 tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.

25. Kegiatan Penyertaan

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 31 Desember 2023:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan
Entitas anak					
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Syariah	2008	2009	67,3	7,13%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	1982	1982	51,49	13,38%



Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan
Perusahaan Penyertaan					
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	2003	1993	25,06	-
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	2001	1980	7,76	-
PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi	1989	1989	29	-
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan	1990	1973	1	-

Penyertaan PT FAC Sekuritas Indonesia sebesar Rp750,15 juta dan PT Sarana Kal-Sel Ventura sebesar Rp193,07 juta, kurang dari Rp1 miliar, maka tidak terdapat PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Sarana Kal-Sel Ventura dalam tabel. Adapun tindakan penyertaan Perseroan pada masing-masing telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Perusahaan Penyertaan tidak memberikan kontribusi lebih dari 10% (sepuluh persen) baik dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak.

Kontribusi pendapatan untuk Perusahaan Penyertaan kurang dari 1% terhadap pendapatan Perseroan.

26. Pemasaran

Perseroan terus melakukan perbaikan pada seluruh proses operasional bisnis seraya tetap berfokus pada strategi pemasaran produk-produk unggulan. Strategi pemasaran untuk perkreditan difokuskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*).

Strategi yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan ekspansi kredit melalui *community financing* khususnya komunitas para pengusaha guna membangun relasi dan memperluas basis debitur.
- Menggunakan aplikasi Mobile e-SAR, CMS (*Mobile Collection*) dan e-KAR (Mobile Inisiasi Kredit) untuk meningkatkan produktivitas tim sales.
- Menjalankan Program Subsidi Bunga Developer dan Program Sponsorship Developer.

Sementara, fokus strategi bidang pendanaan adalah terus memperkuat struktur *current account saving account (CASA)*. Sinergi antar unit bisnis dalam Bank Panin dan Kelompok Usaha Panin diharapkan mampu mengakselerasi upaya penguatan tersebut.

Strategi yang akan dilakukan antara lain:

- Memperkuat *brand awareness* produk-produk tabungan, terutama Panin Super Bonanza yang sudah menjadi *trademark* Perseroan. Panin Superbonanza diharapkan akan bisa memperkuat loyalitas nasabah *existing* dan menambah portofolionya, memperluas basis nasabah baru, serta memperkuat *brand awareness*. Produk seperti Panin Super Prize dan Simpanan Pelajar (Simpel) terus didorong untuk memperluas basis nasabah pemula.
- Melanjutkan program promosi *Member-get-Member (MGM)* yang cukup berhasil dalam mendorong *brand awareness* dan jumlah nasabah.
- Mengembangkan kapabilitas dan bisnis perbankan digital, termasuk meluncurkan aplikasi mobile omnichannel untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus nilai tabungan, terutama dari nasabah milenial.

Perseroan juga menerapkan strategi diferensiasi produk melalui *cross selling* dengan Entitas Anak dan Entitas Afiliasi, termasuk *cross selling* dengan produk-produk dari PT Panin Dai-Ichi Life, PT Panin Sekuritas Tbk., PT Clipan Finance Indonesia Tbk., PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk., dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.



27. Prospek dan Persaingan Usaha Dan Strategi Menghadapi Persaingan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy), didukung oleh pertumbuhan sebesar 5,04% pada Q4 2023. Adapun perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin bertumbuh, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5,20% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan stabilitas ekonomi dan politik yang relatif terjaga. Dalam satu dekade terakhir, di luar pandemi Covid-19, ekonomi tumbuh dikisaran 5%-6%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sekitar 3%. Perbaikan kinerja ekonomi secara umum berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Tidak hanya karena pertumbuhan merupakan elemen kunci dalam upaya menekan pengangguran, bank juga jadi memiliki banyak opsi sumber pendanaan untuk dikelola dan didiversifikasi ke dalam aktivitas *risk-taking* saat ekonomi *booming*.

Bisnis perbankan nasional masih sangat prospektif. Basis pasar yang besar, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang meningkat, serta ekonomi yang tumbuh positif di atas rata-rata global menjadi pendorongnya. Perseroan optimis kinerja bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan visi: Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019 dimana indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Inklusi keuangan ditargetkan dapat mencapai 90% pada tahun 2024. Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan.

Perseroan termasuk 10 bank nasional terbesar dalam lanskap industri perbankan nasional. Perseroan mengidentifikasi beberapa bank sebagai *peer* dengan pertimbangan kesamaan karakteristik, seperti ukuran, model bisnis, dan spesialisasi layanan. *Peer* yang dimaksud adalah CIMB Niaga, Permata, OCBC NISP, Danamon, BTPN, dan Maybank. Kinerja Perseroan relatif kompetitif dibanding *Peer*. Ditengah persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat, Perseroan berupaya untuk mempercepat penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan. Penerapan program otomasi proses bisnis terus dilakukan untuk mendukung perbankan digital. Perseroan menempatkan karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Karyawan merupakan pilar utama dalam menghadapi persaingan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif. Untuk itu, Perseroan memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Perseroan memperhatikan persaingan dalam industri keuangan yang sedang berlomba-lomba mendorong pertumbuhan bisnis yang sempat hilang atau tertahan di masa pandemi. Agar tidak kehilangan pangsa pasar, Perseroan terus melanjutkan fokusnya dalam mengembangkan beragam produk baru sambil terus memperkuat program tabungan yang sudah ada untuk menarik dana pihak ketiga. Selain penyaluran kredit ke sektor-sektor yang selama ini menjadi keahlian dan keunggulan, Perseroan juga berekspansi ke kredit untuk sektor-sektor strategis yang menjadi perhatian Pemerintah, seperti energi terbarukan, industri dengan pasokan bahan baku yang bertanggung jawab, dan infrastruktur dan berwawasan lingkungan lainnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pangsa total aset Panin Bank per Desember 2023 adalah sebesar 1,89%, pangsa kredit 1,83% dan pangsa DPK 1,60% dari perbankan umum. Posisi Perseroan di tengah persaingan industri perbankan juga dapat ditilik dari penilaian pihak eksternal terhadap kinerja secara keseluruhan. Pengakuan atas kinerja Perseroan secara keseluruhan terlihat dari penghargaan dari pihak eksternal yang diraih. Pada tahun 2023, Perseroan berhasil meraih penghargaan berikut:

1. Penghargaan Bank Umum Penyusun Resolution Plan Tahun 2022, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Juni 2023
2. Meraih ISO 27001; Certified Information Security Management, Badan Standardisasi Nasional, Juni 2023



3. The 2nd Best Website Conventional Bank, InfoBank Banking Service Excellence Award, Juni 2023
4. InfoBank Digital Brand Award, April 2023
 - The Best Saving Conventional Bank
 - The Best DebitCard Coventional Bank
 - The Best Deposito Conventional Bank
 - The 2nd Best Credit Card Conventional Bank
 - The 2nd Best Mortgage Loan Coventional Ban, dan
 - The 3rd Best Mobile Banking Conventional Bank
 - The 3rd Best Coventional Bank KBMI 3.
5. Straight Through Processing (STP) Award, Standard Chartered Bank, Maret 2023
6. Information Security Management System ISO 27001, CBQA Global Indonesia
7. Tempo IDNFinancials 52 untuk Kategori Main Index
8. Tempo IDNFinancials 52 untuk Kategori High Market Capitalization
9. Excellence Financial performance Bank in 2022, InfoBank
10. Bank Implementasi KEJAR Terbaik 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
11. The Best Operational Services, ATM Bersama Award
12. The Highest YoY Commercial Credit Card Volume Growth for Non Regional Bank, VISA International
13. The Best Consistent Bank In Mortgage Acquisition, Majalah Properti Indonesia
14. Top Dealer (Perusahaan dengan Pertumbuhan Tertinggi), Indonesia Stock Exchange SPPA Scaling Up Campaign 2023.

Lingkungan Hidup

Tidak terdapat investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.

Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Prospek usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan kredit yang berkualitas.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Penjualan dan pendapatan usaha Perseroan lebih dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam mengelola sumber-sumber pendanaan dan kredit dengan strategi penetapan harga (*pricing*) suku bunga yang kompetitif dan menguntungkan, dengan dukungan produk dan jasa yang berkualitas.

Masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak

Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, Hak Merek merupakan salah satu aset penting yang harus dijaga status hukumnya. Nama dan Logo Perseroan beserta produk-produknya telah didaftarkan pada Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana (i) Perseroan memiliki total pendaftaran hak merek mencapai 24 pendaftaran merek yang masing-masing berlaku sampai dengan tanggal antara lain 20 April 2030, 25 November 2030, 14 Juni 2031 dan 10 Mei 2033, (ii) CFI memiliki pendaftaran hak merek yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 dan (iii) BPS memiliki pendaftaran hak merek yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2032.



Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada para debitur sehingga, risiko khusus yang dihadapi oleh Perseroan adalah Risiko Kredit. Risiko kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya pencadangan (CKPN), yang akan menurunkan keuntungan Perseroan. Dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Persaingan Dalam Industri

Kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi oleh sektor perbankan di Indonesia saat ini terus mengalami perubahan yang relatif cepat. Kondisi tersebut telah menyebabkan persaingan menjadi semakin tajam. Namun demikian, dengan strategi yang tepat, masih terbuka peluang bank untuk mengembangkan usaha di masa datang. Pangsa total aset Panin Bank per Desember 2023 adalah sebesar 1,89%, pangsa kredit 1,83% dan pangsa DPK 1,60% dari perbankan umum (*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan*).

Saat ini, Panin Bank berada pada urutan bank terbesar ke-10 berdasarkan total aktiva dengan urutan sebagai berikut:

1. PT Bank Mandiri Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
3. PT Bank Central Asia Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk
5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6. PT Bank CIMB Niaga Tbk
7. PT Bank Permata Tbk
8. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
9. PT Bank OCBC NISP Tbk
10. PT Bank Pan Indonesia Tbk
11. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
12. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

(*Sumber: Bloomberg*)

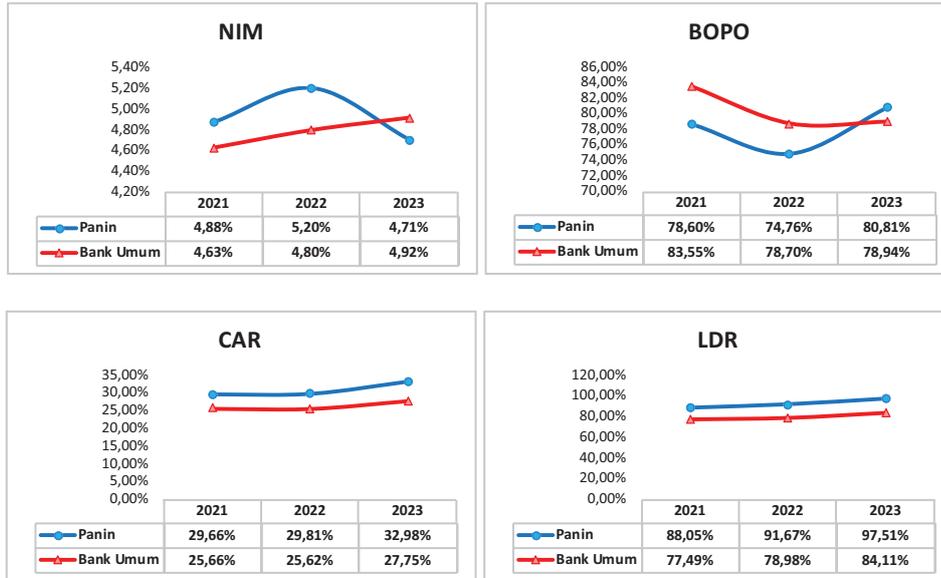
Ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah

Perseroan bergerak di bidang jasa perbankan, sehingga tidak memiliki kontrak industrial, komersial maupun pemasok. Kontrak keuangan dilakukan dengan banyak pelanggan/nasabah penyimpan (deposan) dan nasabah peminjam (debitur), sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu saja. Ketergantungan pada pemerintah dan/atau regulator terkait dengan pemberian ijin untuk mengeluarkan produk dan aktivitas baru selama ini dapat dipenuhi dengan baik.

Kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan

Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan, selain ANZ Banking Group sebagai pemegang saham Bank ANZ Indonesia dimana Perseroan juga memiliki penyertaan saham sebesar 1%.

Perbandingan Rasio-rasio Keuangan Utama Bank dan Industri





IX. PERPAJAKAN

1. Umum

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2022.

2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 14 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 27 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 32 Tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35 Tanggal 19 Juni 2024 (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”) dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 30 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35 Tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 39 tanggal 19 Juni 2024 (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi”), yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Presentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi			
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	20.000.000.000	40,00
2.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	60,00
TOTAL		50.000.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Presentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi			
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	20.000.000.000	40,00
2.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	60,00
TOTAL		50.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Nomor: IX.A.7”).

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Berdasarkan UUPM sebagaimana diubah pada UUP2SK, yang dimaksud dengan Afiliasi yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Pendekatan atau Metode Penentuan Harga Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu:

1. Kondisi pasar Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berkembang saat pelaksanaan *bookbuilding*;
2. Hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
3. *Benchmark* kepada obligasi pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri obligasi);
4. *Risk premium* (sesuai dengan rating dari obligasi dan Obligasi Subordinasi).



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Imelda & Rekan

Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte

The Plaza Office Tower Lt. 32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30
Jakarta 10350, Indonesia

- No. STTD : STTD.AP-38/PM.223/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama Fony Alimin
- No. Registrasi : AP.1687 atas nama Fony Alimin
Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
- Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- No. Surat Penunjukkan : 014/KOM/PDO/23
No. Surat Penunjukkan Audit : 003/KOM/PDO/24

Partner yang bertanggung jawab: Fony Alimin

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri lantai 22
International Banking & Financial Institution Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190, Indonesia

Tugas Pokok:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

No. Surat Penunjukkan : 119/DIR/EXT/2024, tanggal 29 Januari 2024

Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia

Tugas Pokok:

Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum (“Uji Tuntas”) yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Tumbuan & Partners dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-28/P.J.1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023 atas nama Jennifer B. Tumbuan

No. Surat Penunjukkan : 120/DIR/EXT/2024, tanggal 29 Januari 2024

Partner yang bertanggung jawab: Jennifer B. Tumbuan



Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.

Jl. Panglima Polim V No. 11 Jakarta Selatan

Tugas Pokok:

Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. antara lain Perjanjian Perwaliamanatan. Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta akta-akta pengubahannya.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H selaku Notaris Perseroan adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 23 Maret 2023.

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI)

No. Surat Penunjukkan : 118/DIR/EXT/24, tanggal 29 Januari 2024
Partner yang bertanggung jawab : Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H

Perusahaan : PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pemeringkat

Efek Equity Tower Lt. 30 Unit A, E, F dan G. SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan, Kebayoran Baru

Pedoman Kerja
POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok:

Melakukan analisa dan memberikan keputusan nilai pemeringkatan terhadap produk Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

- Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan.
- Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 5 April 2024 *unctis* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 31 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I 33 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29 tanggal 5 April 2024 Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 34 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang beralamatkan di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penerbitan dan penunjukan Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

1. Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan; dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan surat tanggal 5 Maret 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b POJK No. 20/2020.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

1. Riwayat Singkat

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu tujuh belas (24-08-2023) Nomor : 36, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 29-08-2023 (dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0166888.

2. Permodalan

Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 September 2023 sesuai Laporan Keuangan *Inhouse* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	250	0,0
Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi	4.152.658	1.038.164.500	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.662.514.008	4.665.628.502.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 13 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Nawal Nely
Komisaris	: Arief Budimanta
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	: Heru Kristiyana
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	: Zainudin Amali

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris
Direktur Commercial Banking	: Riduan
Direktur Treasury dan International Banking	: Eka Fitria
Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto
Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology	: Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo

4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.



Dalam Pengembangan Pasar Modal pada tahun 2019-2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

- i. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut:
 - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)
 - Perum Perumnas
 - PT Bank Bukopin Tbk
 - PT Bussan Auto Finance
 - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
 - PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
 - PT Bank Panin Tbk
 - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
 - PT Adhi Guna Putera
 - PT Bank UOB Indonesia
 - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
 - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
 - PT Indonesia Financial Group
 - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
 - PT PP Properti Tbk
- ii. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:
 - PT Reasuransi Indonesia Utama
 - PT Hotel Indonesia Property

3. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)
4. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2023, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.631 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza dan 1 Kantor Remittance Hong Kong.

6. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 5 April 2024 *junctis* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 31 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I 33 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29 tanggal 5 April 2024, *junctis* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 34 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 5 April 2024 *junctis* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I No. 31 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I 33 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29 tanggal 5 April 2024, *junctis* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 34 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

1. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
3. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
4. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
6. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
7. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
9. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020; atau
10. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	23.443.305	27.212.759
Giro pada Bank Indonesia	84.586.356	107.349.158
Giro pada bank lain	34.203.780	47.789.700
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	50.935.601	95.320.511
Efek-efek - neto	84.323.733	82.799.818
Obligasi Pemerintah	304.687.727	329.211.764



Uraian	30 September 2023	31 Desember 2022
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	24.925.415	32.188.559
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	10.978.398	11.705.989
Tagihan derivatif	2.795.658	2.252.141
Kredit	1.223.379.690	1.107.987.237
Piutang Pembiayaan Konsumen	28.894.131	23.147.366
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.274.809	5.733.387
Tagihan akseptasi	12.622.882	11.719.618
Penyertaan Saham	2.778.358	2.688.954
Biaya dibayar dimuka	3.566.043	1.895.503
Pajak dibayar dimuka	595.106	1.164.925
Aset Tetap	56.437.084	56.540.566
Aset Tidak berwujud	5.095.363	5.093.609
Aset lain-lain	36.143.896	28.697.644
Aset Pajak Tangguhan	11.271.811	12.045.479
JUMLAH ASET	2.006.939.146	1.992.544.687
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	6.966.178	4.056.029
Giro dan giro wadiah	486.106.956	519.077.962
Tabungan dan tabungan wadiah	491.798.201	480.482.766
Deposito Berjangka	275.921.392	296.015.201
Simpanan dari Bank Lain	5.080.864	5.734.401
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	28.949.747	29.710.227
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	25.593.367	24.325.475
Liabilitas Derivatif	2.193.957	2.126.769
Liabilitas Akseptasi	12.833.550	11.781.581
Efek-efek yang diterbitkan	51.725.081	45.774.139
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	1.233.808	2.073.429
Beban yang masih harus dibayar	4.656.445	6.493.794
Utang Pajak	2.142.812	3.590.522
Liabilitas Imbalan Kerja	10.545.867	12.607.759
Provisi	298.885	323.365
Liabilitas lain-lain	37.657.861	27.336.753
Pinjaman yang diterima	85.566.386	62.840.118
Pinjaman subordinasi	215.496	633.333
Total Liabilitas	1.539.736.586	1.544.096.631
Dana Syirkah Temporer		
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.643.264	17.643.264
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasuri)		-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(72.716)	(60.427)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(3.428.280)	(2.768.553)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(763)	(3.156)
Keuntungan revaluasi aset tetap	34.716.693	34.716.693
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.489.590	1.510.016
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(97.202)	(97.202)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	175.926.975	161.614.963
Kepentingan non pengendali	25.294.392	22.566.669
Jumlah Ekuitas	268.603.940	252.245.455
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	2.006.939.146	1.992.544.687



Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September 2023	30 September 2022	31 Desember 2022
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	98.008.135	81.258.804	112.382.118
Beban bunga dan beban syariah	(26.144.840)	(17.274.042)	(24.478.764)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	71.863.295	63.984.762	87.903.354
Pendapatan premi - neto	1.587.033	1.998.774	2.467.698
Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	73.450.328	65.983.536	90.371.052
Pendapatan operasional lainnya	27.256.553	23.826.873	34.280.703
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(9.895.748)	(12.048.805)	(16.096.382)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	822.984	487.732	255.268
Pembentukan penyisihan lainnya	(79.922)	(281.564)	(282.073)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link		3.015	-
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	99.942	850.666	899.579
Beban operasional lainnya	(38.452.605)	(36.650.566)	(53.260.058)
Laba operasional	53.201.532	42.170.887	56.168.089
Pendapatan (beban) non operasional - neto	10.260	22.190	209.637
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan Nonpengendali	53.211.792	42.193.077	56.377.726
Beban pajak – neto	(10.440.791)	(8.728.163)	(11.425.358)
Laba tahun berjalan	42.771.001	33.464.914	44.952.368

Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Financial Institutions Banking Group
 Plaza Mandiri Lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190. Indonesia
 Telp. (021) 5268216, 5245161
 Faks. (021) 5268201
 Situs Internet: www.bankmandiri.co.id
 Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id



XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 Juli 2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPOS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPOS dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPOS (R-3) berakhirnya RUPO dan/atau RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO dan FPPOS diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO dan FPPOS tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada para Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan FPPOS tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan FPPOS, wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan FPPOS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO dan FPPOS.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum pada tanggal 1 - 2 Juli 2024, pada hari dan jam kerja (09.00 - 16.00 WIB).

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO dan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus, FPPO dan FPPOS.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPOS yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah 3 Juli 2024.



Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimana pemesan memperoleh Prospektus, FPPO dan FPPOS.

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2024 pada pukul 13.00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening dibawah ini:

Obligasi

Nama Bank	: PT Bank Panin Tbk	Nama Bank	: PT Bank Panin Tbk
No. Rekening	: 1005006772	No. Rekening	: 1005007034
Cabang	: Senayan	Cabang	: Senayan
Atas Nama	: PT Evergreen Sekuritas Indonesia	Atas Nama	: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Obligasi Subordinasi

Nama Bank	: PT Bank Panin Tbk	Nama Bank	: PT Bank Panin Tbk
No. Rekening	: 1005006772	No. Rekening	: 1005007034
Cabang	: Senayan	Cabang	: Senayan
Atas Nama	: PT Evergreen Sekuritas Indonesia	Atas Nama	: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2024 pada pukul 13.00 WIB (*in good fund*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Distribusi yaitu tanggal 5 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- 1) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- 2) Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam 1) a. i., maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam 1) a. i., maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;



- iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir iii kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu tanggal 1 - 2 Juli 2024 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut ini:

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Menara Tekno
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telp.: (021) 3970 5868
(021) 3970 5858
Faks. : (021) 3970 5850
www.aldiracita.com

PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA

Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp: (021) 5739510
Fax: (021) 5739508
www.evergreensekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 136/T&P/VI/24

Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada:

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

u.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon**

2. **PT Bank Pan Indonesia Tbk**
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270

u.p. : **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV
"Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024" dan "Obligasi
Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024"**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan ("**UUPM**"), **PT Bank Pan Indonesia Tbk** disingkat **PT Bank Panin Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV kepada masyarakat dengan nama:

- "Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin" dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok yang diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024**"); dan
 2. Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.
- "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin" dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun

- dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok yang diterbitkan dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut "**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024**"); dan
2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.

(selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 secara bersama-sama disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I**").

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("**POJK No. 11/2016**") dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan IV ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 04/KOM/EXT/24 tertanggal 26 Februari 2024.

Adapun Penawaran Umum Berkelanjutan IV ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 No. S-60/PB.31/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV PT Bank Panin Tbk melalui Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No. S-03217/BEI.PP1/04-2024 tanggal 2 April 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN).

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Dana hasil Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/2016.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**");
2. memperoleh persetujuan dari RUPO; dan
3. serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") dengan peringkat "**idAA**" (*Double A*) sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 yang ditujukan kepada Perseroan.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PEFINDO dengan peringkat "**idA+**" (*Single A Plus*) sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-174/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 yang ditujukan kepada Perseroan.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; dan (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; dan (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku para Penjamin Emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 14** tanggal 8 Maret 2024 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 27** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 32** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; dan (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia; selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; dan (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia; selaku para

Penjamin Emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 17** tanggal 8 Maret 2024 *unctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 30** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 35** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 39** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13** tanggal 8 Maret 2024 *unctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 31** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 33** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**") dan **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16** tanggal 8 Maret 2024 *unctis* **Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 34** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 37** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 180/DIR/EXT/24 tanggal 2 Februari 2024. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV ini adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan dan Entitas Anak (yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih), yaitu terdiri dari:

- (i). PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**CFI**"); dan
- (ii). PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("**BPS**");

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Entitas Anak**”) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM (“**Pendapat Hukum**”).

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 27 Juni 2024 (“**LPSH**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 133/T&P/VI/24 tanggal 21 Juni 2024. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 133/T&P/VI/24 tanggal 21 Juni 2024 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami.
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;

5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I yakni sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972.
2. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 81 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusannya No. AHU-78480.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4246, Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 2009 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei

2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27887, Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2019.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31459, Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 22/2021**").

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk: (i) UUPT; (ii) Peraturan No. IX.J.1; (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun belum disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**").

Redaksional kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum sesuai dengan Peraturan KBLI 2020, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Elektronik tanggal 5 Juni 2024, Perseroan menyatakan akan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020 paling lambat pada RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2025. Lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai konsekuensi maupun sanksi yang akan timbul dan/atau akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha pada anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Hendrawan Danusaputra (Direktur)	6.510.000	651.000.000	0,03
4. Masyarakat < 5%	3.639.171.561	363.617.156.100	15,09
5. Perseroan (saham tresuri)	6.100.000	610.000.000	0,02
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	-

Kepemilikan saham PT Panin Financial Tbk dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 40%, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**"). Namun demikian sejak POJK No. 56/2016 berlaku:

- a. Perseroan tidak pernah mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; dan
- b. PT Panin Financial Tbk tidak pernah melakukan penjualan saham yang dimiliki.

oleh karenanya PT Panin Financial Tbk tidak diwajibkan untuk menyesuaikan kepemilikan saham dalam Perseroan dan tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Perseroan telah menetapkan Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**") dan PSP yang ditetapkan telah memenuhi kriteria penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yaitu PT Panin Financial Tbk dan Votraint 1103 Pty. Ltd. selaku PSP dengan *Ultimate Shareholders* adalah Mu'min Ali Gunawan dan Australia and New Zealand Banking Group Limited berdasarkan Surat No. SR-233/PB.12/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan *Ultimate Shareholder* Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 7 September 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian

Data, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Mu'min Ali Gunawan.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nelson Tampubolon
Wakil Presiden Komisaris/ Independen	: Lintang Nugroho
Komisaris	: Chandra Rahadja Gunawan
Komisaris	: Johnny
Komisaris	: Gregory James Terry
Komisaris Independen	: Drs. H. Riyanto

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Januar Hadi
Direktur	: Haryono Wongsonegoro
Direktur	: Suwito Tjokrorahadjo
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 69 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0215142 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* SABH dan telah memenuhi syarat uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK untuk dapat diangkat sebagai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK No. 17/2023**”).

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”).

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”). Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/3014**”). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada instansi yang berwenang, antara lain menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Rencana Bisnis Bank, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan Laporan Tahunan periode 2023.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, Perseroan telah membayar iuran/premi penjaminan simpanan.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha Usaha serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah

mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di tempat dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan: (i) tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLK**"); dan (iii) telah memiliki Peraturan perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dimana tenaga kerja asing tersebut telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin tersebut masih berlaku. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan jabatan, pengangkatan Tenaga Kerja Asing serta telah mencantumkan penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan berupa penyertaan saham dalam Entitas Anak dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Saran Kalsel Ventura, hak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk menjalankan haknya atas aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali untuk hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 203 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Maret 2024 dan belum dilakukan perpanjangan masa berlaku dikarenakan saat ini Perseroan sedang mencari informasi mengenai notaris pengganti yang menerima mandat dari notaris yang sebelumnya ditunjuk namun telah pensiun guna melacak dokumen SHGB No. 203 sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 170/GA/EXT/24 tanggal 25 Juni 2024 yang ditujukan kepada Ikatan Notaris Indonesia dan melakukan proses permohonan perpanjangan masa berlaku SHGB tersebut.
 - b. SHGB No. 208 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 26 September 2021 dan sedang dalam proses permohonan perpanjangan masa berlaku dengan status sedang dalam tahap pengukuran dan pemetaan kadastral oleh Badan Kantor Pertanahan Kota Batam sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan 38765/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No. 18/2021**") dinyatakan bahwa permohonan pembaharuan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan permohonan perpanjangan atas SHGB No. 203 dalam jangka waktu tersebut, maka SHGB No. 203 berpotensi berubah statusnya menjadi Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 huruf (g)

PP No. 18/2021. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh perpanjangan jangka waktu atas nama Perseroan dan/atau memperoleh hak baru atas tanah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga menguasai sebidang tanah dan bangunan berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan akta jual beli tersebut kewajiban Perseroan telah dipenuhi (dibayar lunas). Hak kepemilikan Perseroan atas tanah-tanah tersebut baru dapat dibuktikan setelah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Perseroan sebagai bentuk dari pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dirubah sebagian dengan PP No. 18/2021.

Mengingat tanah dan bangunan tersebut belum terdaftar atas nama Perseroan, maka jika pemilik/penguasa hak-hak atas tanah ("**Penjual**") dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, hak atas tanah dan bangunan yang sudah diikat dengan akta pengikatan jual beli, sekalipun sudah dibayar lunas oleh Perseroan selaku pembeli, demi hukum akan termasuk dalam harta pailit Penjual. Oleh karenanya, Perseroan dapat kehilangan haknya untuk memperoleh atau menggunakan tanah dan bangunan tersebut (*vide* Pasal 21 *junctis* Pasal 24 dan 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material berupa bangunan serta kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan.

11. Sampai dengan Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) (AYDA). Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun Perseroan telah berupaya untuk melakukan penyelesaian atas AYDA melalui penjualan sebagaimana termaktub pada Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, dimana nilai penjualan tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum *juncto* Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2016 dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum Perseroan ditetapkan paling rendah 9% s/d <10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Perseroan per Desember 2023, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 33,41% dari ATMR.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) periode Desember 2023, hasil peringkat *Good Corporate Governance* sebesar 1,75, Profil Risiko 2,06, Rentabilitas 2,22 dan Permodalan sebesar 1,48 yang menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar 1,86.
15. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat berpotensi menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau merugikan hak pemegang obligasi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan tidak mempunyai kewajiban yang sekiranya dapat membatasi Perseroan dalam melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali perkara:
 - i. Perkara No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brj pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Tuty Surjawijaya sebagai

- Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I dan KPKNL sebagai Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
- ii. Perkara No. 355/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brnt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi objek lelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta No. 8/Pen.Eks.RL/2024 *aanmaning* pengosongan objek lelang yang sudah terjual antara Tuty Surjawijaya sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I, KPKNL sebagai Tergugat II, dan Arif Suhardinaman R. selaku pembeli lelang sebagai Tergugat II, yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
 - iii. Perkara No. 925/PDT.G /2023/PN Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Unipro Konstruksi selaku Penggugat, Chan Peter Ho Kwan sebagai Tergugat I, Perseroan cq Kantor Cabang Pembantu Subroto sebagai Tergugat II dan PT Global Buana Premium sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
 - iv. Perkara No. 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Andre Wirantana sebagai Penggugat, KPKNL Jakarta V sebagai Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
 - v. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 567/PDT/2023/PT SBY perihal gugatan wanprestasi antara Djoko Lendiarto sebagai Pembanding, Perseroan KCU Surabaya Coklat sebagai Terbanding, KPKNL Kota Surabaya II sebagai Turut Terbanding II dan Notaris Felicia Imantaka sebagai Turut Terbanding III yang hingga tanggal Surat pernyataan ini sedang dalam proses kasasi;
 - vi. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 88/Pdt.G/2023/PN Bdg perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Perry Utama Saputra dan Eddy Saputra sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I, KPKNL Kota Bandung sebagai Tergugat II dan Kantor Agraria dan Pertanahan sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses banding;
 - vii. Perkara No. 500/Pdt.G/2023/PN Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Berkat Jaya Baru sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I, Okto Rianto Hostiadi sebagai Tergugat II, KPKNL Bandung sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Agraria dan Tata Ruang sebagai Turut Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
 - viii. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 359/Pdt/2022/PT MDN perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Jusuf Halim Yati sebagai Pembanding, Perseroan Kantor Cabang Medan sebagai Terbanding I, KPKNL sebagai Terbanding II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses kasasi;
 - ix. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 281/Pdt.G/2022/PN Pbr *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 66/Pdt.G/2023/PT Pbr perihal perbuatan melawan hukum antara Edy Suprianto sebagai Pembanding I, Susi Sri Ayu Nainggolan sebagai Pembanding II, Perseroan Cabang Pekanbaru sebagai Terbanding I dan Agusti Notaris/PPAT sebagai Terbanding II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses kasasi; dan
 - x. Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 588/PDT/2020/PT.SBY, Putusan Mahkamah

Agung No. 2648 K/PDT/2021 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1220/PK/PDT/2022 perihal gugatan melawan hukum antara Perseroan sebagai Tergugat I, Perseroan KC Kediri sebagai Tergugat II, Bambang Suprihadi sebagai Tergugat III, Eka Marifatul Auliani sebagai Tergugat IV, Sony Sandra sebagai Penggugat, Sri Mulyati sebagai Turut Tergugat I, Thomas Hady Soewito sebagai Turut Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam permohonan sita eksekusi oleh Penggugat dan sehubungan dengan Aanmaning tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bantahan yang didaftarkan di bawah Perkara No. 83/Pdt.Bth/2023/PN Kdr pada Pengadilan Negeri Kediri.

Perkara-perkara tersebut di atas telah mencapai batas penetapan nilai batas materialitas berdasarkan Surat Direksi No. 036/DIR/SBD/18 tanggal 7 Juni 2018 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,-, namun demikian perkara-perkara tersebut tidak memiliki dampak atau pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024;

- b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. Perkara No. 001601.25/2021/PP sehubungan dengan sengketa Pajak SKPKB PPh 4 (2) Tahun 2017, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak Jakarta;
- b. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan.

Namun demikian Perseroan berkeyakinan bahwa perkara tersebut di atas tidak akan berdampak pada kegiatan operasional Perseroan.

17. Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

18. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/2016 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa Atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap ("**SEOJK No. 20/2016**") dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dalam hal Perseroan berada dalam peristiwa terganggu kelangsungan usahanya Perseroan memilih untuk melakukan *write down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK No. 20/2016.

Sepanjang Perseroan telah mengungkapkan spesifikasi mengenai Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 termasuk mengenai klausula *write down* dan risiko yang dihadapi oleh investor pembeli obligasi subordinasi tersebut pada Prospektus yang akan diterbitkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, investor pembeli Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dianggap telah mengetahui dan menerima risiko sebagaimana dimaksud. Adapun, klausula mengenai mekanisme *write down* tersebut dapat dilaksanakan apabila terjadi kondisi yang menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait.

19. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 ini, Perseroan telah menandatangani:
- a. **Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Panin No. 12** tanggal 8 Maret 2024 *unctis Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 25* tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 30** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 32** tanggal 19 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. **Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 15** tanggal 8 Maret 2024 *unctis Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 28* tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 33** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin No. 36** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

- d. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
- e. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
- f. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi;
- g. **Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 10** tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran;
- h. **Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 11** tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran;
- i. **Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-008/OBL/KSEI/0224** tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini; dan
- j. **Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI No. SP-011/OBL/KSEI/0224** tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak (i) mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Wali Amanat, Penjamin Emisi Obligasi serta PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

- 20. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I.
- 21. Selain persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia serta pencatatan dalam administrasi pengawasan OJK (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1), tidak terdapat persetujuan dan/atau perizinan dari dan/atau kewajiban pemberitahuan kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I.
- 22. Aspek hukum Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum Mengenai Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar terakhir dari masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

CFI

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 43 tanggal 22 Juli 2023 belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

BPS

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 70 tanggal 20 Juli 2021 belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPU, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Anggaran dasar Entitas Anak sebagai suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPU; (ii) Peraturan No. IX.J.1, (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020.

2. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali CFI yang belum melakukan penyesuaian redaksional kegiatan usaha dengan Peraturan KBLI 2020 pada anggaran dasar CFI, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Elektronik tanggal 5 Juni 2024, CFI menyatakan akan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020 paling lambat pada RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2025.

Lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha dengan Peraturan KBLI 2020.

3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Kepemilikan saham Perseroan dalam BPS sebesar 67,30% telah melebihi batas maksimum sebesar 40% namun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Perseroan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham karena telah memenuhi skema konsolidasi Bank sebagaimana dibuktikan dengan Surat OJK No. S-83/PB.33/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Panin Tbk.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali untuk pengangkatan Dewan Komisaris CFI yang belum dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham dan Murwanto selaku anggota Dewan Komisaris CFI yang belum memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari OJK.

Masing-masing anggota Direksi dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (**"POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan"**).

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014 dan POJK No. 55/2015, kecuali untuk masa jabatan Komite Audit CFI yang

telah habis masa berlakunya dan belum dilakukan pengangkatan ulang untuk anggota Komite Audit CFI.

Entitas Anak telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin material tersebut masih berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laport Tenaga Kerja) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UUWLK dan masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang berwenang.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Entitas Anak berupa (i) hak atas tanah dan bangunan; dan (ii) hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya adalah benar terdaftar atas nama Entitas Anak dan karenanya memberi hak kepada Entitas Anak sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, aset/harta kekayaan material Entitas Anak baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Entitas Anak tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material Entitas Anak tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Entitas Anak.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum BPS ditetapkan paling rendah 9% s.d.<10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Semester II – 2023, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 20,93% dari ATMR.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank yang telah dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Surat BPS No. 013/DIR/EXT-OJK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Semester II 2023, dimana hasil peringkat Profil Risiko sebesar Peringkat 2, *Good Corporate Governance* sebesar Peringkat 2, Rentabilitas sebesar Peringkat 2, dan Permodalan sebesar Peringkat 2, sehingga menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar Peringkat Komposit 2.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah: (i) terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan pembiayaan yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("**POJK No. 47/2020**"); dan (ii) bekerja sama dengan PT Rapi Utama Indonesia selaku perusahaan yang mengelola sistem registrasi aset sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 POJK No. 47/2020.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah memenuhi ketentuan mengenai *gearing ratio* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**"), dimana berdasarkan Pasal 79 POJK No. 35/2018, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali. Berdasarkan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 PT Clipan Finance Indonesia Tbk, *gearing ratio* CFI pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 0,73.
13. Perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material Entitas Anak dengan pihak lain tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak dan didukung dengan surat pernyataan dari

Entitas Anak, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Entitas Anak dengan pihak lain yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana masing-masing Entitas Anak merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian masing-masing Entitas Anak terhadap pihak manapun.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan OJK.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner



Halaman ini sengaja dikosongkan

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN
ENTITAS ANAK**

Halaman ini sengaja dikosongkan

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	Notes to Consolidated Financial Statements



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
PT BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022
PT BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama/ Name
Alamat kantor/Office address | : | Herwidayatmo
Bank Panin Pusat
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position | : | Jakarta
(021) 2700545
Presiden Direktur/President Director |
| 2. | Nama/Name
Alamat kantor/Office address | : | Hendrawan Danusaputra
Bank Panin Pusat
Jl. Jend. Sudirman - Senayan
Jakarta 10270 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/ Position | : | Jakarta
(021) 2700545
Wakil Presiden Direktur/Deputy President Director |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements; |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. | a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;

b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4. | Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank. | 4. | We are responsible for the Bank's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

AX Jakarta, 28 Mei / May 28, 2024 LC

Presiden Direktur/President Director

Wakil Presiden Direktur/Deputy President Director

Herwidayatmo
Herwidayatmo



Hendrawan Danusaputra
Hendrawan Danusaputra

Laporan Auditor Independen

No. 00413/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

No. 00413/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/V/2024

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of P.T. Bank Pan Indonesia Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023 and 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") - perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit dan piutang pembiayaan (piutang sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang, piutang pembiayaan konsumen, piutang jual dan sewa-balik)

Mengacu pada Catatan 3f Informasi Kebijakan Akuntansi Material – Instrumen Keuangan; Catatan 4 Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian; Catatan 12 Kredit; Catatan 13 Piutang Sewa Pembiayaan; Catatan 13 Tagihan Anjak Piutang; Catatan 14 Piutang Pembiayaan Konsumen; Catatan 15 Piutang Jual dan Sewa-Balik; dan Catatan 57 Manajemen Risiko – Manajemen Risiko Kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat kredit, piutang sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang, piutang pembiayaan konsumen, dan piutang jual dan sewa-balik masing-masing sebesar Rp 139.701.141 juta, Rp 529.433 juta, Rp 75.000 juta, Rp 8.614.493 juta, dan Rp 93.334 juta, dan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap kredit, piutang sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang, piutang pembiayaan konsumen, dan piutang jual dan sewa-balik masing-masing sebesar Rp 8.202.868 juta, Rp 953 juta, Rp 30.951 juta, Rp 185.488 juta, dan Rp 60.186 juta. Grup menerapkan persyaratan PSAK 71 Instrumen Keuangan untuk menghitung KKE atas kredit dan piutang pembiayaan kecuali pembiayaan dan piutang syariah.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Expected Credit Losses ("ECL") – computation of allowance for impairment losses on loans and financing receivables (finance lease receivables, factoring receivables, consumer financing receivables, sale and lease-back receivables)

Refer to Note 3f Material Accounting Policy Information – Financial Instruments; Note 4 Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty; Note 12 Loans; Note 13 Finance Lease Receivables; Note 13 Factoring Receivables; Note 14 Consumer Financing Receivables; Note 15 Sales and Lease-back Receivables; and Note 57 Risk Management – Credit Risk Management.

As at December 31, 2023, the Group recorded loans, finance lease receivables, factoring receivables, consumer financing receivables, and sales and lease-back receivables amounting to Rp 139,701,141 million, Rp 529,433 million, Rp 75,000 million, Rp 8,614,493 million, and Rp 93,334 million, respectively, and allowance for impairment losses against these loans, finance lease receivables, factoring receivables, consumer financing receivables, and sale and lease-back receivables amounting to Rp 8,202,868 million, Rp 953 million, Rp 30,951 million, Rp 185,488 million, and Rp 60,186 million, respectively. The Group applies PSAK 71 Financial Instruments requirements to calculate ECL for loans and finance receivables except for sharia financing and receivables.

Imelda & Rekan

Kami fokus pada area ini karena signifikansi nilai tercatat atas kredit dan piutang pembiayaan, yang mewakili 63% dari jumlah aset Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan saldo KKE terkait yang dibentuk, khususnya pertimbangan subjektif yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan kebutuhan untuk, dan mengestimasi tingkat cadangan KKE terhadap kredit dan piutang pembiayaan.

Grup menghitung KKE untuk kredit dan piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai. Untuk kredit dan piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Grup menilai KKE secara kolektif. Untuk kredit dan piutang pembiayaan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Grup menilai KKE secara individual.

a. KKE atas kredit dan piutang pembiayaan yang dinilai secara kolektif

Dalam menentukan KKE, Grup menggunakan metodologi permodelan dan menggunakan berbagai asumsi dan penilaian dalam menentukan model. Hal ini meliputi:

- identifikasi faktor peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR"), seperti faktor internal dan eksternal yang memengaruhi portfolio kredit;
- penentuan dan/atau validasi estimasi arus kas masa depan dan pembobotan probabilitas tertimbang atas kemungkinan skenario yang teridentifikasi; dan
- asumsi-asumsi model.

b. KKE atas kredit dan piutang pembiayaan yang dinilai secara individual

Penilaian individual atas KKE melibatkan penentuan dan/atau validasi estimasi arus kas masa depan dan pembobotan probabilitas tertimbang atas kemungkinan skenario yang teridentifikasi.

Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, kami mengidentifikasi hal ini sebagai hal audit utama.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of loans and financing receivables, which represented 63% of the total assets of the Group as at December 31, 2023 and the related ECL provided, especially the subjective judgments used by management in determining the necessity for, and estimating the level of ECL allowance against the loans and financing receivables.

The Group calculates ECL for both non-impaired and impaired loans and financing receivables. For non-impaired and impaired loans and financing receivables, which are not considered individually significant, the Group assesses ECL on a collective basis. For impaired loans and financing receivables, which are considered individually significant, the Group assesses ECL on an individual basis.

a. ECL on collectively assessed loans and financing receivables

In determining the ECL, the Group utilizes modelling methodologies and the use of various assumptions and judgment in determining the model. These include:

- identification factors of significant increase in credit risk ("SICR"), such as internal and external factors affecting the loan receivables portfolios;
- determination and/or validation of estimated future cash flow and its probability weightings across the identified possible scenarios; and
- the model assumptions.

b. ECL on individually assessed loans and financing receivables

Individual assessment of ECL includes determination and/or validation of estimated future cash flow and its probability weightings across the identified possible scenarios.

In view of these factors, we identified this as a key audit matter.

Imelda & Rekan

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

a. KKE atas kredit dan piutang pembiayaan yang dinilai secara kolektif

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan audit kami dan menilai desain dan penerapan pengendalian yang relevan atas KKE atas kredit dan piutang pembiayaan, yang meliputi:

- Identifikasi SICR, kriteria default atau penurunan nilai kredit;
- Penelaahan dan persetujuan informasi masa depan yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian atas keandalan dan akurasi dari elemen data kritis yang digunakan dalam model KKE;
- Penelaahan dan persetujuan perhitungan dan hasil KKE, termasuk penyesuaian pasca model yang diterapkan; dan
- Pengendalian umum dari Teknologi Informasi ("IT") atas sistem perhitungan KKE serta pengendalian aplikasi IT atas kelengkapan dan keakuratan aliran data dari sistem asal ke sistem KKE, dengan melibatkan spesialis IT kami.

Kami melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur berikut ini dengan dasar sampel:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Grup atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;
- Menguji pendekatan Grup dalam pemilihan model skenario ekonomi untuk menilai kewajaran atas skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas yang diterapkan oleh Grup;
- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh Manajemen pada model dan *parameter probabilities of default* (PD) dan *loss given default* (LGD);
- Menilai penerapan penyesuaian pasca model terhadap *bucket* dan *stage*; dan
- Validasi secara independen atas KKE model dan evaluasi hasil validasi model oleh Manajemen.

How our audit addressed the key audit matter

a. ECL on collectively assessed loans and financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of such relevant controls over the ECL on loans and financing receivables, which include:

- Identification of SICR, default criteria, or credit impaired;
- Assessment and approval of forward-looking information used in the ECL models;
- Assessment of the reliability and accuracy of critical data elements in the ECL models;
- Assessment and approval of the ECL calculation and results, including post model adjustments applied; and
- General information technology ("IT") controls over the ECL system as well as IT application controls over the completeness and accuracy of data flows from source systems to the ECL system, by involving our IT specialists.

We involved our internal specialist to assist us in performing the following procedures on a sampling basis:

- Evaluated the appropriateness of the Group's assessment of its SICR criteria;
- Challenged the Group's approach for the selection of economic scenario to assess the reasonableness of the economic scenarios and corresponding probability weighted applied by the Group;
- Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;
- Assessed the implementation post model adjustments on the bucket and stage; and
- Independently validate the ECL models and assessed model validation results by management.

Imelda & Rekan

Kami juga melakukan pengujian secara substantif secara sampel:

- Mengevaluasi input dan asumsi relevan yang digunakan oleh Grup dalam model KKE;
- Menelaah kesesuaian identifikasi manajemen atas kredit dan piutang pembiayaan yang mengalami peningkatan signifikan risiko kredit, gagal bayar, dan penurunan nilai dengan mempertimbangkan informasi keuangan dan non-keuangan debitur, bukti eksternal yang relevan, dan faktor lainnya; dan
- Menghitung ulang KKE secara independen.

b. KKE atas kredit dan piutang pembiayaan yang dinilai secara individual

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implementasi pengendalian yang relevan atas KKE atas kredit dan piutang pembiayaan, yang mencakup penelaahan dan persetujuan atas skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas yang digunakan.

Untuk sampel kami atas kredit dan piutang pembiayaan yang dinilai secara individual, kami melakukan prosedur berikut:

- menilai fakta latar belakang dan keadaan terkini sehubungan dengan nasabah;
- menguji asumsi utama yang digunakan manajemen atas perhitungan arus kas masa depan yang diharapkan dari nasabah, termasuk jumlah dan waktu pemulihan, dan membandingkan nilai agunan yang dapat direalisasikan dengan bukti-bukti eksternal, termasuk laporan penilaian independen, jika tersedia; dan
- melakukan verifikasi perhitungan KKE.

Kami telah menilai kesesuaian atas pengungkapan terkait yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

We also performed substantive testing on a sampling basis:

- Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Group in the ECL models;
- Assessed the appropriateness of management's identification of loans and financing receivables experiencing significant increases in credit risk, defaults, and credit impairment considering the debtors' financial and non-financial information, relevant external evidence, and other factors; and
- Independently recalculated the ECL.

b. ECL on individually assessed impaired loans and financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls over the ECL on loans and financing receivables, which include review and approval of the economic scenarios and the probability weightings used.

For our selected sample of loans and financing receivables that are individually assessed, we performed the following procedures:

- assessed the background facts and the latest circumstances in relation to the customer;
- challenged management's key assumptions applied on expected future cash flows of the customer, including amounts and timing of recoveries, and compared the realizable value of collaterals against externally derived evidence including independent valuation reports, where available; and
- verified the calculation of ECL.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the consolidated financial statements.

Imelda & Rekan

Hal-hal Lain

Kami sebelumnya telah mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen No. 00375/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti dijelaskan pada Catatan 61 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matters

We have previously audited and issued our independent auditor's report No. 00375/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/V/2024 dated May 8, 2024 on the consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2023 and 2022, with unmodified opinion.

In connection with the Public Offering of Continuous Bonds IV Bank Panin, the Group reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022 to conform with the disclosures required by the prevailing capital market regulations, as described in Note 61 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Public Offering Document of Continuous Bonds IV Bank Panin, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of this consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Groups' internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Imelda & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Groups' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group's audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Imelda & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

IMELDA & REKAN



Fanny Alimin

Izin Akuntan Publik/Public Accountant Licence No. AP. 1687

28 Mei 2024/May 28, 2024



00413

	2023	Catatan/ Notes	2022	
	Rp Juta/ Rp Million		Rp Juta/ Rp Million	
ASET				ASSETS
KAS	1.297.547	5	1.704.409	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	7.870.438	6	7.204.803	DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		7		DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS
Pihak berelasi	221.111	48	139.787	Related parties
Pihak ketiga	1.076.630		1.112.334	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35)		(50)	Allowance for impairment losses
Bersih	1.297.706		1.252.071	Net
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		8		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	6.038.336		7.192.136	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.688)		(1.633)	Allowance for impairment losses
Bersih	6.035.648		7.190.503	Net
EFEK-EFEK		9		SECURITIES
Pihak ketiga	39.010.673		33.398.471	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39)		(53)	Allowance for impairment losses
Bersih	39.010.634		33.398.418	Net
TAGIHAN DERIVATIF - PIHAK KETIGA	20.437	10	29.385	DERIVATIVE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		11		SECURITIES PURCHASED WITH AGREEMENTS TO RESELL
Pihak ketiga	4.827.120		10.642.145	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(329)		-	Allowance for impairment losses
Bersih	4.826.791		10.642.145	Net
KREDIT		12		LOANS
Pihak berelasi	1.350.018	48	1.325.517	Related parties
Pihak ketiga	138.351.123		128.552.782	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.202.868)		(6.608.717)	Allowance for impairment losses
Bersih	131.498.273		123.269.582	Net
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		13		FINANCE LEASE RECEIVABLES
Pihak ketiga	529.433		281.868	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(953)		(9.727)	Allowance for impairment losses
Bersih	528.480		272.141	Net
TAGIHAN ANJAK PIUTANG		13		FACTORING RECEIVABLES
Pihak ketiga	75.000		100.000	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30.951)		(49.580)	Allowance for impairment losses
Bersih	44.049		50.420	Net
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN		14		CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
Pihak ketiga	8.614.493		6.914.427	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(185.488)		(118.977)	Allowance for impairment losses
Bersih	8.429.005		6.795.450	Net
PIUTANG JUAL DAN SEWA BALIK		15		SALES AND LEASE-BACK RECEIVABLES
Pihak ketiga	93.334		78.778	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.186)		(23.591)	Allowance for impairment losses
Bersih	33.148		55.187	Net
TAGIHAN AKSEPTASI		16		ACCEPTANCES RECEIVABLE
Pihak ketiga	1.637.787		2.132.501	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.658)		(6.652)	Allowance for impairment losses
Bersih	1.630.129		2.125.849	Net
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM	766.401	17	791.410	INVESTMENT IN SHARES OF STOCK
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	114.353		124.361	PREPAID EXPENSE
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	10.002.144	18	10.176.936	PREMISES AND EQUIPMENT AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	747.872	44	609.846	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET TAKBERWUJUD	522.482	19	425.974	INTANGIBLE ASSETS
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	7.334.513	20,48	6.312.991	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET	<u>222.010.050</u>		<u>212.431.881</u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2023 Rp Juta/ Rp Million	Catatan/ Notes	2022 Rp Juta/ Rp Million	
<u>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</u>				<u>LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</u>
<u>LIABILITAS</u>				<u>LIABILITIES</u>
LIABILITAS SEGERA	186.926		169.964	LIABILITIES PAYABLE IMMEDIATELY
SIMPANAN		21		DEPOSITS
Pihak berelasi	1.477.929	48	1.520.921	Related parties
Pihak ketiga	133.611.552		131.162.554	Third parties
Jumlah	<u>135.089.481</u>		<u>132.683.475</u>	Total
SIMPANAN DARI BANK LAIN - PIHAK KETIGA	2.420.728	22	2.548.103	DEPOSITS FROM OTHER BANKS - THIRD PARTIES
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - PIHAK KETIGA	9.761.945	23	2.408.299	SECURITIES SOLD WITH AGREEMENTS TO REPURCHASE - THIRD PARTIES
LIABILITAS DERIVATIF - PIHAK KETIGA	16.432	10	29.561	DERIVATIVE PAYABLES - THIRD PARTIES
LIABILITAS AKSEPTASI - PIHAK KETIGA	1.641.363	16	2.137.042	ACCEPTANCES PAYABLE - THIRD PARTIES
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH	-	24,48	3.999.020	SECURITIES ISSUED - NET
PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA	2.803.373	25	2.144.195	BORROWINGS - THIRD PARTIES
UTANG PAJAK	221.735	26,44	222.169	TAXES PAYABLE
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	960.675	46	440.481	POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN	1.347.101	27,48	1.266.865	ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES
OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH	<u>3.699.276</u>	28,48	<u>3.795.470</u>	SUBORDINATED BONDS - NET
JUMLAH LIABILITAS	<u>158.149.035</u>		<u>151.844.644</u>	TOTAL LIABILITIES
<u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u>		29		<u>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</u>
BUKAN BANK	10.130.768		9.160.456	NON BANK
BANK	<u>417.762</u>		<u>710.687</u>	BANK
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>10.548.530</u>		<u>9.871.143</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
<u>EKUITAS</u>				<u>EQUITY</u>
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 100 per saham				CAPITAL STOCK - par value of Rp 100 per share
Modal dasar - 96.000.000.000 saham				Authorized - 96,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.087.645.998 saham	2.408.765	30	2.408.765	Subscribed and paid-up - 24,087,645,998 shares
SAHAM TREASURI	(610)	30	(610)	TREASURY STOCK
TAMBAHAN MODAL DISETOR	3.440.707	30	3.440.707	ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI	(269.072)	31	(269.072)	DIFFERENCE IN VALUE OF EQUITY TRANSACTION WITH NON-CONTROLLING INTEREST
PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN	7.373.975	33	7.621.379	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
SALDO LABA				RETAINED EARNINGS
Ditentukan penggunaannya	140.000		140.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	36.611.051		34.059.727	Unappropriated
Jumlah	<u>36.751.051</u>		<u>34.199.727</u>	Total
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	49.704.816		47.400.896	EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	<u>3.607.669</u>	32	<u>3.315.198</u>	NON-CONTROLLING INTEREST
JUMLAH EKUITAS	<u>53.312.485</u>		<u>50.716.094</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u><u>222.010.050</u></u>		<u><u>212.431.881</u></u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

	2023	Catatan/ Notes	2022	
	Rp Juta/ Rp Million		Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				OPERATING REVENUES (EXPENSES)
Pendapatan Bunga				Interest Revenues
Bunga yang diperoleh	14.136.964	35,48	13.367.323	Interest earned
Provisi dan komisi kredit	451.417		538.887	Loan commissions and fees
Jumlah Pendapatan Bunga	14.588.381		13.906.210	Total Interest Revenues
Beban Bunga	(5.381.905)	36,48	(3.957.460)	Interest Expense
Pendapatan Bunga - Bersih	9.206.476		9.948.750	Interest Revenues - Net
Pendapatan Operasional Lainnya				Other Operating Revenues
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	124.581		115.096	Gain on foreign exchange transactions - net
Keuntungan bersih penjualan efek	142.973	37	202.790	Net gain on sale of securities
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	150.059	38	137.302	Commissions and fees from transactions other than loans - net
Bagian laba bersih entitas asosiasi	53.149	17	87.579	Share in net income of associates
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	38.955		(142.850)	Changes in fair value of securities measured at fair value through profit or loss
Lainnya	2.066.572	39	1.595.654	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.576.289		1.995.571	Total Other Operating Revenues
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	(1.979.148)	41,48	(2.067.137)	General and administrative
Tenaga kerja	(2.435.356)	42	(2.274.770)	Personnel
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	(266.458)	46	(112.705)	Pension and employee benefits
Lainnya	(664.549)	43	(626.224)	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(5.345.511)		(5.080.836)	Total Other Operating Expenses
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(2.769.222)		(3.085.265)	Other Operating Expenses - Net
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan Nilai		40		Reversal of (Provision for) Impairment Losses
Aset keuangan	(2.769.587)		(2.819.053)	Financial assets
Aset non-keuangan	11.681		28.501	Non-financial assets
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(2.757.906)		(2.790.552)	Total Provision for Impairment Losses
LABA OPERASIONAL	3.679.348		4.072.933	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan Non Operasional				Non-Operating Revenues
Hasil sewa	6.570	48	8.820	Rental revenues
Lainnya - bersih	89.808		7.140	Others - net
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	96.378		15.960	NON-OPERATING REVENUES - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.775.726		4.088.893	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(770.190)	44	(815.883)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.005.536		3.273.010	NET INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 (Continued)**

	2023	Catatan/ Notes	2022	
	Rp Juta/ Rp Million		Rp Juta/ Rp Million	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		33		OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	14.665		234.880	Revaluation of premises
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(472.736)		203.809	Remeasurement of defined benefit obligation
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	1.757		1.328	Share of other comprehensive income of associates
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	107.402	44	(48.221)	Income tax relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	<u>(348.912)</u>		<u>391.796</u>	Sub total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.261		(1.266.813)	Changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(38.184)	44	251.985	Income tax relating to items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	<u>133.077</u>		<u>(1.014.828)</u>	Sub total
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<u>(215.835)</u>		<u>(623.032)</u>	Total other comprehensive income for the current year of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	<u>2.789.701</u>		<u>2.649.978</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.531.895		3.041.676	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	473.641	32	231.334	Non-controlling interest
LABA BERSIH	<u>3.005.536</u>		<u>3.273.010</u>	NET INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.303.920		2.436.934	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	485.781	32	213.044	Non-controlling interest
JUMLAH LABA KOMPEHENSIF	<u>2.789.701</u>		<u>2.649.978</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		45		EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)
Dasar/Dilusian	105,11		126,28	Basic/Diluted

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Saham yang dibeli kembali/ Treasury stock	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali/ Difference in value of equity transaction with non-controlling interest	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation of premises	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit obligation	Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income	Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Shares in other comprehensive income of associate	Saldo Laba/Retained Earnings		Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
									Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
									Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million				
Saldo per 1 Januari 2022	2.408.765	(610)	3.440.707	(269.072)	7.957.289	396.638	373.179	2.423	140.000	30.996.274	45.445.593	3.102.154	48.547.747	Balance as of January 1, 2022
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi	-	-	-	-	(503.408)	-	-	-	-	503.408	-	-	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(481.631)	(481.631)	-	(481.631)	Distribution of dividends
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.041.676	3.041.676	231.334	3.273.010	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	33	-	-	-	229.920	161.572	(997.562)	1.328	-	-	(604.742)	(18.290)	(623.032)	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2022	2.408.765	(610)	3.440.707	(269.072)	7.683.801	558.210	(624.383)	3.751	140.000	34.059.727	47.400.896	3.315.198	50.716.094	Balance as of December 31, 2022
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi	-	-	-	-	(19.429)	-	-	-	-	19.429	-	-	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Dividen dari entitas anak yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(193.310)	(193.310)	Dividends from subsidiary paid to non-controlling interests
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.531.895	2.531.895	473.641	3.005.536	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	33	-	-	-	12.122	(367.764)	125.910	1.757	-	-	(227.975)	12.140	(215.835)	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2023	2.408.765	(610)	3.440.707	(269.072)	7.676.494	190.446	(498.473)	5.508	140.000	36.611.051	49.704.816	3.607.669	53.312.485	Balance as of December 31, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2023	2022	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima		14.375.601	13.748.599	Interest, loan commissions and fees received
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar		(5.336.905)	(3.863.846)	Interest, prizes, fund commissions and fees paid
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		2.252.408	1.556.801	Other operating revenues received
Pembayaran beban operasional lainnya		(4.770.774)	(4.627.276)	Other operating expenses paid
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih		121.795	120.998	Gain on foreign exchange transactions - net
Penerimaan pendapatan non-operasional - bersih		95.742	-	Non-operating income received - net
Pembayaran beban non-operasional - bersih		-	(8.979)	Non-operating expense paid - net
Pembayaran beban pajak penghasilan		(816.417)	(751.503)	Income tax expense paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset, liabilitas operasi, dan dana syirkah temporer		5.921.450	6.174.794	Operating cash flows before changes in operating assets, liabilities, and temporary syirkah funds
Penurunan (kenaikan) aset operasi				Decrease (increase) in operating assets
Efek-efek (diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	9	(4.506.903)	(1.279.630)	Securities (measured at fair value through profit and loss)
Kredit	12	(10.471.886)	(12.374.150)	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11	5.815.025	5.317.954	Securities purchased with agreements to resell
Piutang sewa pembiayaan	13	(247.809)	(77.336)	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	14	(1.975.812)	(1.331.490)	Consumer financing receivables
Piutang jual dan sewa-balik	15	(14.556)	(78.778)	Sales and lease-back
Tagihan anjak piutang	13	10.612	-	Factoring receivables
Aset lain-lain	20	(912.473)	(1.473.046)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera		15.985	(1.901)	Liabilities payable immediately
Simpanan	21	2.406.006	5.741.834	Deposits
Simpanan dari bank lain	22	(127.375)	1.051.670	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	16	(965)	4.541	Acceptances payable
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	23	7.353.646	(4.493.742)	Securities sold with agreements to repurchase
Liabilitas lain-lain	27	(70.848)	168.543	Other liabilities
Kenaikan dana syirkah temporer	29	677.387	2.474.280	Increase in temporary syirkah funds
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>3.871.484</u>	<u>(176.457)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen		62.659	50.727	Dividends received
Hasil penjualan aset tetap	18	4.632	36.115	Proceeds from sale of premises and equipment
Perolehan aset tak berwujud	19	(142.099)	(135.113)	Acquisition of intangible assets
Perolehan aset tetap	18	(159.835)	(216.043)	Acquisitions of premises and equipment
Pembelian efek-efek (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)		(1.292.061)	(834.840)	Securities purchased (other than those measured at fair value through profit or loss)
Efek-efek jatuh tempo (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)		569.287	4.275.872	Securities matured (other than those measured at fair value through profit or loss)
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi		<u>(957.417)</u>	<u>3.176.718</u>	Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	56	(4.000.000)	-	Redemption of securities issued
Pembayaran dividen tunai		(193.310)	(481.075)	Cash dividends payment
Penerima pinjaman yang diterima oleh entitas anak	56	3.150.000	2.425.576	Borrowing received by subsidiaries
Pembayaran liabilitas sewa		(80.412)	(85.557)	Lease liability payment
Pelunasan pinjaman yang diterima oleh entitas anak		(2.493.637)	(1.567.431)	Borrowings repaid by subsidiary
Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan	56	(100.000)	-	Redemption of subordinated bond
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>(3.717.359)</u>	<u>291.513</u>	Net Cash (Used in) Provided by Financing Activities
(PENURUNAN) KENAikan BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>(803.292)</u>	<u>3.291.774</u>	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>17.353.469</u>	<u>13.766.259</u>	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES
Pengaruh perubahan kurs valuta asing		<u>(46.115)</u>	<u>295.436</u>	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u><u>16.504.062</u></u>	<u><u>17.353.469</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 (Continued)**

	Catatan/ Notes	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				SUPPLEMENTAL DISCLOSURES
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	5	1.297.547	1.704.409	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6	7.870.438	7.204.803	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	7	1.297.741	1.252.121	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	6.038.336	7.192.136	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah		<u>16.504.062</u>	<u>17.353.469</u>	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

P.T. Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank") didirikan dengan akta No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 dari notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972 Tambahan No. 210. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0055417 dan No. AHU-AH.01.03-0055418 tertanggal 8 Juni 2016.

Bank berkedudukan di Jakarta dengan 57 kantor cabang di Indonesia dan 1 kantor perwakilan di Singapura. Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Panin Centre, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Jumlah rata-rata karyawan Bank dan entitas anak (selanjutnya disebut "Grup") masing-masing 10.847 dan 10.788 karyawan pada tahun 2023 dan 2022.

Sesuai dengan anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha bank umum dalam arti kata seluas-luasnya di dalam maupun di luar negeri.

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Agustus 1971, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah sebagai berikut:

- a. PT Panin Financial Tbk, dengan pemegang saham pengendali adalah Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo dan Tidjan Ananto.
- b. Votrait No. 11013 Pty, Ltd, dengan pemegang saham pengendali adalah ANZ Banking Group.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

P.T. Bank Pan Indonesia Tbk (the "Bank") is established based on Deed No. 85 dated August 17, 1971 of notary Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. The Deed of Establishment is approved by the Minister of Justice through Decision Letter No. J.A.5/81/24 dated April 19, 1972 and is published in Supplement No. 210 of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 6, 1972. The Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 42 dated May 19, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, to conform the Bank's Articles of Association with the Financial Services Authority (OJK) regulations No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0055417 and No. AHU-AH.01.03-0055418 dated June 8, 2016.

The Bank is domiciled in Jakarta and has 57 main branch offices in Indonesia and 1 representative office in Singapore. The Bank's head office is located at Panin Centre Building, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. The Bank and its subsidiaries (the "Group") have average total number of employees in 2023 and 2022 of 10,847 and 10,788, respectively.

In accordance with the Bank's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in general banking both in Indonesia and overseas.

The Bank started commercial operations on August 18, 1971 when it obtained its business license based on the Decision Letter No. KEP-205/DDK/II/8/1971 dated August 18, 1971 from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. In accordance with Bank Indonesia's Decision Letter No. 5/2-Kep.Dir. dated April 21, 1972, the Bank is authorized to be a foreign exchange bank.

The ultimate shareholders of the Bank are as follows:

- a. PT Panin Financial Tbk, the ultimate shareholders are Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo and Tidjan Ananto.
- b. Votrait No. 11013 Pty, Ltd, the ultimate shareholder is ANZ Banking Group.

Susunan pengurus dan komite audit Bank pada tanggal dan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's management and audit committee consist of the following:

31 Desember/
 December 31, 2023

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

President Commissioner/ Independent Commissioner
 Deputy President Commissioner/Independent Commissioner
 Commissioner
 Commissioner
 Commissioner
 Independent Commissioner

Nelson Tampubolon
 Lintang Nugroho
 Chandra Rahardja Gunawan
 Drs. Johnny
 Gregory James Terry
 Drs. H. Riyanto

Direksi/Directors

President Director
 Deputy President Director
 Commercial Banking and Mortgage Director
 Corporate Banking Director
 Network and Distribution Director
 Treasury and Capital Market Director
 Human Resources, Business and Information Technology
 Strategic Director
 Operation and Information Technology Director
 Compliance and Risk Management Director

Herwidayatmo
 Hendrawan Danusaputra
 Edy Heryanto
 Januar Hardi
 Haryono Wongsonegoro
 Gunawan Santoso

Lionto Gunawan
 Suwito Tjokrorahardjo
 Antonius Ketut Dwirianto

Komite Audit/Audit Committee *)

Chairman
 Members

Nelson Tampubolon
 Drs. H. Riyanto
 Lukman Abdullah
 Lintang Nugroho
 Bambang Setyoko

Komite Pemantau Risiko/Risk Monitoring Committee **)

Chairman
 Members

Lintang Nugroho
 Chandra Rahardja Gunawan
 Drs. Johnny
 Gregory James Terry
 Lukman Abdullah
 Usep Ekadaya
 Bambang Setyoko

**Komite Remunerasi dan Nominasi/
 Remuneration and Nomination Committee ***)**

Chairman
 Members

Drs. H. Riyanto
 Nelson Tampubolon
 Drs. Johnny
 Yusak Zefanya
 Akijat Lukito

**Audit Internal/Internal Audit
 Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary**

Herbert J.S. Sibuea
 Jasman Ginting

31 Desember/
December 31, 2022

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

President Commissioner/ Independent Commissioner
Deputy President Commissioner/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Nelson Tampubolon
Lintang Nugroho
Chandra Rahardja Gunawan
Drs. Johnny
Gregory James Terry
Drs. H. Riyanto

Direksi/Directors

President Director
Deputy President Director
Commercial Banking and Mortgage Director
Corporate Banking Director
Network and Distribution Director
Treasury and Capital Market Director
Risk Management and Digital Development Director
Human Resources, Business and Information Technology
Strategic Director
Operation and Information Technology Director
Compliance, Legal Affairs and Anti Money Laundering Director

Herwidayatmo
Hendrawan Danusaputra
Edy Heryanto
Januar Hardi
Haryono Wongsonegoro
Gunawan Santoso
Ng Kean Yik

Lionto Gunawan
Suwito Tjokrorahardjo
Antonius Ketut Dwirianto

Komite Audit/Audit Committee *)

Chairman
Members

Nelson Tampubolon
Drs. H. Riyanto
Lukman Abdullah
Lintang Nugroho
Bambang Setyoko

Komite Pemantau Risiko/Risk Monitoring Committee **)

Chairman
Members

Lintang Nugroho
Chandra Rahardja Gunawan
Drs. Johnny
Gregory James Terry
Lukman Abdullah
Usep Ekadaya
Bambang Setyoko

**Remuneration and Nomination Committee/
Komite Remunerasi dan Nominasi ***)**

Chairman
Members

Drs. H. Riyanto
Nelson Tampubolon
Drs. Johnny
Yusak Zefanya
Akijat Lukito

**Internal Audit/Audit Internal
Corporate Secretary/Sekretaris Perusahaan**

Herbert J.S. Sibuea
Jasman Ginting

*) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10/SK-
DIR/20. Berlaku efektif pada tanggal 14 September
2020.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. 03/SK-DIR/21. Berlaku efektif pada tanggal
25 Februari 2021.

***) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. 06/SK-DIR/20. Berlaku efektif pada tanggal 17 Juli
2020.

*) According to Director's Decision Letter No. 10/SK-
DIR/20. Effective on September 14, 2020.

**) According to Director's Decision Letter No. 03/SK-
DIR/21. Effective on February 25, 2021.

***) According to Director's Decision Letter No. 06/SK-
DIR/20. Effective on July 17, 2020.

Pembentukan Komite Audit telah sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang "Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit".

The establishment of the Audit Committee is
based on Financial Services Authority
Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated
December 23, 2015 regarding "The
Establishment and the Implementation
Guidelines of Audit Committee".

b. Entitas Anak

Bank memiliki secara langsung lebih dari 50% saham atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut:

Entitas Anak/Subsidiaries	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership		Persentase pemilikan kepentingan non-pengendali/ Percentage of ownership held by non-controlling interest		Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Eliminations)	
		2023	2022	2023	2022		2023	2022
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million			
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI)	Lembaga pembiayaan/ Financing	51,49%	51,49%	48,51%	48,51%	1982	9.911.254	8.049.256
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDDB)	Bank Syariah/ Sharia Banking	67,30%	67,30%	32,70%	32,70%	2009	17.343.322	14.791.738

Seluruh entitas anak berdomisili di Jakarta dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan keputusan RUPS, pada tanggal 22 Juni 2023, CFI membagikan dividen tunai sebesar Rp 100 per lembar. Bank menerima dividen dari CFI senilai Rp 205.142 juta. Dividen dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2023.

Rincian dari entitas anak yang tidak dimiliki seluruhnya dimana Grup memiliki kepentingan non pengendali diungkapkan di Catatan 32.

c. Penawaran Umum Efek Grup

Penawaran Umum Saham

Penawaran Umum Perdana dan Terbatas yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Tahun/ Year	Keterangan/ Description	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai nominal per saham/ Par value per share	Harga penawaran per saham/ Offering price per share	Nomor dan tanggal surat efektif dari BAPEPAM/ Number and date of BAPEPAM's notice of effectivity
1982	Penawaran Umum Perdana/ Initial Public Offering	1.637.500	1.000	3.475	SI-014/PM/E/1982 28 Oktober 1982/ October 28, 1982
1983	Penawaran Umum Kedua/ Second Public Offering	3.162.500	1.000	3.550	SI-017/PM/E/1983 18 Mei 1983/ May 18, 1983
1989	Penawaran Umum Terbatas I/ Limited Public Offering I	914.655	1.000	4.500	S-467/PM/1989 31 Oktober 1989/ October 31, 1989
1990	Penawaran Umum Terbatas II/ Limited Public Offering II	2.614.410	1.000	13.000	21 April 1990/April 21, 1990
1995	Penawaran Umum Terbatas III/ Limited Public Offering III	60.180.462	1.000	1.900	S-725/PM/1995 8 Juni 1995/ June 8, 1995
1997	Penawaran Umum Terbatas IV/ Limited Public Offering IV	300.902.312	500	1.200	S-1212/PM/1997 10 Juni 1997/ June 10, 1997
1998	Penawaran Umum Terbatas V/ Limited Public Offering V	702.105.395	500	500	S-1268/PM/1998 19 Juni 1998/ June 19, 1998
1999	Penawaran Umum Terbatas VI/ Limited Public Offering VI	1.225.406.221	250	1.100	S-1180/PM/1999 29 Juni 1999/ June 29, 1999
2006	Penawaran Umum Terbatas VII/ Limited Public Offering VII	4.016.358.393	100	350	S-791/BL/2006 28 Juni 2006/ June 28, 2006

b. Consolidated Subsidiaries

The Bank has direct ownership interest of more than 50% or has control over the management of the following subsidiaries:

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and listed in the Indonesia Stock Exchange.

In accordance with the annual general meeting of shareholders decision, on June 22, 2023, CFI distributed cash dividends of Rp 100 per share. The Bank received dividends from CFI in the amount of Rp 205,142 million. Dividends are paid on July 25, 2023.

Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interest to the Group are disclosed in Note 32.

c. Public Offering of Shares and Bonds of the Group

Public Offering of Shares

The initial public offering and limited public offerings conducted by the Bank were as follows:

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa I para pemegang saham yang tercantum dalam Akta Berita Acara No. 52 tanggal 28 Mei 2004 dari Veronica Lily Dharma, S.H., notaris di Jakarta, disetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saldo laba dengan jumlah maksimum 1.176.093.346 saham. Jumlah saham bonus yang dibagikan menjadi sejumlah 1.176.091.818 saham karena adanya pembulatan. Nilai nominal Rp 100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sejumlah 23.837.645.998 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 250.000.000 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Penawaran Umum Obligasi

Pada tanggal 8 Juni 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-69/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 10.000 miliar.

- Pada tanggal 3 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 4 Juli 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini jatuh tempo pada 3 Juli 2023 dan telah dilunasi pada tanggal 27 Juni 2023.

Pada tanggal 17 Juni 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-299/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahun 2016 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 10.000 miliar.

- Pada tanggal 27 Februari 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 3.900 miliar. Pada tanggal 27 Februari 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 27 Februari 2023.

Based on the Extraordinary Meeting I of Stockholders as stated in Minutes of Meeting Deed No. 52 dated May 28, 2004 of Veronica Lily Dharma, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved to distribute bonus shares from retained earnings at a maximum of 1,176,093,346 shares. The actual number of shares distributed is 1,176,091,818. Par value is Rp 100 per share. All of those shares have been listed on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges on June 28, 2004.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's outstanding shares totaling 23,837,645,998 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange, while the founder shares totaling 250,000,000 shares are not listed on the stock exchange.

Public Offering of Bonds

On June 8, 2018, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-69/D.04/2018 to conduct public offering of Continuous Bonds III Bank Panin Year 2018 with targeted funds amounting to Rp 10,000 billion.

- On July 3, 2018, the Bank issued Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 with a nominal value of Rp 100 billion. On July 4, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. These bonds has matured on July 3, 2023 and repaid on June 27, 2023.

On June 17, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in the letter No. S-299/D.04/2016 to conduct public offering of Continuous Bonds II Bank Panin Year 2016 with targeted funds amounting to Rp 10,000 billion.

- On February 27, 2018, the Bank issued Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018 with a nominal value of Rp 3,900 billion. On February 27, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. These bonds has matured and repaid on February 27, 2023.

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 8 Juni 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-69/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 6.000 miliar.

- Pada tanggal 3 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.302 miliar. Pada tanggal 4 Juli 2018, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Obligasi subordinasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2025.

Pada tanggal 17 Juni 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-299/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2.500 miliar.

- Pada tanggal 28 Juni 2016, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 29 Juni 2016, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Obligasi subordinasi ini telah jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2023 dan dilunasi pada tanggal 27 Juni 2023.
- Pada tanggal 17 Maret 2017, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp 2.400 miliar. Pada tanggal 20 Maret 2017, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Obligasi subordinasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Public Offering of Subordinated Bonds

On June 8, 2018, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-69/D.04/2018 to conduct public offering of Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Year 2018 with targeted funds amounting to Rp 6,000 billion.

- On July 3, 2018, the Bank issued Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 with a nominal value of Rp 1,302 billion. On July 4, 2018, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. These subordinated bonds will be matured on July 3, 2025.

On June 17, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-299/D.04/2016 to conduct public offering of Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 with targeted funds amounting to Rp 2,500 billion.

- On June 28, 2016, the Bank issued Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 with a nominal value of Rp 100 billion. On June 29, 2016, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. These subordinated bonds has matured on June 28, 2023 and repaid on June 27, 2023.
- On March 17, 2017, the Bank issued continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017 with a nominal value of Rp 2,400 billion. On March 20, 2017, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. These subordinated bonds will be matured on March 17, 2024.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these consolidated financial statements.

PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi*

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 1 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amendemen ini mengubah persyaratan PSAK 1 terkait pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut menggantikan seluruh istilah 'kebijakan akuntansi signifikan' dengan 'informasi kebijakan akuntansi material'. Informasi kebijakan akuntansi bersifat material jika, ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang termasuk dalam laporan keuangan suatu entitas, informasi tersebut secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Paragraf pendukung dalam PSAK 1 juga diubah untuk memperjelas bahwa informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain adalah tidak material, tidak perlu diungkapkan. Informasi kebijakan akuntansi mungkin material karena sifat transaksi terkait, peristiwa atau kondisi lain, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak semua informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi material, peristiwa atau kondisi lain bersifat material.

PSAK 25 (amendemen) *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi*

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 25 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amendemen tersebut menggantikan definisi perubahan estimasi akuntansi dengan definisi estimasi akuntansi. Berdasarkan definisi baru, estimasi akuntansi adalah "jumlah moneter dalam laporan keuangan yang bergantung pada ketidakpastian pengukuran". Definisi perubahan estimasi akuntansi telah dihapus.

PSAK 16 (amendemen) *Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan*

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 16 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amendemen tersebut melarang pengurangan terhadap biaya perolehan suatu aset tetap untuk setiap hasil sebelum aset tersebut tersedia untuk digunakan, yaitu hasil saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut mampu beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Oleh karena itu, Grup mengakui hasil penjualan dan biaya-biaya terkait dalam laba rugi.

PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*

The Group has adopted the amendments to PSAK 1 for the first time in the current year. The amendments change the requirements in PSAK 1 with regard to disclosure of accounting policies. The amendments replace all instances of the term 'significant accounting policies' with 'material accounting policy information'. Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements.

The supporting paragraphs in PSAK 1 are also amended to clarify that accounting policy information that relates to transactions, other events or conditions that is immaterial, need not to be disclosed. Accounting policy information may be material because of the nature of the related transactions, other events or conditions, even if the amounts are immaterial. However, not all accounting policy information relating to material transactions, other events or conditions is itself material.

PSAK 25 (amendment) *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition Accounting Estimates*

The Group has adopted the amendments to PSAK 25 for the first time in the current year. The amendments replace the definition of a change in accounting estimates with a definition of accounting estimates. Under the new definition, accounting estimates are "monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty". The definition of a change in accounting estimates was deleted.

PSAK 16 (amendments) *Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*

The Group has adopted the amendments to PSAK 16 for the first time in the current year. The amendments prohibit deducting from the cost of an item of property, plant and equipment any proceeds of output before that asset is available for use, i.e. proceeds while bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Consequently, the Group recognises such sales proceeds and related costs in profit or loss.

Amendemen tersebut juga memperjelas arti 'menguji apakah suatu aset berfungsi dengan sesuai'. PSAK 16 menetapkan hal tersebut sebagai penilaian apakah kinerja teknis dan fisik suatu aset sedemikian rupa sehingga mampu digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.

PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 46 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amendemen ini memperkenalkan pengecualian lebih lanjut dari pengecualian pengakuan awal. Berdasarkan amendemen tersebut, entitas tidak menerapkan pengecualian pengakuan awal untuk transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak yang setara. Tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak yang setara mungkin timbul pada pengakuan awal aset dan liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak.

Setelah amendemen PSAK 46, entitas diharuskan mengakui aset dan liabilitas pajak tanggungan terkait, dengan pengakuan aset pajak tanggungan tunduk pada kriteria terpulihkan dalam PSAK 46.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 73 (amandemen) *Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik*
- PSAK 1 (amandemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

The amendments also clarify the meaning of 'testing whether an asset is functioning properly'. PSAK 16 specifies this as assessing whether the technical and physical performance of the asset is such that it is capable of being used in the supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes.

PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

The Group has adopted the amendments to PSAK 46 for the first time in the current year. The amendments introduce a further exception from the initial recognition exemption. Under the amendments, an entity does not apply the initial recognition exemption for transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences. Depending on the applicable tax law, equal taxable and deductible temporary differences may arise on initial recognition of an asset and liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting profit nor taxable profit.

Following the amendments to PSAK 46, an entity is required to recognise the related deferred tax asset and liability, with the recognition of any deferred tax asset being subject to the recoverability criteria in PSAK 46.

b. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 73 (amendment) *Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback*
- PSAK 1 (amendment) *Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants*

- Amendemen PSAK 101 “*Penyajian Laporan Keuangan Syariah*” terkait perubahan komponen laporan keuangan entitas amil; dan
- Amendemen PSAK 109 “*Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*” tentang perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada entitas amil;

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 10 (amandemen): *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- Amendment of PSAK 101 “*Presentation of Sharia Financial Statement*” related changes in financial statement components of amil entity; and
- Amendment of PSAK 109 “*Accounting for Zakat, Infak and Sedekah*” related to accounting treatment for zakat, infak, and sedekah for amil entity.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 10 (amendment) *The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah untuk entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Sesuai dengan PSAK 1, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali revaluasi atas aset tetap dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Sesuai dengan PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and Sharia Financial Accounting Standards for the subsidiary operates in Sharia Banking and the Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guideline for Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Entities.

b. Basis of Preparation

In accordance with PSAK 1, the consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the revaluation of premises and certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

In accordance with PSAK 68, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK 1, direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan entitas anak yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

c. Dasar Konsolidasian

Sesuai dengan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Bank dan entitas yang dikendalikan oleh Bank dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Bank memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Bank menilai kembali apakah Bank mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Bank memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Bank mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Bank cukup untuk memberikan Bank kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Bank relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Bank, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Bank memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

In accordance PSAK 2, the consolidated statements of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks and placements with Bank Indonesia and other banks with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged or restricted.

In accordance PSAK 1, the directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

The financial statements of a subsidiary company engaged in sharia banking have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 101 (Revised 2016) regarding "Presentation of Sharia Financial Statements".

c. Basis of Consolidation

In accordance with PSAK 65, the consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Bank and entities (including structured entities) controlled by the Bank and its subsidiaries. Control is achieved where the Bank has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Bank reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Bank has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Bank's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Bank's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Bank, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Bank has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Bank memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Bank kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Bank sampai tanggal ketika Bank berhenti mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Kepentingan non-pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham non-pengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non-pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non-pengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Bank juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Consolidation of a subsidiary begins when the Bank obtains control over the subsidiary and ceases when the Bank loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Bank gains control until the date when the Bank ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Bank and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Bank and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Bank.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71 Instrumen Keuangan atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK 10, laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup dan laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional individu masing-masing entitas Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs *spot Reuters* pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including *goodwill*), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71 Financial Instruments or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Foreign Currency Transactions and Translation

In accordance with PSAK 10, the individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group and the individual financial statements of each Group entity are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the individual financial statement of each Group entity and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated using reporting (closing) exchange rate set by Bank Indonesia, which is Reuters' spot rate at 4.00 P.M. Western Indonesia Time to reflect the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

e. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK 7, a related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. the entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan the sponsoring employees are also related to the reporting entity.
 - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

- Diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI);
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- viii. the entity, or any members of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Financial Instruments

In accordance with PSAK 71, financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

- Measured at amortized cost;
- Measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) (lihat di bawah).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and
- may irrevocably designate a financial asset that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit. Bank tidak memiliki aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Bunga yang diperoleh".

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired. The Bank does not have purchased or originated credit-impaired financial assets.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest earned" line item.

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54. Efek utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jika efek utang ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI

Pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas pada FVTOCI. Penetapan pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan tersedia untuk diperdagangkan jika:

- Diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan actual laba jangka pendek; atau
- Merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrument lindung nilai yang ditunjuk dan efektif).

Debt instruments classified as at FVTOCI

Debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 54. The debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these debt securities had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income. When these debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Equity instruments designated as at FVTOCI

On initial recognition, the Group may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).

Investasi dalam instrumen ekuitas di FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba.

Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas tersebut diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71, kecuali jika dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan dari sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam pos "Pendapatan Operasional Lainnya - Lainnya" (Catatan 39) dalam laba rugi.

Grup menetapkan semua investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada FVTOCI ketika pengakuan awal.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal (di atas).
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda.

Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the investments revaluation reserve. The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, it is transferred to retained earnings.

Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss in accordance with PSAK 71, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment. Dividends are included in the "Other Operating Revenues - Others" line item (Notes 39) in profit or loss.

The Group designated all investments in equity instruments that are not held for trading as at FVTOCI on initial recognition.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition (above).
- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria (above) are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Keuntungan Bersih Penjualan Efek" (Catatan 37). Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi;
- Untuk instrumen utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang diakui dalam laba rugi. Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi; dan
- Untuk instrumen ekuitas diukur pada FVTOCI, selisih kurs diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian yang lebih melihat ke depan dalam mengukur penurunan nilai instrumen keuangan (*expected loss*). Setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung (*reasonable and supportable information*). Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atau 12 bulan sesuai dengan tingkat risiko kredatnya.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Net Gain on Sale of Securities" (Note 37). Fair value is determined in the manner described in Note 54.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of each reporting period. Specifically:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss;
- For debt instruments measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income;
- For financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss; and
- For equity instruments measured at FVTOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income.

Impairment of financial assets

PSAK 71 introduces the expected credit loss method which is more forward looking at measuring impairment of financial instruments (*expected loss*). At each reporting date, the Group assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition using reasonable and supportable information. The Group measures the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses throughout their life or 12 months in accordance with the level of credit risk.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Jika informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) yang wajar dan didukung tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, Bank tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi yang lebih bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, Bank dapat menggunakan informasi tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-months ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, government and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

If reasonable and supportable forward-looking information is available without undue cost or effort, the Bank cannot rely solely on delinquent information to determine whether credit risk has increased significantly since initial recognition. However, when information that is more forward-looking than the status of arrears (either individually or collectively) is not available without undue cost or effort, the Bank may use the arrears information referred to determine whether there is a significant increase in credit risk since the initial recognition.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Untuk kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Grup menjadi salah satu pihak dari komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan. Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal kontrak jaminan keuangan, Grup mempertimbangkan perubahan risiko bahwa debitur tertentu akan gagal bayar dalam kontrak tersebut.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of investment grade in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of performing. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

For financial guarantee contracts, the date that the Group becomes a party to the irrevocable commitment is considered to be the date of initial recognition for the purposes of assessing the financial instrument for impairment. In assessing whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition of a financial guarantee contract, the Group considers the changes in the risk that the specified debtor will default on the contract.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definisi gagal bayar

Bank menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif (sebagai contoh: perjanjian keuangan) ketika keadaannya sesuai. Akan tetapi, terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa gagal bayar tidak terjadi ketika aset keuangan selambat-lambatnya menunggak 90 hari, kecuali Bank memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa *lagging default criterion* lebih tepat digunakan. Definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan ini diterapkan secara konsisten untuk seluruh instrumen keuangan kecuali informasi tersebut tersedia yang dapat menunjukkan definisi gagal bayar lain lebih tepat untuk instrumen keuangan tertentu.

Pengukuran risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Definition of default

The Bank applies a definition of default that is consistent with the definition used for internal credit risk management purposes for the relevant financial instruments and considers qualitative indicators (for example: financial covenant) when appropriate. However, there is a rebuttable presumption that the default does not occur when financial assets are 90 days in arrears, unless the Bank has reasonable and supportable information to demonstrate that the lagging default criterion is more appropriate. The default definition used for this purpose is consistently applied to all financial instruments unless such information is available which may indicate a more appropriate definition of default for a particular financial instrument.

Credit risk measurement is based on default risk at the reporting date by considering changes in default risk that occur during the life of the financial instrument.

Credit-impaired financial assets

Financial assets decrease in loan amount when one or more event that has an effect in future cash flow estimation from financial assets have happened. The proof of financial assets experiencing decrement including the data that can be observe related to the event as follows:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- breach of contract, such as default or delinquency in payments;
- lenders, for economic or contractual reason related to financial difficulty experience by borrower, has given the concessions to borrower that will not be given if the borrower didn't experience financial difficulty;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Hapus buku merupakan upaya penyelesaian atas aset keuangan yang tidak dapat ditagih. Hapus buku adalah tindakan administratif Grup untuk menghapusbukukan aset keuangan yang memiliki kualitas macet dan/atau telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari kewajiban debitur kepada Grup. Hapus buku aset keuangan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar (EAD). Pengukuran risiko kredit ini merupakan estimasi berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi sebagai komponen *forward-looking/predictor*.

Perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) dibagi menjadi 3, yaitu:

- *Stage 1*

Dalam PSAK 71, Bank membukukan ECL untuk 12 bulan sejak hari pengakuan awal untuk *Stage 1*. Untuk periode selanjutnya, Bank terus memonitor apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dari pengakuan awal.

- *Stage 2*

Jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan, eksposur akan pindah ke *Stage 2* dimana pencadangan dibukukan berdasarkan ECL sepanjang umur eksposur. Sebaliknya, jika terdapat perbaikan yang signifikan pada kualitas kredit, eksposur akan pindah kembali ke *Stage 1*.

- *Stage 3*

Eksposur pada *Stage 2* dapat pindah ke *Stage 3* jika terdapat bukti penurunan nilai yang obyektif (contohnya wanprestasi/ gagal bayar) yang teridentifikasi sejak pengakuan awal. Cadangan penurunan nilai pada *Stage 3* didasarkan pada ECL sepanjang umur eksposur. Eksposur yang dapat dipulihkan akan pindah ke *Stage 2* atau *Stage 1*.

Write-off policy

Write-off is an attempt to resolve uncollectible financial asset. Write-off is an administrative action of the Group to write-off the financial asset with bad quality and/or financial asset with 100% allowance for impairment losses of the debtor's obligation to the Group. Written-off financial assets are recorded in off-balance sheet. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default (PD), loss given default (LGD) (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default (EAD). This credit risk measurement is an estimate based on historical experience by considering macroeconomic factors as a component of forward-looking/predictor.

Calculation of expected credit loss (ECL) is divided into 3 stage:

- *Stage 1*

In PSAK 71, Bank records ECL for 12 months from the day of initial recognition for *Stage 1*. For the next period, Bank continues to monitor whether there is a significant increase in credit risk from initial recognition.

- *Stage 2*

If there is a significant increase in credit risk, the exposure will move to *Stage 2* where reserves are posted on the ECL basis throughout the lifetime of the exposure. Conversely, if there is a significant improvement in credit quality, the exposure will move back to *Stage 1*.

- *Stage 3*

Exposures on *Stage 2* can move to *Stage 3* if there is evidence of objective impairment (for example non-performance of contract/ default) identified from initial recognition. Allowance for impairment on *Stage 3* is based on ECL for the life of the exposure. Recoverable exposures will move to *Stage 2* or *Stage 1*.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVTOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan sebagai pergerakan pada penghasilan komprehensif lain. Untuk komitmen pinjaman yang belum digunakan, kerugian kredit ekspektasian merupakan nilai kini dari perbedaan antara arus kas kontraktual yang menjadi hak Grup jika pemegang komitmen pinjaman menggunakan pinjaman, dan arus kas yang diharapkan diterima oleh Grup jika pinjaman digunakan. Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen dan kontinjensi diakui pada liabilitas lain-lain (Catatan 27).

For assets measured at amortized cost, the balance in the balance sheet reflects gross assets less expected credit losses. For debt instruments in the FVTOCI category, the balance in the balance sheet reflects the fair value of the instrument, with expected credit loss are included in the movement of other comprehensive income. For undrawn loan commitments, the expected credit loss is the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Group if the holder of the loan commitment draws down the loan, and the cash flows that the Group expects to receive if the loan is drawn down. Expected credit loss for commitments and contingencies are recognized in other liabilities (Notes 27).

Untuk kontrak jaminan keuangan, karena Grup diharuskan untuk melakukan pembayaran hanya jika debitur gagal bayar sesuai dengan ketentuan instrumen yang dijamin, penyisihan kerugian yang diharapkan adalah pembayaran yang diharapkan untuk mengganti pemegang kerugian kredit yang timbul dikurangi jumlah yang diharapkan akan diterima Grup dari pemegang, debitur atau pihak lain.

For a financial guarantee contract, as the Group is required to make payments only in the event of a default by the debtor in accordance with the terms of the instrument that is guaranteed, the expected loss allowance is the expected payments to reimburse the holder for a credit loss that it incurs less any amounts that the Group expects to receive from the holder, the debtor or any other party.

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu untuk entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi: giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Determination of the quality of assets and allowance for impairment losses on certain assets for subsidiary which operates in sharia banking is based on Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding Asset Quality Rating for Islamic Banks and Islamic Business Units, applied to: demand deposits with commercial sharia banks, placements with other banks, investments in marketable securities, Qardh funds and Mudharabah and Musyarakah financing.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, aset tertentu (kredit) ditelaah berdasarkan kualitasnya dan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai:

Based on the above regulation, specified asset (loan) are reviewed based on its quality and classified into the following categories with percentage of allowance for impairment losses:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Percentage of Allowance for Impairment Losses	Classification
Lancar	Minimum/Minimum of 1%	Current
Dalam perhatian khusus	Minimum/Minimum of 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/Minimum of 15%	Substandard
Diragukan	Minimum/Minimum of 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

The above percentages are applied to the outstanding balance of assets less the value of eligible collateral in line with above regulation, except for those classified as current and are not secured by cash collateral.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai periode berjalan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

Bank Indonesia Wadiah Certificates, bonds issued by the government based on sharia principle, Bank Indonesia Sharia Certificates and part of earning assets which are secured with government guarantee do not have allowance for impairment losses.

Assets written off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible. Recovery of assets previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses during the period.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Sesuai dengan PSAK 71, liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau

g. Financial Liabilities and Equity Instruments

In accordance with PSAK 71, financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at FVTPL) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at FVTPL are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or its designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal; atau
- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 atau PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam laporan laba rugi.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup yang ditetapkan oleh Grup sebagai FVTPL diakui dalam laba rugi. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54.

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition, if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or
- it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 or PSAK 71 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Gains or losses on financial guarantee contracts issued by the Group that are designated by the Group as at FVTPL are recognized in profit or loss. Fair value is determined in the manner described in Note 54.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Sesuai dengan PSAK 50, aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Nilai Wajar

Sesuai dengan PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Grup memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Grup melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut yang mengkategorikan ke dalam tiga tingkat masukan untuk teknik penilaian:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Grup dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

In accordance with PSAK 50, financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Fair Value

In accordance with PSAK 68, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the Group measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy that categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; that the Group can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).
<p>j. Kas</p>	<p>j. Cash</p>
<p>Sesuai dengan PSAK 2, kas terdiri dari kas kecil, kas besar, kas pada pihak ketiga, kas di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kas pada <i>teller</i> dan <i>bank notes</i>.</p>	<p>In accordance with PSAK 2, cash includes petty cash, cash, cash in third parties, cash in Automated Teller Machines (ATMs), cash in teller and bank notes.</p>
<p>k. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain</p>	<p>k. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks</p>
<p>Sesuai dengan PSAK 71, giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.</p>	<p>In accordance with PSAK 71, demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.</p>
<p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.</p>	<p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks are discussed in Note 3f related to financial assets.</p>
<p>l. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain</p>	<p>l. Placements with Bank Indonesia and Other Banks</p>
<p>Sesuai dengan PSAK 71, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.</p>	<p>In accordance with PSAK 71, placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.</p>
<p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.</p>	<p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Note 3f related to financial assets.</p>
<p>m. Efek-efek</p>	<p>m. Securities</p>
<p>Sesuai dengan PSAK 71, setelah pengakuan awal, efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara efek yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI diukur pada nilai wajar setelah pengakuan awal, dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi laba/rugi yang belum direalisasi serta cadangan kerugian yang dibentuk diakui ke laba rugi. Untuk efek yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar langsung diakui ke laba rugi.</p>	<p>In accordance with PSAK 71, after initial recognition, the securities measured at cost are amortized using the effective interest rate. While securities classified as FVTOCI are measured at fair value after initial recognition, where unrealized gains and losses on changes in fair value will be recognized as other comprehensive income. At the time of derecognition, the accumulated unrealized gain/loss and allowance for losses that have been created are recognized in profit or loss. For securities classified as FVTPL, after initial recognition will be measured at fair value where unrealized gains and losses on changes in fair value are recognized immediately in profit or loss.</p>

n. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Sesuai dengan PSAK 71, tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas derivatif mengacu pada Catatan 3f dan 3g terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

o. Kredit

Sesuai dengan PSAK 71, kredit diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan kredit mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

Dalam kredit yang diberikan termasuk pembiayaan oleh entitas anak (PDSB) berupa piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Sesuai dengan PSAK 102, piutang Murabahah diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang Murabahah mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

Sesuai dengan PSAK 105, pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. PDSB menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3f).

Sesuai dengan PSAK 59, pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas Qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

n. Derivative Receivables and Payables

In accordance with PSAK 71, receivables and payables are classified as FVTPL.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value measurement, impairment and derecognition of derivative receivables and payables are discussed in Notes 3f and 3g related to financial assets and financial liabilities.

o. Loans

In accordance with PSAK 71, loans are classified as amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of loans are discussed in Note 3f related to financial assets.

Loans included in financing by subsidiary (PDSB) consist of murabahah receivable, mudharabah financing and musyarakah financing.

In accordance with PSAK 102, murabahah receivables are classified as loans and receivable.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of Murabahah receivables are discussed in to Note 3f related to financial assets.

Accelerated repayment or repayment before maturity date for Murabahah receivables are treated as if the repayment is made on due date. Discount or muqasah can be offered based on applicable term but can not be predetermined.

In accordance with PSAK 105, mudharabah financing is stated at the outstanding balance less allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is provided based on a review on the quality of each individual financing account (Note 3f).

In accordance with PSAK 59, qardh is recognized based on fund provided at the transaction date. Excess received from repayment of Qardh is recognized as income when received.

Pinjaman Qardh disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Sesuai dengan PSAK 106, pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. PDSB menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3f).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

p. Aset Keuangan Memburuk

Sesuai dengan PSAK 71, restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok atau bunga sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Jika persyaratan aset keuangan dimodifikasi, Grup mengevaluasi apakah arus kas dari aset yang dimodifikasi secara substansial berbeda. Jika arus kas berbeda secara substansial, hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan original dianggap telah kadaluwarsa. Dalam kasus ini, aset keuangan original dihentikan pengakuannya dan aset keuangan baru diakui pada nilai wajar.

Jika arus kas dari aset yang dimodifikasi dicatat pada biaya perolehan amortisasi tidak jauh berbeda, maka modifikasi tersebut tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini, Grup menghitung ulang nilai tercatat bruto aset keuangan dan mengakui jumlah yang timbul dari penyesuaian jumlah tercatat bruto sebagai modifikasi keuntungan atau kerugian dalam laba rugi.

q. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Sesuai dengan PSAK 71, tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Qardh are stated at their outstanding balance net of impairment losses.

In accordance with PSAK 106, musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for impairment losses. PDSB provides allowance for impairment losses based on the quality of the financing as determined by a review of each individual account (Note 3f).

If there is a loss in Musyarakah due to negligence or irregularities of Musyarakah partners, the partners are to bear the expenses. The Bank's losses caused by negligence or irregularities by those partners are recognized as the past due Musyarakah financing.

p. Credit Impaired Financial Assets

In accordance with PSAK 71, debt restructuring performed to the borrower that unable or predicted to unable to fulfill its principal payment installments responsibilities or interest according to contractual schedule.

If the terms of financial asset are modified, the Group evaluates whether the cash flows of the modified asset are substantially different. If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flow from the original financial asset are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value.

If the cash flows of the modified asset carried at amortized cost are not substantially different, then the modification does not result in derecognition of the financial asset. In this case, the Group recalculates the gross carrying amount of the financial asset and recognizes the amount arising from adjusting the gross carrying amount as a modification gain or loss in profit or loss.

q. Acceptances Receivable and Payable

In accordance with PSAK 71, acceptance receivables are classified as amortized cost.

Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3f dan 3g terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

r. Piutang Pembiayaan Konsumen

Sesuai dengan PSAK 71, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

Jaminan kendaraan yang dikuasai kembali oleh CFI dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen atau nilai realisasi bersih. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi bersih dicatat sebagai cadangan kerugian ekpektasian atau cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan sebagai laba/rugi. Dalam upaya penyelesaian piutang, konsumen memberi kuasa kepada CFI untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Jika harga jual jaminan kendaraan lebih rendah dibandingkan dengan nilai saldo piutang pembiayaan, maka selisih tersebut dibebankan sebagai laba/rugi. Apabila harga jual jaminan kendaraan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai saldo piutang pembiayaan, maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

s. Sewa

Pada tanggal insepisi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of acceptances receivable and payable are discussed in Notes 3f and 3g related to financial assets and financial liabilities.

r. Consumer Financing Receivables

In accordance with PSAK 71, consumer financing receivables are classified as amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value measurement, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3f related to financial assets.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

Net realisable value of repossessed vehicle obtained by CFI are stated at the lower of related consumer financing receivables' carrying value or net realisable value of the repossessed assets. The difference between the carrying value and net realisable value is recorded as allowance for expected loss and allowance for impairment loan losses and is charged as profit/loss. In case of default, the consumer gives the right to CFI to sell repossessed assets or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables. If the sale price of the repossessed vehicles is lower compared to the consumer financing receivable, then the difference is charged as profit/ loss. If the sale price of the repossessed vehicles is higher compared to the consumer financing receivable, then the difference will be paid back to the consumers.

s. Leases

On the date of the contract's inception, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract gives the right to control the use of an identification asset for a period of time to be exchanged for compensation.

Sebagai penyewa (lessee)

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi tunggal dan mensyaratkan lessee mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset dengan nilai rendah. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah.

Sebagai pesewa (lessor)

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan beberapa properti investasinya.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

As a lessee

PSAK 73 introduces a single accounting model and requires the lessee to recognize right of-use asset and lease liabilities on the date of commencement of lease for all leases with terms of more than 12 months, except for low value asset. Right of-use asset are initially measured at cost, which consists of the initial measurement of the lease liabilities adjusted for lease payments made on or before the commencement date, plus the initial direct costs incurred, and the estimated costs to dismantle and move the underlying asset or to restore the underlying asset or the place where the asset is, less the lease incentives received.

After the start date, the right of-use assets are measured using the cost model. The right of-use asset are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earliest date between the end of the useful life of the right of-use asset or the end of the lease period. In addition, the right of-use asset are periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for the re-measurement of lease liabilities.

Lease liabilities are initially measured at the present value of the unpaid lease payments at the start date, discounted using the implicit interest rate in the lease or, if the interest rate cannot be determined, the Group's incremental loan interest rate is used. Generally, the Group uses the incremental loan rate as the discount rate.

The Group has chosen not to recognize right of-use asset and lease liabilities for short-term leases that have a lease period of 12 months or less and lease for low value assets.

As a lessor

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to some of its investment properties.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Setelah pengungkapan awal, Grup secara teratur melakukan review atas estimasi nilai sisa tidak dijamin dan menerapkan persyaratan penurunan nilai PSAK 71, yaitu mengakui cadangan ekspektasi kerugian kredit atas piutang sewa.

Penghasilan sewa pembiayaan dihitung dengan mengacu pada jumlah tercatat bruto piutang sewa, kecuali untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai di mana penghasilan bunganya dihitung dengan mengacu pada biaya perolehan diamortisasi (yaitu setelah dikurangi cadangan kerugian).

t. Penyertaan dalam Bentuk Saham

Investasi pada entitas asosiasi

Sesuai dengan PSAK 15, entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Group's net investment outstanding in respect of the leases.

Subsequent to initial recognition, the Group regularly reviews the estimated unguaranteed residual value and applies the impairment requirements of PSAK 71, recognizing an allowance for expected credit losses on the lease receivables.

Finance lease income is calculated with reference to the gross carrying amount of the lease receivables, except for credit-impaired financial assets for which interest income is calculated with reference to their amortized cost (i.e. after a deduction of the loss allowance).

t. Investments in Shares of Stock

Investments in associates

In accordance with PSAK 15, an associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilainya sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 48, Impairment of Assets, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. The Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

Penyertaan lainnya

Penyertaan dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penyertaan lainnya mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

u. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

v. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK 16, aset tetap dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

When the group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interests.

When the Group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

Other investments

Investment in shares of stock with percentage of ownership less than 20% is classified as measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of other investments are discussed in Note 3f related to financial assets.

u. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

v. Premises and Equipment

In accordance with PSAK 16, premises and equipment are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses, except for land is not depreciated. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the determined fair value as at consolidated statement financial position reporting date. Asset with insignificant changes in fair value, must be revalued at least every 3 (three) years.

Any revaluation increase arising from appraisal is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the revaluation surplus relating to a previous revaluation of such assets.

Penyusutan aset tetap yang direvaluasi diakui pada laba rugi.

Depreciation on revalued premises and equipment is recognized in profit or loss.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Tidak terdapat perubahan untuk metode penyusutan bangunan, kendaraan bermotor dan inventaris kantor, yaitu metode garis lurus (*straight-line method*).

There are no changes for buildings, motor vehicles and office furniture and fixtures depreciation method, which are straight-line method.

Tarif penyusutan untuk bangunan, kendaraan bermotor dan inventaris kantor masing-masing adalah sebagai berikut:

The depreciation rate for buildings, motor vehicles, and office furnitures and fixtures, respectively are as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>	
Bangunan	20 - 48	2% - 5%	Buildings
Kendaraan bermotor	3 - 5	25% - 50%	Motor vehicles
Inventaris kantor	3 - 25	25% - 50%	Office furniture and fixtures

Aset tetap kendaraan bermotor dan inventaris kantor milik entitas anak disusutkan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 2 – 5 tahun.

The depreciation of subsidiaries vehicles and office furniture and fixtures are computed using the straight line method based on their estimated useful lives of 2 – 5 years.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap.

The legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under premises and equipment.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai biaya pada tahun berjalan.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an expense in the current year.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

w. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Sesuai dengan PSAK 58, aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

x. Aset Tak berwujud

Sesuai dengan PSAK 19, aset takberwujud adalah perangkat lunak yang dibeli oleh Grup.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibeli oleh Grup dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direview setiap akhir tahun.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item premises and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

w. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

In accordance with PSAK 58, non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell.

Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

x. Intangible Assets

In accordance with PSAK 19, Intangible assets consist of software acquired by the Group.

Software

Software acquired by the Group is stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss using the double-declining balance method based on its estimated useful lives of 4 years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each year end.

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali Goodwill

Sesuai dengan PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pemulihan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi (Catatan 3v).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3f.

z. Aset Tetap yang Akan Digunakan dalam Kegiatan Operasional

Sesuai dengan PSAK 16, aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan.

y. Impairment of Non-financial Assets except Goodwill

In accordance with PSAK 48, at the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (Note 3v).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3f.

z. Premises and Equipment to be Used

In accordance with PSAK 16, premises and equipments to be used are stated at carrying amount which is cost.

aa. Agunan yang Diambil Alih

Sesuai dengan PSAK 58, tanah dan aset lainnya (jaminan kredit dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Grup) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit atau piutang pembiayaan di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

ab. Tagihan Anjak Piutang

Sesuai dengan PSAK 71, tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan anjak piutang mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

ac. Piutang Jual dan Sewa-Balik

Sesuai dengan PSAK 71, piutang Jual dan Sewa-Balik merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewapembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang jual dan sewa-balik mengacu kepada Catatan 3f terkait aset keuangan.

aa. Foreclosed Collateral

In accordance with PSAK 58, land and other assets (collateral foreclosed by the Group) are presented in the Foreclosed Collateral account under "Other assets".

Foreclosed collateral are stated at net realizable value. The excess of loan receivable or financing receivables over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged against allowance for impairment losses.

The difference between the carrying amount of foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as gain or loss at the time of sale.

Management evaluates the value of foreclosed collateral periodically. Allowance for impairment losses on foreclosed collateral is reserved on reduction of foreclosed collateral value.

The carrying amount of foreclosed collateral is written down to recognize a permanent decline in the value of the foreclosed collateral, which is charged to current operations.

ab. Factoring Receivables

In accordance with PSAK 71, factoring receivables are purchased receivables from the other companies. These are classified as amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of factoring receivables are discussed in Note 3f related to financial assets.

ac. Sales and Lease-Back Receivables

In accordance with PSAK 71, sales and lease-back receivables are financing activities in form of selling goods by customer to financing company, along with leasing back the same goods to the same customer.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of factoring receivables are discussed in Note 3f related to financial assets.

ad. Simpanan

Sesuai dengan PSAK 71, simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan mengacu pada Catatan 3g terkait liabilitas keuangan.

Simpanan dan dana syirkah temporer entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah dinyatakan sebagai berikut:

- Giro *wadiah* dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.
- Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

ae. Simpanan dari Bank Lain

Sesuai dengan PSAK 71, simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *interbank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan dari bank lain mengacu pada Catatan 3g terkait liabilitas keuangan.

af. Instrumen Utang dan Ekuitas yang Diterbitkan

Sesuai dengan PSAK 71:

• **Surat Berharga yang Diterbitkan**

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga yang diterbitkan mengacu pada Catatan 3g terkait liabilitas keuangan.

• **Obligasi Subordinasi**

Obligasi subordinasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

ad. Deposits

In accordance with PSAK 71, deposits are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of deposits are discussed in Note 3g related through financial liabilities.

The policy on subsidiary's deposits and temporary syirkah funds which operates in sharia banking industry are stated as follow:

- *Wadiah* demand deposits are stated at the amounts due to current account holders.
- *Wadiah* savings are stated at the value of savings holders' savings in the Bank.

ae. Deposits from Other Banks

In accordance with PSAK 71, deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized cost.

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, interbank call money deposits with original maturities of 90 days or less, saving deposits and time deposits.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of deposits from other banks are discussed in Note 3g related to financial liabilities.

af. Debt and Equity Instruments Issued

In accordance with PSAK 71:

• **Securities Issued**

Bonds issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of securities issued are discussed in Note 3g related to financial liabilities.

• **Subordinated Bonds**

Subordinated bonds issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan obligasi subordinasi mengacu pada Catatan 3g terkait liabilitas keuangan.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of subordinated bonds are discussed in Note 3g related to financial liabilities.

• **Biaya Emisi Saham**

Biaya emisi saham yang menambah dan beratribusi secara langsung terhadap penerbitan saham baru disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

• **Share Issuance Costs**

Share issuance costs that are incremental and directly attributable to issuance of new shares are deducted from additional paid-in capital and are not amortized.

ag. **Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali**

Sesuai dengan PSAK 71, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mengacu pada Catatan 3g terkait liabilitas keuangan.

ag. **Securities Sold with Agreements to Repurchase**

In accordance with PSAK 71, securities sold with agreements to repurchase (*repo*) are classified as financial liabilities at amortized cost.

Securities sold under repurchase agreements (*repo*) are presented as liabilities and stated at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the year commencing from the selling date to the repurchase date.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of securities sold with agreements to repurchase refer to Note 3g related to financial liabilities.

ah. **Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali**

Sesuai dengan PSAK 71, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali efek-efek yang disepakati dikurangi selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan metode suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali.

ah. **Securities Purchased with Agreements to Resell**

In accordance with PSAK 71, securities purchased with agreements to resell (*reverse repo*) are classified as amortized cost.

Securities purchased under resale agreements (*reverse repo*) are presented as receivables and stated at the agreed resale price less the difference between the purchase price and the agreed resale price. The difference between the purchase price and the agreed resale price is amortized using the effective interest method as interest income over the year commencing from the acquisition date to the resale date.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan.

ai. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Sesuai dengan PSAK 72, pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3f).

Pendapatan kredit yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian termasuk:

- Bunga pada aset dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.
- Bunga pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dihitung menggunakan suku bunga efektif.

Perubahan nilai wajar pada efek-efek yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan diukur pada nilai wajar pada laba rugi dan derivatif lainnya yang digunakan untuk kepentingan manajemen risiko, dan aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, akan mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Di dalam pendapatan dan beban bunga terdapat pendapatan dan beban pengelolaan dana (mudharib) oleh entitas anak (PDSB) berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad Murabahah dan pendapatan dari bagi hasil yaitu Mudharabah, Musyarakah dan pendapatan usaha utama lainnya serta hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities purchased with agreements to resell are discussed in Note 3f related to financial assets.

ai. Recognition of Interest Revenues and Expenses

In accordance with PSAK 72, interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest rate method (Note 3f).

Interest income from impaired loan are computed using the effective interest method based on the amount of loan – net of impairment loss.

Interest income and expense recognized in the consolidated financial statements includes:

- Interest on financial assets and liabilities measured at amortized costs using the effective interest method.
- Interest on financial assets measured at fair value through other comprehensive income is computed using the effective interest method.

Changes in fair value of trading securities measured at FVTPL and other derivatives used for risk management purposes, and other financial assets and liabilities measured at FVTPL will affect the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Included in interest income and expense are income as fund manager (mudharib) by PDSB consist of income from Murabahah transactions, income from profit sharing of Mudharabah, Musyarakah and other main operating income and third parties' share on the return of temporary syirkah funds.

Murabahah revenue are recognized on accrual basis using the effective rate of return method.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh PDSB yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan PDSB yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

aj. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Sesuai dengan PSAK 72, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu tertentu atau nilainya tidak material menurut Grup diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

ak. Dana Syirkah Temporer

Sesuai dengan PSAK 105, dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Revenue from Musyarakah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on Musyarakah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as right of the passive partner on the revenue sharing and as a liability.

Revenue from Mudharabah is recognized during the period of revenue sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio and recognition of revenue based on projected result is not allowed. Loss incurred due to negligence of mudharib is charged to mudharib and will not reduce the Mudharabah investment.

Third party share on the revenue sharing of temporary syirkah funds represents their share on the return of their fund managed by PDSB based on Mudharabah Mutlaqah principles, which is recognized based on distributed income (cash basis).

Distribution of income is based on revenue sharing principle, which is calculated from PDSB gross profit margin.

aj. Recognition of Revenues and Expenses on Commissions and Fees

In accordance with PSAK 72, commissions and fees income related to loan activities or specific terms and with significant amounts are treated as deferred transaction cost which directly attributable to the financial instruments and amortized over the periods of the related financial instruments using the effective interest method.

Commissions and fees, which are not related to loan activities and terms of the loan or whose amount is not material according to the Group are recognized as revenues or expenses at the time the transactions are made.

ak. Temporary Syirkah Funds

In accordance with PSAK 105, temporary syirkah funds consist of Mudharabah savings deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificates.

Mudharabah savings deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the holders of time deposit and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

al. Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Sesuai dengan PSAK 105, hak pemilik dana atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil pemilik dana yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

am. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Sesuai dengan PSAK 24, bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Atas skema pensiun normal, Bank menghitung dan mencatat jumlah yang lebih tinggi antara manfaat berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No.11/2020 dengan jumlah berdasarkan pensiun imbalan pasti.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when the Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank. On the other side, temporary syirkah funds can not be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss in proportion to the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

al. Depositors Share on Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds

In accordance with PSAK 105, depositors share on the revenue sharing of temporary syirkah funds represents their share on the return of their fund managed by the Bank based on Mudharabah Mutlaqah principles, which is recognized based on distributed income.

Distribution of income is based on revenue sharing principle, which is calculated from gross profit margin.

am. Pension Plan and Other Post-employment Benefits

In accordance with PSAK 24, the Bank established a defined benefit pension plan covering the local permanent employments. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Job Creation Law No. 11/2020. For normal pension scheme, the Bank calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), diakui langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam "saldo laba" tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amandemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

an. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Sesuai dengan PSAK 46, pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements recognised in other comprehensive income are reflected immediately in "retained earnings" not reclassified. Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

an. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

In accordance with PSAK 46, the tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

ao. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

ap. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK 5, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja informasi segmen.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ao. Earnings per Share

In accordance with PSAK 56, Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

ap. Segment Information

In accordance with PSAK 5, operating segments identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

aq. Program Loyalitas Pelanggan

Bank telah menyusun berbagai strategi, mulai dari program promosi untuk menarik minat nasabah baru, mempertahankan loyalitas nasabah *existing*, perluasan usaha hingga peningkatan layanan terhadap nasabah.

Beberapa program terkait dengan promosi antara lain sebagai berikut:

- Program Panin Super Bonanza (PSB).
- Program Panin *Member Get Member*.
- Bunga ringan KPR *fixed* berjenjang.
- Uang muka ringan untuk KPR.

Sesuai dengan PSAK 71, perlakuan akuntansi atas program loyalitas pelanggan dilakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk Panin Super Bonanza dan Panin Member Get Member, dan hadiah diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pada akun simpanan (Catatan 3ae), sebagai biaya transaksi. Sementara untuk program bunga dan uang muka ringan, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pada akun kredit (Catatan 3p).

Beberapa program terkait dengan perluasan usaha dan jaringan antara lain sebagai berikut:

- Menjadi bank pembayaran untuk transaksi pasar modal.
- Kerjasama dengan *digital fintech company* seperti PT Dana (*Direct Debit Dana*) dan Tokopedia (pembayaran *virtual account*).

Beberapa program terkait dengan pengembangan layanan, antara lain sebagai berikut:

- Penambahan fasilitas, seperti *virtual account*, *auto collection*, *payroll service*, dan transfer *online* di *transaction banking*.
- Memperluas *acceptance* kartu debit Panin Bank untuk mendukung perkembangan *e-commerce*.
- Nasabah dapat memantau *portfolio* reksadana, *bancassurance* maupun obligasi melalui fitur pada *internet banking* dan *mobile banking* Panin Bank.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

aq. Customer Loyalty Program

The Bank has developed various strategy, from promotion program to attract new customers, maintain the loyalty of existing customers, expanding business and improving the services to customers.

Few programs related to promotion, are as follows:

- Panin Super Bonanza (PSB) Program.
- Panin Member Get Member Program.
- Lower and fixed tiered interest for KPR.
- Lower Down Payment for KPR.

In accordance with PSAK 71, accounting treatment for Customer Loyalty Program is in accordance with the applicable of financial accounting standards. In relation to Panin Super Bonanza and Panin Member Get Member, and prizes are treated based on accounting policies of deposits (Note 3ae), as transaction cost. While for low interest and down payment program are treated based on accounting policies of loans (Note 3p).

Some programs related to expanding business and network, are as follows:

- To be the payment bank for capital market transaction.
- Cooperate with digital fintech company such as PT Dana (*Direct Debit Dana*) and Tokopedia (*virtual account payment*).

Few programs related to expanding service, are as follows:

- Additional facilities, such as *virtual account*, *auto collection*, *payroll service*, and *online transfer* in *banking transaction*.
- Expand the *acceptance* of Panin Bank debit card to support the development of *e-commerce*.
- Customers can monitor mutual funds portfolio, *bancassurance* and bonds via Panin Bank *internet banking* and *mobile banking* features.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Grup mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Perhitungan cadangan kerugian

Saat mengukur ECL, Bank menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimates is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgement in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the managements have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Significant increase in credit risk

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Group takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are discussed below:

Calculation of loss allowance

When measuring ECL the Bank uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima Bank, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di tahun berjalan. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 46.

Penentuan Nilai Wajar Aset Tetap

Aset tetap milik Grup diukur berdasarkan nilai wajarnya. Grup menggunakan jasa penilai independen yang terdaftar di OJK untuk mengestimasi nilai aset tetap berdasarkan pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Informasi mengenai penilai independen dan cara penentuan nilai wajar dijelaskan dalam Catatan 18 dan 54.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 18.

5. KAS

	2023
	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah	1.235.406
Dollar Singapura	31.385
Dollar Amerika Serikat	30.756
Jumlah	<u>1.297.547</u>

Kas dan *bank notes* pada kantor cabang dan mesin ATM (*Automated Teller Machines*) telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), seluruhnya merupakan pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 338.800 juta dan Rp 337.200 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Employee benefits

Determination of liability for employee benefits depends on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating the amount of such liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of increase in salaries. Different realization of the Group's assumptions is directly recognized in the consolidated other comprehensive income and therefore, generally affect the recognized amount of other comprehensive income and recorded obligation in the period in which they occur. Although the assumptions used by the Group are assessed to be appropriate and fair, significant changes in actual events or significant changes in the assumptions used can significantly affect the Group's post-employment benefits liability.

The balance of liability for employee benefits are disclosed in Note 46.

Fair Value Measurement of Premises and Equipment

Premises and equipment owned by the Group are measured based on its fair value. The Group use independent appraiser registered in OJK to estimate the value of premises and equipment based on market data approach, income approach and cost approach. Information regarding independent appraiser and valuation method to determine its fair value as described in Notes 18 and 54.

The carrying amounts of premises and equipment are disclosed in Note 18.

5. CASH

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	1.235.406	1.596.469	Rupiah
Dollar Singapura	31.385	64.830	Singapore Dollar
Dollar Amerika Serikat	30.756	43.110	United States Dollar
Jumlah	<u>1.297.547</u>	<u>1.704.409</u>	Total

Cash and bank notes at branch office and ATM (Automated Teller Machine) are insured against fire, theft and other possible risks with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), third parties, with coverage amount of Rp 338,800 million and Rp 337,200 million as of December 31, 2023 and 2022.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	7.302.084	6.561.380	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	568.354	643.423	United States Dollar
Jumlah	<u>7.870.438</u>	<u>7.204.803</u>	Total

Sesuai PBI No. 20/3/PBI/2018 dan perubahan terakhir dalam PBI No. 24/04/PBI/2022 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan pemenuhan GWM dalam mata uang Rupiah yang ditetapkan sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 9%. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. Selanjutnya sesuai PADG No. 24/8/PADG/2022 dan perubahan terakhir PADG No. 12 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata paling tinggi sebesar 4%. Sesuai PBI No. 20/4/PBI/2018 dan perubahan terakhir dalam PBI No.24/16/PBI/2022 dan PADG No. 21/22/PADG/2019 dan perubahan terakhirnya sesuai PADG No. 18 tahun 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

6. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA

In accordance with PBI No. 20/3/PBI/2018 and its latest amendment in PBI No. 24/04/PBI/2022 concerning Statutory Reserve Requirement (GWM) in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Bank, Sharia Bank, and Sharia Unit, Bank is required to fulfill the GWM in Rupiah in certain percentage from total third party funds in Rupiah which is set daily at 0% and on an average at 9%. GWM in foreign currencies is set at 4% of total third party funds in foreign currencies. Furthermore, in accordance with PADG No. 24/8/PADG/2022 and its last amendment in PADG No. 12 year 2023 concerning Incentives for Banks Providing Funds for Certain and Inclusive Economic Activities, Bank Indonesia provides incentives for Banks that provide funds for certain and inclusive economic activities in the form of easing of the obligation to fulfill the GWM in rupiah which must be fulfilled on average at a maximum of 4%. In accordance with PBI No. 20/4/PBI/2018 and its latest amendment in PBI No. 24/16/PBI/2022 and PADG No. 21/22/PADG/2019 and the latest amendment in PADG No. 18 year 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is set at 5% of total third party funds in Rupiah.

	2023		2022		
	%	Minimal/ Minimum	%	Minimal/ Minimum	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Rupiah					Rupiah
GWM Primer					Primary GWM
GWM Harian	5,68	0,00	5,14	0,00	Daily GWM
GWM Rata-rata *)	7,32	9,00	8,02	9,00	Average GWM *)
Penyangga Likuiditas					Macroprudential Intermediation
Makroprudensial	34,55	5,00	34,93	6,00	Ratio
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
GWM Primer					Primary GWM
GWM Harian	4,03	2,00	4,07	2,00	Daily GWM
GWM Rata-rata	4,03	2,00	4,03	2,00	Average GWM

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023		2022		
	%	Minimal/ Minimum	%	Minimal/ Minimum	
Entitas Anak Syariah					Sharia Subsidiary
Rupiah					Rupiah
GWM Primer					Primary GWM
GWM Harian	0,00	0,00	0,00	0,00	Daily GWM
GWM Rata-rata	5,54	7,50	6,91	6,70	Average GWM
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	21,10	3,50	22,50	4,50	Macroprudential Intermediation Ratio
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
GWM Primer					Primary GWM
GWM Harian	6,59	1,00	3,33	1,00	Daily GWM

*) Sejak 1 Juli 2022, Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rata-rata Rupiah sebesar 1% dan berubah menjadi 2% pada tanggal 1 September 2022 sebagaimana dimaksud dalam PADG No. 24/8/PADG/2022. Insentif tersebut lalu mengalami perubahan menjadi 2,8% sejak 1 April 2023 sesuai PADG No. 2 tahun 2023.

*) Since July 1, 2022, Bank that provide funds for certain and inclusive economic activities will receive incentives in the form of relaxation on the obligation to fulfill the Average Statutory Reserves in Rupiah amounting to 1% and change to 2% since September 1, 2022, according to PADG No. 24/8/PADG/2022. This incentive has amended, amounting to 2.8% since April 1, 2023 according to PADG No. 2 year 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with the required minimum deposit balances under the Bank Indonesia regulation.

7. GIRO PADA BANK LAIN

Rincian giro pada bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

7. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

Demand deposits with other banks by type of currencies are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related parties
Bank			The Bank
Dollar Australia	198.052	86.707	Australian Dollar
Dollar Selandia Baru	23.059	53.080	New Zealand Dollar
Jumlah	221.111	139.787	Total
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	24.158	34.309	Rupiah
Yen Jepang	394.228	297.126	Japanese Yen
Dollar Amerika Serikat	305.688	217.114	United States Dollar
Dollar Singapura	88.600	148.361	Singapore Dollar
Euro	84.020	110.290	Euro
Yuan China	43.526	123.493	Chinese Yuan
Poundsterling Inggris	33.604	61.019	Great Britain Poundsterling
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	84.178	105.422	Others (below 5% each)
Sub jumlah	1.058.002	1.097.134	Sub total
Entitas anak			Subsidiaries
Rupiah	18.628	15.200	Rupiah
Jumlah	1.076.630	1.112.334	Total
Jumlah Giro pada Bank Lain	1.297.741	1.252.121	Total Demand Deposits with Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35)	(50)	Allowance for impairment losses
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	1.297.706	1.252.071	Total Demand Deposits with Other Banks - Net

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Rincian giro pada bank lain berdasarkan pihak dimana Grup menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

Demand deposits with other banks by counterparties are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Rupiah			Rupiah
Bank Central Asia	17.113	21.549	Bank Central Asia
Bank Riau Kepri	3.839	7.194	Bank Riau Kepri
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1.609	3.417	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	1.597	2.149	Others (below 5% each)
Sub jumlah	<u>24.158</u>	<u>34.309</u>	Sub total
Valuta Asing			Foreign Currencies
Mizuho Bank, Tokyo	394.228	297.126	Mizuho Bank, Tokyo
Australia and New Zealand Bank, Melbourne	198.052	86.707	Australia and New Zealand Bank, Melbourne
JP Morgan Chase, New York	165.172	94.317	JP Morgan Chase, New York
United Overseas Bank, Singapore	72.663	91.887	United Overseas Bank, Singapore
ICBC Indonesia, Jakarta	43.526	123.493	ICBC Indonesia, Jakarta
Deutsche Bank AG, Frankfurt	38.423	45.720	Deutsche Bank AG, Frankfurt
Standard Chartered Bank, London	33.604	61.019	Standard Chartered Bank, London
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	309.287	402.343	Others (below 5% each)
Sub jumlah	<u>1.254.955</u>	<u>1.202.612</u>	Sub total
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bank	<u>1.279.113</u>	<u>1.236.921</u>	Total Demand Deposits with Other Banks - Bank
Entitas Anak			Subsidiaries
Rupiah			Rupiah
Bank Central Asia	15.863	12.298	Bank Central Asia
Bank Danamon	2.582	2.749	Bank Danamon
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	183	153	Others (below 5% each)
Jumlah Giro pada Bank Lain - Entitas Anak	<u>18.628</u>	<u>15.200</u>	Total Demand Deposits with Other Banks - Subsidiaries
Jumlah Giro pada Bank Lain	1.297.741	1.252.121	Total Demand Deposits with Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(35)</u>	<u>(50)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	<u>1.297.706</u>	<u>1.252.071</u>	Total Demand Deposits with Other Banks - Net

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per tahun giro pada bank lain untuk mata uang Rupiah dan valuta asing masing-masing sebesar 0,52% dan 0,99% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 0,60% dan 0,16% pada tanggal 31 Desember 2022.

The average annual effective interest rates of demand deposits with other banks in Rupiah and foreign currencies were 0.52% and 0.99% as of December 31, 2023 and 0.60% and 0.16% as of December 31, 2022, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan agunan oleh Grup.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no demand deposits from other banks that serve as collateral to the Group.

Mutasi nilai tercatat Giro pada Bank Lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount on Demand Deposits with other Banks are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	1.248.763	-	-	3.358	1.252.121	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	46.599	-	-	(979)	45.620	Changes in gross carrying amount New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Financial asset derecognized
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	46.599	-	-	(979)	45.620	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	1.295.362	-	-	2.379	1.297.741	Balance at the end of the year
	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	3.003.873	-	-	4.517	3.008.390	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	(1.755.100)	-	-	(1.159)	(1.756.259)	Changes in gross carrying amount New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(10)	-	-	-	(10)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(1.755.110)	-	-	(1.159)	(1.756.269)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	1.248.763	-	-	3.358	1.252.121	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 dan PPAP BI

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai Giro pada Bank Lain adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on Demand Deposits with other Banks are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	50	-	-	-	50	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(15)	-	-	-	(15)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan **)	(15)	-	-	-	(15)	Total deductions for the current year **)
Saldo akhir tahun	35	-	-	-	35	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 dan PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Saldo awal tahun	52	-	-	-	52	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2)	-	-	-	(2)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan **)	(2)	-	-	-	(2)	Total deductions for the current year **)
Saldo akhir tahun	50	-	-	-	50	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 dan PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai Giro pada Bank Lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on Demand Deposits with other Banks is adequate to cover the losses.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan adalah sebagai berikut:

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Placements with Bank Indonesia and other banks by types of placements are as follows:

	2023			Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate			
Rupiah					Rupiah
Pihak ketiga					Third parties
Bank					The Bank
<i>Call money</i>	30 - 31 hari/days	3,96%	1.489.914		Call money
Tabungan	-	1,25%	11		Savings deposits
Sub jumlah			1.489.925		Sub total
Entitas anak					Subsidiary
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia					Bank Indonesia Sharia
Syariah	4 hari/days	5,25%	1.876.000		Deposit Facility
Jumlah			3.365.925		Total
Valuta asing					Foreign currencies
Pihak ketiga					Third parties
Bank					The Bank
<i>Call money</i>					Call money
Dollar Amerika Serikat	4 - 92 hari/days	6,05%	1.154.775		United States Dollar
Dollar Australia	31 - 33 hari/days	4,36%	789.058		Australian Dollar
Dollar Singapura	31 - 33 hari/days	4,07%	478.730		Singapore Dollar
Euro	31 - 33 hari/days	3,75%	119.268		Euro
Poundsterling Inggris	33 hari/days	5,16%	78.506		Great Britain Poundsterling
Yuan China	33 hari/days	2,80%	32.543		Chinese Yuan
Dollar Selandia Baru	31 hari/days	5,25%	19.531		New Zealand Dollar
Jumlah			2.672.411		Total
Jumlah			6.038.336		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.688)		Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			6.035.648		Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

		2022				
		Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah					Rupiah	
Pihak ketiga					Third parties	
Bank					The Bank	
<i>Call money</i>		3 - 90 hari/days	5,55%	2.849.828	<i>Call money</i>	
Tabungan		-	1,25%	<u>11</u>	Savings deposits	
Sub jumlah				<u>2.849.839</u>	Sub total	
Entitas anak					Subsidiary	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		3 hari/days	4,75%	<u>860.000</u>	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility	
Jumlah				<u>3.709.839</u>	Total	
Valuta asing					Foreign currencies	
Pihak ketiga					Third parties	
Bank					The Bank	
<i>Call money</i>					<i>Call money</i>	
Dollar Amerika Serikat		14 - 62 hari/days	5,04%	1.619.020	United States Dollar	
Dollar Australia		31 - 33 hari/days	2,94%	1.029.393	Australian Dollar	
Dollar Singapura		32 - 65 hari/days	3,84%	475.308	Singapore Dollar	
Euro		32 hari/days	1,63%	149.235	Euro	
Poundsterling Inggris		32 hari/days	3,45%	131.503	Great Britain Poundsterling	
Deposito berjangka					Time deposit	
Dollar Amerika Serikat		4 hari/days	4,32%	<u>77.838</u>	United States Dollar	
Jumlah				<u>3.482.297</u>	Total	
Jumlah				7.192.136	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai				<u>(1.633)</u>	Allowance for impairment losses	
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih				<u>7.190.503</u>	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net	

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan pihak dimana Grup menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia and other banks by counterparties are as follows:

		2023	2022		
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah				Rupiah	
Pihak ketiga				Third parties	
Bank				The Bank	
<i>Call Money</i>				<i>Call Money</i>	
Bank Indonesia		589.914	1.299.828	Bank Indonesia	
Bank J-Trust, Jakarta		500.000	600.000	Bank J-Trust, Jakarta	
BPD Jawa Tengah, Semarang		400.000	200.000	BPD Jawa Tengah, Semarang	
BPD Papua, Jayapura		-	300.000	BPD Papua, Jayapura	
Bank Victoria International, Jakarta		-	200.000	Bank Victoria International, Jakarta	
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)		-	250.000	Others (below 5% each)	
Sub jumlah		<u>1.489.914</u>	<u>2.849.828</u>	Sub total	
Tabungan				Savings deposits	
Bank Negara Indonesia		<u>11</u>	<u>11</u>	Bank Negara Indonesia	
Jumlah		<u>1.489.925</u>	<u>2.849.839</u>	Total	
Entitas anak				Subsidiary	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah				Bank Indonesia Sharia Deposit Facility	
Bank Indonesia		<u>1.876.000</u>	<u>860.000</u>	Bank Indonesia	
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Rupiah		<u>3.365.925</u>	<u>3.709.839</u>	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Rupiah	

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Valuta Asing			Foreign currencies
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
<i>Call Money</i>			<i>Call Money</i>
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Bank Mandiri, Cayman Island	923.820	467.025	Bank Mandiri, Cayman Island
Bank Mega, Jakarta	153.970	124.540	Bank Mega, Jakarta
Bank Mandiri, London	76.985	389.187	Bank Mandiri, London
Bank Negara Indonesia, Hongkong	-	467.025	Bank Negara Indonesia, Hongkong
Bank Resona Perdania, Jakarta	-	93.405	Bank Resona Perdania, Jakarta
BPD Kalimantan Timur, Samarinda	-	77.838	BPD Kalimantan Timur, Samarinda
Sub jumlah	<u>1.154.775</u>	<u>1.619.020</u>	Sub total
Dollar Australia			Australian Dollar
National Bank of Kuwait, Singapura	789.058	1.029.393	National Bank of Kuwait, Singapore
Dollar Singapura			Singapore Dollar
Bank Negara Indonesia, Singapura	385.319	475.308	Bank Negara Indonesia, Singapore
MUFG Bank, Singapura	93.411	-	MUFG Bank, Singapore
Sub jumlah	<u>478.730</u>	<u>475.308</u>	Sub total
Euro			Euro
MUFG Bank, Singapura	119.268	149.235	MUFG Bank, Singapore
Poundsterling Inggris			Great Britain Poundsterling
MUFG Bank, Singapura	78.506	131.503	MUFG Bank, Singapore
Yuan China			Chinese Yuan
MUFG Bank, Singapura	32.543	-	MUFG Bank, Singapore
Dollar Selandia Baru			New Zealand Dollar
MUFG Bank, Singapura	19.531	-	MUFG Bank, Singapore
<i>Deposito Berjangka</i>			<i>Time Deposit</i>
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Bank Indonesia	-	77.838	Bank Indonesia
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Valuta asing	<u>2.672.411</u>	<u>3.482.297</u>	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Foreign currencies
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	6.038.336	7.192.136	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(2.688)</u>	<u>(1.633)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih	<u>6.035.648</u>	<u>7.190.503</u>	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The carrying amount of placements with Bank Indonesia and other banks at amortized cost were as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.038.336	7.192.136	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 20)	17.044	9.956	Accrued interest receivable (Note 20)
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(2.688)</u>	<u>(1.633)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>6.052.692</u>	<u>7.200.459</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijadikan agunan oleh Grup.

On December 31, 2023 and 2022, there are no placements with Bank Indonesia and other banks that serve as collateral to the Group.

Mutasi nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount of placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	2023				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Saldo awal tahun	6.332.136	-	-	860.000	7.192.136	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto	-	-	-	-	-	Changes in gross carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	4.162.325	-	-	1.876.000	6.038.325	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(6.332.125)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(860.000)</u>	<u>(7.192.125)</u>	Financial asset derecognized
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	<u>(2.169.800)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.016.000</u>	<u>(1.153.800)</u>	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	<u>4.162.336</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.876.000</u>	<u>6.038.336</u>	Balance at the end of the year
	2022				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Saldo awal tahun	5.875.458	-	-	1.400.000	7.275.458	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto	(3)	-	-	-	(3)	Changes in gross carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	6.332.125	-	-	860.000	7.192.125	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(5.875.444)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.400.000)</u>	<u>(7.275.444)</u>	Financial asset derecognized
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	<u>456.678</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(540.000)</u>	<u>(83.322)</u>	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	<u>6.332.136</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>860.000</u>	<u>7.192.136</u>	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

Mutasi cadangan penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	1.633	-	-	-	1.633	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	2.689	-	-	-	2.689	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.634)	-	-	-	(1.634)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan **)	1.055	-	-	-	1.055	Total additions for the current year **)
Saldo akhir tahun	2.688	-	-	-	2.688	Balance at the end of the year
	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	564	-	-	-	564	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	1.633	-	-	-	1.633	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(564)	-	-	-	(564)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan **)	1.069	-	-	-	1.069	Total additions for the current year **)
Saldo akhir tahun	1.633	-	-	-	1.633	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin muncul.

Management believes that the allowance for impairment losses on placement with Bank Indonesia and other banks is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible placement with Bank Indonesia and other banks.

9. EFEK-EFEK

Rincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga					Third parties
Bank					The Bank
Rupiah	35.174.556		28.908.890		Rupiah
Dollar Amerika Serikat	1.349.086		1.772.324		United States Dollar
Euro	170.029		215.087		Euro
Entitas anak - Rupiah	2.317.002		2.502.170		Subsidiaries - Rupiah
Jumlah efek-efek	39.010.673		33.398.471		Total securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39)		(53)		Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-Efek - Bersih	39.010.634		33.398.418		Total Securities - Net

9. SECURITIES

Securities classified according to currencies are as follows:

Klasifikasi efek-efek berdasarkan jenis dan tujuan adalah sebagai berikut:

Securities classified according to type and purpose were as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.029.342	3.138.549	Indonesian Government bonds
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	2.164.808	-	Bank Indonesia Rupiah Securities
Sukuk Negara	1.218.931	1.221.873	Government Sukuk
Obligasi lainnya	268.573	271.264	Other bonds
Sukuk lainnya	25.000	25.000	Other Sukuk
Wesel tagih	4.039	16.002	Export drafts
Entitas anak			Subsidiaries
Sukuk Negara	<u>320.287</u>	<u>370.094</u>	Government Sukuk
Jumlah efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi	<u>7.030.980</u>	<u>5.042.782</u>	Total securities measured at amortized cost
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	18.651.686	19.093.216	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	2.533.492	2.501.866	Government Sukuk
Obligasi lainnya	707.589	718.114	Other bonds
Surat utang jangka menengah	58.562	62.442	Medium term notes
Reksadana	-	505.034	Mutual funds
Entitas anak			Subsidiaries
Sukuk Negara	<u>1.996.715</u>	<u>2.132.076</u>	Government Sukuk
Jumlah efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>23.948.044</u>	<u>25.012.748</u>	Total securities measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss (FVTPL)
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.891.856	3.049.040	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	3.151.094	290.393	Government Sukuk
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	489.245	-	Bank Indonesia Rupiah Securities
Surat Perbendaharaan Negara	496.164	-	Government Treasury Bills
Surat utang jangka menengah	<u>3.290</u>	<u>3.508</u>	Medium term notes
Jumlah efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	<u>8.031.649</u>	<u>3.342.941</u>	Total securities measured at fair value through profit or loss
Jumlah efek-efek Cadangan kerugian penurunan nilai	39.010.673	33.398.471	Total securities
	<u>(39)</u>	<u>(53)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-Efek - Bersih	<u>39.010.634</u>	<u>33.398.418</u>	Total Securities - Net

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk efek-efek adalah sebagai berikut:

The average annual effective interest rates of the above securities are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Wesel tagih	9,03%	9,93%	Export drafts
Surat Perbendaharaan Negara	6,60%	-	Government Treasury Bills
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	6,20%	-	Bank Indonesia Rupiah Securities
Obligasi	6,10%	6,22%	Bonds
Sukuk	5,65%	5,59%	Sukuk
Surat utang jangka menengah	1,20%	0,67%	Medium term notes
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi	5,79%	5,05%	Bonds
Sukuk	4,28%	3,51%	Sukuk
Wesel tagih	-	5,09%	Export drafts
Euro			Euro
Obligasi	2,63%	2,63%	Bonds

Jangka waktu efek-efek sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The terms of the above securities from acquisition dates to maturity dates were as follows:

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Obligasi	2 bulan - 28 tahun/ 2 months - 28 years	10 bulan - 30 tahun/ 10 months - 30 years	Bonds
Sukuk	3 bulan - 26 tahun/ 3 months - 26 years	9 bulan - 26 tahun/ 9 months - 26 years	Sukuk
Surat utang jangka menengah	9 tahun/years	9 tahun/years	Medium term notes
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	6 - 9 bulan/ months	-	Bank Indonesia Rupiah Securities
Surat Perbendaharaan Negara	2 bulan/ months	-	Government Treasury Bills
Wesel tagih	59 - 181 hari/ days	67 - 180 hari/days	Export drafts
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi	1 - 50 tahun/ years	5 - 50 tahun/ years	Bonds
Sukuk	10 tahun/years	10 tahun/ years	Sukuk
Wesel tagih	-	14 hari/ days	Export drafts
Euro			Euro
Obligasi	7 - 12 tahun/ years	7 - 12 tahun/years	Bonds

Efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Securities measured at amortized cost are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Rata-rata suku bunga efektif untuk efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk mata uang Rupiah dan valuta asing ini masing-masing sebesar 7,65% dan 6,43% per tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 8,36% dan 5,39% per tahun pada tanggal 31 Desember 2022.

Effective interest rate in these securities measured at amortized cost in Rupiah and foreign currencies on December 31, 2023 were 7.65% and 6.43% per annum and on December 31, 2022 were 8.36% and 5.39% per annum, respectively.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi berdasarkan beberapa perusahaan pemeringkat pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Securities classified according to issuers and rating of bonds from various rating companies as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	
Rupiah					Rupiah
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	2.654.053		-		Bank Indonesia Rupiah Securities
Surat Perbendaharaan Negara	496.164		-		Government Treasury Bills
Obligasi / Sukuk					Bonds / Sukuk
Pemerintah Republik Indonesia	33.542.861	BBB	30.081.397	BBB	Government of Republic of Indonesia
Perusahaan Lainnya					Other Companies
PT Bank KB Bukopin	597.000	AAA (idn)	605.190	AAA(idn)	PT Bank KB Bukopin
PT KB Finansia Multi Finance	110.589	AAA (idn)	112.924	AAA(idn)	PT KB Finansia Multi Finance
PT Indosat Ooredoo	25.000	AA+ (idn)	25.000	AA(idn)	PT Indosat Ooredoo
Surat utang jangka menengah					Medium term notes
Badan Usaha Milik Negara					State owned enterprises
PT Barata Indonesia Seri B	32.242		34.378		PT Barata Indonesia Seri B
PT Barata Indonesia Seri A	29.610		31.572		PT Barata Indonesia Seri A
Wesel tagih					Export drafts
Perusahaan lainnya	4.039		15.565		Other Companies
Reksadana					Mutual funds
Perusahaan lainnya					Other Companies
Bahana Seri D Optima Protected Fund 56	-		280.570		Bahana Seri D Optima Protected Fund 56
Bahana Seri D Optima Protected Fund 55	-		224.464		Bahana Seri D Optima Protected Fund 55
Jumlah Efek-efek - Rupiah	37.491.558		31.411.060		Total Securities - Rupiah
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
Obligasi / Sukuk					Bonds / Sukuk
Pemerintah Republik Indonesia	1.080.513	BBB	1.500.623	BBB	Government of Republic of Indonesia
Badan Usaha Milik Negara					State-owned enterprises
PT Perusahaan Gas Negara	192.363	BBB-	194.263	BBB-	PT Perusahaan Gas Negara
PT Perusahaan Pelayaran Indonesia	76.210	BBB	77.001	BBB	PT Perusahaan Pelayaran Indonesia
Wesel tagih					Export drafts
Perusahaan lainnya	-		437		Other Companies
Jumlah Efek-efek - Dollar Amerika Serikat	1.349.086		1.772.324		Total Securities - United States Dollar
Euro					Euro
Obligasi					Bonds
Pemerintah Republik Indonesia	170.029	BBB	215.087	BBB	Government of Republic of Indonesia
Jumlah Efek-efek	39.010.673		33.398.471		Total Securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39)		(53)		Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-efek - Bersih	39.010.634		33.398.418		Total Securities - Net

Efek-efek telah diperingkat oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan Grup, yaitu Pefindo dan PT Fitch Ratings Indonesia.

Securities are rated by third parties that are not related to the Group, namely Pefindo and PT Fitch Ratings Indonesia.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E ditujukan untuk biaya izin kepada Pemerintah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri E were utilized to finance license fee to government.

Biaya perolehan efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 7.084.841 juta dan Rp 5.067.065 juta. Diskonto yang belum diamortisasi bersih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 53.860 juta dan Rp 24.283 juta.

Cost of securities measured at amortized cost as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 7,084,841 million and Rp 5,067,065 million, respectively. Unamortized net discount as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 53,860 million and Rp 24,283 million, respectively.

Kerugian yang belum direalisasi akibat peningkatan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 572.911 juta dan Rp 729.473 juta, yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, efek-efek yang dijadikan sebagai efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23), adalah Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar Rp 10.360.000 juta dan Rp 2.600.000 juta.

Cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 39 juta dan Rp 53 juta. Cadangan tersebut dibentuk untuk surat berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan agunan oleh Grup.

Pada tahun 2023 dan 2022, terdapat beberapa efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi seluruhnya dengan nilai nominal sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Obligasi Pemerintah	519.287	-	Government Bonds
Sukuk Negara	50.000	514.848	Government Sukuk
Sukuk Bank Indonesia	-	3.669.024	Bank Indonesia Sukuk
Obligasi Subordinasi	-	92.000	Subordinated Bonds
Jumlah	<u>569.287</u>	<u>4.275.872</u>	Total

Nilai tercatat dari efek-efek yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Efek-efek	7.030.980	5.042.782	Securities
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 20)	128.013	89.852	Accrued interest receivables (Note 20)
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(39)</u>	<u>(53)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>7.158.954</u>	<u>5.132.581</u>	Total

Unrealized loss from increase in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), net of deferred income tax on December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp 572,911 million and Rp 729,473 million, respectively, are recorded as other comprehensive income (Note 33).

As of December 31, 2023 and 2022, securities which serve as collateral for securities sold with agreements to repurchase (Note 23), are Indonesia Government Bank amounted to Rp 10,360,000 million and Rp 2,600,000 million, respectively.

The allowance for impairment losses of securities as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 39 million and Rp 53 million, respectively. The allowance is formed for securities classified at amortized cost.

On December 31, 2023 and 2022, there are no securities that serve as collateral to the Group.

In 2023 and 2022, certain securities that are measured at amortized cost has matured and were settled with nominal value as follows:

The net carrying amount of securities measured at amortized cost is as follows:

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Rincian obligasi rekapitalisasi pemerintah beserta tanggal jatuh tempo dan frekuensi pembayaran bunga adalah sebagai berikut:

Recapitalization Government Bonds

The details of recapitalization government bonds along with maturity date and interest payment frequency are as follows:

Nama Efek/Securities Name	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Frekuensi Pembayaran Bunga/Interest Payment Frequency	2023	2022
			Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah				
Bank				
Fixed Rate (FR)/Fixed Rate Bonds				
FR 0087	15 Februari/February 15, 2031	Semesteran/Semi annually	8.114.305	8.525.385
FR 0086	15 April/April 15, 2026	Semesteran/Semi annually	7.885.903	7.838.672
FR 0090	15 April/April 15, 2027	Semesteran/Semi annually	3.153.503	3.568.754
FR 0081	15 Juni/June 15, 2025	Semesteran/Semi annually	896.706	894.529
FR 0040	15 September/September 15, 2025	Semesteran/Semi annually	609.188	614.006
FR 0045	15 Mei/May 15, 2037	Semesteran/Semi annually	544.416	544.191
FR 0101	15 April/ April 15, 2029	Semesteran/Semi annually	516.938	-
FR 0044	15 September/September 15, 2024	Semesteran/Semi annually	320.124	320.409
FR 0062	15 April/April 15, 2042	Semesteran/Semi annually	311.464	5
FR 0083	15 April/April 15, 2040	Semesteran/Semi annually	309.434	349.371
FR 0096	15 Februari/ February 15, 2033	Semesteran/Semi annually	301.947	501
FR 0097	15 Juni/June 15, 2043	Semesteran/Semi annually	292.882	20.017
FR 0095	15 Agustus/August 15, 2028	Semesteran/Semi annually	253.570	13.361
FR 0089	15 Agustus/August 15, 2051	Semesteran/Semi annually	214.631	87.678
FR 0100	15 Februari/ February 15, 2034	Semesteran/Semi annually	180.514	-
FR 0091	15 April/April 15, 2032	Semesteran/Semi annually	132.656	147.951
FR 0098	15 Juni/June 15, 2038	Semesteran/Semi annually	111.888	12.413
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	Semesteran/Semi annually	106.577	-
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	Semesteran/ Semi annually	105.220	-
FR 0059	15 Mei/May 15, 2027	Semesteran/Semi annually	68.959	186.565
FR 0065	15 Mei/May 15, 2033	Semesteran/Semi annually	47.963	52.276
FR 0080	15 Juni/June 15, 2035	Semesteran/Semi annually	32.898	254.489
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	Semesteran/Semi annually	24.256	489
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	Semesteran/Semi annually	6.321	-
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	Semesteran/Semi annually	4.626	-
FR 0092	15 Juni/June 15, 2042	Semesteran/Semi annually	829	25.856
FR 0084	15 Februari/February 15, 2026	Semesteran/Semi annually	-	146.389
FR 0093	15 Juli/ July 15, 2037	Semesteran/Semi annually	-	93.691
FR 0039	15 Agustus/August 15, 2023	Semesteran/Semi annually	-	50.332
FR 0075	15 Mei/May 15, 2038	Semesteran/Semi annually	-	44.859
FR 0076	15 Mei/May 15, 2048	Semesteran/Semi annually	-	4.129
FR 0085	15 April/April 15, 2031	Semesteran/Semi annually	-	526
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	Semesteran/Semi annually	-	111
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)/ Indonesia Retail Bonds				
ORI 019	15 Februari/February 15, 2024	Bulanan/Monthly	3.366	116
ORI 021	15 Februari/ February 15, 2025	Bulanan/Monthly	1.415	149
ORI 020	15 Oktober/October 15, 2024	Bulanan/Monthly	771	-
ORI 024	15 Oktober/ October 15, 2029	Bulanan/Monthly	27	-
ORI 022	15 Oktober/ October 15, 2025	Bulanan/Monthly	-	1.288
ORI 018	15 Oktober/October 15, 2023	Bulanan/Monthly	-	100
Project Based Sukuk (PBS)/ Project Based Sukuk (PBS)				
PBS 031	15 Juli/July 15, 2024	Semesteran/Semi annually	1.723.406	1.092.886
PBS 026	15 Oktober/October 15, 2024	Semesteran/Semi annually	1.130.445	640.262
PBS 017	15 Oktober/October 15, 2025	Semesteran/Semi annually	800.602	798.824
PBS 033	15 Juni/ June 15, 2047	Semesteran/Semi annually	679.141	52.415
PBS 032	15 Juli/July 15, 2026	Semesteran/Semi annually	630.469	623.132
PBS 038	15 Desember/ December 15, 2049	Semesteran/Semi annually	622.415	-
PBS 036	15 Agustus/ August 15, 2025	Semesteran/Semi annually	349.192	-
PBS 028	15 Oktober/October 15, 2046	Semesteran/Semi annually	348.051	348.099
PBS 003	15 Januari/ January 15,2027	Semesteran/Semi annually	306.629	9.804
PBS 037	15 Maret/ March 15, 2036	Semesteran/Semi annually	76.664	-
PBS 029	15 Maret/March 15, 2034	Semesteran/Semi annually	-	213.953
PBS 022	15 April/April 15, 2034	Semesteran/Semi annually	-	372

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)

Nama Efek/Securities Name	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Frekuensi Pembayaran Bunga/Interest Payment Frequency	2023	2022
			Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah				
Bank				
Sukuk Ritel (SRI)/ Retail Sukuk				
SR 014	10 Maret/ March 10, 2024	Bulanan/Monthly	3.405	-
SR 016	10 Maret/ March 10, 2025	Bulanan/Monthly	1.275	320
SR 015	10 September/ September 10, 2024	Bulanan/Monthly	866	541
SR 018	10 Maret/ March 10, 2026	Bulanan/Monthly	2	-
SR 017	10 September/ September 10, 2025	Bulanan/Monthly	-	10
SR 013	10 September/September 10, 2023	Bulanan/Monthly	-	1
Sub jumlah/Sub total			<u>31.225.859</u>	<u>27.579.227</u>
Entitas anak				
<i>Project Based Sukuk (PBS)/</i> Project Based Sukuk (PBS)				
PBS 029	15 Maret/March 15, 2034	Semesteran/Semi annually	1.331.070	1.306.122
PBS 032	15 Juli/July 15, 2026	Semesteran/Semi annually	431.370	433.350
PBS 017	15 Oktober/October 15, 2025	Semesteran/Semi annually	298.500	301.560
PBS 030	15 Juli/July 15, 2028	Semesteran/Semi annually	216.789	216.131
PBS 003	15 Januari/January 15, 2027	Semesteran/Semi annually	20.065	20.087
PBS 004	15 Februari/February 15, 2037	Semesteran/Semi annually	19.208	19.148
PBS 027	15 Mei/May 15, 2023	Semesteran/Semi annually	-	110.142
PBS 005	15 April/April 15, 2043	Semesteran/Semi annually	-	95.630
Sub jumlah/Sub total			<u>2.317.002</u>	<u>2.502.170</u>
Jumlah Rupiah/Total Rupiah			<u>33.542.861</u>	<u>30.081.397</u>
Valuta asing/Foreign currencies				
Bank				
Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar				
<i>Republic of Indonesia Bonds (ROI)/</i> Republic of Indonesia Bonds (ROI)				
ROI 121035 8,5 REGS	12 Oktober/October 12, 2035	Semesteran/Semi annually	322.562	326.100
ROI 120331 1,85	12 Maret/March 12, 2031	Semesteran/Semi annually	221.561	217.702
ROI 170237 6,625 REGS	17 Februari/February 17, 2037	Semesteran/Semi annually	209.858	211.272
ROI 170138 7,75 REGS	17 Januari/January 17, 2038	Semesteran/Semi annually	89.115	89.980
ROI 150125 4,125 REGS	15 Januari/ January 15, 2025	Semesteran/Semi annually	3.815	-
ROI 110153 5,65	11 Januari/ January 11, 2053	Semesteran/Semi annually	842	-
ROI 110133 4,85	11 Januari/ January 11, 2033	Semesteran/Semi annually	784	-
ROI 120371 3,35	12 Maret/March 12, 2071	Semesteran/Semi annually	565	519
ROI 200927 4,15	20 September/ September 20, 2027	Semesteran/Semi annually	456	1.224
ROI 110123 2,95	11 Januari/January 11, 2023	Semesteran/Semi annually	-	420.314
<i>Republic of Indonesia Bonds Sukuk (ROI)/</i> Republic of Indonesia Bonds Sukuk (ROI)				
ROI SUKUK 290327 4,15 REGS	29 Maret/March 29, 2027	Semesteran/Semi annually	153.970	155.675
ROI SUKUK 290326 4,55 REGS	29 Maret/March 29, 2026	Semesteran/Semi annually	76.985	77.837
Jumlah Dollar Amerika Serikat/Total United States Dollar			<u>1.080.513</u>	<u>1.500.623</u>
Euro/Euro				
<i>Republic of Indonesia Bonds (ROI)/</i> Republic of Indonesia Bonds (ROI)				
ROI 180724 2,15 REGS	18 Juli/July 18, 2024	Tahunan/Annually	119.243	116.017
ROI 140628 3,75 REGS	14 Juni/June 14, 2028	Tahunan/Annually	50.786	49.362
ROI 140623 2,625 REGS	14 Juni/June 14, 2023	Tahunan/Annually	-	49.708
Jumlah Euro/Total Euro			<u>170.029</u>	<u>215.087</u>
Jumlah/Total			<u>34.793.403</u>	<u>31.797.107</u>

Sukuk negara yang dimiliki Bank dan entitas anak ditujukan untuk membiayai infrastruktur dan kegiatan APBN.

Government sukuk owned by Bank and subsidiaries were utilized to finance infrastructures and APBN's activity.

Reksadana

Rincian reksadana adalah sebagai berikut:

Mutual Funds

Mutual funds are as follows:

Unit penyertaan/ Investment unit	2022			Nilai wajar/ Fair value Rp Juta/ Rp Million	The Bank Bahana Seri D Optima Protected Fund 56 Bahana Seri D Optima Protected Fund 55 Total
	Nilai aset bersih per unit/ Net asset value per unit Rp	Laba yang belum direalisasi/ Unrealized gain Rp Juta/ Rp Million			
Bank					
Bahana Seri D Optima Protected Fund 56	250.000.000	1.122,28	30.570	280.570	Bahana Seri D Optima Protected Fund 56
Bahana Seri D Optima Protected Fund 55	200.000.000	1.122,32	24.464	224.464	Bahana Seri D Optima Protected Fund 55
Jumlah	450.000.000		55.034	505.034	Total

Wesel Tagih

Rincian wesel tagih adalah sebagai berikut:

Export Drafts

Export drafts are as follows:

	Suku bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2023		
			Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	8,00%	12 Februari/ February 12, 2024	1.505		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	8,50%	7 Februari/ February 7, 2024	1.381		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank DKI	10,00%	19 Juni/ June 19, 2024	480		PT Bank DKI
PT Bank Central Asia	10,00%	6 Mei/ May 6, 2024	400		PT Bank Central Asia
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	8,00%	18 Maret/ March 18, 2024	172		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	15 Januari/ January 15, 2024	101		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Jumlah			4.039		Total

	Suku bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2022		
			Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero)	8,00%	20 Maret/March 20, 2023	3.736		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	11,00%	14 Februari/February 14, 2023	2.811		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	11,00%	4 Januari/January 4, 2023	1.151		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	11,00%	11 April/April 11, 2023	1.144		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	8,00%	29 Mei/May 29, 2023	1.014		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank DKI	10,00%	4 Januari/January 4, 2023	722		PT Bank DKI
PT Bank Mandiri (Persero)	8,00%	10 April/April 10, 2023	631		PT Bank Mandiri (Persero)
HSBC Bank, Ltd.	10,00%	7 Februari/February 7, 2023	626		HSBC Bank, Ltd.
PT Bank Mandiri (Persero)	8,00%	27 April/April 27, 2023	511		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank DKI	10,00%	25 Januari/January 25, 2023	501		PT Bank DKI
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	24 Januari/January 24, 2023	420		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
HSBC Bank, Ltd.	10,00%	9 Januari/January 9, 2023	411		HSBC Bank, Ltd.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	11,00%	17 April/April 17, 2023	407		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	8,00%	24 Mei/May 24, 2023	380		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	10,00%	14 Februari/February 14, 2023	324		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank DKI	10,00%	14 Juni/June 14, 2023	286		PT Bank DKI
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	24 Maret/March 24, 2023	224		PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	10,00%	24 Januari/January 24, 2023	155		PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)	10,00%	13 Februari/February 13, 2023	111		PT Bank Mandiri (Persero)
Sub Jumlah			15.565		Sub Total
Valuta asing					Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
Shinhan Bank	4,00%	6 Januari/January 6, 2023	234		Shinhan Bank
Taiwan Cooperative Bank, Ltd.	4,00%	9 Januari/January 9, 2023	203		Taiwan Cooperative Bank, Ltd.
Sub Jumlah			437		Sub Total
Jumlah			16.002		Total

Seluruh transaksi wesel tagih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berasal dari transaksi usaha.

All export drafts as of December 31, 2023 and 2022 are from business transaction.

Mutasi nilai tercatat efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount on securities measured at amortized cost are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	4.672.688	-	-	370.094	5.042.782	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto	(11.162)	-	-	185	(10.977)	Changes in gross carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	2.585.525	-	-	-	2.585.525	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(536.358)	-	-	(49.992)	(586.350)	Financial asset derecognized
Total penambahan dan pengurangan tahun berjalan	2.038.005	-	-	(49.807)	1.988.198	Total additions and deductions for the current year
Saldo akhir tahun	6.710.693	-	-	320.287	7.030.980	Balance at the end of the year
	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	5.113.692	-	-	1.512.205	6.625.897	Balance at the beginning of the year
Perubahan jumlah tercatat bruto	133.871	-	-	62	133.933	Changes in gross carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	16.003	-	-	280.867	296.870	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(590.878)	-	-	(1.423.040)	(2.013.918)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	(441.004)	-	-	(1.142.111)	(1.583.115)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	4.672.688	-	-	370.094	5.042.782	Balance at the end of the year

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on securities measured at amortized cost are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	53	-	-	-	53	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	(12)	-	-	-	(12)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	1	-	-	-	1	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3)	-	-	-	(3)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan **)	(14)	-	-	-	(14)	Total deductions for the current year **)
Saldo akhir tahun	39	-	-	-	39	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	179	-	-	15.908	16.087	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	34	-	-	-	34	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	3	-	-	-	3	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(163)	-	-	(15.908)	(16.071)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan **)	(126)	-	-	(15.908)	(16.034)	Total deductions for the current year **)
Saldo akhir tahun	53	-	-	-	53	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

Management believes that the allowance for impairment losses on securities is adequate to cover the losses, which might arise from uncollectible securities.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif dalam bentuk pembelian dan penjualan berjangka valuta asing (*forward*) dan *swap* untuk tujuan *trading*.

Transaksi *swap* terdiri dari kontrak *swap* mata uang asing. Transaksi tersebut merupakan komitmen untuk melunasi liabilitas dalam mata uang asing dengan kurs yang ditentukan terlebih dahulu.

Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya perubahan nilai potensial fluktuasi kurs mata uang, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada Bank. Jangka waktu dari pembelian dan penjualan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berkisar antara 5 hari sampai 180 hari dan 4 hari sampai 179 hari.

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023				
	Jumlah nosional/ Notional amount		Nilai wajar/ Fair value		
	Beli/ Buy	Jual/ Sell	Tagihan/ Receivables	Liabilitas/ Payables	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga					Third parties
Kontrak berjangka mata uang asing	1.713.499	1.124.054	7.496	11.454	Currency forward contract
<i>Swap</i>	1.728.369	2.292.613	12.941	4.978	Swap
Jumlah	3.441.868	3.416.667	20.437	16.432	Total

10. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

The Bank's derivative instruments, principally consist of forward foreign exchange contracts and swap contracts for trading purposes.

Swap transactions consists of foreign currency swap contracts. Such currency swap transactions are commitments to settle in cash on a future date an obligation in foreign currency at a predetermined rate of exchange.

The market risk of derivative transactions arise from potential changes in value due to fluctuations in foreign exchange rates, while credit risk is the possibility that a loss may occur due to the failure of a counterparty to fulfill its obligations. According to the terms of the contracts as of December 31, 2023 and 2022, the Bank's derivative instruments have terms range from 5 days to 180 days and 4 days to 179 days, respectively.

The details of derivative receivables and payables as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Jumlah nosional/ Notional amount		Nilai wajar/ Fair value		
	Beli/ Buy	Jual/ Sell	Tagihan/ Receivables	Liabilitas/ Payables	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga					Third parties
Kontrak berjangka mata uang asing					Currency forward contract
Swap	1.349.501	2.138.550	10.870	10.630	Swap
	<u>3.231.813</u>	<u>2.314.202</u>	<u>18.515</u>	<u>18.931</u>	
Jumlah	<u>4.581.314</u>	<u>4.452.752</u>	<u>29.385</u>	<u>29.561</u>	Total

Tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 adalah dalam mata uang Rupiah dan Yuan Cina dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

The derivative receivables and payables are denominated in Rupiah and Chinese Yuan as of December 31, 2023 and and in Rupiah and United States Dollar as of December 31, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah keuntungan dan kerugian atas tagihan dan liabilitas derivatif yang diakui dalam laba rugi dalam akun "pendapatan transaksi valuta asing - bersih" masing-masing sebesar Rp 58.017 juta dan Rp 54.711 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, the amount of gain or loss on derivative receivables and payables recognized in profit or loss under "gain on foreign exchange transactions - net" amounted to Rp 58,017 million and Rp 54,711 million, respectively.

11. EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

11. SECURITIES PURCHASED WITH AGREEMENTS TO RESELL – THIRD PARTIES

The details of securities purchased with agreements to resell are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal Mulai/ Starting Date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2023		
				Nilai penjualan kembali/ Resale amount	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest income	Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/days	14 Desember/ December 14,2023	2 Januari/ January 2, 2024	943.868	166	943.702
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	17 hari/ days	18 Desember/ December 18,2023	4 Januari/ January 4,2024	848.970	444	848.526
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	23 hari/ days	11 Desember/ December 11, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	788.679	278	788.401
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/days	20 Desember/ December 20,2023	8 Januari/ January 8, 2024	486.386	597	485.789
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	17 hari/days	18 Desember/ December 18,2023	4 Januari/ January 4, 2024	471.094	246	470.848
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/days	20 Desember/ December 20,2023	8 Januari/ January 8, 2024	287.303	352	286.951
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/days	20 Desember/ December 20,2023	8 Januari/ January 8, 2024	283.053	347	282.706
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/days	14 Desember/ December 14,2023	2 Januari/ January 2, 2024	282.887	50	282.837
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	23 hari/ days	11 Desember/ December 11, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	248.851	88	248.763
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Indonesian Bank Rupiah Securities	19 hari/ days	20 Desember/ December 20, 2023	8 Januari/ January 8, 2024	188.829	232	<u>188.597</u>
Jumlah Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ Total Securities Purchased with Agreements to Resell						4.827.120
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance of impairment losses						<u>(329)</u>
Jumlah Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - Bersih/ Total Securities Purchased with Agreements to Resell - Net						<u>4.826.791</u>

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal Mulai/ Starting Date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2022		
				Nilai peniulan kembali/ Resale amount	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest income	Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	28 hari/ days	23 Desember/ December 23, 2022	20 Januari/ January 20, 2023	4.315.082	13.647	4.301.435
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/ days	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	4.185.244	3.340	4.181.904
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	28 hari/ days	26 Desember/ December 26, 2022	23 Januari/ January 23, 2023	1.450.247	5.310	1.444.937
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	28 hari/ days	28 Desember/ December 28, 2022	25 Januari/ January 25, 2023	716.737	2.868	<u>713.869</u>
Jumlah Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - Bersih/ Total Securities Purchased with Agreements to Resell - Net						<u>10.642.145</u>

Seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berlokasi di Jakarta.

All securities purchased with agreements to resell are located in Jakarta.

Suku bunga efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berkisar antara 6,30% - 6,38% pada 31 Desember 2023 dan berkisar antara 5,75% - 6,03% pada 31 Desember 2022.

Interest rate of securities purchased with agreements to resell are ranged between 6.30% - 6.38% on December 31, 2023 and between 5.75% - 6.03% on December 31, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar efek yang dijadikan sebagai jaminan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, adalah Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar Rp 5.113.375 juta dan Rp 11.253.285 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, the fair value of securities used to secure the securities purchased with agreements to resell is Indonesian Government Bonds amounted to Rp 5,113,375 million and Rp 11,253,285 million, respectively.

Mutasi nilai tercatat untuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah sebagai berikut:

The changes in net carrying amount of securities purchased with agreement to resell are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	10.642.145	-	-	10.642.145	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	4.827.120	-	-	4.827.120	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(10.642.145)</u>	-	-	<u>(10.642.145)</u>	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	<u>(5.815.025)</u>	-	-	<u>(5.815.025)</u>	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	<u>4.827.120</u>	-	-	<u>4.827.120</u>	Balance at the end of the year

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	15.960.099	-	-	15.960.099	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	10.642.145	-	-	10.642.145	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(15.960.099)	-	-	(15.960.099)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	(5.317.954)	-	-	(5.317.954)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	10.642.145	-	-	10.642.145	Balance at the end of the year

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance of impairment losses of securities purchased with agreement to resell are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	329	-	-	329	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	329	-	-	329	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	329	-	-	329	Balance at the end of the year

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	1.036	-	-	1.036	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.036)	-	-	(1.036)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	(1.036)	-	-	(1.036)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	-	-	-	-	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible securities purchased with agreement to resell.

12. KREDIT

Kredit memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

a. Jenis Pinjaman

12. LOANS

Loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

a. By Type of Loan

2023							
	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah						Rupiah	
Kredit modal kerja	37.481.767	1.591.559	21.528	9.261	886.463	39.990.578	Working capital loans
Kredit investasi	25.299.586	5.943.929	29.555	314.498	1.352.599	32.940.167	Investment loans
Kredit konsumsi	22.769.531	1.205.780	97.441	90.564	484.235	24.647.551	Consumer loans
Pinjaman rekening koran	20.997.223	320.865	41.531	77.679	693.809	22.131.107	Demand loans
Pembiayaan bersama	6.069.780	2.606.954	-	-	62.180	8.738.914	Syndicated loans
Pinjaman karyawan	61.399	-	-	-	-	61.399	Employee loans
Kredit lainnya	4.445.714	210.092	20.543	34.055	59.139	4.769.543	Others
Jumlah - Rupiah	117.125.000	11.879.179	210.598	526.057	3.538.425	133.279.259	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit modal kerja	2.686.279	57.657	-	-	-	2.743.936	Working capital loans
Kredit investasi	2.222.358	379.393	-	-	-	2.601.751	Investment loans
Pembiayaan bersama	1.049.295	-	-	-	-	1.049.295	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	26.900	-	-	-	-	26.900	Demand loans
Jumlah - Valuta asing	5.984.832	437.050	-	-	-	6.421.882	Total - Foreign currencies
Jumlah	123.109.832	12.316.229	210.598	526.057	3.538.425	139.701.141	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(8.202.868)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						131.498.273	Total Loans - Net
2022							
	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah						Rupiah	
Kredit modal kerja	31.141.419	2.571.367	75.206	35.206	742.120	34.565.318	Working capital loans
Kredit investasi	22.979.851	3.996.153	243.629	357.097	1.559.559	29.136.289	Investment loans
Pinjaman rekening koran	22.927.845	766.254	46.357	55.436	840.042	24.635.934	Demand loans
Kredit konsumsi	20.454.321	1.031.376	118.384	70.825	325.463	22.000.369	Consumer loans
Pembiayaan bersama	8.830.573	-	-	-	64.094	8.894.667	Syndicated loans
Pinjaman karyawan	64.369	-	-	-	-	64.369	Employee loans
Kredit lainnya	3.705.206	186.528	14.520	24.279	73.487	4.004.020	Others
Jumlah - Rupiah	110.103.584	8.551.678	498.096	542.843	3.604.765	123.300.966	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit investasi	2.061.850	999.411	-	-	-	3.061.261	Investment loans
Kredit modal kerja	2.334.003	-	-	-	-	2.334.003	Working capital loans
Pembiayaan bersama	1.148.782	-	-	-	-	1.148.782	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	31.491	-	-	-	-	31.491	Demand loans
Kredit lainnya	1.796	-	-	-	-	1.796	Others
Jumlah - Valuta asing	5.577.922	999.411	-	-	-	6.577.333	Total - Foreign currencies
Jumlah	115.681.506	9.551.089	498.096	542.843	3.604.765	129.878.299	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.608.717)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						123.269.582	Total Loans - Net

b. Sektor Ekonomi

b. By Economic Sector

2023							
	Lancar/ Current Rp Juta/ Rp Million	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention Rp Juta/ Rp Million	Kurang Lancar/ Substandard Rp Juta/ Rp Million	Diragukan/ Doubtful Rp Juta/ Rp Million	Macet/ Loss Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Jasa	32.337.603	3.732.654	2.872	341.263	1.198.398	37.612.790	Services
Konstruksi	17.736.078	5.633.482	13.500	21.746	554.802	23.959.608	Construction
Industri	21.175.670	744.420	26.537	5.509	667.584	22.619.720	Industry
Perdagangan	21.043.780	616.380	64.109	63.058	632.983	22.420.310	Trading
Lain-lain	24.831.869	1.152.243	103.580	94.481	484.658	26.666.831	Others
Jumlah - Rupiah	117.125.000	11.879.179	210.598	526.057	3.538.425	133.279.259	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Industri	2.663.358	57.656	-	-	-	2.721.014	Industry
Jasa	2.147.758	119.374	-	-	-	2.267.132	Services
Konstruksi	1.135.705	260.020	-	-	-	1.395.725	Construction
Perdagangan	38.011	-	-	-	-	38.011	Trading
Jumlah - Valuta asing	5.984.832	437.050	-	-	-	6.421.882	Total - Foreign currencies
Jumlah	123.109.832	12.316.229	210.598	526.057	3.538.425	139.701.141	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(8.202.868)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						131.498.273	Total Loans - Net
2022							
	Lancar/ Current Rp Juta/ Rp Million	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention Rp Juta/ Rp Million	Kurang Lancar/ Substandard Rp Juta/ Rp Million	Diragukan/ Doubtful Rp Juta/ Rp Million	Macet/ Loss Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Jasa	28.279.638	3.603.221	187.001	368.912	1.516.202	33.954.974	Services
Konstruksi	20.653.780	2.219.722	48.037	14.617	495.149	23.431.305	Construction
Industri	20.382.336	1.024.470	73.549	30.452	758.530	22.269.337	Industry
Perdagangan	18.961.569	697.284	73.272	54.979	497.108	20.284.212	Trading
Lain-lain	21.826.261	1.006.981	116.237	73.883	337.776	23.361.138	Others
Jumlah - Rupiah	110.103.584	8.551.678	498.096	542.843	3.604.765	123.300.966	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Industri	2.703.503	-	-	-	-	2.703.503	Industry
Jasa	1.665.144	674.472	-	-	-	2.339.616	Services
Konstruksi	1.161.195	324.939	-	-	-	1.486.134	Construction
Perdagangan	48.080	-	-	-	-	48.080	Trading
Jumlah - Valuta asing	5.577.922	999.411	-	-	-	6.577.333	Total - Foreign currencies
Jumlah	115.681.506	9.551.089	498.096	542.843	3.604.765	129.878.299	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.608.717)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						123.269.582	Total Loans - Net

Sektor ekonomi lain-lain terdiri dari administrasi dan rumah tangga.

Other economic sectors consist of administration and household.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode pinjaman dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
≤ 1 tahun	19.971.030	32.871.078	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	23.611.948	9.991.103	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	36.336.674	33.820.694	> 2 - 5 years
> 5 tahun	59.781.489	53.195.424	> 5 years
Jumlah	139.701.141	129.878.299	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.202.868)	(6.608.717)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	<u>131.498.273</u>	<u>123.269.582</u>	Total Loans - Net

c. By Period

Loan period classified based on the term of the loan agreements are as follows:

d. Berdasarkan Staging PSAK 71

Berikut adalah perubahan nilai tercatat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

d. By PSAK 71 Staging

Following are the changes in the carrying value of loans and receivables/sharia financing with the classification of amortized cost based on the stage for the year ended December 31, 2023 and 2022:

	2023				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah		
	Rp Juta/ Rp Million					
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Saldo awal tahun	112.571.472	1.257.758	5.695.996	10.353.072	129.878.298	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage</i> 1)	411.360	(273.078)	(138.282)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (<i>stage</i> 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage</i> 2)	(591.074)	631.944	(40.870)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (<i>stage</i> 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage</i> 3)	(4.205.145)	(250.001)	4.455.146	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage</i> 3)
Saldo setelah pengalihan	<u>108.186.613</u>	<u>1.366.623</u>	<u>9.971.990</u>	<u>10.353.072</u>	<u>129.878.298</u>	Balance after transfer
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(9.470.426)	(88.628)	(135.652)	(251.334)	(9.946.040)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan	30.631.677	135.238	30.427	6.119.819	36.917.161	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.469.127)	(447.461)	(2.626.870)	(4.604.820)	(17.148.278)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	<u>11.692.124</u>	<u>(400.851)</u>	<u>(2.732.095)</u>	<u>1.263.665</u>	<u>9.822.843</u>	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	<u>119.878.737</u>	<u>965.772</u>	<u>7.239.895</u>	<u>11.616.737</u>	<u>139.701.141</u>	Balance at the end of the year

	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah*)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Saldo awal tahun	104.574.698	1.483.673	4.517.186	8.385.993	118.961.550	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	820.825	(379.623)	(441.202)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(764.945)	788.598	(23.653)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(3.377.448)	(381.511)	3.758.959	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	<u>101.253.130</u>	<u>1.511.137</u>	<u>7.811.290</u>	<u>8.385.993</u>	<u>118.961.550</u>	Balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(8.093.799)	(71.264)	(134.351)	(577.173)	(8.876.587)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan	31.451.869	53.690	20.074	3.815.969	35.341.602	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(12.039.728)</u>	<u>(235.805)</u>	<u>(2.001.017)</u>	<u>(1.271.716)</u>	<u>(15.548.266)</u>	Financial assets derecognized
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	<u>11.318.342</u>	<u>(253.379)</u>	<u>(2.115.294)</u>	<u>1.967.080</u>	<u>10.916.749</u>	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	<u>112.571.472</u>	<u>1.257.758</u>	<u>5.695.996</u>	<u>10.353.073</u>	<u>129.878.299</u>	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit:

Other major information on loans are as follows:

1) Pada tahun 2023 dan 2022 tingkat bunga efektif rata-rata untuk kredit adalah sebagai berikut:

1) In 2023 and 2022, the average effective annual interest rates for loans are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	9,65%	10,09%	Rupiah
Valuta asing	5,63%	5,20%	Foreign currency

2) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa giro, tabungan dan deposito berjangka (Catatan 21). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

2) Loans are secured by collateral, which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industry. Loans are also secured by cash collateral, in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits (Note 21). Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses which may arise from uncollectible loans.

3) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap, berulang, rekening koran dan diskonto, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.

3) Loans for working capital and investments include long-term, fixed, revolving, demand and discounted loans, while consumer loans include housing, car and other consumer loans.

4) Kredit, selain kredit dalam rangka pembiayaan sindikasi, dalam Rupiah berjangka waktu 1 hari sampai 29 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 3 bulan sampai 9 tahun. Kredit dalam rangka pembiayaan sindikasi dalam Rupiah berjangka waktu 5 sampai dengan 15 tahun, sedangkan dalam valuta asing berjangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun.

4) Loans, other than syndicated loans, in Rupiah have terms ranging from 1 day to 29 years, while those in foreign currencies have terms ranging from 3 months to 9 years. Syndicated loans have terms of 5 to 15 years for Rupiah and 5 to 10 years for foreign currencies.

5) Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 4,91% - 37,37% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5) The Bank's participation as a member in syndicated loans range from 4.91% - 37.37% as of December 31, 2023 and 2022.

- 6) Kredit kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 sampai 10 tahun dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan.
- 7) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank mengakui langsung dalam laba rugi, perbedaan nilai wajar dari kredit yang diberikan kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 331 juta dan Rp 359 juta.
- 8) Dalam jumlah kredit termasuk kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 1.180.679 juta dan Rp 1.238.510 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 169.339 juta dan Rp 87.007 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 99.512 juta dan Rp 181.564 juta telah melewati jatuh tempo setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 140.573 juta dan Rp 58.521 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 99.513 juta dan Rp 181.564 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 161.007 juta dan Rp 78.956 juta mengalami penurunan nilai secara individu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- 9) Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 9,22% dan 9,79% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
- 10) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh Grup.
- 11) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis pinjaman adalah sebagai berikut:
- 6) Employee loans represent loans for purchase of cars, houses and other necessities. The maturity periods range from 1 to 10 years and the interest rate is charged at 6% per annum. The payments are deducted from monthly salary.
- 7) As of December 31, 2023 and 2022, the Bank recognizes directly to profit or loss, the difference in the fair value of employee loans amounting to Rp 331 million and Rp 359 million, respectively.
- 8) Total loans include loans to related parties amounting to Rp 1,180,679 million dan Rp 1,238,510 million net of allowance for impairment losses of Rp 169,339 million and Rp 87,007 million as of December 31, 2023 and 2022, respectively.
- Loans to related parties amounted to Rp 99,512 million and Rp 181,564 million are past due, net of allowance for impairment losses of Rp 140,573 million and Rp 58,521 million as of December 31, 2023 and 2022.
- Loans to related parties are Rp 99,513 million and Rp 181,564 million net of allowance of impairment losses of Rp 161,007 million and Rp 78,956 million are individually impaired as of December 31, 2023 and 2022.
- 9) The ratio of small business loans to total loans as of December 31, 2023 and 2022 are 9.22% and 9.79%, respectively.
- 10) As of December 31, 2023 and 2022, there are no loans pledged as collateral by the Group.
- 11) As of December 31, 2023 and 2022, the details of restructured loans classified based on types of loans are as follows:

	2023						
	Lancar/ Current Rp Juta/ Rp Million	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention Rp Juta/ Rp Million	Kurang Lancar/ Substandard Rp Juta/ Rp Million	Diragukan/ Doubtful Rp Juta/ Rp Million	Macet/ Loss Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit investasi	5.205.347	7.491.000	13.952	312.272	510.772	13.533.343	Investment loans
Kredit modal kerja	1.414.480	1.098.285	25.497	9.074	775.045	3.322.381	Working capital loans
Kredit konsumsi	1.007.734	416.182	34.265	56.886	294.669	1.809.736	Consumer loans
Pinjaman rekening koran	713.630	221.094	24.476	41.016	424.805	1.425.021	Demand loans
Jumlah - Rupiah	8.341.191	9.226.561	98.190	419.248	2.005.291	20.090.481	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit investasi	1.933.251	123.011	-	-	-	2.056.262	Investment loans
Kredit modal kerja	3.849	-	-	-	-	3.849	Working capital loans
Jumlah - Valuta asing	1.937.100	123.011	-	-	-	2.060.111	Total - Foreign currencies
Jumlah Kredit - Bersih	10.278.291	9.349.572	98.190	419.248	2.005.291	22.150.592	Total Loans - Net

	2022						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit investasi	8.614.982	3.850.117	229.397	314.109	1.299.182	14.307.787	Investment loans
Kredit modal kerja	2.449.840	891.301	75.856	36.418	426.545	3.879.960	Working capital loans
Kredit konsumsi	1.492.119	512.343	57.511	50.408	270.805	2.383.186	Consumer loans
Pinjaman rekening koran	1.236.484	326.043	19.425	41.542	336.796	1.960.290	Demand loans
Jumlah - Rupiah	<u>13.793.425</u>	<u>5.579.804</u>	<u>382.189</u>	<u>442.477</u>	<u>2.333.328</u>	<u>22.531.223</u>	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit investasi	1.388.010	1.009.855	-	-	-	2.397.865	Investment loans
Kredit modal kerja	84.999	-	-	-	-	84.999	Working capital loans
Jumlah - Valuta asing	<u>1.473.009</u>	<u>1.009.855</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.482.864</u>	Total - Foreign currencies
Jumlah Kredit - Bersih	<u>15.266.434</u>	<u>6.589.659</u>	<u>382.189</u>	<u>442.477</u>	<u>2.333.328</u>	<u>25.014.087</u>	Total Loans - Net

Sepanjang tahun 2023 dan 2022, Bank telah melakukan restrukturisasi atas kredit untuk beberapa debitur masing-masing sebesar Rp 9.808.226 juta dan Rp 15.402.604 juta.

Sehubungan dengan penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19, sesuai dengan Siaran Pers OJK Keluarkan Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus Covid-19 No. SP 37/DHMS/OJK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tertanggal 16 Maret 2020, yang telah mengalami perubahan dua kali atas POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical terhadap Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dari Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, serta siaran pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi dan Pembiayaan Kredit Secara Terukur dan Sektoral untuk Mengatasi Dampak Pasca Pandemi Covid-19. Kredit tersebut direstrukturisasi dengan kualitas lancar.

During the year of 2023 and 2022, the Bank has restructured loans for some debtors, which amounted to Rp 9,808,226 million and Rp 15,402,604 million, respectively.

Due to the handling of economic impact due to Covid-19 pandemic, according to OJK Press Conference to Launch Covid-19 Advance Stimulus Package Policy No. SP 37/DHMS/OJK/V/2020 dated May 28, 2020 and POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 which has been amended twice to POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 1, 2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 and POJK No. 17/POJK.03/2021 dated September 10, 2021 concerning the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation No 11/POJK.03/2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019, as well as OJK press release No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 dated November 28, 2022 concerning Extension of Credit Restructuring and Financing Policies on a Targeted and Sectoral Basis to Address the After-Effect of the Covid-19 Pandemic. Loans have restructured with current collectibility.

Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit yang direstrukturisasi sesuai Kebijakan Stimulus Covid-19 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the details of restructured loan based on Covid-19 Stimulus Policy are as follows:

	2023			2022			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currency	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currency	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Lancar	5.286.217	1.157.686	6.443.903	11.867.335	1.328.268	13.195.603	Current
Dalam perhatian khusus	4.387.180	-	4.387.180	5.044.278	1.009.855	6.054.133	Special mention
Kurang lancar	43.143	-	43.143	260.600	-	260.600	Substandard
Diragukan	74.132	-	74.132	425.934	-	425.934	Doubtful
Macet	1.771.930	-	1.771.930	2.154.502	-	2.154.502	Loss
Jumlah	11.562.602	1.157.686	12.720.288	19.752.649	2.338.123	22.090.772	Total

- 12) Rasio *non-performing loan* (NPL) yang dihitung berdasarkan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

- 12) Non-performing loan (NPL) ratio calculated based on Circular Letter No. 43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 are as follows:

	2023		2022		
	Konsolidasi/ Consolidated	Bank	Konsolidasi/ Consolidated	Bank	
NPL Bruto	3,09%	2,97%	3,53%	3,58%	Gross NPL
NPL Neto	0,57%	0,29%	0,92%	0,81%	Net NPL

- 13) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

- 13) As of December 31, 2023 and 2022, the details of non-performing loans based on economic sector are as follows:

	2023		2022		
	Kredit bermasalah/ Non-performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Kredit bermasalah/ Non-performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah					Rupiah
Jasa	1.542.533	1.440.872	2.072.115	1.544.713	Services
Industri	699.630	572.901	862.531	572.516	Industry
Konstruksi	590.048	523.424	557.803	490.351	Construction
Perdagangan	760.150	484.251	625.359	487.865	Trading
Lain-lain	682.719	529.852	527.896	377.785	Others
Jumlah - Rupiah	4.275.080	3.551.300	4.645.704	3.473.230	Total - Rupiah

- 14) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kredit yang disalurkan dengan sistem joint financing melalui CFI, berupa kredit kendaraan bermotor dan mobil sebesar Rp 2.932.530 juta dan Rp 2.755.518 juta.

- 14) As of December 31, 2023 and 2022, loans channeled through joint financing system with CFI to finance motorcycle and car loans amounted to Rp 2,932,530 million and Rp 2,755,518 million, respectively.

15) Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

15) The carrying amount of loans at amortised cost is as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kredit	139.701.141	129.878.299	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 20)	635.284	590.326	Accrued interest receivables (Note 20)
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.202.868)</u>	<u>(6.608.717)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>132.133.557</u>	<u>123.859.908</u>	Total

16) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

16) The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2023				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)		
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	1.291.481	264.784	4.808.566	243.886	6.608.717	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	151.478	(61.172)	(90.306)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(17.679)	36.185	(18.506)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	<u>(80.289)</u>	<u>(47.946)</u>	<u>128.235</u>	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	<u>1.344.991</u>	<u>191.851</u>	<u>4.827.989</u>	<u>243.886</u>	<u>6.608.717</u>	Balance after transfer
Pengukuran kembali cadangan kerugian penurunan nilai	1.554.177	66.351	2.149.216	(1.109)	3.768.635	Remeasurement of the allowance for the impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	223.952	28.114	21.348	56.875	330.289	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(73.269)</u>	<u>(91.508)</u>	<u>(2.284.184)</u>	<u>(55.812)</u>	<u>(2.504.773)</u>	Financial assets derecognized
Total penambahan (pengurangan) tahun berjalan **)	<u>1.704.860</u>	<u>2.957</u>	<u>(113.620)</u>	<u>(46)</u>	<u>1.594.151</u>	Total additions (deductions) for the current year **)
Saldo akhir tahun	<u>3.049.851</u>	<u>194.808</u>	<u>4.714.369</u>	<u>243.840</u>	<u>8.202.868</u>	Balance at the end of the year
	2022				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)		
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	1.223.484	855.798	3.472.725	115.530	5.667.537	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	999.296	(659.926)	(339.370)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(12.911)	30.755	(17.844)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	<u>(717.775)</u>	<u>(53.662)</u>	<u>771.437</u>	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	<u>1.492.094</u>	<u>172.965</u>	<u>3.886.948</u>	<u>115.530</u>	<u>5.667.537</u>	Balance after transfer
Pengukuran kembali cadangan kerugian penurunan nilai	(297.001)	130.004	2.845.061	107.253	2.785.317	Remeasurement of the allowance for the impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	380.900	13.932	19.074	37.530	451.436	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	<u>(284.512)</u>	<u>(52.117)</u>	<u>(1.942.517)</u>	<u>(16.427)</u>	<u>(2.295.573)</u>	Financial assets derecognized
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan **)	<u>(200.613)</u>	<u>91.819</u>	<u>921.618</u>	<u>128.356</u>	<u>941.180</u>	Total additions/(deductions) for the current year **)
Saldo akhir tahun	<u>1.291.481</u>	<u>264.784</u>	<u>4.808.566</u>	<u>243.886</u>	<u>6.608.717</u>	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

17) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

17) The changes in the loans written off are as follows:

	2023			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	10.294.104	1.668.716	11.962.820	Balance at the beginning of the year
Penambahan dalam tahun berjalan	640.229	-	640.229	Additions during the year
Hapus tagih	(52.146)	(418.828)	(470.974)	Write-off
Penerimaan kembali	(500.739)	(170.898)	(671.637)	Recovery
Selisih kurs	-	(18.277)	(18.277)	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	<u>10.381.448</u>	<u>1.060.713</u>	<u>11.442.161</u>	Balance at the end of the year
	2022			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	9.566.464	1.576.450	11.142.914	Balance at the beginning of the year
Penambahan dalam tahun berjalan	1.535.005	-	1.535.005	Additions during the year
Koreksi saldo hapus buku tahun-tahun sebelumnya	(132)	-	(132)	Corrections to write-off balances of previous years
Hapus tagih	(115.830)	-	(115.830)	Write-off
Penerimaan kembali	(691.403)	(53.184)	(744.587)	Recovery
Selisih kurs	-	145.450	145.450	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	<u>10.294.104</u>	<u>1.668.716</u>	<u>11.962.820</u>	Balance at the end of the year

Kredit yang dihapus buku dicatat dalam rekening administratif. Grup terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapus buku tersebut.

Loans written-off is recorded in administrative account. The Group continuously collect those written-off loans.

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN DAN TAGIHAN ANJAK PIUTANG

a. Piutang Sewa Pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*).

Piutang sewa pembiayaan berasal dari CFI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan perincian sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah		
Piutang sewa pembiayaan - bruto	596.878	319.024
Nilai sisa	285.618	171.765
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(67.445)	(37.156)
Simpanan jaminan	<u>(285.618)</u>	<u>(171.765)</u>
Jumlah	529.433	281.868
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(953)</u>	<u>(9.727)</u>
Jumlah - Bersih	<u>528.480</u>	<u>272.141</u>
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun		
Rupiah	13,06%	13,76%

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan *stage*:

	2023			Jumlah/ Total
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Saldo awal tahun	270.841	2.602	8.425	281.868
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	-	-	-	-
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(57.871)	57.871	-	-
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	<u>(1.115)</u>	<u>(240)</u>	1.355	-
Saldo setelah pengalihan	<u>211.855</u>	<u>60.233</u>	<u>9.780</u>	<u>281.868</u>
Aset keuangan baru yang diterbitkan	516.621	-	-	516.621
Aset keuangan yang dilunasi	(240.724)	(19.514)	(8.573)	(268.811)
Penghapusan	-	-	(245)	(245)
Jumlah penambahan (pengurangan) periode berjalan	<u>275.897</u>	<u>(19.514)</u>	<u>(8.818)</u>	<u>247.565</u>
Saldo akhir tahun	<u>487.752</u>	<u>40.719</u>	<u>962</u>	<u>529.433</u>

13. FINANCE LEASE RECEIVABLES AND FACTORING RECEIVABLES

a. Finance Lease Receivables

Finance lease receivables are arranged at fixed interest rates, thus the Group is exposed to fair value interest rate risk.

Finance lease receivables are entered into by CFI as of December 31, 2023 and 2022 with details as follows:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah		
Finance lease receivables - gross	596.878	319.024
Residual value	285.618	171.765
Unearned finance lease income	(67.445)	(37.156)
Security deposits	<u>(285.618)</u>	<u>(171.765)</u>
Total	529.433	281.868
Allowance for impairment losses	<u>(953)</u>	<u>(9.727)</u>
Total - Net	<u>528.480</u>	<u>272.141</u>
Average annual effective interest rates		
Rupiah	13,06%	13,76%

Finance lease receivables as of December 31, 2023 and 2022 based on *stages*:

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	189.407	13.344	16.354	219.105	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	55	(55)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(2.291)	2.291	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (<i>stage 2</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	(73)	(7.770)	7.843	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage 3</i>)
Saldo setelah pengalihan	187.098	7.810	24.197	219.105	Balance after transfer
Aset keuangan baru yang diterbitkan	310.905	-	-	310.905	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(227.162)	(5.208)	(1.200)	(233.570)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(14.572)	(14.572)	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	83.743	(5.208)	(15.772)	62.763	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	270.841	2.602	8.425	281.868	Balance at the end of the year

Jumlah piutang sewa pembiayaan bruto (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Total gross financial lease receivable (before unearned lease income and allowance for impairment losses) as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Alat berat	576.448	300.959	Heavy equipment
Mesin	13.405	13.740	Machine
Kendaraan bermotor	5.073	1.387	Vehicle
Lain-lain	1.952	2.938	Others
Jumlah	596.878	319.024	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Investasi	596.548	318.033	Investment
Modal kerja	330	991	Working capital
Jumlah	596.878	319.024	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total lease installments (gross of allowance for impairment losses) based on maturity date are as follows:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ Minimum lease payments		Nilai kini dari pembayaran minimum sewa pembiayaan/Present value of minimum lease payments		
	2023	2022	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Angsuran sewa pembiayaan					Lease Installments
Sampai dengan satu tahun	353.307	182.078	304.633	155.923	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>243.571</u>	<u>136.946</u>	<u>224.800</u>	<u>125.945</u>	More than one year up to five years
Sub jumlah	<u>596.878</u>	<u>319.024</u>	<u>529.433</u>	<u>281.868</u>	Sub total
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui					Unearned finance lease income
Sampai dengan satu tahun	(48.674)	(26.155)	-	-	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>(18.771)</u>	<u>(11.001)</u>	-	-	More than one year up to five years
Sub jumlah	<u>(67.445)</u>	<u>(37.156)</u>	-	-	Sub total
Jumlah	<u>529.433</u>	<u>281.868</u>	<u>529.433</u>	<u>281.868</u>	Total

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 1 – 11 tahun dengan mayoritas pembiayaan ditenor 3 tahun.

The range of financing terms is 1 – 11 years with majority tenor of within 3 years.

Biaya-biaya yang timbul, seperti premi asuransi, bea meterai dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan perolehan aset sewa pembiayaan, dibebankan kepada debitur.

Costs incurred, such as insurance premium, stamp duty, and other related costs in connection with finance lease transaction are charged directly to debtors.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	1.346	120	8.261	9.727	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(764)	764	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(6)	(240)	246	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	<u>576</u>	<u>644</u>	<u>8.507</u>	<u>9.727</u>	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	-	189	50	239	Remeasurement of the net allowance of the impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	1.553	-	-	1.553	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(1.608)	(527)	(8.186)	(10.321)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(245)	(245)	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	<u>(55)</u>	<u>(338)</u>	<u>(8.381)</u>	<u>(8.774)</u>	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	<u>521</u>	<u>306</u>	<u>126</u>	<u>953</u>	Balance at the end of the year

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	339	288	15.865	16.492	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	8	(8)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(23)	23	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(2)	(139)	141	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	322	164	16.006	16.492	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	(16)	87	6.965	7.036	Remeasurement of the net allowance of the impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	1.179	-	-	1.179	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(139)	(131)	(138)	(408)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(14.572)	(14.572)	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	1.024	(44)	(7.745)	(6.765)	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	1.346	120	8.261	9.727	Balance at the end of the year

Sebagian dari piutang sewa pembiayaan dijamin dengan kendaraan bermotor dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang bersangkutan. Piutang sewa pembiayaan untuk tanah dan bangunan dijamin dengan objek yang dibiayai Perusahaan dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Piutang sewa pembiayaan untuk tongkang dan *tug boat* diikat dengan akta fidusia (*grosse akta*) dari barang-barang yang dibiayakan sedangkan piutang sewa pembiayaan untuk alat-alat berat, mesin-mesin produksi dan peralatan dijamin dengan barang-barang yang dibiayai.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari debitur adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Tidak terdapat perubahan teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam penilaian cadangan kerugian piutang sewa pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, CFI menggunakan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 25). Jumlah piutang sewa pembiayaan yang dijamin masing-masing sebesar Rp 20.743 juta dan Rp 20.899 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Some finance lease receivables are secured by motor vehicles and Vehicle Document of Ownership (BPKB) of the related vehicle. Finance lease receivable related to land and buildings are secured by the object financed by the Company and document of ownership in the form of Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB). Finance lease receivables related to barges and tug boats are tied with fiduciary certificate (*certificate grosse*) of the financed items, while finance lease receivables related to heavy equipment, production machinery and equipment are secured by financed items.

The management of the Group believes that the allowance for impairment losses and collateral received from debtors are adequate to cover the losses, which might arise from uncollectible finance lease receivables.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the loss allowance for finance lease receivables.

Finance lease receivables are used as collateral for loans received by CFI as of December 31, 2023 and 2022 (Note 25). Total finance lease receivables pledged as collateral amounted to Rp 20,743 million and Rp 20,899 million as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Pihak penerima jaminan adalah bank-bank pemberi pinjaman yang diterima.

The recipient of the guarantee are counterparty banks of loans received.

Jumlah piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 12.030 juta dan Rp 4.648 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Total restructured finance lease receivables as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 12,030 million and Rp 4,648 million, respectively.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee pada akhir masa sewa pembiayaan.

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option right is exercised. If the option right is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

b. Tagihan Anjak Piutang

b. Factoring Receivables

Tagihan anjak piutang memiliki suku bunga tetap, sehingga CFI terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*).

The factoring receivable are arranged at fixed interest rates, thus exposing CFI to fair value interest rate risk.

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Tagihan anjak piutang	75.000	100.000	Factoring receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(30.951)</u>	<u>(49.580)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>44.049</u>	<u>50.420</u>	Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	20,00%	17,67%	Average annual effective interest rate

Tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan *stage*:

Factoring receivables as of December 31, 2023 and 2022 based on stages:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	100.000	100.000	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage 3</i>)
Saldo setelah pengalihan	-	-	100.000	100.000	Balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang dilunasi	-	-	-	-	Financial assets has been paid
Agunan yang diambil alih	-	-	(10.612)	(10.612)	Foreclosed collateral
Penghapusan	-	-	<u>(14.388)</u>	<u>(14.388)</u>	Write-offs
Jumlah pengurangan tahun berjalan	-	-	<u>(25.000)</u>	<u>(25.000)</u>	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	-	-	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	Balance at the end of the year

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	25.000	-	75.000	100.000	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(25.000)	-	25.000	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	-	-	100.000	100.000	Balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan yang ditunasi	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value Financial assets has been paid
Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	Foreclosed collateral
Kerugian realisasi bunga	-	-	-	-	Loss on interest realization
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Jumlah pengurangan tahun berjalan	-	-	-	-	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	-	-	100.000	100.000	Balance at the end of the year

Seluruh tagihan anjak piutang merupakan pembiayaan modal kerja dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

All of the Company's factoring receivable are financing working capital and in Indonesian Rupiah.

Jangka waktu tagihan anjak piutang berdasarkan periode dalam perjanjian adalah 1 tahun.

The term of factoring receivable based on the agreements are 1 year.

Tagihan anjak piutang memiliki jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan.

Factoring receivable have additional collateral in the form of land and buildings.

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang selama tahun berjalan:

The following table show movement of the allowance for impairment losses of factoring receivable in the current year:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	49.580	49.580	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	-	-	49.580	49.580	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	3.607	3.607	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Agunan yang diambil alih	-	-	(7.848)	(7.848)	Foreclosed collateral
Kerugian realisasi bunga	-	-	-	-	Loss on interest realization
Penghapusan	-	-	(14.388)	(14.388)	Write-offs
Jumlah pengurangan tahun berjalan	-	-	(18.629)	(18.629)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	-	-	30.951	30.951	Balance at the end of the year

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	3.294	-	14.454	17.748	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(3.294)	-	3.294	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	-	-	17.748	17.748	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kembali penurunan nilai	-	-	31.832	31.832	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	Foreclosed collateral
Kerugian realisasi bunga	-	-	-	-	Loss on interest realization
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Jumlah penambahan tahun berjalan	-	-	31.832	31.832	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	-	-	49.580	49.580	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari debitur telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.

The management believes that allowance for impairment losses and collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses arising from uncollectible factoring receivable.

14. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Piutang pembiayaan konsumen memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*).

Jumlah piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan piutang pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh CFI dengan perincian sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	10.735.573	8.586.584	Consumer financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(2.121.080)	(1.672.157)	Unearned consumer financing income receivables
Jumlah	8.614.493	6.914.427	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(185.488)	(118.977)	Allowance for impairment losses
Bersih	8.429.005	6.795.450	Net

Seluruh piutang pembiayaan konsumen dilakukan dalam mata uang Rupiah.

14. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

The consumer financing receivables are arranged at fixed interest rates, thus the Group are exposed to fair value interest rate risk.

Consumer financing receivables as of December 31, 2023 and 2022 are consumer financing receivables made by CFI with details as follows:

All of CFI's consumer financing receivables are in Rupiah.

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan stage:

Consumer financing receivables as of December 31, 2023 and 2022 based on stages:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	6.678.345	144.919	91.163	6.914.427	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	9.554	(8.893)	(661)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(878.393)	879.279	(886)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(425.546)	(77.064)	502.610	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	5.383.960	938.241	592.226	6.914.427	Balance after transfer
Aset keuangan baru yang diterbitkan	7.891.676	-	-	7.891.676	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(5.316.842)	(513.785)	(85.236)	(5.915.863)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(275.747)	(275.747)	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	2.574.834	(513.785)	(360.983)	1.700.066	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	7.958.794	424.456	231.243	8.614.493	Balance at the end of the year
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	5.429.915	230.828	101.415	5.762.158	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	24.588	(23.023)	(1.565)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(146.084)	146.176	(92)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(161.116)	(44.517)	205.633	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	5.147.303	309.464	305.391	5.762.158	Balance after transfer
Aset keuangan baru yang diterbitkan	7.077.417	-	-	7.077.417	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(5.546.375)	(164.545)	(35.007)	(5.745.927)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(179.221)	(179.221)	Write-offs
Jumlah penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	1.531.042	(164.545)	(214.228)	1.152.269	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	6.678.345	144.919	91.163	6.914.427	Balance at the end of the year

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembiayaan bersama (*joint financing*) masing-masing sebesar Rp 373.418 juta dan Rp 352.831 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, allocation for joint financing amounted to Rp 373,418 million and Rp 352,831 million, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp 149.300 juta dan Rp 115.884 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, consumer financing receivable include transaction costs directly attributable to the original consumer financing amounted to Rp 149,300 million and Rp 115,884 million, respectively.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen bruto (sebelum dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Total gross consumer finance receivable (before unearned income and allowance for impairment losses) based on business activity as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Multi guna	8.032.283	6.610.378	Multi purpose
Investasi	2.282.178	1.593.358	Investment
Modal kerja	<u>421.112</u>	<u>382.848</u>	Working capital
Jumlah	<u>10.735.573</u>	<u>8.586.584</u>	Total

Piutang pembiayaan konsumen jatuh tempo dalam:

Consumer financing receivables matured within:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Satu tahun berikutnya (termasuk yang telah jatuh tempo)	4.290.612	3.680.884	The following year (including past due)
> 1 - 2 tahun	3.174.503	2.485.347	> 1 - 2 years
Lebih dari 3 tahun	<u>3.270.458</u>	<u>2.420.353</u>	More than 3 years
Jumlah	<u>10.735.573</u>	<u>8.586.584</u>	Total

Tingkat bunga rata-rata efektif per tahun - Rupiah

17,81%

Average effective interest rates per annum - Rupiah

18,25%

Aset yang dibiayai oleh CFI adalah kendaraan baru dan bekas, apartemen, tanah dan bangunan dengan tenor pembiayaan adalah 1 - 10 tahun dengan mayoritas pembiayaan di tenor 4 tahun.

Assets finance by CFI are new and used vehicles, apartment, land and buildings with period of financing ranging from 1 - 10 years with majority tenor of within 4 years.

Biaya-biaya yang timbul, sehubungan dengan perolehan aset pembiayaan konsumen, dibebankan kepada debitur.

Cost incurred related to consumer financing are charged to debtors.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 63.464 juta dan Rp 139.055 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Total restructured consumer financing receivables as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp 63,464 million and Rp 139,055 million, respectively.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	59.024	9.540	50.413	118.977	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	583	(464)	(119)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(8.572)	8.839	(267)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(184.131)	(47.877)	232.008	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	(133.096)	(29.962)	282.035	118.977	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	176.464	52.662	143.869	372.995	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	42.440	-	-	42.440	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(54.189)	(7.882)	(11.106)	(73.177)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(275.747)	(275.747)	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	164.715	44.780	(142.984)	66.511	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	31.619	14.818	139.051	185.488	Balance at the end of the year
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	27.815	8.836	64.312	100.963	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	2.547	(1.912)	(635)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(4.689)	4.795	(106)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(25.078)	(3.030)	28.108	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Saldo setelah pengalihan	595	8.689	91.679	100.963	Balance after transfer
Pengukuran kembali penyisihan kembali penurunan nilai	(1.821)	3.546	151.494	153.219	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	66.693	-	-	66.693	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(6.443)	(2.695)	(13.539)	(22.677)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	(179.221)	(179.221)	Write-offs
Jumlah penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	58.429	851	(41.266)	18.014	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	59.024	9.540	50.413	118.977	Balance at the end of the year

Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (baru dan bekas) dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang bersangkutan sedangkan piutang pembiayaan konsumen untuk apartemen, tanah serta tanah dan bangunan dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Consumer financing receivables of vehicles (new and used) are secured by the related certificates of ownership (BPKB) of the vehicle while consumer financing receivable related to apartment, land and buildings are secured by Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB) or Certificates of Ownership of Mansions Unit (SHMSRS).

Piutang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang diterima oleh CFI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dari beberapa bank (Catatan 25). Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang dijaminakan masing-masing sebesar Rp 2.506.444 juta dan Rp 1.811.858 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Consumer financing receivables are pledged as collateral for bank loans received by CFI as of December 31, 2023 and 2022 from several banks (Note 25). Total consumer financing receivables pledged as collateral amounted to Rp 2,506,444 million and Rp 1,811,858 million as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

The management of the Group believes that the amount of allowance for impairment losses of consumer financing receivables is adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible consumer financing receivables.

15. PIUTANG JUAL DAN SEWA-BALIK – PIHAK KETIGA

Piutang jual dan sewa-balik memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*).

Piutang jual dan sewa-balik pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berasal dari CFI, dengan perincian sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Piutang jual dan sewa-balik	98.107	88.514	Sales and lease-back receivables
Nilai sisa terjamin	33.908	29.983	Residual value
Pendapatan jual dan sewa-balik yang belum diakui	(4.773)	(9.736)	Unearned sales and lease-back income
Simpanan jaminan	(33.908)	(29.983)	Security deposits
Jumlah	93.334	78.778	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.186)	(23.591)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u>33.148</u>	<u>55.187</u>	Total - Net
Tingkat bunga rata-rata efektif per tahun - Rupiah	14,05%	12,69%	Average effective interest rates per annum - Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang jual dan sewa-balik termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan piutang jual dan sewa-balik sebesar Rp 138 juta dan Rp 76 juta.

15. SALES AND LEASE-BACK RECEIVABLES – THIRD PARTIES

Sales and lease-back receivables are arranged at fixed interest rates, thus the Group is exposed to fair value interest rate risk.

Sales and lease-back receivables as of December 31, 2023 and 2022 are entered into by CFI, with details as follows:

As of December 31, 2023 and 2022, sales and lease-back receivables including transaction costs directly related to sales and leaseback receivables amounted to Rp 138 million and Rp 76 million.

Jumlah piutang jual dan sewa-balik (sebelum dikurangi pendapatan piutang jual dan sewa-balik yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Total sales and lease-back receivables (gross of unearned sales and leaseback income and allowance for impairment losses) as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kapal	66.022	72.941	Vessel
Kendaraan bermotor	19.723	3.454	Vehicle
Alat berat	12.362	12.119	Heavy equipment
Jumlah	<u>98.107</u>	<u>88.514</u>	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Investasi	61.159	45.054	Investment
Modal kerja	36.948	43.460	Working capital
Jumlah	<u>98.107</u>	<u>88.514</u>	Total

Jumlah angsuran piutang jual dan sewa-balik (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Total sales and lease-back receivables installments (gross of allowance for impairment losses) based on maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Jatuh tempo satu tahun berikutnya (termasuk yang telah jatuh tempo)	76.125	26.826	Due next years (including past due)
Jatuh tempo dua tahun berikutnya	18.503	48.814	Due in the next two years
Jatuh tempo tiga tahun berikutnya atau lebih	3.479	12.874	Due in the next three years or more
Jumlah	<u>98.107</u>	<u>88.514</u>	Total

Aset yang masuk klasifikasi piutang jual dan sewa-balik ini terdiri dari alat berat dan kapal dengan tenor pembiayaan 1 sampai 4 tahun, dengan mayoritas pembiayaan di tenor 3 tahun.

Assets that are classified as sale and lease-back receivables consist of heavy equipment and vessels with a financing tenor of 1 – 4 years, with majority tenor of 3 years.

Piutang jual dan sewa-balik yang direstrukturisasi sebesar nihil dan Rp 65.029 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Total restructured sales and lease-back receivables amounted to nil and Rp 65,029 million as of December 31, 2023 and 2022.

Piutang jual dan sewa-balik pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan *stage*:

Sales and lease-back receivables as of December 31, 2023 and 2022 based on stages:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	13.749	65.029	-	78.778	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(3.000)	3.000	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (<i>stage 2</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	-	(35.097)	35.097	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage 3</i>)
Saldo setelah pengalihan	10.749	32.932	35.097	78.778	Balance after transfer
Aset keuangan baru yang diterbitkan	32.504	-	-	32.504	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(16.831)	(456)	(661)	(17.948)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	15.673	(456)	(661)	14.556	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	26.422	32.476	34.436	93.334	Balance at the end of the year
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Pergerakan antar tahap:					Interstage movement:
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(65.029)	65.029	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (<i>stage 2</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage 3</i>)
Aset keuangan baru yang diterbitkan	82.402	-	-	82.402	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(3.624)	-	-	(3.624)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Saldo akhir tahun	13.749	65.029	-	78.778	Ending balance of the year

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang jual dan sewa-balik adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of sales and lease-back receivables are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	67	23.524	-	23.591	Balance at the beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(4)	4	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (<i>stage 2</i>)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	-	(2.240)	2.240	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (<i>stage 3</i>)
Saldo setelah pengalihan	63	21.288	2.240	23.591	Balance after transfer

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	-	4.632	31.981	36.613	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan	108	-	-	108	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(126)	-	-	(126)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Jumlah penambahan (pengurangan) tahun berjalan	(18)	4.632	31.981	36.595	Total additions (deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	45	25.920	34.221	60.186	Balance at the end of the year
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Pergerakan antar tahap:					Interstage movement:
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umumnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(12.536)	12.536	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Aset keuangan baru yang diterbitkan	12.639	-	-	12.639	New financial assets issued
Pengukuran kembali cadangan kerugian kredit	-	10.988	-	10.988	Remeasurement of the allowance for credit losses
Aset keuangan yang dilunasi	(36)	-	-	(36)	Financial assets which have been repaid
Penghapusan	-	-	-	-	Write-offs
Saldo akhir tahun	67	23.524	-	23.591	Balance at the end of the year

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang dibentuk dan yang diterima dari debitur adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang jual dan sewa-balik.

Tidak terdapat perubahan teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam penilaian cadangan kerugian piutang jual dan sewa-balik.

Simpanan Jaminan

Pada saat perjanjian jual dan sewa-balik dimulai, debitur memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan untuk opsi membeli aset yang dijual dan sewa-balik sebesar nilai sisa aset tersebut pada akhir perjanjian sebagai bagian pembayarannya.

Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pada akhir masa sewa pembiayaan.

The management of the Group believes that the allowance for credit losses provided, and collateral received from customers is adequate to cover the possible losses arising from uncollectible sale and lease-back receivables.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the loss allowance for sale and lease-back receivables.

Security Deposits

When the sales and lease-back agreement is started, the debtor provides a security deposit which will be used for the option to purchase the asset sold and leased-back at the remaining value of the asset at the end of the agreement as part of the payment.

If the option right is not exercised, such security deposits will be returned at the end of lease period.

16. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

16. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Tagihan Akseptasi			Acceptances Receivable
Rupiah	930.878	1.021.701	Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat	531.979	1.095.202	United States Dollar
Yen Jepang	121.828	16.339	Japanese Yen
Euro	49.111	3.174	Euro
Yuan China	7.567	626	Chinese Yuan
Jumlah	1.641.363	2.137.042	Total
Diskonto tagihan akseptasi	<u>(3.576)</u>	<u>(4.541)</u>	Discount on acceptances receivable
Jumlah	1.637.787	2.132.501	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(7.658)</u>	<u>(6.652)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah Tagihan Akseptasi - Bersih	<u>1.630.129</u>	<u>2.125.849</u>	Total Acceptances Receivable - Net
Liabilitas Akseptasi			Acceptances Payable
Rupiah	930.878	1.021.701	Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat	531.979	1.095.202	United States Dollar
Euro	49.111	3.174	Euro
Yen Jepang	121.828	16.339	Japanese Yen
Yuan China	7.567	626	Chinese Yuan
Jumlah	<u>1.641.363</u>	<u>2.137.042</u>	Total

Tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan jangka waktu perjanjian adalah sebagai berikut:

The acceptances receivable and payable classified based on the term of the agreement are as follows:

	2023		2022		
	Tagihan/ Receivable Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Payable Rp Juta/ Rp Million	Tagihan/ Receivable Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Payable Rp Juta/ Rp Million	
≤ 1 bulan	61.640	61.671	17.678	17.678	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	213.124	213.239	574.001	575.155	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	1.145.287	1.147.313	1.476.020	1.479.282	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	<u>217.736</u>	<u>219.140</u>	<u>64.802</u>	<u>64.927</u>	> 6 - 12 months
Jumlah	<u>1.637.787</u>	<u>1.641.363</u>	<u>2.132.501</u>	<u>2.137.042</u>	Total

Mutasi nilai tercatat dari tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying amount of acceptances receivable are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	2.132.501	-	-	2.132.501	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan	1.637.787	-	-	1.637.787	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.132.501)	-	-	(2.132.501)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	(494.714)	-	-	(494.714)	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	1.637.787	-	-	1.637.787	Balance at the end of the year
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	2.083.313	-	-	2.083.313	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan	2.132.501	-	-	2.132.501	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.083.313)	-	-	(2.083.313)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	49.188	-	-	49.188	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	2.132.501	-	-	2.132.501	Balance at the end of the year

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai dari tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of acceptances receivable are as follows:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	6.652	-	-	6.652	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan	7.658	-	-	7.658	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.652)	-	-	(6.652)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan *)	1.006	-	-	1.006	Total additions for the current year *)
Saldo akhir tahun	7.658	-	-	7.658	Balance at the end of the year

*) Termasuk selisih kurs

*) Include differences in exchange rate

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	3.809	-	-	3.809	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan	6.652	-	-	6.652	New financial assets issued
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.809)	-	-	(3.809)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan *)	2.843	-	-	2.843	Total additions for the current year *)
Saldo akhir tahun	6.652	-	-	6.652	Balance at the end of the year

*) Termasuk selisih kurs

*) Include differences in exchange rate

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

The management of the Group believes that the amount of allowance for impairment losses of acceptance receivables is adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible acceptance receivables.

17. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

17. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership		2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million
		2023	2022		
Metode Ekuitas/Equity Method					
Bank					
PT Panin Sekuritas Tbk	Sekuritas/Securities	29,00%	29,00%	448.339	460.819
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (MLI)	Lembaga pembiayaan/ Financing	25,06%	25,06%	188.099	172.916
Subjumlah/Subtotal				636.438	633.735
Aset keuangan - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Financial assets - measured at FVTOCI					
Bank					
PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG)	Asuransi/Insurance	7,76%	7,76%	112.520	139.680
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan/Banking	1,00%	1,00%	16.500	16.500
PT FAC Sekuritas Indonesia	Sekuritas/Securities	2,50%	2,50%	750	750
PT Sarana Kasesel Ventura	Modal ventura/ Venture Capital	1,04%	1,04%	193	193
Entitas anak/Subsidiary					
PT Al Jarah Indonesia Finance (ALIF)	Lembaga pembiayaan/ Financing	-	6,77%	-	552
Subjumlah/Subtotal				129.963	157.675
Jumlah Penyertaan dalam bentuk saham/ Total Investments in shares of stock				766.401	791.410

Lokasi utama kegiatan usaha seluruh entitas adalah di Indonesia.

The principal domicile of business of all the entities are located in Indonesia.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Mutasi penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

The changes in investments in shares accounted for under the equity method are as follows:

	2023					
	Saldo awal tahun/ Balance at beginning of year Rp Juta/ Rp Million	Bagian laba bersih entitas asosiasi/Share in net income of associates Rp Juta/ Rp Million	Laba komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Share in other comprehensive Income of associates Rp Juta/ Rp Million	Pengurangan/ Deduction Rp Juta/ Rp Million	Saldo akhir tahun/ Balance at end of year Rp Juta/ Rp Million	
PT Panin Sekuritas Tbk	460.819	37.822	1.898	(52.200)	448.339	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	172.916	15.327	(141)	(3)	188.099	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jumlah	633.735	53.149	1.757	(52.203)	636.438	Total

	2022					
	Saldo awal tahun/ Balance at beginning of year Rp Juta/ Rp Million	Bagian laba bersih entitas asosiasi/Share in net income of associates Rp Juta/ Rp Million	Laba komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Share in other comprehensive Income of associates Rp Juta/ Rp Million	Pengurangan/ Deduction Rp Juta/ Rp Million	Saldo akhir tahun/ Balance at end of year Rp Juta/ Rp Million	
PT Panin Sekuritas Tbk	419.436	72.028	675	(31.320)	460.819	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	156.712	15.551	653	-	172.916	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jumlah	576.148	87.579	1.328	(31.320)	633.735	Total

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi di atas adalah sebagai berikut:

Summary of the associates' financial statements above are as follows:

	PT. Panin Sekuritas Tbk		PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk		
	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Aset	2.235.129	2.102.240	2.793.351	2.466.671	Assets
Liabilitas	668.943	501.707	2.042.866	1.776.773	Liabilities
Aset Bersih	1.566.186	1.600.533	750.485	689.898	Net Assets
Pendapatan	396.662	518.048	401.687	332.395	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					Income (loss) for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	130.420	248.372	61.150	62.046	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	7.594	7.257	-	-	Non-controlling interest
Laba (rugi) tahun berjalan	138.014	255.629	61.150	62.046	Income (loss) for the year
Jumlah laba (rugi) dan laba komprehensif yang diatribusikan kepada:					Total profit (loss) and comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	136.966	250.700	60.587	64.653	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	7.543	7.250	-	-	Non-controlling interest
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	144.509	257.950	60.587	64.653	Total comprehensive income (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain	6.495	2.321	(563)	2.607	Other comprehensive income
Penerimaan dividen	52.200	31.320	-	-	Dividends received

Nilai wajar penyertaan dalam bentuk saham pada PT Panin Sekuritas dengan menggunakan harga kuotasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 337.212 juta dan Rp 400.896 juta.

Fair value of investment in shares of stock in PT Panin Sekuritas by using quoted price as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 337,212 million and Rp 400,896 million, respectively.

Nilai wajar penyertaan dalam bentuk saham pada MLI dengan menggunakan harga kuotasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 122.589 juta dan Rp 146.825 juta.

Fair value of investment in shares of stock in MLI by using quoted price as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 122,589 million and Rp 146,825 million.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, *unquoted equity instruments*, yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal, diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

As of December 31, 2023 and 2022, unquoted equity instruments whose fair value cannot be determined reliably are classified as measured at fair value through other comprehensive income that are recorded at cost net of allowance for impairment losses.

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas penyertaan saham AMAG sebesar Rp 60.916 juta. Nilai wajar penyertaan saham AMAG didasarkan pada harga pasar yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar penyertaan, setelah dikurangi pajak penghasilan tanguhan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 40.251 juta dan Rp 61.436 juta yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain tahun berjalan (Catatan 33).

The initial fair value of the investment in AMAG amounting to Rp 60,916 million is based on its quoted market price as of reporting date. The unrealized gain on increase in value of investment, net of deferred income tax, as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 40,251 million and Rp 61,436 million, respectively, and is recorded as other comprehensive income in the current year (Note 33).

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas penyertaan saham ALIF sebesar Rp 61.100 juta. Nilai wajar penyertaan saham ALIF didasarkan pada teknik penilaian yang mencakup input berupa model bisnis dan arus kas kontraktual. Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar penyertaan, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 61.100 juta dan Rp 60.548 juta yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain tahun berjalan (Catatan 33).

The initial fair value of the investment in ALIF amounting to Rp 61,100 million is based on valuation technique that include inputs from business model and contractual cash flow. The unrealized loss on decrease in value of investment, as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 61,100 million and Rp 60,548 million, respectively, and is recorded as other comprehensive income in the current year (Note 33).

Pada tanggal 4 April 2023, ALIF mengajukan rencana pembubaran perusahaan. Melalui pengumuman nomor PENG-44/PL.02/2023, OJK telah mencabut izin usaha ALIF. Sehingga pada tahun 2023, PDSB telah menghapus penyertaan modal saham kepada ALIF.

On April 4 2023, ALIF submitted a plan to disband the company. Through announcement number PENG-44/PL.02/2023, OJK has revoked ALIF's business license. Thus in 2023, PDSB has write-off its investment in shares of stock to ALIF.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat penyertaan dalam bentuk saham yang dijaminan oleh Grup.

On December 31, 2023 and 2022, there is no investment in shares of stocks that serve as collateral to the Group.

18. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

18. PREMISES AND EQUIPMENT AND RIGHT-OF-USE ASSETS

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset Tetap	9.879.981	10.029.990	Fixed Assets
Aset Hak Guna	122.163	146.946	Right-of-use Assets
Jumlah Tercatat	<u>10.002.144</u>	<u>10.176.936</u>	Net Book Value

a. Aset tetap

a. Premises and equipment

		2023						
		1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Redclassification	Penerapan metode revaluasi/Application of the revaluation method	31 Desember/ December 31, 2023	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Model revaluasi:								At revaluation model:
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Tanah		5.764.479	1.870	-	(1.504)	4.929	5.769.774	Land
Bangunan		3.509.719	8.824	6.875	6.120	1.474	3.519.262	Buildings
Kendaraan bermotor		209.889	16.315	5.349	-	-	220.855	Vehicles
Inventaris kantor		713.714	130.180	12.627	-	-	831.267	Office equipments
Aset tetap yang akan digunakan		33.587	2.646	-	(6.184)	-	30.049	Premises and equipments to be used
Jumlah		10.231.388	159.835	24.851	(1.568)	6.403	10.371.207	Total
Model revaluasi:								At revaluation model:
Akumulasi Penyusutan								Accumulated depreciation
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Bangunan		155.605	141.540	2.693	-	(8.263)	286.189	Buildings
Kendaraan bermotor		15.214	36.921	1.674	-	-	50.461	Vehicles
Inventaris kantor		30.579	132.329	8.332	-	-	154.576	Office equipments
Jumlah		201.398	310.790	12.699	-	(8.263)	491.226	Total
Jumlah Tercatat		10.029.990				14.666	9.879.981	Net Book Value
		2022						
		1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Redclassification	Penerapan metode revaluasi/Application of the revaluation method	31 Desember/ December 31, 2022	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Model revaluasi:								At revaluation model:
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Tanah		6.041.950	-	501	(276.970)	-	5.764.479	Land
Bangunan		3.678.795	3.929	4.291	(168.714)	-	3.509.719	Buildings
Kendaraan bermotor		172.845	89.152	44.340	-	(7.768)	209.889	Vehicles
Inventaris kantor		929.732	101.683	9.000	7.794	(316.495)	713.714	Office equipments
Aset tetap yang akan digunakan		57.384	21.279	-	(45.076)	-	33.587	Premises and equipments to be used
Jumlah		10.880.706	216.043	58.132	(482.966)	(324.263)	10.231.388	Total
Model revaluasi:								At revaluation model:
Akumulasi Penyusutan								Accumulated depreciation
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Bangunan		14.569	151.868	4.291	(6.541)	-	155.605	Buildings
Kendaraan bermotor		61.822	38.278	32.544	-	(52.342)	15.214	Vehicles
Inventaris kantor		344.439	201.144	8.217	-	(506.787)	30.579	Office equipments
Jumlah		420.830	391.290	45.052	(6.541)	(559.129)	201.398	Total
Jumlah Tercatat		10.459.876				234.866	10.029.990	Net Book Value

Tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris kantor yang dimiliki, digunakan dalam operasional Grup, penyediaan layanan keuangan, atau untuk keperluan administratif.

Land, buildings, vehicles, and office equipments owned are used in the Group's operations, provision of financial services, or for administrative purposes.

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Deductions of premises and equipment represent the sale and write-off of premises and equipment with details as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Nilai tercatat	12.152	13.080	Net book value
Harga jual dan penghapusan	4.632	36.115	Selling price and disposal
Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih	(7.520)	23.035	Gain (loss) on sale and write-off of premises and equipment - net

Pada tahun 2023, CFI membebaskan aset tetap dengan harga perolehan di bawah Rp 5 juta ke beban umum dan administrasi (Catatan 41) pada pos peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 3.976 juta.

In 2023, CFI charge the premises and equipment with acquisition cost below Rp 5 million to general and administration expenses (Note 41) in office supplies and stationeries expense post amounted to Rp 3,976 million.

Pada tahun 2023, nilai buku aset tetap yang dihapus Bank adalah Rp 4.182 juta, yang dibebankan pada beban operasional lainnya (Catatan 43).

Pada tahun 2021, Bank melakukan penilaian kembali atas nilai wajar tanah dan bangunan yang dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan laporan tertanggal 17 Desember 2021 dengan penanggung jawab Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert). Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal.

Pada tahun 2022, Bank melakukan penilaian kembali atas nilai wajar kendaraan bermotor dan inventaris kantor yang dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan laporan tertanggal 15 Desember 2022 dengan penanggung jawab Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert). Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan peraturan POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal dan Surat Edaran No.33/SEOJK.04.2021 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Nilai wajar aset tetap ditentukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Untuk nilai wajar tanah ditentukan menggunakan pendekatan pasar yang dapat dibandingkan yang mencerminkan harga transaksi terkini untuk properti serupa dan pendekatan pendapatan dengan metode Gross Income Multiplier (GIM) yang menggunakan rasio harga sewa. Untuk nilai wajar bangunan ditentukan menggunakan pendekatan pasar yang dapat dibandingkan yang mencerminkan harga transaksi terkini untuk properti serupa dan pendekatan pendapatan dengan metode Gross Income Multiplier (GIM) yang menggunakan rasio harga sewa atau pendekatan biaya pengganti baru pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. Untuk nilai wajar kendaraan bermotor ditentukan menggunakan pendekatan pasar dan untuk nilai wajar inventaris ditentukan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya.

In 2023, the book value of premises and equipment owned by the Bank has been written of amounting to Rp 4,182 million, and has been recognized in other operating expense (Note 43).

In 2021, Bank revalued its fair value of land and building that were performed by independent appraiser registered in OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan as stated in the report dated December 17, 2021 with Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert) as the partner in charge. Based on the appraisal report, the valuation was performed in accordance with Indonesian Appraiser Standards and the Bapepam-LK's rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market.

In 2022, Bank revalued its fair value of vehicles and office equipments were performed by independent appraisers registered in OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan as stated in the report dated December 15, 2022 with partner in charge Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert). Based on the appraisal report, the valuation was determined in accordance with the regulation POJK No. 28/POJK.04/2021 on the assessment and presentation of property valuation reports in the capital market and Circular Letter No.33/SEOJK.04.2021 on the guidelines for the valuation and presentation of property valuation reports in the capital market.

The fair value of premises and equipment were determined based on three approaches, which are market approach, income approach, and cost approach. The fair value of land is determined using a comparable market approach that reflects the current transaction price for similar properties and an income approach with the Gross Income Multiplier (GIM) method that uses a rental price ratio. The fair value of buildings is determined using a comparable market approach that reflects the current transaction price for similar properties and an income approach with the Gross Income Multiplier (GIM) method that uses a rental price ratio or replacement cost approach at the valuation date after deducting depreciation. For fair value of motor vehicles is determined using market approach and for fair value of office equipments is determined using market approach and cost approach.

Ringkasan Penilai Independen adalah sebagai berikut:

The summary of the Independent Appraiser are as follows:

Penilai Independen/ Independent Appraiser	Rekan Penanggung Jawab/ Partner In-charge	Tanggal Laporan/ Report Date	Metode Penilaian/ Appraisal Method	Tanggal Efektif Revaluasi/ Revaluation Effective Date
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert.)	17 Desember/ December 17, 2021	Pasar, pendapatan dan biaya/Market, income and cost	30 September/ September 30, 2021
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert.)	30 Desember/ December 30, 2021	Pasar, pendapatan dan biaya/Market, income and cost	30 September/ September 30, 2021
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert.)	15 Desember/ December 15, 2022	Pasar dan biaya/Market and cost	30 September/ September 30, 2022
KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan	Audrey Angelina, M.Bus., MAPPI (Cert.)	30 Desember/ December 30, 2022	Pasar dan biaya/Market and cost	18 November/ November 18, 2022
KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan	Audrey Angelina, M.Bus., MAPPI (Cert.)	29 Desember/ December 29, 2023	Pasar dan biaya/Market and cost	4 Desember/ December 4, 2023
KJPP Sapto Kasmodiard & Rekan	Sapto Haji, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)	15 Februari/ February 15, 2024	Pasar dan pendapatan/Market and income	15 Desember/ December 15, 2023

Pada tahun 2023 dan 2022, selisih lebih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi dengan pajak penghasilan masing-masing adalah sebesar Rp 18.065 juta dan Rp 231.496 juta, dibukukan dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada akun "Surplus Revaluasi Aset Tetap" (Catatan 33).

In 2023 and 2022, the difference between the fair value and carrying amount of the assets net of tax amounting to Rp 18,065 million and Rp 231,496 million, respectively, is recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as "Revaluation of premises and equipment" (Note 33).

Jika aset tetap dicatat menggunakan model biaya, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

If the premises and equipment are measured using the cost model, the carrying amount would be as follows:

	2023			2022			
	Biaya perolehan/ Cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation	Jumlah/ Total	Biaya perolehan/ Cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Tanah	1.109.257	-	1.109.257	1.097.496	-	1.097.496	Land
Bangunan	2.478.303	1.714.135	764.168	2.479.103	1.629.821	849.282	Building
Kendaraan bermotor	297.965	202.306	95.659	288.003	179.972	108.031	Motor vehicle
Inventaris kantor	1.781.167	1.545.762	235.405	1.663.111	1.453.668	209.443	Furnitures and fixtures
Jumlah	<u>5.666.692</u>	<u>3.462.203</u>	<u>2.204.489</u>	<u>5.527.713</u>	<u>3.263.461</u>	<u>2.264.252</u>	Total

Bank memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan 2052. Bank memiliki beberapa bangunan dengan hak legal berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan 2041. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Bank owns several pieces of land with Building Use Right (HGB) for 30 (thirty) years expiring up to 2052. The Bank owns several buildings with Strata Title Ownership Right (HMASRS) for 20 (twenty) years expiring in 2041. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land are acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dengan sertifikatnya Hak Guna Bangunan (HGB) berjangka waktu 30 (tiga puluh tahun) yang akan jatuh tempo sampai dengan 2039. Tanah ini disusutkan sepanjang masa berlaku sertifikat hak guna bangunannya. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah tersebut karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat tanah dan bangunan milik Bank dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp 33.305 juta dan Rp 77.769 juta yang masih dalam proses balik nama atau atas nama pihak lain.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset tetap masih lebih rendah dari pada nilai yang dapat dipulihkan, oleh karena itu tidak diperlukan penurunan nilai aset tetap.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset tetap pada tanggal posisi keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat aset tetap yang dijamin oleh Grup.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia dan China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, seluruhnya merupakan pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 5.983.388 juta dan SGD 280.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 6.800.152 juta dan SGD 280.000 pada tanggal 31 Desember 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

The Bank owns several pieces of land upon Land Management Right (HPL), which the certificates of Building Use Right (HGB) are valid for 30 (thirty) years expiring up to 2039. These land are depreciated over the period of their Building Use Right (HGB). Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land are acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

As of December 31, 2023 and 2022, land and buildings owned by the Bank with net book value amounting to Rp 33,305 million and Rp 77,769 million, are still in process of transferring the name of the owner or are still under other parties' name.

Management believes that the carrying amount of premises and equipment is lower than the recoverable value, as such there is no impairment in value of premises and equipment.

Management believes that the carrying amount of premises and equipment at the financial position date represents its fair value.

On December 31, 2023 and 2022, there is no premises and equipment that serve as collateral to the Group.

Premises and equipment, except for land, are insured against fire, theft and other possible risks with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia and China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, third parties, with coverage amount of Rp 5,983,388 million and SGD 280,000 as of December 31, 2023 and Rp 6,800.152 million and SGD 280,000 as of December 31, 2022. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

b. Aset hak guna

Grup menyewa beberapa aset termasuk bangunan, kendaraan bermotor, dan peralatan lainnya dengan masa sewa rata-rata adalah 5 tahun.

Jumlah yang diakui ke laba rugi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang timbul dari sewa adalah beban penyusutan aset-hak-guna setelah dikurangi beban penyusutan aset-hak-guna yang direklasifikasi sebesar Rp 103.746 juta dan Rp 95.351 juta yang diakui sebagai penyusutan dan amortisasi pada Catatan 41, dan beban bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 4.662 juta dan Rp 4.797 juta yang dicatat sebagai beban bunga atas liabilitas sewa pada Catatan 36.

b. Right-of-use assets

The Group leases several assets including building, motor vehicles, and other equipment with an average lease periode of 5 years.

The amount recognized in profit or loss for the period ended December 31, 2023 and 2022 arising from leases, are depreciation expense of right-of-use assets after deducting depreciation expense of reclassified right-of-use assets amounting to Rp 103,746 million and Rp 95,351 million which is recognized as depreciation and amortization in Note 41, and interest expense on lease liabilities amounting to Rp 4,662 million and Rp 4,797 million which is recorded as interest expense on lease liability on Note 36.

		2023						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset hak-guna							Right-of-use assets	
<u>Harga perolehan</u>							<u>Acquisition cost</u>	
Tanah	52.191	-	15.409	3.359	40.141	Land		
Ruangan	162.354	79.102	68.258	-	173.198	Rooms		
Kendaraan bermotor	7.572	4.130	1.683	-	10.019	Motor vehicles		
Lainnya	5.925	-	-	-	5.925	Others		
	<u>228.042</u>	<u>83.232</u>	<u>85.350</u>	<u>3.359</u>	<u>229.283</u>			
<u>Akumulasi penyusutan</u>							<u>Accumulated depreciation</u>	
Tanah	15.637	19.005	15.409	-	19.233	Land		
Ruangan	63.566	80.037	60.696	-	82.907	Rooms		
Kendaraan bermotor	1.697	3.519	1.617	-	3.599	Motor vehicles		
Lainnya	196	1.185	-	-	1.381	Others		
	<u>81.096</u>	<u>103.746</u>	<u>77.722</u>	<u>-</u>	<u>107.120</u>			
Nilai buku bersih	<u>146.946</u>				<u>122.163</u>	Net book value		
		2022						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset hak-guna							Right-of-use assets	
<u>Harga perolehan</u>							<u>Acquisition cost</u>	
Tanah	122.499	-	8.797	(61.511)	52.191	Land		
Ruangan	114.449	104.785	56.880	-	162.354	Rooms		
Kendaraan bermotor	4.983	11.298	8.709	-	7.572	Motor vehicles		
Lainnya	1.137	5.924	1.136	-	5.925	Others		
Jumlah	<u>243.068</u>	<u>122.007</u>	<u>75.522</u>	<u>(61.511)</u>	<u>228.042</u>	Total		
<u>Akumulasi penyusutan</u>							<u>Accumulated depreciation</u>	
Tanah	11.269	40.503	8.797	(27.338)	15.637	Land		
Ruangan	47.038	73.886	57.358	-	63.566	Rooms		
Kendaraan bermotor	2.088	7.156	7.547	-	1.697	Motor vehicles		
Lainnya	188	1.144	1.136	-	196	Others		
Jumlah	<u>60.583</u>	<u>122.689</u>	<u>74.838</u>	<u>(27.338)</u>	<u>81.096</u>	Total		
Nilai buku bersih	<u>182.485</u>				<u>146.946</u>	Net book value		

19. ASET TAKBERWUJUD - PERANGKAT LUNAK

Perincian perangkat lunak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Biaya perolehan		
Awal tahun	738.154	616.844
Penambahan tahun berjalan	142.099	135.113
Penghapusan tahun berjalan	<u>(11.228)</u>	<u>(13.803)</u>
Akhir tahun	<u>869.025</u>	<u>738.154</u>
Akumulasi amortisasi		
Awal tahun	(312.180)	(295.863)
Amortisasi tahun berjalan	(45.590)	(30.121)
Penghapusan tahun berjalan	<u>11.227</u>	<u>13.804</u>
Akhir tahun	<u>(346.543)</u>	<u>(312.180)</u>
Jumlah Tercatat	<u>522.482</u>	<u>425.974</u>

19. INTANGIBLE ASSETS - SOFTWARE

The details of software are as follows:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Cost		
Beginning of the year	616.844	616.844
Additions during the year	135.113	135.113
Disposals during the year	<u>(13.803)</u>	<u>(13.803)</u>
End of the year	<u>738.154</u>	<u>738.154</u>
Accumulated amortization		
Beginning of the year	(295.863)	(295.863)
Amortization during the year	(30.121)	(30.121)
Disposals during the year	<u>13.804</u>	<u>13.804</u>
End of the year	<u>(312.180)</u>	<u>(312.180)</u>
Carrying Value	<u>425.974</u>	<u>425.974</u>

20. ASET LAIN-LAIN

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank		
Agunan yang diambil alih	1.775.624	1.874.461
Aset tetap yang tidak digunakan	735.601	746.327
Pendapatan yang masih akan diterima		
Kredit	597.236	561.606
Efek-efek	548.145	511.445
Penempatan pada BI dan bank lain	16.223	9.729
Uang muka		
Pembelian aset tetap	31.017	27.664
Pihak ketiga	30.834	13.416
Pendirian cabang	6.664	3.215
Lainnya	<u>2.034.240</u>	<u>1.591.498</u>
Sub jumlah	<u>5.775.584</u>	<u>5.339.361</u>
Entitas Anak		
Agunan yang diambil alih	1.405.782	860.112
Piutang lain-lain	391.544	375.037
Lainnya	<u>127.414</u>	<u>108.447</u>
Sub jumlah	<u>1.924.740</u>	<u>1.343.596</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(365.811)</u>	<u>(369.966)</u>
Jumlah Aset Lain-lain - Bersih	<u>7.334.513</u>	<u>6.312.991</u>

20. OTHER ASSETS

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
The Bank		
Foreclosed collaterals	1.874.461	1.874.461
Idle properties	746.327	746.327
Accrued income receivables		
Loans	561.606	561.606
Securities	511.445	511.445
Placement with BI and other banks	9.729	9.729
Advances		
Purchase of premises and equipments	27.664	27.664
Third parties	13.416	13.416
New branches	3.215	3.215
Others	<u>1.591.498</u>	<u>1.591.498</u>
Sub total	<u>5.339.361</u>	<u>5.339.361</u>
Subsidiaries		
Foreclosed collaterals	860.112	860.112
Other receivables	375.037	375.037
Others	<u>108.447</u>	<u>108.447</u>
Sub total	<u>1.343.596</u>	<u>1.343.596</u>
Allowance for impairment losses	<u>(369.966)</u>	<u>(369.966)</u>
Total Other Assets - Net	<u>6.312.991</u>	<u>6.312.991</u>

Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit dan pembiayaan konsumen dalam bentuk tanah, bangunan dan kendaraan yang telah diambil alih oleh Grup.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih, antara lain melalui penjualan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	308.277	336.778	Balance at the beginning of the year
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(11.682)	(28.501)	Provision (recovery) during the year
Saldo akhir tahun	<u>296.595</u>	<u>308.277</u>	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Pendapatan bunga yang Masih Akan Diterima

Merupakan bunga yang masih akan diterima atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek dan kredit setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai dan tagihan atas dividen tunai dari penyertaan saham senilai Rp 5.086 juta dan 5.840 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	5.840	-	Balance at the beginning of the year
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(737)	5.826	Provision (recovery) during the year
Selisih kurs	(17)	14	Differences in exchange rate
Saldo akhir tahun	<u>5.086</u>	<u>5.840</u>	Balance at the end of the year

Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals represent collaterals on loan and consumer financing collaterals in the form of land, buildings and vehicles that have been foreclosed by the Group.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed collaterals as required by Financial Services Authority No. 40/POJK.03/2019, dated December 19, 2019, among others through sales.

The changes in the allowance for impairment losses on foreclosed collaterals are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on foreclosed collaterals is adequate to cover potential losses.

Accrued Interest Receivables

This account represents interest receivables on placement with Bank Indonesia and other banks, securities and loans minus impairment and cash dividend receivables from investment in shares of stock amounting to Rp 5,086 million and Rp 5,840 million as of December 31, 2023 and 2022.

The changes in the allowance for the impairment losses on accrued interest receivables are as follows:

Piutang lain-lain

Jumlah piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari CFI dengan perincian berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Piutang dalam proses penyelesaian	345.144	332.017	Receivables in settlement process
Lain-lain	<u>46.400</u>	<u>43.020</u>	Others
Jumlah	<u>391.544</u>	<u>375.037</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(64.130)</u>	<u>(55.849)</u>	Allowance for impairment loss
Bersih	<u>327.414</u>	<u>319.188</u>	Net

Piutang dalam proses penyelesaian dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar.

Piutang pembiayaan yang tercatat direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban konsumen setelah melalui proses yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal piutang pembiayaan khususnya untuk anjak piutang reklasifikasi menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika Hak Tanggungan jaminan tambahan digunakan untuk memenuhi kewajiban konsumen setelah melalui proses yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	55.849	1.168	Balance at the beginning of the year
Penyisihan tahun berjalan	51.688	62.432	Provision for the year
Penghapusan	<u>(43.407)</u>	<u>(7.751)</u>	Write-off
Saldo akhir tahun	<u>64.130</u>	<u>55.849</u>	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Other Receivables

Other receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 represents CFI with details as follows:

Receivables in settlement process
Others
Total
Allowance for impairment loss
Net

Receivable in settlement process stated at net realizable value which is lower of carrying amount or principal amount minus impairment of market value.

Finance receivable are reclassified as receivable in the process when the collateral can be used to settle receivable from customer after going through the process stipulated in financing agreement. Particularly factoring receivable reclassified to receivable in the process of settlement when mortgage rights from additional collateral is used to fulfill customers obligation through the process stipulated in financing receivable.

The changes in the allowance for impairment losses in 2023 and 2022 are as follows:

Balance at the beginning of the year
Provision for the year
Write-off
Balance at the end of the year

Management believes that the allowance for impairment losses on receivable in settlement process is adequate to cover potential losses.

Aset Keuangan Lainnya	Other Financial Assets	
	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million
Pihak berelasi		Related parties
Bank		Bank
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Kredit (Catatan 12)	7.717	Loans (Note 12)
Pihak ketiga		Third parties
Bank		Bank
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Kredit (Catatan 12)	589.519	Loans (Note 12)
Efek-efek (Catatan 9)	81.688	Securities (Note 9)
Penempatan pada BI dan Bank lain		Placement with BI and other banks
(Catatan 8)	16.223	(Note 8)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan		Measured at value through other
komprehensif lain		comprehensive income
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Efek-efek (Catatan 9)	351.342	Securities (Note 9)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		Measured at fair value through profit or loss
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Efek-efek	115.115	Securities
Sub jumlah	<u>1.161.604</u>	Subtotal
Entitas anak		Subsidiary
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Efek-efek (Catatan 9)	46.325	Securities (Note 9)
Kredit (Catatan 12)	38.048	Loans (Note 12)
Penempatan pada BI dan Bank lain		Placement with BI and other banks
(Catatan 8)	821	(Note 8)
Piutang lain	391.544	Other receivables
Setoran jaminan	5.935	Security deposits
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan		Measured at fair value through other
komprehensif lain		comprehensive income
Pendapatan yang masih akan diterima		Accrued interest receivables
Efek-efek	-	Securities
Subjumlah	<u>482.673</u>	Subtotal
Jumlah Aset Keuangan Lainnya	1.644.277	Total Other Financial Assets
Cadangan kerugian penurunan nilai -		Allowance for impairment losses -
aset keuangan lainnya	<u>(69.216)</u>	other financial assets
Jumlah Aset Keuangan Lainnya - Bersih	<u>1.575.061</u>	Total Other Financial Assets - Net

21. SIMPANAN

Simpanan memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

21. DEPOSITS

Deposits are arranged at both fixed and floating interest rate, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

	2023			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank				The Bank
Giro	186.069	11.535.347	11.721.416	Demand deposits
Tabungan	562.937	50.571.593	51.134.530	Savings deposits
Deposito berjangka	<u>728.923</u>	<u>68.986.654</u>	<u>69.715.577</u>	Time deposits
Sub Jumlah	<u>1.477.929</u>	<u>131.093.594</u>	<u>132.571.523</u>	Sub Total
Entitas Anak				Subsidiary
Giro <i>Wadiah</i>	-	289.238	289.238	<i>Wadiah</i> demand deposits
Tabungan <i>Wadiah</i>	<u>-</u>	<u>2.228.720</u>	<u>2.228.720</u>	<i>Wadiah</i> savings deposits
Sub Jumlah	<u>-</u>	<u>2.517.958</u>	<u>2.517.958</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.477.929</u>	<u>133.611.552</u>	<u>135.089.481</u>	Total
	2022			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank				The Bank
Giro	158.098	12.137.131	12.295.229	Demand deposits
Tabungan	503.372	48.955.033	49.458.405	Savings deposits
Deposito berjangka	<u>859.451</u>	<u>68.592.410</u>	<u>69.451.861</u>	Time deposits
Sub Jumlah	<u>1.520.921</u>	<u>129.684.574</u>	<u>131.205.495</u>	Sub Total
Entitas Anak				Subsidiary
Giro <i>Wadiah</i>	-	253.616	253.616	<i>Wadiah</i> demand deposits
Tabungan <i>Wadiah</i>	<u>-</u>	<u>1.224.364</u>	<u>1.224.364</u>	<i>Wadiah</i> savings deposits
Sub Jumlah	<u>-</u>	<u>1.477.980</u>	<u>1.477.980</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.520.921</u>	<u>131.162.554</u>	<u>132.683.475</u>	Total

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits at amortized cost are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Simpanan			Deposits
Giro	12.010.654	12.548.845	Demand deposits
Tabungan	53.363.250	50.682.769	Savings deposits
Deposito berjangka	69.715.577	69.451.861	Time deposits
Jumlah	<u>135.089.481</u>	<u>132.683.475</u>	Total
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)			Accrued interest payable (Note 27)
Giro	367	372	Demand deposits
Tabungan	2.721	1.265	Savings deposits
Deposito berjangka	178.678	144.682	Time deposits
Sub jumlah	<u>181.766</u>	<u>146.319</u>	Sub Total
Jumlah	<u>135.271.247</u>	<u>132.829.794</u>	Total

a. Giro terdiri atas:

a. Demand deposits consist of:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related parties
Bank			The Bank
Rupiah	127.313	102.472	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	58.719	55.585	United States Dollar
Lainnya	37	41	Others
Sub Jumlah	<u>186.069</u>	<u>158.098</u>	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	8.602.973	8.828.584	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	2.468.435	2.768.814	United States Dollar
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	463.939	539.733	Others (below 5% each)
Sub Jumlah	<u>11.535.347</u>	<u>12.137.131</u>	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiary
Rupiah	286.158	250.502	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	3.080	3.114	United States Dollar
Sub Jumlah	<u>289.238</u>	<u>253.616</u>	Sub Total
Jumlah	<u>12.010.654</u>	<u>12.548.845</u>	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rate
Rupiah	1,46%	1,40%	Rupiah
Valuta asing	0,08%	0,08%	Foreign currencies
Tingkat bonus rata-rata per tahun	0,80%	0,39%	Average bonus rate per annum

Jumlah giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 16.025 juta dan Rp 16.976 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, demand deposits which are earmarked and pledged as loan collateral amounted to Rp 16,025 million and Rp 16,976 million, respectively.

b. Tabungan terdiri atas:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah		
Bank		
Tabungan Panin	37.699.948	34.836.964
Tabungan Panin Super Prize	3.930.147	4.097.612
Tabungan Bisnis Panin	610.769	784.056
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	<u>2.045.706</u>	<u>1.911.976</u>
Sub Jumlah	<u>44.286.570</u>	<u>41.630.608</u>
Entitas Anak		
Tabungan <i>Wadiah</i>	<u>2.228.720</u>	<u>1.224.364</u>
Sub Jumlah - Rupiah	<u>46.515.290</u>	<u>42.854.972</u>
Valuta asing		
Bank		
Tabungan Pan Dollar		
Dollar Amerika Serikat	4.798.581	5.464.498
Dollar Australia	911.807	1.045.447
Dollar Singapura	497.861	569.033
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	<u>639.711</u>	<u>748.819</u>
Sub Jumlah - valuta asing	<u>6.847.960</u>	<u>7.827.797</u>
Jumlah	<u>53.363.250</u>	<u>50.682.769</u>
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun		
Rupiah	0,72%	0,76%
Valuta asing	0,12%	0,12%
Tingkat bonus rata-rata per tahun	5,02%	3,30%

Jumlah tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 266.479 juta dan Rp 166.369 juta.

b. Savings deposits consist of:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah		
The Bank		
Panin Saving Deposits	37.699.948	34.836.964
Panin Super Prize Saving Deposits	3.930.147	4.097.612
Bisnis Panin Saving Deposits	610.769	784.056
Others (below 5% each)	<u>2.045.706</u>	<u>1.911.976</u>
Sub Total	<u>44.286.570</u>	<u>41.630.608</u>
Subsidiary		
<i>Wadiah</i> Saving Deposit	<u>2.228.720</u>	<u>1.224.364</u>
Sub Total - Rupiah	<u>46.515.290</u>	<u>42.854.972</u>
Foreign currencies		
The Bank		
Pan Dollar Saving Deposits		
United States Dollar	4.798.581	5.464.498
Australian Dollar	911.807	1.045.447
Singapore Dollar	497.861	569.033
Others (below 5% each)	<u>639.711</u>	<u>748.819</u>
Sub Total - foreign currencies	<u>6.847.960</u>	<u>7.827.797</u>
Total	<u>53.363.250</u>	<u>50.682.769</u>
Average annual effective interest rates		
Rupiah	0,72%	0,76%
Foreign currencies	0,12%	0,12%
Average bonus rate per annum	5,02%	3,30%

As of December 31, 2023 and 2022, blocked savings deposits which pledged as loan collateral are amounted to Rp 266,479 million and Rp 166,369 million, respectively.

c. Deposito berjangka terdiri atas:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Pihak berelasi		
Bank		
Rupiah	642.930	695.353
Dollar Amerika Serikat	83.329	161.135
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	<u>2.664</u>	<u>2.963</u>
Sub Jumlah	<u>728.923</u>	<u>859.451</u>

c. Time deposits consist of:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Related parties		
The Bank		
Rupiah	642.930	695.353
United States Dollar	83.329	161.135
Other (below 5% each)	<u>2.664</u>	<u>2.963</u>
Sub Total	<u>728.923</u>	<u>859.451</u>

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	66.820.644	65.989.133	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	2.060.553	2.505.872	United States Dollar
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	<u>105.457</u>	<u>97.405</u>	Others (below 5% each)
Sub Jumlah	<u>68.986.654</u>	<u>68.592.410</u>	Sub Total
Jumlah	<u>69.715.577</u>	<u>69.451.861</u>	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rates
Rupiah	4,23%	2,89%	Rupiah
Valuta asing	0,17%	0,16%	Foreign currencies

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

Time deposits classified based on the term are as follows:

	2023			2022			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
1 bulan	42.742.665	1.690.720	44.433.385	43.928.310	1.810.622	45.738.932	1 month
3 bulan	14.608.486	228.794	14.837.280	14.100.772	416.656	14.517.428	3 months
6 bulan	4.411.048	275.514	4.686.562	3.589.534	397.506	3.987.040	6 months
12 bulan	4.904.782	56.975	4.961.757	4.116.527	142.591	4.259.118	12 months
Lebih dari 12 bulan	<u>796.593</u>	-	<u>796.593</u>	<u>949.343</u>	-	<u>949.343</u>	More than 12 months
Jumlah	<u>67.463.574</u>	<u>2.252.003</u>	<u>69.715.577</u>	<u>66.684.486</u>	<u>2.767.375</u>	<u>69.451.861</u>	Total

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.255.833 juta dan Rp 4.824.364 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, blocked time deposits which pledged as loan collateral are amounted to Rp 5,255,833 million and Rp 4,824,364 million, respectively.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

22. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks are arranged at both fixed and floating interest rate, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

	2023			2022			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga							Third parties
Bank							The Bank
Giro	24.429	212	24.641	20.487	217	20.704	Demand deposits
Deposito berjangka	52.986	-	52.986	18.664	-	18.664	Time deposits
Call money	<u>950.000</u>	-	<u>950.000</u>	<u>2.497.000</u>	-	<u>2.497.000</u>	Call money
Sub Jumlah	<u>1.027.415</u>	<u>212</u>	<u>1.027.627</u>	<u>2.536.151</u>	<u>217</u>	<u>2.536.368</u>	Sub Total
Entitas Anak							Subsidiary
Giro Wadiah	33.958	-	33.958	11.735	-	11.735	Wadiah demand deposits
PASBI	<u>1.359.143</u>	-	<u>1.359.143</u>	-	-	-	PASBI
Sub Jumlah	<u>1.393.101</u>	-	<u>1.393.101</u>	<u>11.735</u>	-	<u>11.735</u>	Sub Total
Jumlah	<u>2.420.516</u>	<u>212</u>	<u>2.420.728</u>	<u>2.547.886</u>	<u>217</u>	<u>2.548.103</u>	Total

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023		2022		
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					Average annual effective interest rates
Giro	0,24%	0,00%	0,08%	0,00%	Demand deposits
Deposito berjangka	3,76%	-	2,40%	-	Time deposits
Call money	5,81%	-	3,93%	-	Call money
Tingkat bonus rata-rata per tahun					Average bonus rate per annum
Giro Wadiah	0,80%	-	0,39%	-	Wadiah demand deposits
PASBI	6,50%	-	-	-	PASBI

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak ada simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no blocked deposits from other banks which pledged as collateral

Jangka waktu simpanan dari bank lain sejak tanggal penempatan hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The term of deposits from other banks from placement date to maturity date are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	30 - 366 hari/days	31 - 365 hari/days	Time deposits
Call money	14 - 32 hari/days	14 - 31 hari/days	Call money

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits from other banks at amortized cost are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Simpanan			Deposits
Giro	58.599	32.439	Demand deposits
Deposito berjangka	52.986	18.664	Time deposits
Call money	950.000	2.497.000	Call money
PASBI	1.359.143	-	PASBI
Jumlah	2.420.728	2.548.103	Total
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)			Accrued interest payable (Note 27)
Deposito berjangka	100	27	Time deposits
Call money	3.545	7.269	Call money
PASBI	2.343	-	PASBI
Jumlah	5.988	7.296	Total
Jumlah	2.426.716	2.555.399	Total

23. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2023		
				Nilai pembelian kembali/ Repurchase amount	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	2.358.435	820	2.357.615
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	17 hari/days	19 Desember/ December 19, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	1.414.051	990	1.413.061
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	23 hari/days	13 Desember/ December 13, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	1.225.378	866	1.224.512
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	19 hari/days	22 Desember/ December 22, 2023	10 Januari/ January 10, 2024	1.143.876	1.796	1.142.080
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	19 hari/days	15 Desember/ December 15, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	1.036.010	363	1.035.647
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	29 hari/days	21 Desember/ December 21, 2023	19 Januari/ January 19, 2024	473.332	1.589	471.743
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	30 hari/days	20 Desember/ December 20, 2023	19 Januari/ January 19, 2024	472.837	1.575	471.262
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	30 hari/days	13 Desember/ December 13, 2023	12 Januari/ January 12, 2024	471.992	957	471.035
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	31 hari/days	8 Desember/ December 8, 2023	8 Januari/ January 8, 2024	470.474	605	469.869
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	31 hari/days	11 Desember/ December 11, 2023	11 Januari/ January 11, 2024	470.235	867	469.368
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	94.346	32	94.314
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	28 Desember/ December 28, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	94.330	48	94.282
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	8 hari/days	27 Desember/ December 27, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	47.181	24	47.157
Jumlah/Total				9.772.477	10.532	9.761.945
				2022		
				Nilai pembelian kembali/ Repurchase amount	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/days	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	929.460	774	928.686
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/days	21 Desember/ December 21, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	925.970	452	925.518
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	32 hari/days	1 Desember/ December 1, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	369.042	58	368.984
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	33 hari/days	7 Desember/ December 7, 2022	9 Januari/ January 9, 2023	185.351	240	185.111
Jumlah/Total				2.409.823	1.524	2.408.299

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN – BERSIH

Surat berharga yang diterbitkan oleh Grup adalah sebagai berikut:

	2022
	Rp Juta/ Rp Million
Nilai nominal	
Bank	
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 - Pihak ketiga	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018	
Pihak berelasi	52.300
Pihak ketiga	3.847.700
	3.900.000
Surat berharga yang beredar	4.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi	(980)
Bersih	<u>3.999.020</u>

Suku bunga efektif rata-rata pada tahun 2022 untuk obligasi yang diterbitkan adalah sebesar 7,75% per tahun.

Seluruh surat berharga diterbitkan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh Grup tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Jumlah surat berharga diterbitkan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan adalah senilai Rp 4.000.000 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 27 Februari 2023, Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018 telah jatuh tempo dan dilunasi.

Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 telah jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2023 dan dilunasi pada tanggal 27 Juni 2023.

24. SECURITIES ISSUED - NET

Securities issued by the Group are as follows:

Nominal value
Bank
Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 - Third parties
Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018
Related parties
Third parties
Outstanding securities
Unamortized discount
Net

The average annual effective interest rate of these securities in 2022 is 7.75% per annum, respectively.

All securities issued and recorded at Indonesia Stock Exchange, Jakarta.

All securities issued by Group are not secured by a specific collateral, whether tangible or income or other assets of any kind of the Bank and are not guaranteed by any other party.

The amount of securities issued that will due within 12 months are amounting to Rp 4,000,000 million on December 31, 2022.

As of February 27, 2023, Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018 have matured and paid off.

Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 have matured on July 3, 2023 and repaid on June 27, 2023.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

	2022
	Rp Juta/ Rp Million
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.999.020
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)	29.949
Jumlah	<u>4.028.969</u>

Bank

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/ Rating	2022 Rp Juta/ Rp Million
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	5 tahun/years	3 Juli/ July 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2023	8,00%	idAA *)	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	5 tahun/years	27 Februari/ February 27, 2018	27 Februari/ February 27, 2023	7,60%	idAA *)	<u>3.900.000</u>
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount						4.000.000 (980)
Bersih/Net						<u>3.999.020</u>

*) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 1 April 2022 No. RC-301/PEF-DIR/IV/2022 untuk periode 1 April 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Tujuan penerbitan surat berharga oleh Bank adalah untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan bidang usaha.

The carrying amount of securities issued at amortized cost are as follows:

2022
Rp Juta/ Rp Million
3.999.020
29.949
<u>4.028.969</u>

The Bank

Bonds issued by the Bank offered at 100% of nominal value, with details are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/ Rating	2022 Rp Juta/ Rp Million
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	5 tahun/years	3 Juli/ July 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2023	8,00%	idAA *)	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	5 tahun/years	27 Februari/ February 27, 2018	27 Februari/ February 27, 2023	7,60%	idAA *)	<u>3.900.000</u>
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount						4.000.000 (980)
Bersih/Net						<u>3.999.020</u>

*) Based on PT Pefindo's letter No. RC-301/PEF-DIR/IV/2022, dated April 1, 2022 for period April 1, 2022 until April 1, 2023.

After one year from the issuance date of the bonds, the Bank has the option to buy them back in full or in part as a reserve for future resale or redemption, in accordance with the applicable regulations.

The purpose of issuing securities by Bank is for working capital in the context of business development, especially in providing loans.

The trustee for the bonds issued is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee agreement, contain a set of limitations that restrict the Bank to, among others:

- Reduce its Issued and Paid Up Capital.
- Change its business.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

- Increase its equity to any parties that in total will exceed the Financial Services Authority regulation or authorized financial institution.
- Sell or dispose of or transfer part or all of land and the buildings on it, both existing and those that will exist in the future.
- Pledge or encumber in any way the Bank's assets, existing or future to any third parties.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan selama tahun 2023 dan 2022.

The Bank has no defaults of payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to securities issued in 2023 and 2022.

Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

Interest is paid quarterly, with details as follows:

Jenis/Type	Kupon bunga pertama/ First coupon payment	Kupon bunga terakhir/ Last coupon payment
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	3 Oktober/ October 3, 2018	3 Juli/July 3, 2023
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	27 Mei/May 27, 2018	27 Februari/ February 27, 2023

25. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA

25. BORROWINGS – THIRD PARTIES

	2023			
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata efektif/ Average effective annual interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga				Third parties
CFI				CFI
Rupiah				Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3 - 4 tahun/years	7,31%	417.954	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	4 tahun/years	7,82%	414.501	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3 - 4 tahun/years	6,98%	404.157	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Danamon Tbk	3 - 4 tahun/years	7,48%	389.896	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	1 tahun/year	6,40%	300.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank DKI Tbk	4 - 5 tahun/years	7,46%	287.564	PT Bank DKI Tbk
PT Bank CIMB Naga Tbk	4 tahun/years	7,30%	234.290	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	4 tahun/years	7,50%	185.417	PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3 - 4 tahun/years	7,98%	168.969	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3 - 4 tahun/years	8,75%	625	PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah			<u>2.803.373</u>	Total

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

		2022				
		Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata efektif/ Average effective annual interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million		
Pihak ketiga					Third parties	
CFI					CFI	
Rupiah					Rupiah	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3 tahun/years		7,18%	611.763	PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	2 - 3 tahun/years		7,09%	362.665	PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank DKI Tbk	4 - 5 tahun/years		7,50%	218.133	PT Bank DKI Tbk	
PT Bank Danamon Tbk	3 - 4 tahun/years		7,27%	218.017	PT Bank Danamon Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3 tahun/years		8,45%	89.127	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3 - 4 tahun/years		7,00%	89.031	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Mandiri Tbk	4 tahun/years		8,65%	80.561	PT Bank Mandiri Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	3 - 4 tahun/years		8,75%	28.117	PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	1 tahun/year		6,00%	10.000	PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	
PT Bank Shinhan Indonesia	3 tahun/years		8,20%	1.250	PT Bank Shinhan Indonesia	
Sub Jumlah				1.708.664	Sub Total	
PDSB					PDSB	
Rupiah					Rupiah	
Bank Indonesia	28 hari/days		6,00%	435.531	Bank Indonesia	
Jumlah				<u>2.144.195</u>	Total	

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The carrying amount of borrowings at amortized cost are as follows:

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Pinjaman yang diterima	2.803.373	2.144.195	Borrowings
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)	<u>9.443</u>	<u>8.257</u>	Accrued interest payable (Note 27)
Jumlah	<u>2.812.816</u>	<u>2.152.452</u>	Total

Bagian pinjaman yang diterima yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan adalah sebesar Rp 1.860.053 juta dan Rp 1.286.557 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Loans received that will due within 12 months from the reporting date are amounting to Rp 1,860,053 million dan Rp 1,286,557 million on December 31, 2023 and 2022, respectively.

Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing pinjaman adalah sebagai berikut:

Payment made on the period for each loan facility are as follows:

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
CFI			CFI
PT Bank Central Asia Tbk	704.792	226.434	PT Bank Central Asia Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	380.000	312.083	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	185.000	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	165.746	136.931	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Danamon Tbk	158.125	385.312	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	149.583	35.000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	140.764	122.292	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	157.843	PT Bank Permata Tbk
Lainnya	<u>174.097</u>	<u>315.404</u>	Others
Jumlah	<u>2.058.107</u>	<u>1.691.299</u>	Total

CFI

Seluruh pinjaman yang diterima oleh CFI digunakan untuk modal kerja. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima berasal dari CFI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan perincian sebagai berikut:

CFI

All CFI's borrowing is used for working capital. Summary of major information related to borrowing are as follows from CFI on December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Bank	Fasilitas/Facility	Batas Kredit/ Credit Limit Rp Juta/ Rp Million	Awal/ Begin	Akhir/ Due
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pinjaman Berjangka V/ Term Loan V	500.000	06-Agu-19/ 06-Aug-19	05-Dec-23/ 05-Dec-23
	Pinjaman Berjangka VI/ Term Loan VI	500.000	28-Sep-22/ 28-Sep-22	28-Sep-26/ 28-Sep-26
	Modal Kerja 1/ Working Capital 1	500.000	30-Mei-18/ 30-May-18	14-Mar-23/ 14-Mar-23
PT Bank Mandiri Tbk	Modal Kerja 2/ Working Capital 2	500.000	16-Apr-19/ 16-Apr-19	14-Okt-23/ 14-Oct-23
	Modal Kerja 3/ Working Capital 3	500.000	09-Dec-19/ 09-Dec-19	20-Apr-24/ 20-Apr-24
	Modal Kerja 4/ Working Capital 4	500.000	08-Feb-23/ 08-Feb-23	22-Mei-27/ 22-May-27
PT Bank Danamon Tbk	Pinjaman Berjangka V/ Term Loan V	100.000	17-Jun-19/ 17-Jun-19	19-Jul-23/ 19-Jul-23
	Pinjaman Berjangka VI/ Term Loan VI	100.000	23-Agu-19/ 23-Aug-19	21-Okt-23/ 21-Oct-23
	Pinjaman Berjangka VII/ Term Loan VII	500.000	03-Jul-20/ 03-Jul-20	22-Mei-27/ 22-May-27
	Modal Kerja/Working Capital	150.000	27-Jan-23/ 27-Jan-23	27-Jan-24/ 27-Jan-24
PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan/and PT Bank Permata Tbk	Pinjaman Sindikasi/Syndicated Loan	1.000.000	05-Mar-21/ 05-Mar-21	04-Sep-24/ 04-Sep-24
PT Bank DKI Tbk	Pinjaman Berjangka III/Term Loan III	350.000	21-Nov-22/ 21-Nov-22	05-Jun-27/ 05-Jun-27
PT Bank Central Asia Tbk	<i>Installment Loan 11</i>	650.000	15-Nov-19/ 15-Nov-19	01-Jul-25/ 01-Jul-25
	Uncommitted Money Market Line	250.000	17-Agu-23/ 17-Aug-23	17-Agu-24/ 17-Aug-24 *)
	Pinjaman Rekening Koran/Overdraft	30.000	17-Agu-23/ 17-Aug-23	17-Agu-24/ 17-Aug-24 *)
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	<i>Money Market Line (Uncommitted)</i>	50.000	15-Apr-23/ 15-Apr-23	15-Apr-24/ 15-Apr-24 *)
	Pinjaman Berjangka VII/ Term Loan VII	200.000	16-Agu-23/ 16-Aug-23	14-Sep-27/ 14-Sep-27
PT Bank Victoria International Tbk	<i>Demand Loan - Non Revolving (Uncommitted)</i>	300.000	06-Dec-23/ 06-Dec-23	28-Okt-24/ 28-Oct-24 *)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Kredit Modal Kerja 8/Working Capital 8	300.000	25-Nov-19/ 25-Nov-19	20-Mei-24/ 20-May-24
	Kredit Modal Kerja 9/Working Capital 9	500.000	23-Agu-23/ 23-Aug-23	15-Dec-27/ 15-Dec-27
PT Bank OCBC NISP Tbk	Pinjaman Berjangka II/Term Loan II	500.000	14-Feb-18/ 14-Feb-18	13-Jan-24/ 13-Jan-24
PT Bank Shinhan Indonesia	Modal Kerja 1/Working Capital 1	150.000	23-Sep-20/ 23-Sep-20	23-Sep-23/ 23-Sep-23

*) Perpanjangan dari periode sebelumnya.

*) Extension from the previous period.

Terkait dengan utang bank tersebut di atas, CFI wajib menjaga *gearing ratio* sebesar 8x - 10x. CFI juga diwajibkan menjaga *rasio non-performing loan* untuk tunggakan lebih dari 30 hari tidak melebihi 5% dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 3% - 5%. CFI diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank terkait dengan perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk CFI, komposisi permodalan dan pembagian laba CFI.

Untuk pinjaman berjangka dalam bentuk sindikasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai *mandated lead arrangers and bookrunners*, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai *facility agent* dan PT Bank Central Asia Tbk bertindak sebagai *security agent*.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibebankan oleh CFI sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, CFI telah memenuhi semua pembatasan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman yang diterima adalah sebesar 7,22% dan 7,36% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga CFI terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

CFI memberikan piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga sebagai jaminan fidusia, dengan rincian sebagai berikut:

In relation to these bank loans, CFI is required to keep its gearing ratio value between 8x - 10x. CFI is also required to keep its non-performing loan ratio value for arrears exceeding 30 days not more than 5% and for arrears exceeding 90 days between 3% - 5%. CFI must give written notification to concerned banks regarding changes in management, mergers and acquisitions, changes in CFI structure, composition of capital and CFI profit sharing arrangement.

For syndicated loan, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Permata Tbk act as mandated lead arrangers and bookrunners, PT Bank CIMB Niaga Tbk act as facility agent and PT Bank Central Asia Tbk act as security agent.

Interest and principal loan payment have been paid by CFI on schedule.

As of December 31, 2023 and 2022, CFI has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

Weighted average effective interest rate of borrowings are amounting to 7.22% and 7.36% as of December 31, 2023 and 2022.

Bank loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus, exposing CFI to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

CFI provides finance lease receivables and/or consumer financing receivables to third parties as fiduciary collateral, with details as follows:

Bank	Jaminan/Collateral
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka VI (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 70% of the outstanding balance of term loan credit facility VI (Note 14).
PT Bank Mandiri Tbk	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja (Catatan 13 dan 14)/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of working capital credit facility (Notes 13 and 14).
PT Bank Danamon Tbk	Piutang pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka VII dan modal kerja/ Finance lease receivables and consumer financing receivables at an amount equivalent to 80% of the outstanding balance of term loan VII and working capital facility.
PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Permata Tbk	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit sindikasi (Catatan 13 dan 14)/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of syndicated loan (Notes 13 and 14).

Bank	Jaminan/Collateral
PT Bank DKI Tbk	Piutang sewa pembiayaan dan/ atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja (Catatan 13 dan 14)/ Finance leases receivables and/ or customer financing receivables at a minimum amount equivalent to 70% of the outstanding balance of working capital credit facility (Notes 13 and 14).
PT Bank Central Asia Tbk	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit <i>installment, uncommitted money market</i> dan pinjaman rekening koran (Catatan 13 dan 14)/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 70% of the outstanding balance of installment, uncommitted loan and demand loan (Notes 13 and 14)
PT Bank KEB Hana Indonesia	Tidak ada agunan untuk <i>money market</i> dan 70% dari jumlah utang pokok fasilitas pinjaman berjangka 7/ Clean basis collateral for money market line and 70% of the outstanding balance of term loan credit facility 7.
PT Bank Victoria International Tbk	Tidak ada agunan/ Clean basis collateral.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 8 dan 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 9 (Catatan 13 dan 14)/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of working capital credit facility 8 and 70% of the outstanding balance of working capital credit facility 9 (Notes 13 and 14).
PT Bank OCBC NISP Tbk	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit <i>Term Loan</i> (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 100% of the outstanding balance of term loan credit (Note 14).
PT Bank Shinhan Indonesia	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 70% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 1 (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 70% of the outstanding balance of working capital loan 1 (Note 14).

26. UTANG PAJAK

26. TAXES PAYABLE

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Pajak penghasilan badan (Catatan 44)	88.893	63.384	Corporate income tax (Note 44)
Pajak Penghasilan			Income tax
Pasal 21	27.631	24.689	Article 21
Pasal 25 (Catatan 44)	5.324	9.347	Article 25 (Note 44)
Pasal 23/26	76.288	68.634	Article 23/26
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.256	861	Value Added Tax - Net
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan badan	1.428	41.377	Corporate income tax
Pajak Penghasilan			Income tax
Pasal 21	5.926	7.506	Article 21
Pasal 4(2)	6.709	5.276	Article 4(2)
Pasal 23/26	460	502	Article 23/26
Pasal 25	6.444	-	Article 25
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.376	593	Value Added Tax - Net
Jumlah	<u>221.735</u>	<u>222.169</u>	Total

**27. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN
LIABILITAS LAIN-LAIN**

27. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Beban bunga yang masih harus dibayar	223.927	223.658	Accrued interest payable
Setoran jaminan	212.687	220.972	Marginal deposits
Pendapatan diterima dimuka	203.084	231.417	Income received in advance
Liabilitas pada pihak ketiga	197.820	73.319	Liabilities to third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	75.700	71.286	Allowance for impairment losses of commitments and contingencies
Lainnya	95.024	51.815	Others
Sub jumlah	<u>1.008.242</u>	<u>872.467</u>	Sub total
Entitas anak			Subsidiaries
Biaya yang masih harus dibayar	87.648	74.991	Accrued expenses
Liabilitas titipan setoran nasabah	78.803	98.051	Customer deposit liabilities
Liabilitas pada pihak ketiga	67.478	116.127	Liabilities to third parties
Lainnya	104.930	105.229	Others
Sub jumlah	<u>338.859</u>	<u>394.398</u>	Sub total
Jumlah	<u>1.347.101</u>	<u>1.266.865</u>	Total

Pendapatan Diterima dimuka

Merupakan pendapatan provisi kredit dan pendapatan *bancassurance* diterima dimuka yang belum diamortisasi.

Income Received in Advance

This account represents unamortized fees on loans and bancassurance income.

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi.

Accrued Interest Payable

This account represents interest payable on deposits, deposits from other banks, securities sold with agreements to repurchase, borrowings, securities issued and subordinated bonds.

Setoran Jaminan

Merupakan setoran jaminan transaksi L/C, bank garansi dan sewa *safe deposit*.

Marginal Deposits

This account represents marginal deposits on L/C transactions, bank guarantee and safe deposit rentals.

Liabilitas Keuangan Lainnya

Other Financial Liabilities

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial liabilities, measured at amortized cost
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related party
Jangka pendek			Short term
Pendapatan diterima dimuka	123.773	147.348	Income received in advance
Jangka panjang			Long term
Setoran jaminan	-	595	Security deposits
Pihak ketiga			Third party
Jangka pendek			Short term
Pendapatan diterima dimuka	79.311	84.069	Income received in advance
Bunga yang masih harus dibayar	223.927	223.658	Accrued interest payable
Jangka panjang			Long term
Setoran jaminan	212.687	220.377	Security deposits
Sub jumlah	<u>639.698</u>	<u>676.047</u>	Sub total
Entitas anak			Subsidiary
Pihak ketiga			Third party
Jangka pendek			Short term
Bunga yang masih harus dibayar	47.982	22.814	Accrued interest payable
Jangka panjang			Long term
Setoran jaminan	142	135	Security deposits
Sub jumlah	<u>48.124</u>	<u>22.949</u>	Sub total
Jumlah	<u>687.822</u>	<u>698.996</u>	Total

28. OBLIGASI SUBORDINASI – BERSIH

28. SUBORDINATED BONDS – NET

Merupakan obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh Bank dengan rincian sebagai berikut:

This account represents subordinated bonds issued by the Bank with details as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/Term	Tanggal mulai/Starting date	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/Fixed interest rate per annum	Peringkat/Rating	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	7 tahun/years	3 Juli/ July 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2025	9,50%	idA+ *)	1.302.000	1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017	7 tahun/years	17 Maret/ March 17, 2017	17 Maret/ March 17, 2024	10,25%	idA+ *)	2.400.000	2.400.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	7 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2023	9,60%	idA+ **)	-	100.000
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds						3.702.000	3.802.000
Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount						<u>(2.724)</u>	<u>(6.530)</u>
Bersih/Net						<u>3.699.276</u>	<u>3.795.470</u>
Tingkat bunga rata-rata per tahun/Average annual interest rate						9,99%	9,98%

*) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.

*) Based on PT Pefindo's letter No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023, dated April 11, 2023 for period April 11, 2023 until April 1, 2024.

**) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-399/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 28 Juni 2023.

**) Based on PT Pefindo's letter No. RC-399/PEF-DIR/IV/2023, dated April 11, 2023 for period April 11, 2023 until June 28, 2023.

Amortisasi diskonto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.806 juta dan Rp 3.759 juta.

Amortization of discount for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 3,806 million and Rp 3,759 million, respectively.

Obligasi subordinasi yang diterbitkan memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*). Suku bunga efektif rata-rata pada tahun 2023 dan 2022 dari obligasi subordinasi yang diterbitkan ini adalah sebesar 10,09% dan 10,10% per tahun.

Subordinated bonds are arranged at fixed interest rates, exposing the Group to fair value interest rate risk. The average effective interest rate in these subordinated bonds in 2023 and 2022 were 10.09% and 10.10% per annum, respectively.

Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

Interest is paid quarterly, with details as follow:

Jenis/Type	Kupon bunga pertama/ First coupon payment	Kupon bunga terakhir/ Last coupon payment
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	3 Oktober/ October 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2025
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017	17 Juni/ June 17, 2017	17 Maret/ March 17, 2024
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	28 September/ September 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2023

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

The Bank has no defaults on payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to subordinated bonds in 2023 and 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 telah jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2023 dan dilunasi pada tanggal 27 Juni 2023.

Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 have matured on June 28, 2023 and repaid on June 27, 2023.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari obligasi subordinasi adalah sebagai berikut:

The carrying amount of subordinated bonds at amortized cost are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Obligasi subordinasi - bersih	3.699.276	3.795.470	Subordinated bonds - net
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)	39.802	39.882	Accrued interest payable (Note 27)
Jumlah	<u>3.739.078</u>	<u>3.835.352</u>	Total

Tujuan penerbitan obligasi subordinasi adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif.

The purpose of issuing subordinated bonds is to strengthen capital structure and support the growth of productive assets.

Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for the issuance of subordinated bonds is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

The Bank has no right to redeem all or a part of the subordinated bonds.

Dalam hal terjadi penutupan usaha atau disolusi atau likuidasi karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Obligasi subordinasi tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan bidang usaha.
- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

In the event of liquidation or dissolution for any reason, any proceeds from the liquidation process will only be applied to the outstanding amount due to the subordinated bondholders after all payment of obligation to senior debts have been made. Claims in regard to subordinated bonds are ranked paripassu without any preferences among subordinated bondholders.

These subordinated bonds are not secured by a specific collateral, whether tangible or income or other assets of any kind of the Bank and are not guaranteed by any other party.

The trustee agreement, contain a set of limitations that restrict the Bank to, among others:

- Reduce its Issued and Paid Up Capital.
- Change its business.
- Increase its equity to any parties that in total will exceed the Financial Services Authority regulation or authorized financial institution.
- Perform a merger, consolidation or reorganization with other companies, that contradict with Financial Services Authority or authorized financial institution.
- Sell or dispose of or transfer part or all of land and the buildings on it, both existing and those that will exist in the future.
- Pledge or encumber in any way the Bank's assets, existing or future to any third parties.

The Bank has no defaults of payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to subordinated bonds in 2023 and 2022.

29. DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer merupakan investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Dana syirkah temporer berasal dari PDSB pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan perincian sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Pihak ketiga		
Rupiah		
<i>Counterparty</i> Bank		
Tabungan Mudharabah	24.582	4.187
Deposito berjangka Mudharabah	43.180	6.500
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	<u>350.000</u>	<u>700.000</u>
Sub jumlah	<u>417.762</u>	<u>710.687</u>
<i>Counterparty</i> Bukan Bank		
Tabungan Mudharabah	392.209	278.091
Deposito berjangka Mudharabah	<u>9.737.772</u>	<u>8.879.894</u>
Sub jumlah	<u>10.129.981</u>	<u>9.157.985</u>
Jumlah Rupiah	<u>10.547.743</u>	<u>9.868.672</u>
Dollar Amerika Serikat		
<i>Counterparty</i> Bukan Bank		
Deposito berjangka Mudharabah	<u>787</u>	<u>2.471</u>
Jumlah Dana Syirkah Temporer	<u>10.548.530</u>	<u>9.871.143</u>
Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun		
Tabungan Mudharabah	3,15%	2,36%
Deposito berjangka Mudharabah	5,70%	3,79%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	6,50%	3,80%

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari dana syirkah temporer adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Dana syirkah temporer		
Tabungan Mudharabah	416.791	282.278
Deposito berjangka Mudharabah	9.781.739	8.888.865
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	<u>350.000</u>	<u>700.000</u>
Sub jumlah	<u>10.548.530</u>	<u>9.871.143</u>

29. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Temporary syirkah funds represent investment in the form of Mudharabah saving deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificate.

Temporary syirkah funds are entered into by PDSB as of December 31, 2023 and 2022 with details as follows:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Third parties		
Rupiah		
Bank Counterparties		
Mudharabah Saving Deposits		
Mudharabah Time Deposits - Mudharabah Interbank Investment Certificate		
Sub total		
Non Bank Counterparties		
Mudharabah Saving Deposits		
Mudharabah Time Deposits		
Sub total		
Total Rupiah		
United States Dollar		
Non Bank Counterparties		
Mudharabah Saving Deposits		
Total Temporary Syirkah Funds		
Revenue sharing per annum		
Mudharabah saving deposits		
Mudharabah time deposits		
Mudharabah Interbank Investment Certificate		

The carrying amount of temporary syirkah funds at amortized cost are as follows:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Temporary syirkah funds		
Mudharabah Saving Deposits		
Mudharabah Time Deposits - Mudharabah Interbank Investment Certificate		
Sub total		

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 27)			Accrued interest payable (Note 27)
Deposito berjangka Mudharabah	33.462	13.429	Mudharabah Time Deposits
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	885	757	Mudharabah Interbank Investment Certificate
Sub jumlah	34.347	14.186	Sub total
Jumlah	10.582.877	9.885.329	Total

Tabungan Mudharabah

Mudharabah saving deposits

Tabungan Mudharabah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Mudharabah savings deposits by types are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Tabungan Bisnis	261.472	180.517	Tabungan Bisnis
Tabungan Fleksibel Program Gadget	97.866	76.252	Tabungan Fleksibel Program Gadget
Tabungan Mudharabah ABP	24.581	67	Tabungan Mudharabah ABP
Tabungan Tazam	10.505	997	Tabungan Tazam
Tabungan Mudharabah Karyawan	8.730	5.070	Tabungan Mudharabah Karyawan
Tabungan Pas Flexible	5.044	3.918	Tabungan Pas Flexible
Tabungan Rencana	4.874	13.128	Tabungan Rencana
Tabungan Mudharabah Pas IB	3.719	2.329	Tabungan Mudharabah Pas IB
Jumlah	416.791	282.278	Total

Deposito berjangka Mudharabah

Mudharabah time deposits

Klasifikasi deposito berjangka Mudharabah berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Mudharabah time deposits classified based on the term are as follows:

	2023			2022			
	Valuta asing/ Foreign currencies		Jumlah/ Total	Valuta asing/ Foreign currencies		Jumlah/ Total	
	Rupiah Rp'000	Rp'000		Rupiah Rp'000	Rp'000		
1 bulan	4.454.027	-	4.454.027	5.753.966	2.471	5.756.437	1 month
3 bulan	2.304.093	-	2.304.093	2.073.090	-	2.073.090	3 months
6 bulan	2.937.427	-	2.937.427	1.013.978	-	1.013.978	6 months
12 bulan	85.405	787	86.192	45.360	-	45.360	12 months
Jumlah	9.780.952	787	9.781.739	8.886.394	2.471	8.888.865	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah deposito berjangka Mudharabah yang diblokir dan dijadikan jaminan pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 429.006 juta dan Rp 243.796 juta.

As of December 31, 2023 and 2022, Mudharabah time deposits that are blocked and served as collateral for Mudharabah financing and Musyarakah financing are amounting to Rp 429,006 million and Rp 243,796 million.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank merupakan instrumen yang diterbitkan PDSB dalam bentuk sertifikat investasi Mudharabah yang diperdagangkan antar bank pada pasar uang antar bank.

Jangka waktu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berkisar antara 13 hari sampai 31 hari dan 5 hari sampai 18 hari.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank diperoleh dari:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel)	250.000	300.000	Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel)
Bank Victoria Syariah	100.000	100.000	Bank Victoria Syariah
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (BPD Sulselbar)	-	200.000	Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (BPD Sulselbar)
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara (BPD Kaltimtura)	-	100.000	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara (BPD Kaltimtura)
Jumlah	<u>350.000</u>	<u>700.000</u>	Total

Mudharabah Interbank Investment Certificate

Mudharabah Interbank Investment Certificate represents instrument issued by PDSB in the form of Mudharabah investment certificate which are traded on the interbank money market.

As of December 31, 2023 and 2022, Mudharabah Interbank Investment Certificate have terms range from 13 days to 31 days and 5 days to 18 days.

Mudharabah Interbank Investments Certificate are obtained from:

30. MODAL SAHAM, SAHAM TREASURI DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek, rincian pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	2023 dan/and 2022			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp Juta/ Rp Million	
PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	46,04%	1.108.907	PT Panin Financial Tbk
Votrait No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979	Votrait No. 1103 Pty Ltd.
Wakil Presiden Direktur - Hendrawan Danusaputra	3.500.000	0,01%	350	Deputy President Director - Hendrawan Danusaputra
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	<u>3.639.181.561</u>	<u>15,11%</u>	<u>363.919</u>	Public (below 5% each)
Jumlah	24.081.545.998	99,98%	2.408.155	Total
Saham treasuri	<u>6.100.000</u>	<u>0,02%</u>	<u>610</u>	Treasury stock
Jumlah	<u>24.087.645.998</u>	<u>100,00%</u>	<u>2.408.765</u>	Total

30. CAPITAL STOCK, TREASURY STOCK AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Based on report from the Securities' Administration Bureau, the Bank's stockholders as of December 31, 2023 and 2022 as follows:

Saham Treasuri

Sehubungan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tertanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Bank telah melaksanakan pembelian kembali saham yang diterbitkan.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Bank membeli kembali 6.100.000 lembar saham senilai Rp 4.233 juta yang dimiliki oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, senilai nominal Rp 610 juta digunakan sebagai pengurang dari modal disetor, sedangkan sisanya senilai Rp 3.623 juta digunakan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor merupakan kelebihan di atas nominal dari penjualan saham perdana, penawaran umum terbatas, *right issue*, pelaksanaan waran, pembagian dividen saham, *swap share*, dan pembelian saham treasuri.

Berikut ini adalah mutasi tambahan modal disetor:

	2023 dan/ and 2022
	Rp Juta/ Rp Million
Saldo awal tahun	3.440.707
Pengurangan agio dari saham treasuri	-
Saldo akhir tahun	<u>3.440.707</u>

Treasury Stocks

Due to Circular Letter from Financial Service Authority (OJK) No. 3/SEOJK.04/2020 dated March 9, 2020, about Other Condition as Significant Fluctuation of Market Condition Regarding to Repurchase of Stocks that has been issued by The Public Company, Bank has repurchase its own stocks.

On March 26, 2020, Bank repurchase 6,100,000 shares amounting to Rp 4,233 million owned by public. From that amount, Rp 610 million is used as deduction of capital stock, while the rest amounting to Rp 3,623 million is used as deduction of additional paid in capital.

Additional Paid in Capital

The additional paid-in capital represents the excess of the total proceeds over the total par value of shares arising from the sale of shares through public offering, rights issues, exercise of warrants, stock dividends, share swap and the purchase of treasury stocks.

The changes of additional paid in capital are as follows:

Balance at the beginning of year	3.440.707
Deduction paid in capital from treasury stock	-
Balance at the end of year	<u>3.440.707</u>

31. SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Merupakan selisih antara ekuitas bagian Bank di ekuitas entitas anak sebelum dan sesudah pengeluaran saham dengan nilai ekuitas entitas anak sebelum pengeluaran saham, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V saham CFI sejumlah 1.171.488.567 saham disertai sejumlah 911.157.774 waran pada tahun 2011 dan pelaksanaan waran Seri V sejumlah 209.723.040 waran pada tahun 2014, Penawaran Umum Saham Perdana PDSB sejumlah 4.750.000.000 saham disertai sejumlah 950.000.000 waran Seri I pada tahun 2014, pelaksanaan waran Seri I sejumlah 275.809.846 tahun 2017, dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I PDSB dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 13.763.702.595 saham pada tahun 2018.

31. DIFFERENCE IN VALUE OF EQUITY TRANSACTION WITH NON-CONTROLLING INTEREST

Represents the difference between the Bank's interest in the equity of subsidiaries, before and after issuance of shares in relation with CFI limited public offering V of 1,171,488,567 shares with 911,157,774 warrants in 2011, and the exercise of warrants Series V to 209,723,040 shares in 2014 and the PDSB Initial Public Offering of 4,750,000,000 shares with 950,000,000 warrants Series I in 2014 and the exercise of warrants Series I to 275,809,846 shares in 2017, perform to increase of Capital through PDSB Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights Issued (HMETD) of 13,763,702,595 shares in 2018.

32. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

32. NON-CONTROLLING INTEREST

	2023 Rp Juta/ Rp Million	2022 Rp Juta/ Rp Million	
Kepentingan Non-pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak			Non-controlling Interest in Net Assets of Subsidiaries
PT Clipan Finance Indonesia (CFI)	2.673.505	2.473.921	PT Clipan Finance Indonesia (CFI)
PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)	934.164	841.277	PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)
Jumlah	3.607.669	3.315.198	Total
Kepentingan Non-pengendali atas Laba Bersih Entitas Anak			Non-controlling Interest in Net Income of Subsidiaries
PT Clipan Finance Indonesia (CFI)	393.320	148.950	PT Clipan Finance Indonesia (CFI)
PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)	80.321	82.384	PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)
Jumlah	473.641	231.334	Total
Kepentingan Non-pengendali atas Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Entitas Anak - setelah pajak			Non-controlling Interest in Other Comprehensive Income (Loss) of Subsidiaries - net of tax
PT Clipan Finance Indonesia (CFI)	(425)	(2.795)	PT Clipan Finance Indonesia (CFI)
PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)	12.565	(15.495)	PT Bank Panin Dubai Syariah (PDSB)
Jumlah	12.140	(18.290)	Total

Ringkasan informasi keuangan atas setiap entitas anak Grup yang memiliki kepentingan non pengendali yang material dijelaskan dibawah. Ringkasan informasi keuangan dibawah merupakan nilai sebelum eliminasi intra kelompok usaha.

Summarized financial information in respect of each of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

CFI

CFI

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Jumlah Aset	<u>9.911.254</u>	<u>8.049.256</u>	Total Assets
Jumlah Liabilitas	4.384.496	2.938.173	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	<u>5.526.758</u>	<u>5.111.083</u>	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<u>9.911.254</u>	<u>8.049.256</u>	Total Liabilities and Equity
Pendapatan	2.296.383	1.509.403	Revenue
Beban	<u>(1.261.373)</u>	<u>(1.109.902)</u>	Expenses
Laba sebelum pajak	1.035.010	399.501	Income before tax
Beban pajak	<u>(220.005)</u>	<u>(88.779)</u>	Tax expense
Laba bersih periode berjalan	<u>815.005</u>	<u>310.722</u>	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	<u>(877)</u>	<u>(5.759)</u>	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	<u>814.128</u>	<u>304.963</u>	Total comprehensive income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			Profit attributable to:
Pemilik Entitas	421.685	161.772	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	<u>393.320</u>	<u>148.950</u>	Non-controlling interest
Laba periode berjalan	<u>815.005</u>	<u>310.722</u>	Profit for the period
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Entitas	421.233	158.808	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	<u>392.895</u>	<u>146.155</u>	Non-controlling interests
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	<u>814.128</u>	<u>304.963</u>	Total comprehensive income for the period
Dividen yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali	<u>193.310</u>	<u>-</u>	Dividends paid to non-controlling interests
Kas bersih diperoleh dari:			Net cash inflow from:
Aktivitas operasi	<u>(1.066.642)</u>	<u>(522.548)</u>	Operating activities
Aktivitas investasi	<u>(29.967)</u>	<u>(30.607)</u>	Investing activities
Aktivitas pendanaan	<u>1.098.005</u>	<u>457.700</u>	Financing activities

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

PDSB	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Jumlah Aset	<u>17.343.322</u>	<u>14.791.738</u>	Total Assets
Jumlah Liabilitas	4.006.528	2.015.191	Total Liabilities
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.548.529	10.271.143	Total Temporary Syirkah Funds
Jumlah Ekuitas	<u>2.788.265</u>	<u>2.505.404</u>	Total Equity
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	<u>17.343.322</u>	<u>14.791.738</u>	Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity
Pendapatan	1.120.208	942.496	Revenue
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(650.125)	(396.211)	Depository share on Return of Temporary Syirkah Funds
Pendapatan usaha lainnya	103.093	97.818	Other operating revenues
Beban kerugian penurunan nilai - bersih	46	(135.043)	Provision for impairment losses - net
Beban usaha lainnya	<u>(335.622)</u>	<u>(255.211)</u>	Other operating expenses
Laba Usaha	237.600	253.849	Income from Operations
Pendapatan non usaha - bersih	<u>16.737</u>	<u>684</u>	Non-operating revenues - net
Laba sebelum Zakat dan Beban Pajak	254.337	254.533	Income before Zakat and Tax Expense
Zakat	(6.358)	(6.363)	Zakat
Beban pajak	<u>(3.547)</u>	<u>2.362</u>	Tax expense
Laba bersih tahun berjalan	<u>244.432</u>	<u>250.532</u>	Profit for the year
Penghasilan (Kerugian) komprehensif lain	<u>38.428</u>	<u>(47.387)</u>	Other comprehensive income (loss)
Jumlah laba komprehensif	<u>282.860</u>	<u>203.145</u>	Total comprehensive income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			Profit attributable to:
Pemilik Entitas	164.111	168.148	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	<u>80.321</u>	<u>82.384</u>	Non-controlling interest
Laba tahun berjalan	<u>244.432</u>	<u>250.532</u>	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Entitas	189.974	136.257	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	<u>92.886</u>	<u>66.888</u>	Non-controlling interest
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>282.860</u>	<u>203.145</u>	Total comprehensive income for the year
Kas bersih digunakan untuk:			Net cash outflow from:
Aktivitas operasi	<u>938.466</u>	<u>(456.671)</u>	Operating activities
Aktivitas investasi	<u>(20.176)</u>	<u>(23.959)</u>	Investing activities
Aktivitas pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>	Financing activities

33. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

33. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Surplus revaluasi aset tetap (Catatan 18)	7.676.494	7.683.801	Gain on revaluation of premises (Note 18)
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Catatan 9 dan 17)	(498.473)	(624.383)	Changes in fair value marketable securities at fair value through other comprehensive income (Notes 9 and 17)
Bagian pendapatan komprehensif lain atas entitas asosiasi (Catatan 17)	5.508	3.751	Share of other comprehensive income of an associate (Note 17)
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti (Catatan 46)	<u>190.446</u>	<u>558.210</u>	Remeasurement of defined benefit obligation (Note 46)
Jumlah	<u>7.373.975</u>	<u>7.621.379</u>	Total

Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)

Changes in fair value financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

	2023			2022			
	Valuta asing/ Foreign currencies		Jumlah/ Total	Valuta asing/ Foreign currencies		Jumlah/ Total	
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun sebelum pajak tangguhan	(774.831)	(46.724)	(821.555)	328.290	(44.663)	283.627	Balance at beginning of the year before deferred tax
Penambahan tahun berjalan	10.503	-	10.503	(105.411)	-	(105.411)	Addition during the year
Keuntungan yang direalisasi atas penjualan selama tahun berjalan	(196.959)	-	(196.959)	(172.476)	-	(172.476)	Realized gain on sale during the year
Perubahan nilai efek tahun berjalan	340.361	2.183	342.544	(825.234)	2.059	(823.175)	Changes in the value of outstanding securities during the year
Selisih kurs	-	511	511	-	(4.120)	(4.120)	Exchange rate differences
Jumlah sebelum pajak tangguhan	(620.926)	(44.030)	(664.956)	(774.831)	(46.724)	(821.555)	Balance at end of the year before deferred tax
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	137.743	9.687	147.430	173.261	10.279	183.540	Deferred income tax asset (liability) - net
Cadangan kerugian penurunan nilai	57.170	-	57.170	58.917	-	58.917	Allowance for impairment losses
Jumlah	(426.013)	(34.343)	(460.356)	(542.653)	(36.445)	(579.098)	Total
Keuntungan non-pengendali	(38.117)	-	(38.117)	(45.285)	-	(45.285)	Non-controlling interest
Saldo akhir tahun	(464.130)	(34.343)	(498.473)	(587.938)	(36.445)	(624.383)	Balance at end of the year

Revaluasi FVTOCI merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang diukur pada penghasilan komprehensif lain bersih setelah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi ketika aset tersebut telah dilepas.

The FVTOCI valuation reserve represents the cumulative gains and losses arising from the revaluation of financial assets measured at FVTOCI that have been recognized in other comprehensive income, net of amounts reclassified to profit or loss when those assets have been disposed.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 57.170 juta dan Rp 58.917 juta. Cadangan tersebut dibentuk untuk surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The allowance for impairment losses of securities as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 57,170 million and Rp 58,917 million, respectively. The allowance is formed for securities measured at fair value through other comprehensive income.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

Management believes that the allowance for impairment losses on securities measured at fair value through other comprehensive income is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible securities.

Mutasi nilai tercatat atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount of securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2023				Jumlah/ Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Saldo awal tahun	22.880.672	-	-	2.132.076	25.012.748	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(155.830)	-	-	19.119	(136.711)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	687.359	-	-	-	687.359	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.460.872)	-	-	(154.480)	(1.615.352)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	(929.343)	-	-	(135.361)	(1.064.704)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	21.951.329	-	-	1.996.715	23.948.044	Balance at the end of the year

	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	25.709.866	-	180.887	2.149.991	28.040.744	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.433.518)	-	-	(71.670)	(1.505.188)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	1.977.899	-	-	53.755	2.031.654	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.373.575)	-	(180.887)	-	(3.554.462)	Financial asset derecognized
Total pengurangan tahun berjalan	(2.829.194)	-	(180.887)	(17.915)	(3.027.996)	Total deductions for the current year
Saldo akhir tahun	22.880.672	-	-	2.132.076	25.012.748	Balance at the end of the year

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	58.917	-	-	-	58.917	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.627)	-	-	-	(1.627)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(120)	-	-	-	(120)	Financial asset derecognized
Total penambahan (pengurangan) tahun berjalan **)	(1.747)	-	-	-	(1.747)	Total additions (deductions) for the current year **)
Saldo akhir tahun	57.170	-	-	-	57.170	Balance at the end of the year

	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	133	-	180.887	-	181.020	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	562	-	-	-	562	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	58.266	-	-	-	58.266	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(44)	-	(180.887)	-	(180.931)	Financial asset derecognized
Total penambahan (pengurangan) tahun berjalan **)	58.784	-	(180.887)	-	(122.103)	Total additions (deductions) for the current year **)
Saldo akhir tahun	58.917	-	-	-	58.917	Balance at the end of the year

*) ECL untuk syariah menggunakan kerugian historis sesuai PSAK 55 dan PPAP BI

*) ECL for sharia using incurred loss based on PSAK 55 and PPAP BI

***) Termasuk selisih kurs

***) Include differences in exchange rate

34. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

34. DIVIDENDS AND APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

2023

2023

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 52 tanggal 22 Juni 2023 dari Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank tidak membayar dividen.

As stated in the Deed of the Annual Stockholders' Meeting No. 52 dated June 22, 2023 of Fathiah Helmi, SH., notary in Jakarta the stockholders approved that the Bank will not distribute any dividends.

2022

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 60 tanggal 22 Juni 2022 dari Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank telah membagikan dividen tunai Rp 481.631 juta atau Rp 20 per lembar saham.

2022

As stated in the Deed of the Annual Stockholders' Meeting No. 60 dated June 22, 2022 of Fathiah Helmi, SH., notary in Jakarta the stockholders approved that the Bank has distribute cash dividends amounted to Rp 481,631 million or Rp 20 per share.

35. PENDAPATAN BUNGA YANG DIPEROLEH

35. INTEREST EARNED

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	262.830	274.368	Bonds/Sukuk
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	8.766	-	Bank Indonesia Rupiah Security
Surat Perbendaharaan Negara	373	-	Government Treasury Bills
Surat utang jangka menengah	50	43	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	<u>272.019</u>	<u>274.411</u>	Sub total - Measured at fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	1.294.702	1.526.577	Bonds/Sukuk
Reksadana	56.141	21.411	Mutual funds
Surat utang jangka menengah	890	1.205	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>1.351.733</u>	<u>1.549.193</u>	Sub total - Measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Giro	87.408	64.696	Demand deposits
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			Placements with Bank Indonesia and other banks
Call money	48.323	33.981	Call money
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	34.236	23.022	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Deposito Berjangka	6.406	5.672	Time Deposit
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	6.763	4.206	Bank Indonesia Sharia Certificates
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	338.707	274.187	Bonds/Sukuk
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	35.984	-	Bank Indonesia Rupiah Security
Wesel tagih	704	1.307	Export drafts
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	18	-	Interbank Fund Management Certificate based on Sharia Principle
Sukuk Bank Indonesia	-	31.604	Bank Indonesia Sukuk
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	268.114	232.702	Securities purchased with agreements to resell
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	7.233.378	6.773.661	Fixed loans
Pinjaman rekening koran	1.719.648	1.649.435	Demand loans
Pembiayaan bersama	535.057	646.033	Syndicated loans
Kredit program	134.200	130.756	Program loans
Kredit lainnya	140.399	120.573	Other loans
Lainnya			Others
Pembiayaan konsumen	1.231.620	1.037.126	Consumer financing
Sewa pembiayaan	56.363	24.686	Finance lease
Piutang jual dan sewa-balik	4.497	5.387	Sales and lease-back receivables
Anjak piutang	-	356	Factoring receivables
Sub jumlah - Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	<u>11.881.825</u>	<u>11.059.390</u>	Sub total - Measured at amortized cost
Jumlah Pendapatan Bunga - Rupiah	<u>13.505.577</u>	<u>12.882.994</u>	Total Interest Eamed - Rupiah

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Valuta asing			Foreign currencies
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	<u>5.136</u>	<u>5.126</u>	Bonds/Sukuk
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Giro	13.480	2.609	Demand deposits
Penempatan pada bank lain			Placements with other banks
Call money	175.975	63.454	Call money
Deposito berjangka	40.865	8.134	Time deposits
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	79.400	97.288	Bonds/Sukuk
Wesel tagih	69	159	Export drafts
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	241.721	237.852	Fixed loans
Pembiayaan bersama	73.486	68.177	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	1.248	1.365	Demand loans
Kredit lainnya	<u>7</u>	<u>165</u>	Other loans
Sub jumlah - Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	<u>626.251</u>	<u>479.203</u>	Sub total - Measured at amortized cost
Jumlah Pendapatan Bunga - Valuta asing	<u>631.387</u>	<u>484.329</u>	Total Interest Eamed - Foreign currencies
Jumlah Pendapatan Bunga	<u>14.136.964</u>	<u>13.367.323</u>	Total Interest Eamed

Pendapatan bunga dari efek diskonto atas kredit yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 70.779 juta dan Rp 69.042 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Interest income from the effect of discounting of impaired loans are amounting to Rp 70,779 million and Rp 69,042 million as of December 31, 2023 and 2022.

Jumlah pendapatan syariah yang diperoleh dari pendapatan usaha utama sebesar Rp 1.117.842 juta dan Rp 1.057.203 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Sharia income earned from primary income transactions amounted to Rp 1,117,842 million and Rp 1,057,203 million for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

36. BEBAN BUNGA

36. INTEREST EXPENSE

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi Rupiah			Financial liabilities measured at amortized cost Rupiah
Simpanan			Deposits
Deposito berjangka	2.780.654	1.800.024	Time deposits
Tabungan	1.058.134	762.964	Saving deposits
Giro	127.994	123.009	Demand deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
<i>Call money</i>	52.256	23.390	<i>Call money</i>
Giro	575	698	Demand deposits
Deposito berjangka	855	495	Time deposits
Tabungan	134	-	Saving deposits
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	85.543	48.010	Securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan			Securities issued
Obligasi subordinasi	378.216	382.362	Subordinated bonds
Obligasi	51.131	309.150	Bonds
Pinjaman yang diterima	191.411	139.008	Borrowings
Liabilitas sewa	4.662	4.796	Lease liability
Dana syirkah temporer			Temporary syirkah funds
Deposito berjangka	595.399	310.030	Time deposits
Sertifikat investasi Mudharabah	23.667	21.667	Mudharabah investment certificate
Tabungan	14.894	14.881	Saving deposits
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	102	-	Interbank Fund Management Certificate based on Sharia Principle
Sub jumlah	<u>5.365.627</u>	<u>3.940.484</u>	Sub total
Valuta asing			Foreign currencies
Simpanan			Deposits
Tabungan	9.153	9.218	Saving deposits
Deposito berjangka	4.164	4.479	Time deposits
Giro	2.886	3.139	Demand deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
<i>Call money</i>	<u>75</u>	<u>140</u>	<i>Call money</i>
Sub jumlah	<u>16.278</u>	<u>16.976</u>	Sub total
Jumlah Beban Bunga	<u>5.381.905</u>	<u>3.957.460</u>	Total Interest Expense

Jumlah beban syariah sebesar Rp 717.578 juta dan Rp 434.896 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Sharia expense amounted to Rp 717,578 million and Rp 434,896 million for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

37. KEUNTUNGAN BERSIH PENJUALAN EFEK

37. NET GAIN ON SALE OF SECURITIES

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Laba penjualan efek obligasi	134.511	87.816	Gain on sale of bonds
Laba penjualan efek lainnya	2.459	1.159	Gain on sale of other securities
Sub jumlah	<u>136.970</u>	<u>88.975</u>	Sub total
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Laba penjualan efek obligasi	<u>6.003</u>	<u>113.815</u>	Gain on sale of bonds
Jumlah	<u>142.973</u>	<u>202.790</u>	Total

38. PROVISI DAN KOMISI SELAIN KREDIT – BERSIH

38. COMMISSIONS AND FEES FROM TRANSACTIONS OTHER THAN LOANS - NET

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Asuransi	68.732	58.464	Insurance
Transaksi ekspor - impor	46.680	43.335	Export - import transactions
Kiriman uang	2.153	2.462	Money transfers
Lainnya - bersih	<u>32.494</u>	<u>33.041</u>	Others - net
Jumlah	<u>150.059</u>	<u>137.302</u>	Total

39. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN-LAINNYA

39. OTHER OPERATING REVENUES - OTHERS

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Penerimaan kembali kredit dan piutang pembiayaan konsumen yang dihapus buku	1.291.636	853.931	Recovery of loans and consumer financing receivables previously written-off
Pendapatan jasa administrasi	501.041	476.921	Administration fees
Jasa bank lainnya	86.788	93.282	Other service fees
Pendapatan komisi (Catatan 57)	23.576	23.576	Commissions revenue (Note 57)
Lainnya	<u>163.531</u>	<u>147.944</u>	Others
Jumlah	<u>2.066.572</u>	<u>1.595.654</u>	Total

Pendapatan operasional lain-lainnya antara lain terdiri dari hasil jasa kustodian, pendapatan administrasi buku cek/giro dan dividen yang diterima.

Other operating revenues consist of custodial services fees, cheque book fees and dividends received.

40. BEBAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI	2023	2022	40. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan			Financial Assets
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Penempatan pada Bank Indonesia			Placement with Bank Indonesia
dan bank lain (Catatan 8)	1.042	1.051	and other banks (Note 8)
Efek-efek (Catatan 9)	(14)	(123)	Securities (Note 9)
Kredit (Catatan 12)	2.347.482	2.597.134	Loans (Note 12)
Tagihan anjak piutang (Catatan 13b)	(4.241)	31.832	Factoring receivables (Note 13b)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 11)	330	(1.036)	Securities purchased under agreement to resell (Note 11)
Piutang jual dan sewa-balik (Catatan 15)	36.595	23.591	Sales and lease-back receivables (Note 15)
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 13a)	(8.530)	7.715	Finance lease receivables (Note 13a)
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 14)	342.257	197.235	Consumer financing receivables (Note 14)
Tagihan akseptasi (Catatan 16)	1.031	2.714	Acceptances receivables (Note 16)
Pendapatan bunga yang masih harus diterima (Catatan 20)	(737)	1.491	Accrued interest receivables (Note 20)
Sub jumlah	<u>2.715.215</u>	<u>2.861.604</u>	Subtotal
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek (Catatan 33)	(1.746)	(122.104)	Securities (Note 33)
Jumlah	<u>2.713.469</u>	<u>2.739.500</u>	Total
Aset Lain-lain (Catatan 20)			Other Assets (Note 20)
Piutang lain - lain	51.688	62.432	Other receivables
Piutang karyawan	-	1.000	Employee receivables
Jumlah	<u>51.688</u>	<u>63.432</u>	Total
Komitmen dan Kontinjensi (Catatan 50)	<u>4.430</u>	<u>16.121</u>	Commitment and Contingencies (Note 50)
Jumlah	<u>2.769.587</u>	<u>2.819.053</u>	Total
Aset Non Keuangan			Non Financial Assets
Agunan diambil alih (Catatan 20)	(11.681)	(28.501)	Foreclosed collaterals (Note 20)
Jumlah	<u>2.757.906</u>	<u>2.790.552</u>	Total

41. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

41. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Penyusutan dan amortisasi	471.520	637.269	Depreciation and amortization
Pemeliharaan dan perbaikan	229.866	193.505	Repairs and maintenance
Komunikasi	155.274	154.036	Communication
Pajak	120.058	112.566	Taxes
Peralatan dan kebutuhan kantor	107.893	104.804	Office supplies and stationaries
Sewa	67.243	51.611	Rental
Iklan	64.607	53.569	Advertising
Honorarium	56.754	99.331	Honorarium
Premi asuransi	52.314	51.864	Insurance premium
Representasi dan sumbangan	23.664	18.941	Representation and donations
Lainnya	629.955	589.641	Others
Jumlah	<u>1.979.148</u>	<u>2.067.137</u>	Total

Termasuk dalam beban umum dan administrasi lainnya adalah biaya peralatan teknologi, biaya transportasi, biaya pengiriman, biaya *outsourcing*, biaya eksekusi dan lelang jaminan, biaya ijin dan perpanjangannya.

Included in others general and administrative expenses are expenses for technology equipment, transport, courier, outsourcing fee, collateral execution and auction fee, permits and its extension.

42. BEBAN TENAGA KERJA

42. PERSONNEL EXPENSES

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Gaji dan tunjangan	2.033.919	1.880.293	Salaries and benefits
Gratifikasi dan bonus	264.971	251.752	Gratuities and bonuses
Pendidikan dan pelatihan	33.290	39.862	Training and education
Lainnya	103.176	102.863	Others
Jumlah	<u>2.435.356</u>	<u>2.274.770</u>	Total

Gaji dan bonus atas kelompok direksi, dewan komisaris, komite audit dan pejabat eksekutif yang termasuk dalam gaji dan tunjangan dan gratifikasi dan bonus di atas adalah sebagai berikut:

Salaries and bonuses of directors, commissioners, audit committee and executive officers included in salaries and benefit and gratuities and bonuses above are as follows:

2023							
Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits	Bonus/ Bonuses	Beban manfaat pensiun/ Pension benefits	Beban manfaat karyawan/ Post- employment benefits		Jumlah/ Total	
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dewan Komisaris	6	11.471	1.301	-	-	12.772	Board of Commissioners
Direksi	10	47.983	15.849	824	3	64.659	Directors
Anggota Komite Audit	2	598	-	-	-	598	Audit Committee Members
Pejabat Eksekutif	85	101.533	17.474	5.004	199	124.210	Executive Officers
Jumlah	<u>103</u>	<u>161.585</u>	<u>34.624</u>	<u>5.828</u>	<u>202</u>	<u>202.239</u>	Total

2022							
Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits	Bonus/ Bonuses	Beban manfaat pensiun/ Pension benefits	Beban manfaat karyawan/ Post- employment benefits		Jumlah/ Total	
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dewan Komisaris	6	10.205	602	-	-	10.807	Board of Commissioners
Direksi	10	44.948	13.153	5.349	20	63.470	Directors
Anggota Komite Audit	2	593	-	-	-	593	Audit Committee Members
Pejabat Eksekutif	85	94.114	20.911	16.216	448	131.689	Executive Officers
Jumlah	103	149.860	34.666	21.565	468	206.559	Total

43. BEBAN OPERASIONAL LAIN - LAINNYA

43. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Beban premi penjaminan (Catatan 53)	284.780	272.815	Deposit insurance premium paid (Note 53)
Beban pungutan Otoritas Jasa Keuangan Lainnya	100.191	96.631	Financial Service Authority fee expense Others
	<u>279.578</u>	<u>256.778</u>	
Jumlah	<u>664.549</u>	<u>626.224</u>	Total

44. PAJAK PENGHASILAN

44. INCOME TAX

Beban pajak Grup terdiri dari:

Tax expense of the Group consist of the following:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pajak kini			Current tax
Bank	(618.465)	(746.094)	The Bank
Entitas anak			Subsidiaries
CFI	<u>(220.531)</u>	<u>(56.664)</u>	CFI
Jumlah	<u>(838.996)</u>	<u>(802.758)</u>	Total
Pajak tangguhan			Deferred tax
Bank	71.827	16.628	The Bank
Entitas anak			Subsidiaries
CFI	526	(32.115)	CFI
PDSB	<u>(3.547)</u>	<u>2.362</u>	PDSB
Jumlah	<u>68.806</u>	<u>(13.125)</u>	Total
Jumlah	<u>(770.190)</u>	<u>(815.883)</u>	Total

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.775.726	4.088.893
Laba sebelum pajak - entitas anak dan eliminasi konsolidasi	<u>(1.078.504)</u>	<u>(704.072)</u>
Laba sebelum pajak - Bank	2.697.222	3.384.821
Perbedaan temporer:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	328.567	(94.254)
Beban imbalan pasca kerja	5.385	3.991
Beban pensiun	32.348	(87.506)
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	4.742	74.113
Biaya emisi obligasi subordinasi	3.806	3.858
Biaya emisi obligasi	980	5.447
Kenaikan perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang belum direalisasi	(43.136)	142.546
Biaya peralatan teknologi	<u>(6.204)</u>	<u>27.387</u>
Jumlah	<u>326.488</u>	<u>75.582</u>
Beban (manfaat) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Representasi, sumbangan dan denda	34.547	18.759
Kenikmatan kepada karyawan	7.580	4.778
Hasil sewa	(9.316)	(11.557)
Lainnya	<u>(330.013)</u>	<u>(81.048)</u>
Jumlah	<u>(297.202)</u>	<u>(69.068)</u>
Laba Kena Pajak Bank	<u>2.726.508</u>	<u>3.391.335</u>

Current Tax

A reconciliation between income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

Income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	4.088.893
Income before tax - subsidiaries and consolidation elimination	<u>(704.072)</u>
Income before tax - Bank	3.384.821
Temporary differences:	
Allowance for impairment losses	(94.254)
Post-employment benefit costs	3.991
Pension costs	(87.506)
Depreciation of premises and equipment and right-of-use assets	74.113
Subordinated bond issuance costs	3.858
Bond issuance costs	5.447
Unrealized gain from changes in value of financial assets measured at fair value through profit and loss	142.546
Expenses for technology equipment	<u>27.387</u>
Total	<u>75.582</u>
Non deductible expenses (non taxable income):	
Representation, donations and penalties	18.759
Employees' benefits in kind	4.778
Rental income	(11.557)
Others	<u>(81.048)</u>
Total	<u>(69.068)</u>
Taxable Income - Bank	<u>3.391.335</u>

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The computations of current tax expense and current tax payable are as follows:

	2023	2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Beban pajak kini	599.832	746.094
Dikurangi pajak dibayar di muka: Pasal 25	<u>(505.615)</u>	<u>(673.363)</u>
Utang Pajak Kini - Bank (Catatan 26)	<u>94.217</u>	<u>72.731</u>

PAJAK PENGHASILAN

Bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00013/206/16/091/18 tanggal 29 Agustus 2018 atas pajak penghasilan tahun 2016 sebesar Rp 216.430 juta dan denda sebesar Rp 86.572 juta. Bank telah membayar dan mencatat kekurangan pembayaran pajak berikut dendanya.

INCOME TAX

The Bank received corporate income tax underpayment assessment letter from Directorate General of Taxation No. 00013/206/16/091/18 dated August 29, 2018 regarding income tax year 2016 amounting to Rp 216,430 million and penalty amounting to Rp 86,572 million. The Bank has paid and recorded the underpayment and its penalty.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bank mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak tahun 2016 melalui surat No. 701/DIR/EXT/2019. Atas surat permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengabulkan pengurangan sebesar Rp 160.387 juta atas surat ketetapan pajak tahun 2016 melalui Surat Keputusan No. KEP-00543/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 8 Mei 2020. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 77 juta dikompensasikan sebagai pengurang pajak lainnya, sedangkan sisanya sebesar Rp 160.310 juta ditransfer langsung ke rekening Bank. Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada Juni 2020.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Bank mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak tahun 2016 kedua melalui surat No. 391/DIR/EXT/2020 sejumlah Rp 134.308 juta. Permohonan tersebut, telah ditolak melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 29 Desember 2020. Pada tanggal 20 Januari 2021, melalui surat nomor 017/DIR/EXT/21, Bank telah mengajukan surat gugatan PPh badan tahun 2016 sebesar Rp 134.308 juta ke Pengadilan Pajak atas Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 29 Desember 2020, dengan proses sidang pada tanggal 14 Desember 2021. Bank telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak yang diterbitkan tanggal 10 Maret 2022 dengan keputusan menolak Gugatan Bank.

Pada tanggal 9 Juni 2022 Bank mengajukan Surat Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000727.99/2021/PP/M.VI Tahun 2022 mengenai Gugatan terhadap surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 tertanggal 29 Desember 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP. Pada tanggal 20 Februari 2023, Mahkamah Agung telah memberikan keputusan dengan nomor register 195B/PJ/PJK/2023. Atas keputusan di atas, manajemen berkeyakinan tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00014/206/17/091/19 tanggal 30 September 2019 atas pajak penghasilan tahun 2017 sebesar Rp 368.257 juta. Bank telah membayar dan mencatat kekurangan pembayaran pajak tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bank mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tahun 2017 tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat No. 699/DIR/EXT/2019. Atas surat keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan seluruhnya keberatan Bank sejumlah Rp 360.586 juta melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01454/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 17 Desember 2020. Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada 23 Maret 2021.

On December 20, 2019, the Bank submitted a request for reduction or cancellation of 2016 tax assessment letter through the letter No. 701/DIR/EXT/2019. Upon the request letter submitted by the Bank, Directorate General of Taxation has approved the reduction of 2016 tax assessment letter by Rp 160,387 million through Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-00543/NKEB/WPJ.19/2020 dated May 8, 2020. The refund was compensated to other taxes of Rp 77 million and received in cash of Rp 160,310 million. The bank received the refund of in June 2020.

On August 4, 2020, the Bank submitted second request of reduction or cancellation for 2016 tax assessment letter to Directorate General of Taxation through letter No. 391/DIR/EXT/2020 on the remaining Rp 134,308 million. Such request has been rejected by Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 dated December 29, 2020. On January 20, 2021, through letter No. 017/DIR/EXT/21, the Bank has filed a lawsuit for 2016 corporate income tax amounting to Rp 134,308 million to the Tax Court based on the Director General of Taxes decision letter No. KEP 01332/NKEB/WPJ.19/2020 dated December 29, 2020, with a trial on December 14, 2021. The Bank has received official decision statement from the Tax Court, issued on March 10, 2022, rejecting the Bank's objection.

On June 9, 2022, Bank submitted Letter of Application for Judicial Review and Memorandum of Review on Tax Court Decision No. PUT-000727.99/2021/PP/M.VI Year 2022 regarding Lawsuit against the Decision Letter of the Director General of Taxes No. KEP-01332/ NKEB/ WPJ.19/2020 dated December 29, 2020 regarding Deduction of Tax Assessment of SKPKB, in Accordance with Article 36 paragraph (1b) of the KUP. On February 20, 2023, Supreme Court has filed a decision with registered number 195B/PJ/PJK/2023. Regarding to the decision above, management believes that there will be no impact on the Bank's consolidated financial statements.

The Bank received corporate income tax underpayment assessment letter from Directorate General of Taxation No. 00014/206/17/091/19 dated September 30, 2019 regarding income tax year 2017 amounting to Rp 368,257 million. The Bank has paid and recorded the underpayment.

On December 20, 2019, the Bank submitted an objection letter on the 2017 tax assessment letter to Directorate General of Taxation through letter No. 699/DIR/EXT/2019. The Directorate General of Taxation granted the objection of Rp 360,586 million in full through Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-01454/KEB/WPJ.19/2020 dated December 17, 2020. The Bank received the refund on March 23, 2021.

Pada tanggal 30 September 2019, Bank Panin menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) PPh pasal 4 (2) tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pajak. Bank melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut pada tanggal 29 Oktober 2019. Pada tanggal 20 Desember 2019, melalui surat nomor 700/DIR/EXT/2019, Bank mengajukan surat keberatan dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat keputusan nomor KEP-01377/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 20 November 2020.

Pada tanggal 15 Februari 2021, Bank mengajukan banding ke pengadilan pajak atas penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4(2) tahun 2017 melalui surat No. 039/DIR/EXT/21 sebesar Rp 59.706 juta ke pengadilan pajak atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01377/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 20 November 2020. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian tahun 2023, Bank masih menunggu putusan sidang tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PRIN-15/PJ.04/RIK.SIS/2021 tanggal 23 April 2021 PT Bank Pan Indonesia Tbk. telah diperiksa ulang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak penghasilan tahun 2016. Pada tanggal 28 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) sebesar Rp 681.966 juta, ditambah sanksi administrasi 100% sebesar Rp 681.966 juta, sesuai pasal 15 ayat (2) KUP.

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut bank tidak menyetujui baik secara aspek formal maupun material, dan mengajukan keberatan melalui surat No. 094/DIR/EXT/22 tanggal 21 Maret 2022, setelah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKBT pada tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor KEP-00154/KEB/PJ/WPJ.19/2023 mengabulkan sebagian keberatan permohonan Bank sebesar Rp 84.022 juta. Atas keputusan di atas, manajemen berkeyakinan tidak ada dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank dan laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 12 Juni 2023, melalui surat nomor 203/DIR/EXT/23 tertanggal 8 Juni 2023, Bank telah mengajukan surat Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00154/KEB/PJ/WPJ.19/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT") Pajak Penghasilan ("PPh") Badan Nomor 00001/306/16/091/21 tanggal 28 Desember 2021 Tahun Pajak 2016 kepada Ketua Pengadilan Pajak. Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Sidang No. PEMB-116/PAN.061/2023 tanggal 22 September 2023, pelaksanaan sidang pertama dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023.

On September 30, 2019, Bank Panin received PPh article 4 (2) underpayment assessment letter (SKPKB) from Directorate General of Taxation. The Bank paid for the SKPKB on October 29, 2019. On December 20, 2019, through letter number 700/DIR/EXT/2019, the Bank submitted an objection letter and was rejected by the Directorate General of Taxation through Decision Letter No. KEP-01377/KEB/WPJ.19/2020 dated November 20, 2020.

On February 15, 2021, the Bank filed an appeal to the tax court related to the rejection of submission of objections on SKPKB tax article 4(2) 2017 through letter No. 039/DIR/EXT/21, amounting to Rp 59,706 million, based on the Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-01377/KEB/WPJ.19/2020 dated 20 November 2020. As of the issuance date of the 2023 consolidated financial statements, the Bank is still waiting for the decision of the appeal.

Based on the field inspection letter No. PRIN-15/PJ.04/RIK.SIS/2021 dated April 23, 2021, PT Bank Pan Indonesia Tbk has been re-examined by the Directorate General of Taxation for 2016 corporate income tax. On December 28, 2021, the Directorate General of Taxation has issued an additional underpaid tax assessment letter (SKPKBT) amounting to Rp 681,966 million, with 100% administrative sanction of Rp 681,966 million, in accordance with article 15 paragraph (2) of the KUP.

On the tax underpayment additional assessment letter, the Bank did not agree either formally or materially, and would file an objection through letter No. 094/DIR/EXT/22 dated March 21, 2022, after making payments for all the SKPKBT on March 18, 2022. On March 17, 2023, Directorate General of Taxation issued the Decision Number KEP-00154/KEB/PJ/WPJ.19/2023 granted half of objection of Rp 84,022 million. For the decision, management believes that there will be no significant impact on the Bank's financial condition and consolidated financial statements.

On June 12, 2023, through letter No. 203/DIR/EXT/23 dated June 8, 2023, the Bank has submitted an application letter for appeal against the Decision of Directorate General of Taxation No. KEP-00154/KEB/PJ/WPJ.19/2023 dated March 17, 2023, concerning Taxpayer Objections to the Corporate Income Tax ("SKPKBT") Assessment Letter No. 00001/306/16/091/21 dated December 28, 2021 Fiscal Year 2016 to the Chairman of the Tax Court. In accordance with the Hearing Notification Letter No. Pem-116/PAN.061/2023 dated September 22, 2023, the first trial held on October 10, 2023.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian tahun 2023, Bank masih menunggu hasil sidang banding tersebut.

As of the issuance date of the 2023 consolidated financial statements, the Bank is still waiting for the result of the appeal.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00027/WPJ.19/RIK.SIS/2022 tanggal 2 Agustus 2022. Pemeriksaan terhadap PT Bank Pan Indonesia Tbk. atas pajak ditahun 2018 dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Satu. Pada tanggal 09 Juni 2023, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 483.846 juta.

Based on Field Inspection Notification Letter number Pem-00027/WPJ.19/RIK.SIS/2022 dated August 2, 2022. Inspection of PT Bank Pan Indonesia Tbk. Taxes for 2018 were carried out by the Regional Office of DJP Large Taxpayer One. On June 9 2023, the Directorate General of Taxes issued a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) amounting to IDR 483,846 million.

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut Bank telah mengajukan permohonan keberatan melalui surat no. 418/DIR/EXT/23 sampai dengan surat No. 442/DIR/EXT/23 tertanggal 4 September 2023, setelah Bank melakukan pembayaran atas seluruh SKPKBT pada tanggal 25 Agustus 2023. Atas pembayaran SKPKBT di atas, manajemen berkeyakinan tidak ada dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank dan laporan keuangan konsolidasian.

On the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), the Bank does not approve in part, both in formal and material aspects. The Bank has submitted an objection request via letter No. 418/DIR/EXT/23 to letter no. 442/DIR/EXT/23 dated September 4, 2023, after the Bank made payment for all SKPKBT on August 25, 2023. On March 17, 2023. For the SKPKBT payments above, management believes there will be no significant impact on the Bank's financial condition and consolidated financial statements.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian tahun 2023, Bank masih menunggu hasil permohonan keberatan tersebut.

As of the issuance date of the 2023 consolidated financial statements, the Bank is still waiting for the objection request.

Pada tanggal 22 Desember 2023 Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. PRIN-418/RIKSIS/KPP.1901/2023 dan PRIN-419/RIKSIS/KPP.1901/2023 tanggal 12 Desember 2023 untuk tahun pajak 2019 dan 2021.

On December 22, 2023, the Bank received a Tax Audit Order Letter from the Directorate General of Taxes No. PRIN-418/RIKSIS/KPP.1901/2023 and PRIN-419/RIKSIS/KPP.1901/2023 dated December 12, 2023 for the 2019 and 2021 fiscal year.

Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain

Income tax recognized in other comprehensive income

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Manfaat (beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:			Arising on income and expense recognized in other comprehensive income:
Surplus revaluasi aset tetap	3.400	(3.382)	Revaluation of premises and equipment
Keuntungan (kerugian) aktuarial (Catatan 46)	104.002	(44.839)	Remeasurement of defined benefit obligation (Note 46)
Revaluasi aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(81.514)	214.040	Changes in fair value of financial assets measured at fair value through OCI
Jumlah	<u>25.888</u>	<u>165.819</u>	Total
Reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi			Reclassification from equity to profit or loss
Berkaitan dengan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	43.331	37.945	Relating to financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	<u>69.219</u>	<u>203.764</u>	Total income tax recognized in other comprehensive income

Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank				
Cadangan kerugian penurunan nilai	599.204	72.285	-	671.489
Liabilitas imbalan pasca kerja	14.118	1.185	(1.290)	14.013
Beban pensiun	64.806	7.116	104.897	176.819
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	(39.189)	1.043	-	(38.146)
Surplus revaluasi aset tetap	(340.441)	-	1.035	(339.406)
Biaya emisi obligasi subordinasi	(1.435)	834	-	(601)
Biaya emisi obligasi	(219)	219	-	-
Biaya peralatan teknologi	10.426	(1.365)	-	9.061
Penurunan (kenaikan) perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	217.070	(9.490)	(31.846)	175.734
Jumlah	524.340	71.827	72.796	668.963
Entitas anak				
CFI	66.942	526	3.281	70.749
PDSB	18.565	(3.547)	(6.858)	8.160
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	609.847	68.806	69.219	747.872

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
The Bank				
Allowance for impairment losses	619.940	(20.736)	-	599.204
Post-employment benefits obligations	15.518	878	(2.278)	14.118
Pension costs	128.075	(19.251)	(44.018)	64.806
Depreciation of premises and equipment and right-of-use assets	(59.809)	20.620	-	(39.189)
Revaluation of premises and equipment	(338.419)	-	(2.022)	(340.441)
Subordinated bond issuance costs	(2.284)	849	-	(1.435)
Bond issuance costs	(1.417)	1.198	-	(219)
Expenses for technology equipment	8.716	1.710	-	10.426
Unrealized loss (gain) from changes in fair value financial assets measured at fair value through other comprehensive income	(51.285)	31.360	236.995	217.070
Total	319.035	16.628	188.677	524.340
Subsidiaries				
CFI	97.432	(32.115)	1.625	66.942
PDSB	2.741	2.362	13.462	18.565
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	419.208	(13.125)	203.764	609.847

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	<u>2023</u> Rp Juta/ Rp Million	<u>2022</u> Rp Juta/ Rp Million	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.775.726	4.088.893	Income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak - entitas anak dan eliminasi konsolidasi	<u>(1.078.504)</u>	<u>(704.072)</u>	Income before tax - subsidiaries and consolidation elimination
Laba sebelum pajak - Bank	2.697.222	3.384.821	Income before tax - Bank
Tarif pajak yang berlaku	593.389	744.661	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(65.384)	(15.195)	Tax effect of non taxable income
Provisi untuk ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan	<u>18.633</u>	<u>-</u>	Provision for uncertainty over income tax treatment
Beban Pajak - Bank	546.638	729.466	Tax Expense - Bank
Beban Pajak - entitas anak			Tax Expenses - subsidiaries
CFI	220.005	88.779	CFI
PDSB	<u>3.547</u>	<u>(2.362)</u>	PDSB
Jumlah	<u>770.190</u>	<u>815.883</u>	Total

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan tahun 2023 dan 2022.

Taxable income resulting from reconciliation becoming the basis of Annual Corporate Income Tax Return for 2023 and 2022.

45. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

45. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic/diluted earnings per share attributable to the owners of the Bank is based on the following data:

	<u>2023</u> Rp Juta/ Rp Million	<u>2022</u> Rp Juta/ Rp Million	
<u>Laba bersih</u>			<u>Net income</u>
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian: Laba bersih	<u>2.531.895</u>	<u>3.041.676</u>	Earnings for computation of basic/diluted earnings per share: Net income
<u>Jumlah Saham (dalam angka penuh)</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Numbers of Shares (in full amount)</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar/dilusian	<u>24.087.645.998</u>	<u>24.087.645.998</u>	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic/diluted earnings per share

46. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

46. PENSION PLAN AND OTHER POST-EMPLOYMENT BENEFITS

a. Defined Benefits Pension Plan

The Bank established defined benefit pension plan covering all the permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

Dengan akta No. 25 tanggal 15 Agustus 1981 dari notaris Hendra Karyadi, S.H., yang disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat No. S-879/MK.11/1983 tanggal 15 Desember 1983, Bank mendirikan Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank (YDJHT PIB).

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Bank tanggal 4 Januari 1994 telah menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan YDJHT PIB menjadi Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank (DPK PIB). Penyesuaian nama menjadi DPK PIB maupun peraturannya telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusannya No. Kep-069/KM.17/1994 tanggal 4 April 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1994.

DPK PIB mengelola program pensiun manfaat pasti yang memberikan jaminan hari tua bagi seluruh karyawan yang telah pensiun atau, bila yang bersangkutan meninggal dunia, kepada janda-janda/duda-duda dan anak-anak mereka di bawah usia 21 tahun atau belum menikah.

Pendanaan DPK PIB terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan sebesar 3% dari gaji pokok.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur kepada Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan perumahan. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan *real estate* untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

The Bank established Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank (YDJHT PIB), based on Deed No. 25 dated August 15, 1981 of notary Hendra Karyadi, S.H., which is approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. S-879/MK.11/1983 dated December 15, 1983.

Based on the Extraordinary Meeting of the Bank's Stockholders on January 4, 1994, the stockholders agreed and decided to change the name of YDJHT PIB into Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank (DPK PIB). The change in the name and its regulation was approved by the Minister of Finance of Republic of Indonesia through Decision Letter No. Kep-069/KM.17/1994 dated April 4, 1994, and is published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 10, 1994.

DPK PIB manages the Bank's defined benefit pension program, which provides pension benefits to the employees when they retire or, in case of death, to their widows/widowers and their children below 21 years old or their unmarried children.

DPK PIB is funded by contributions from both the employer and its employees. Employees contributions amounted to 3% of their basic salaries.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the Board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Nilai wajar instrumen ekuitas, utang dan derivatif di atas ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian di pasar aktif sedangkan nilai wajar perumahan tidak didasarkan pada harga pasar kuotasian di pasar aktif. Dana pensiun memiliki kebijakan untuk menggunakan *swap* tingkat bunga (*interest rate swap*) sebagai lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga. Kebijakan ini telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan sebelumnya. Eksposur mata uang asing sepenuhnya dilindungi dengan menggunakan kontrak berjangka valuta asing.

Nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas program pensiun imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Diakui pada laba rugi			Recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	213.081	175.809	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	(109.909)	Past service cost due to plan amendment
Beban bunga	253.034	238.344	Interest cost
Ekspektasi pengembalian investasi	(240.341)	(211.388)	Expected return on assets
Dampak IFRIC	-	(19.518)	IFRIC impact
Pengakuan masa kerja lalu	1.048	-	Recognition of past services
Jumlah	<u>226.822</u>	<u>73.338</u>	Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain			Recognized in other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto			Remeasurement on the net-defined benefit obligation
Kerugian (keuntungan) aktuarial	<u>476.806</u>	<u>(200.079)</u>	Actuarial loss (gain)
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u><u>703.628</u></u>	<u><u>(126.741)</u></u>	Total recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The fair values of the above equity, debt instruments and derivatives are determined based on quoted market prices in active markets whereas the fair values of properties are not based on quoted market prices in active markets. It is the policy of the fund to use interest rate swaps to hedge its exposure to interest rate risk. This policy has been implemented during the current and prior years. Foreign currency exposures are fully hedged by the use of the forward foreign exchange contracts.

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respects of the defined benefit plan are as follows:

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Rekonsiliasi liabilitas manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	294.438	582.023	Balance at the beginning of the year
Beban pensiun tahun berjalan	226.822	73.338	Pension expense during the year
Beban (pendapatan) pensiun pada penghasilan komprehensif lain	476.806	(200.079)	Expenses (revenues) recognized in other comprehensive income
luran pensiun dibayar tahun berjalan	<u>(194.474)</u>	<u>(160.844)</u>	Pension contributions paid for the year
Saldo akhir tahun	<u>803.592</u>	<u>294.438</u>	Balance at the end of the year

Pension benefits obligation reconciliation is as follows:

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup berasal dari kewajiban atas program pensiun untuk posisi 31 Desember 2023 dan 2022 dari aktuaris independen, KKA Steven & Mourits adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefit plan as of December 31, 2023 and 2022 based on the latest actuarial report of an independent actuary, KKA Steven & Mourits were, as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Nilai kini liabilitas	4.313.342	3.583.540	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	<u>(3.509.750)</u>	<u>(3.289.102)</u>	Fair value of plan assets
Liabilitas bersih	<u>803.592</u>	<u>294.438</u>	Net liabilities

Mutasi nilai kini aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai wajar aset program	3.289.102	2.725.790	Beginning fair value of plan assets
Kontribusi pemberi kerja	194.475	160.844	Contributions from the employer
Pendapatan bunga atas aset program	240.341	211.388	Interest income on plan assets
Imbal hasil aset program	(164.301)	240.671	Return on plan assets
Kontribusi dari peserta program	25.872	21.398	Contributions from plan participants
Pembayaran manfaat	<u>(75.739)</u>	<u>(70.989)</u>	Benefits paid
Saldo akhir nilai wajar aset program	<u>3.509.750</u>	<u>3.289.102</u>	Ending fair value of plan assets

Mutasi nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefit obligation were as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai kini liabilitas	3.583.540	3.307.813	Beginning present value of obligation
Biaya jasa kini kotor	238.954	197.207	Gross current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	(109.909)	Past service cost due to plan amendment
Pembayaran manfaat	(75.739)	(70.989)	Benefits paid
Beban bunga	253.034	238.344	Interest cost
Pengaruh perubahan asumsi aktuarial	312.506	40.593	Effect of changes in actuarial assumption
Dampak IFRIC	-	(19.519)	IFRIC impact
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	<u>1.047</u>	<u>-</u>	Liability assumed due to recognition of past services
Saldo akhir nilai kini liabilitas	<u>4.313.342</u>	<u>3.583.540</u>	Ending present value of obligation

Nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kas dan setara kas	586.430	688.811	Cash and cash equivalents
Instrumen ekuitas	560.855	710.087	Equity instruments
Instrumen utang	1.997.316	1.544.193	Debt instruments
Perumahan	142.875	142.427	Real estate
Derivatif	111.240	110.579	Derivatives
Lain-lain	111.034	93.005	Others
Jumlah	<u>3.509.750</u>	<u>3.289.102</u>	Total

Nilai wajar instrumen ekuitas, utang dan derivatif di atas ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian di pasar aktif sedangkan nilai wajar perumahan tidak didasarkan pada harga pasar kuotasian di pasar aktif. Dana pensiun memiliki kebijakan untuk menggunakan *swap* tingkat bunga (*interest rate swap*) sebagai lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga. Kebijakan ini telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan sebelumnya. Eksposur mata uang asing sepenuhnya dilindungi dengan menggunakan kontrak berjangka valuta asing.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 210.405 juta (meningkat sebesar Rp 240.073 juta) pada tanggal 31 Desember 2023 dan berkurang sebesar Rp 181.491 juta (meningkat sebesar Rp 207.484 juta) pada tanggal 31 Desember 2022.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp 225.131 juta (turun sebesar Rp 201.487 juta) pada tanggal 31 Desember 2023 dan naik sebesar Rp 193.569 juta (turun sebesar Rp 172.963 juta) pada tanggal 31 Desember 2022.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The fair value of the plan assets at the end of the reporting period for each category are as follows.

The fair values of the above equity, debt instruments and derivatives are determined based on quoted market prices in active markets whereas the fair values of properties are not based on quoted market prices in active markets. It is the policy of the fund to use interest rate swaps to hedge its exposure to interest rate risk. This policy has been implemented during the current and prior years. Foreign currency exposures are fully hedged by the use of the forward foreign exchange contracts.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 210,405 million (increase by Rp 240,073 million) as of December 31, 2023 and decrease by Rp 181,491 million (increase by Rp 207,484 million) as of December 31, 2022.
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 225,131 million (decrease by Rp 201,487 million) as of December 31, 2023 and increase by Rp 193,569 million (decrease by Rp 172,963 million) as of December 31, 2022.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Tabel mortalitas	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Kenaikan gaji jangka pendek (1 tahun kedepan)	8,00%	10,00%	Salary increase-short term (a year ahead)
Kenaikan gaji jangka panjang per tahun	7,00%	8,00%	Salary increase-long term per annum
Tingkat diskonto per tahun	6,90%	7,15%	Discount rate per annum
Tingkat pengembalian aset program per tahun	6,90%	7,15%	Expected return on plan assets per annum
Formula perhitungan manfaat pensiun	2,5% x masa kerja x gaji/ 2.5% x years of service x salary		Pension benefits formula

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the consolidated statements of financial position.

The key actuarial assumptions used for the calculation of pension benefits are as follows:

b. Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas dan beban imbalan pasca kerja terdiri atas:

	2023			2022			
	Liabilitas/ Liabilities Rp Juta/ Rp Million	Beban/ Expenses Rp Juta/ Rp Million	(Penghasilan) biaya komprehensif lain/Other comprehensive loss (income) Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Liabilities Rp Juta/ Rp Million	Beban/ Expenses Rp Juta/ Rp Million	(Penghasilan) biaya komprehensif lain/Other comprehensive loss (income) Rp Juta/ Rp Million	
Bank	63.954	12.322	(5.863)	64.432	12.060	(10.352)	Bank
Entitas anak							Subsidiaries
PDSB	19.655	7.878	(2.365)	21.022	10.334	(762)	PDSB
CFI	73.474	19.438	4.158	60.589	16.973	7.384	CFI
Jumlah	<u>157.083</u>	<u>39.638</u>	<u>(4.070)</u>	<u>146.043</u>	<u>39.367</u>	<u>(3.730)</u>	Total

Bank

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 untuk tahun 2023 dan 2022. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 7.287 dan 7.381 karyawan masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022.

b. Employee Benefits

Employee benefits liabilities and expenses are as follows:

Bank

The Bank calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Job Creation Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021 for 2023 and 2022. The number of employees entitled to the benefits is 7,287 and 7,381 in 2023 and 2022.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

The details of post-employment benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Diakui pada laba rugi			Recognized in of profit or loss
Biaya jasa kini	5.215	5.354	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	-	Post service cost due to plan amendment
Biaya bunga	4.292	4.985	Interest cost
Kelebihan pembayaran	2.274	506	Excess payment
Pengakuan masa kerja lalu	541	1.215	Recognition of past services
Jumlah	<u>12.322</u>	<u>12.060</u>	Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain			Recognized in of other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto			Remeasurement on the net-defined benefit obligation
Keuntungan aktuarial	(5.863)	(10.352)	Actuarial gain
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>6.459</u>	<u>1.708</u>	Total recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit obligations reconciliation is as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	64.432	70.528	Balance at the beginning of the year
Beban imbalan pasca kerja tahun berjalan	12.322	12.060	Post-employment benefit expense during the year
Beban imbalan pasca kerja pada penghasilan komprehensif lain	(5.863)	(10.352)	Post-employment benefit recognised in other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(4.663)	(7.298)	Benefits paid
Kelebihan pembayaran manfaat	(2.274)	(506)	Excess benefit paid
Saldo akhir tahun	<u>63.954</u>	<u>64.432</u>	Balance at the end of the year

Mutasi nilai kini liabilitas yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of past service liability in the current year were as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai tunai liabilitas yang tidak didanai	64.432	70.528	Beginning present value of past service liability
Biaya jasa kini kotor	5.215	5.354	Gross current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	-	Past service cost due to plan amendment
Beban bunga	4.292	4.985	Interest cost
Pembayaran manfaat	(4.663)	(7.298)	Benefits paid
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	541	1.215	Liability assumed due to recognition of past services
Kerugian (keuntungan) pada kewajiban aktuarial	(5.863)	(10.352)	Actuarial loss (gain) on obligation
Saldo akhir nilai tunai liabilitas yang tidak didanai	<u>63.954</u>	<u>64.432</u>	Ending present value of past service liability

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 3.599 juta (meningkat sebesar Rp 4.004 juta) pada tanggal 31 Desember 2023 dan berkurang sebesar Rp 3.646 juta (meningkat sebesar Rp 4.064 juta) pada tanggal 31 Desember 2022.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp 3.632 juta (turun sebesar Rp 3.331 juta) pada tanggal 31 Desember 2023 dan naik sebesar Rp 3.666 juta (turun sebesar Rp 3.356 juta) pada tanggal 31 Desember 2022.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh KKA Steven & Mourits aktuaris independen dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	2023	2022	
Tabel mortalitas	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Kenaikan gaji jangka pendek (1 tahun kedepan)	8,00%	10,00%	Salary increase-short term (a year ahead)
Kenaikan gaji jangka panjang per tahun	7,00%	8,00%	Salary increase-long term per annum
Tingkat diskonto per tahun	6,90%	7,15%	Discount rate per annum
Tingkat ketidakmampuan	10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate		Disability rate
Tingkat pengunduran diri	15% sampai dengan usia 25 tahun dan menurun secara linear setiap tahun sampai 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 15% up to age 25 and reducing linearly up to 1% at age 45 and beyond; and thereafter		Resignation rate
Porsi dari pengunduran diri dipercepat	100% dari usia pengunduran diri normal/100% at normal retirement age		Proportion of early retirement
Usia dari pengunduran diri normal	55 tahun/years		Normal retirement age

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 3,599 million (increase by Rp 4,004 million) as of December 31, 2023 and decrease by Rp 3,646 million (increase by Rp 4,064 million) as of December 31, 2022.
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 3,632 million (decrease by Rp 3,331 million) as of December 31, 2023 and increase by Rp 3,666 million (decrease by Rp 3,356 million) as of December 31, 2022.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

The cost of providing employee benefits is calculated by an independent actuary, KKA Steven & Mourits, using the following key assumptions:

47. JASA KUSTODIAN

Bank memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan surat keputusan No. KEP-01/PM/Kstd/2002 tanggal 28 Februari 2002. Penyimpanan efek nasabah pada kustodian dalam bentuk obligasi tanpa warkat adalah sebesar Rp 25.457.243 juta dan USD 171 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 22.479.038 juta dan USD 143 juta pada tanggal 31 Desember 2022, sementara penyimpanan dalam bentuk saham tanpa warkat sebesar 3.550.443.796 lembar dan 4.137.500.509 lembar masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Jasa kustodian yang dilakukan kustodian Bank antara lain meliputi jasa penyelesaian transaksi efek, jasa penyimpanan dan pengadministrasian efek serta jasa-jasa kustodian lainnya misalnya mengurus/menagihkan hak-hak yang melekat pada efek antara lain pembayaran kupon, dividen, bonus, pembayaran efek saat jatuh waktu dan lain-lainnya.

48. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI

Sifat Berelasi

- a. Perusahaan-perusahaan di bawah ini yang merupakan pihak yang berelasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan pada Catatan 3f.
 - PT Panin Sekuritas Tbk
 - PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
 - PT Panin Dai-Ichi Life Tbk
 - PT Amana Jaya
 - PT Terminal Builders
- b. ANZ National Bank Ltd. (Melbourne dan Wellington) dan PT Bank ANZ Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang memegang saham utamanya sama dengan Bank.
- c. PT Panin Financial Tbk merupakan pemegang saham Bank.
- d. PT Paninvest Tbk merupakan pemegang saham PT Panin Financial Tbk.
- e. DPK PIB adalah perusahaan yang didirikan oleh Bank untuk mengelola program pensiun manfaat pasti Bank, seperti yang dibahas pada Catatan 46.

Transaksi Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup juga mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Giro pada bank lain dan penerimaan bunga (Catatan 7 dan 35).
2. Pemberian kredit, tagihan bunga dan penerimaan bunga (Catatan 12, 20 dan 35).

47. CUSTODIAL SERVICES

The Bank has obtained approval to act as a custodian bank from BAPEPAM through Decision Letter No. KEP-01/PM/Kstd/2002 dated February 28, 2002. The securities which are administered by the Bank, consist of scriptless bonds amounting to Rp 25,457,243 million dan USD 171 million as of December 31, 2023 and Rp 22,479,038 million and USD 143 million as of December 31, 2022, and securities in the form of scriptless shares consisting of 3,550,443,796 shares and 4,137,500,509 shares as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

The custodial services offered by the Bank consist of, among others, handling the settlement of securities transaction, safekeeping and administration of securities, and other related services such as corporate actions, and payments of coupon, dividends, bonus payments, payments of securities at maturity date and others.

48. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- a. The companies below are related parties as mentioned in Note 3f.
 - PT Panin Sekuritas Tbk
 - PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
 - PT Panin Dai-Ichi Life Tbk
 - PT Amana Jaya
 - PT Terminal Builders
- b. ANZ National Bank Ltd. (Melbourne and Wellington) and PT Bank ANZ Indonesia are the companies with the same majority stockholder as the Bank.
- c. PT Panin Financial Tbk is a shareholder of the Bank.
- d. PT Paninvest Tbk is a shareholder of PT Panin Financial Tbk.
- e. DPK PIB is an entity established by the Bank to manage the Bank's defined benefit pension program, as discussed in Note 46.

Transactions with Related Parties

In the course of business, the Group entered into certain transactions with related parties. These transactions included, among others, the following:

1. Demand deposits with other banks and receipt of interest (Notes 7 and 35).
2. Granting of loans, interest receivable and receipt of interest (Notes 12, 20 and 35).

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

- | | |
|---|---|
| <p>3. Penempatan dana dari pihak-pihak yang berelasi dalam bentuk simpanan dan pembayaran bunga (Catatan 21 dan 36).</p> <p>4. Penjualan surat berharga yang diterbitkan, obligasi subordinasi, dan pembayaran bunga (Catatan 24, 28 dan 36).</p> <p>5. Penerimaan setoran jaminan dari pihak-pihak yang berelasi untuk transaksi sewa <i>safe deposit box</i> (Catatan 27).</p> <p>6. Penerimaan komisi <i>bancassurance</i> dari PT Panin Dai Ichi Life Tbk (Catatan 27 dan 38).</p> <p>7. Grup memberikan tunjangan untuk kelompok manajemen kunci, diungkapkan di Catatan 42.</p> <p>8. Dana Pensiun Grup, dikelola oleh DPK PIB diungkapkan di Catatan 46.</p> <p>9. Sewa gedung dari Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank, PT Famlee Invesco, PT Amana Jaya dan PT Terminal Builders.</p> <p>10. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Paninvest Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk menyewa ruang-ruang kantor.</p> | <p>3. Placements of funds by related parties in the form of deposits and payment of interest (Notes 21 and 36).</p> <p>4. Sales of securities issued, subordinated bonds, and payment of interest (Notes 24, 28 dan 36).</p> <p>5. Receipt of security deposits from related parties for lease of safe deposit box (Note 27).</p> <p>6. Receipt of bancassurance commission from PT Panin Dai Ichi Life (Notes 27 and 38).</p> <p>7. The Group provides benefits to the key management personnel as disclosed in Note 42.</p> <p>8. The Group's post-employment benefit is managed by DPK PIB, as disclosed in Note 46.</p> <p>9. The Group provides rentals of buildings from Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank, PT Famlee Invesco, PT Amana Jaya and PT Terminal Builders.</p> <p>10. The Group obtained a lease of office spaces from PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Paninvest Tbk and PT Panin Sekuritas Tbk.</p> |
|---|---|

Persentase giro pada bank lain, kredit dan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pihak yang berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

The percentage of demand deposits with other banks, loans and accrued interest receivables from related parties to total assets are as follows:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Giro pada bank lain (Catatan 7)					Demand deposits with other banks (Note 7)
ANZ National Bank Ltd., Melbourne	198.052	0,089	86.707	0,041	ANZ National Bank Ltd., Melbourne
ANZ National Bank Ltd., Wellington	23.059	0,010	53.080	0,025	ANZ National Bank Ltd., Wellington
Kredit (Catatan 12)					Loans (Note 12)
Manajemen kunci dan Grup Perusahaan	1.350.018	0,608	1.325.517	0,624	Key management and Company Groups
Aset lain-lain (Catatan 20)					Other assets (Note 20)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	7.717	0,003	7.641	0,003	Accrued interest receivables
Jumlah	1.578.846	0,710	1.472.945	0,693	Total

Persentase simpanan, surat berharga yang diterbitkan, obligasi subordinasi, setoran jaminan dan pendapatan diterima dimuka dari pihak yang berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

The percentage of deposits, securities issued, subordinated bonds, security deposits and income received in advance from related parties to total liabilities are as follows:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Simpanan (Catatan 21)	1.477.929	0,935	1.520.921	0,940	Deposits (Note 21)
Surat berharga yang diterbitkan (Catatan 24)	-	-	52.291	0,032	Securities Issued (Note 24)
Obligasi subordinasi (Catatan 28)	19.092	0,012	90.417	0,056	Subordinated bonds (Note 28)
Setoran jaminan (Catatan 27)	66	0,000	595	0,000	Security deposits (Note 27)
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 27)	123.773	0,078	147.348	0,091	Income received in advance (Note 27)
Jumlah	1.620.860	1,025	1.811.572	1,119	Total

Persentase pendapatan bunga, beban bunga, beban sewa dan hasil sewa kepada pihak yang berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga, beban bunga, beban umum dan administrasi serta hasil sewa adalah sebagai berikut:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Pendapatan bunga	88.194	0,618	77.439	0,579	Interest income
Beban bunga	7.486	0,139	8.495	0,215	Interest expense
Beban sewa	20.549	0,966	18.690	0,904	Rental expense
Hasil sewa	338	5,174	2.231	25,295	Rental revenues

The percentage of interest income, interest expense, rental expense and rental revenues from related parties to total interest income, total interest expense, total general and administrative expense and rental revenues are as follows:

Persentase fasilitas kredit yang belum digunakan kepada pihak yang berelasi terhadap jumlah liabilitas komitmen adalah sebagai berikut:

	2023		2022		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Fasilitas kredit yang belum digunakan	259.904	0,648	825.665	2,081	Interest income

The percentage of unused loan facilities from related parties to total commitment liabilities are as follows:

49. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN TUNAI VALUTA ASING

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah nosional pembelian dan penjualan tunai valuta asing yang belum diselesaikan terdiri atas:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pembelian tunai valuta asing			Unsettled spot purchase transactions
Dollar Amerika Serikat	1.139.378	669.403	United States Dollar
Euro	-	43.112	Euro
Jumlah	<u>1.139.378</u>	<u>712.515</u>	Total
Penjualan tunai valuta asing			Unsettled spot sale transactions
Dollar Amerika Serikat	<u>538.895</u>	<u>447.893</u>	United States Dollar

49. SPOT TRANSACTIONS

As of December 31, 2023 and 2022, the notional amount outstanding of unsettled spot exchange contracts are as follows:

50. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Grup yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Komitmen			Commitments
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan L/C yang <i>irrevocable</i> dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	37.861.547	37.997.926	Unused facilities Outstanding irrevocable Letters of Credit (L/C) for export and import
	<u>1.415.309</u>	<u>1.672.645</u>	
Jumlah Liabilitas Komitmen	<u>39.276.856</u>	<u>39.670.571</u>	Total Commitment Liabilities

50. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitment and contingency transactions in the business activities of Group has credit risk as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	282.989	636.035	Past due interest revenues
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Bank Garansi	1.387.672	1.715.621	Bank Guarantee
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Bersih	1.104.683	1.079.586	Total Contingent Liabilities - Net
Lainnya			Others
Kredit hapus buku (Catatan 12)	11.442.161	11.962.820	Loans written off (Note 12)

a. Berikut adalah perubahan nilai tercatat atas komitmen dan kontinjensi dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

a. The following shows the changes in the carrying amount of commitments and contingencies based on amortized cost classification on a stage basis for the year ended December 31, 2023 and 2022:

	2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Svariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	38.683.398	4.277	964	2.697.553	41.386.192	Balance at the beginning of the year
Pengalihan ke:						Transfer to :
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	863	(628)	(235)	-	-	- 12-Months Expected Credit Losses (stage 1)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(13.071)	13.071	-	-	-	- Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(154.624)	(249)	154.873	-	-	- Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	38.516.566	16.471	155.602	2.697.553	41.386.192	Balance at the beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	(3.346.293)	(12.054)	(16.416)	119.495	(3.255.268)	Remeasurement of the carrying value
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	9.919.800	12	-	1.125.787	11.045.599	New commitments and contingencies
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	(6.987.909)	(502)	(12)	(1.523.572)	(8.511.995)	Commitments and contingencies derecognized
	(414.402)	(12.544)	(16.428)	(278.290)	(721.664)	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	38.102.164	3.927	139.174	2.419.263	40.664.528	Balance at the end of the year
	2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Svariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million					
Saldo awal tahun	35.440.277	11.242	1.121	1.164.257	36.616.897	Balance at the beginning of the year
Pengalihan ke:						Transfer to :
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	4.740	(4.079)	(661)	-	-	- 12-Months Expected Credit Losses (Stage 1)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(307)	307	-	-	-	- Lifetime ECL - Not Credit Impaired (Stage 2)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(2.954)	-	2.954	-	-	- Lifetime ECL - Credit Impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	35.441.756	7.470	3.414	1.164.257	36.616.897	Balance at the beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.186.528	(609)	(2.322)	77.363	1.260.960	Remeasurement of the carrying value
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	12.287.073	3	14	1.599.593	13.886.683	New commitments and contingencies
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	(10.231.959)	(2.587)	(142)	(143.660)	(10.378.348)	Commitments and contingencies derecognized
	3.241.642	(3.193)	(2.450)	1.533.296	4.769.295	Total additions/(deductions) for the current year
Saldo akhir tahun	38.683.398	4.277	964	2.697.553	41.386.192	Balance at the end of the year

Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi, dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Tidak memungkinkan untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Bank kalah. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank mengalami beberapa tuntutan pajak dan hukum seperti yang diungkapkan dalam Catatan 44 dan 58j.

The Bank is facing various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Bank will ultimately be successful in any of these legal matters or, if not, what the impact might be. However, the Bank's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Bank's results of operations, financial position or liquidity. In running its operations, the Bank faced several claims of tax and legal cases as disclosed in Notes 44 and 58j.

51. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

Posisi aset dan liabilitas dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

51. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The balance of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset			Assets
Kas	62.141	107.940	Cash on hand
Giro pada Bank Indonesia	568.354	643.423	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.254.955	1.202.612	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.672.411	3.482.297	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.519.115	1.987.411	Securities
Kredit	6.421.882	6.577.333	Loans
Tagihan akseptasi	708.382	1.112.800	Acceptances receivable
Aset lain-lain	56.088	54.643	Other assets
Subjumlah	13.263.328	15.168.459	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(240.909)	(93.407)	Allowance for impairment losses
Jumlah Aset	<u>13.022.419</u>	<u>15.075.052</u>	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas segera	56.332	43.504	Liabilities payable immediately
Simpanan	12.094.173	13.962.459	Deposits
Simpanan dari bank lain	212	217	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	710.485	1.115.341	Acceptances payable
Liabilitas lain-lain	196.140	188.028	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	<u>13.057.342</u>	<u>15.309.549</u>	Total Liabilities
Dana syirkah temporer	<u>787</u>	<u>2.471</u>	Temporary syirkah funds
Jumlah Aset (Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer) Bersih	<u>(35.710)</u>	<u>(236.968)</u>	Total Net Assets (Liabilities and Temporary Syirkah Funds)

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Rincian aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the details of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

<u>Aset</u>		<u>Mata Uang Asing/ in Foreign Currencies</u> Dalam angka penuh/ In full amount	<u>Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp</u> Rp Juta/ Rp Million	<u>Assets</u>
Bank				Bank
Kas	SGD	2.687.910	31.385	Cash
	USD	1.997.504	30.756	
Giro pada Bank Indonesia	USD	36.898.282	568.123	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain				Demand deposits with other banks
Pihak berelasi	AUD	18.824.828	198.052	Related parties
	NZD	2.361.256	23.059	
Pihak ketiga	JPY	3.620.755.812	394.228	Third parties
	USD	19.853.734	305.688	
	SGD	7.588.011	88.600	
	EUR	4.931.254	84.020	
	CAD	3.798.269	44.172	
	CNY	20.062.703	43.526	
	GBP	1.712.190	33.604	
	AUD	1.906.151	20.054	
	HKD	7.838.139	15.447	
	CHF	246.212	4.505	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain				Placements with Bank Indonesia and other banks
	USD	75.000.000	1.154.775	
	AUD	75.000.000	789.058	
	SGD	41.000.000	478.730	
	EUR	7.000.000	119.268	
	GBP	4.000.000	78.506	
	CNY	15.000.000	32.543	
	NZD	2.000.000	19.531	
Efek-efek	USD	87.620.035	1.349.086	Securities
	EUR	9.979.231	170.029	
Kredit	USD	414.435.926	6.381.070	Loans
	SGD	3.495.307	40.812	
Tagihan akseptasi	USD	34.503.455	531.250	Acceptances receivable
	JPY	1.110.847.031	120.949	
	EUR	2.853.420	48.617	
	CNY	3.487.666	7.566	
Aset lain-lain	USD	3.296.264	50.753	Other assets
	EUR	145.650	2.482	
	AUD	130.403	1.372	
	SGD	96.335	1.125	
	Lainnya/others		356	
Sub jumlah - Bank			13.263.097	Sub total - Bank
Entitas anak				Subsidiaries
Giro pada Bank Indonesia	USD	14.980	231	Demand deposits with Bank Indonesia
Sub jumlah - Entitas anak			231	Sub total - Subsidiaries
Cadangan kerugian penurunan nilai	USD	(15.500.327)	(238.659)	Allowance for impairment losses
	JPY	(11.747.528)	(1.279)	
	Lainnya/Others		(971)	
Sub jumlah - cadangan kerugian penurunan nilai			(240.909)	Sub total - allowance for impairment losses
Jumlah Aset			13.022.419	Total Assets

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

		Mata Uang Asing/ in Foreign Currencies Dalam angka penuh/ In full amount	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas				Liabilities
Bank				Bank
Liabilitas segera	USD	1.697.442	26.136	Liabilities payable immediately
	CNY	6.641.893	14.410	
	SGD	523.254	6.110	
	JPY	40.554.209	4.416	
	EUR	155.175	2.644	
	Lainnya/others		2.616	
Simpanan				Deposits
Pihak berelasi	USD	32.300.428	497.330	Related parties
	AUD	1.873.999	19.716	
	SGD	746.210	8.713	
	GBP	131.087	2.573	
	Lainnya/others		298	
Pihak ketiga	USD	582.729.537	8.972.287	Third parties
	AUD	93.794.204	986.787	
	SGD	53.172.920	620.865	
	EUR	21.171.830	360.732	
	JPY	3.241.375.366	352.921	
	GBP	5.609.802	110.101	
	CNY	26.350.367	57.167	
	CAD	3.760.157	43.729	
	NZD	4.306.657	42.057	
	HKD	5.845.486	11.520	
	CHF	234.844	4.297	
Simpanan dari bank lain	USD	13.780	212	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	USD	34.550.833	531.979	Acceptances payable
	JPY	1.118.921.073	121.828	
	EUR	2.882.400	49.111	
	CNY	3.488.127	7.567	
Liabilitas lain-lain	USD	9.988.443	153.792	Other liabilities
	JPY	311.677.669	33.935	
	EUR	448.707	7.645	
	Lainnya/others		525	
Sub jumlah - Bank			<u>13.054.019</u>	Sub total - Bank
Entitas Anak				Subsidiaries
Simpanan	USD	200.017	3.080	Deposits
Liabilitas lain-lain	USD	15.799	243	Other liabilities
Sub jumlah - Entitas Anak			<u>3.323</u>	Sub total - Subsidiaries
Jumlah Liabilitas			<u>13.057.342</u>	Total Liabilities
Entitas Anak				Subsidiaries
Dana syirkah temporer	USD	51.143	787	Temporary syirkah funds
Jumlah Aset (Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer) Bersih			<u>(35.710)</u>	Total Net Assets (Liabilities and Temporary Syirkah Funds)

Bank senantiasa menyiapkan beberapa perangkat dalam pengelolaan risiko mata uang asing, sebagai berikut:

- Membatasi rasio posisi devisa neto baik *limit intraday* maupun *limit overnight*.
- Menetapkan *limit* bagi *risk taking unit*, berupa *limit kerugian*, *limit counterparty* dan *limit* terkait lainnya.

The Bank implements certain measures in managing the foreign exchange risk as follows:

- Set up a limit for net open position ratio, both intraday and overnight.
- Set up a limit for risk taking unit, in the form of loss limit, counterparty limit, and other related limits.

Kurs yang digunakan oleh Bank untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs Reuters pada pukul 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

The foreign exchange rates used by the Bank to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are exchange rate determined by Bank Indonesia, which is the Reuters spot rate at 4:00 PM Western Indonesian Time as follows:

Valuta asing	31 Desember/December 31,		Foreign currencies
	2023 Rp	2022 Rp	
1 Poundsterling Inggris	19.626,56	18.786,09	1 Great Britain Poundsterling
1 Franc Swiss	18.299,27	16.827,00	1 Swiss Franc
1 Euro	17.038,32	16.581,72	1 Euro
1 Dollar Amerika Serikat	15.397,00	15.567,50	1 United States Dollar
1 Dollar Singapura	11.676,34	11.592,88	1 Singapore Dollar
1 Dollar Kanada	11.629,59	11.486,39	1 Canadian Dollar
1 Dollar Australia	10.520,77	10.557,88	1 Australian Dollar
1 Dollar Selandia Baru	9.765,55	9.851,12	1 New Zealand Dollar
1 Ringgit Malaysia	3.355,20	3.533,66	1 Malaysian Ringgit
1 Yuan China	2.169,50	2.234,50	1 Chinese Yuan
1 Dollar Hongkong	1.970,73	1.996,55	1 Hongkong Dollar
1 Yen Jepang	108,88	117,81	1 Japanese Yen

52. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen sesuai kegiatan usaha berikut:

1. Perbankan
2. Perusahaan Pembiayaan

Sektor perbankan termasuk di dalamnya bank umum konvensional dan bank umum syariah yang dianggap sebagai segmen operasi yang sama oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen-segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan industri yang sama dan sifat dari jasa yang diberikan adalah sama.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

52. OPERATING SEGMENTS

The Group's reportable segments based on the following business segment:

1. Banking
2. Multi-finance

Banking sector includes conventional commercial bank and sharia commercial bank which is considered as identical operating segment by the chief operating decision maker. For financial statements presentation purposes, these individual operating segments have been aggregated into a single operating segment taking into account the similar industry and nature of service provided.

The business segment information is as follows:

	2023				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan bunga	13.365.274	1.295.337	(72.230)	14.588.381	Interest revenues
Beban bunga	5.208.077	244.185	(70.357)	5.381.905	Interest expense
Pendapatan (beban) lainnya	1.677.171	995.717	(220)	2.672.668	Other revenues (expenses)
Jumlah	<u>9.834.368</u>	<u>2.046.869</u>	<u>(2.093)</u>	<u>11.879.144</u>	Total

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2023				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
	Rp Million	Rp Million	Rp Million	Rp Million	
HASIL					INCOME
Bagian laba bersih entitas asosiasi	53.149	-	-	53.149	Share in net income of associates
Hasil dari operasi	2.730.389	948.959	-	3.679.348	Income from operations
Laba sebelum beban pajak	2.745.007	1.030.719	-	3.775.726	Income before tax expense
Laba bersih				3.005.536	Net income
Penghasilan komprehensif lain				(215.835)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif				2.789.701	Total comprehensive income
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
ASET					ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	6.035.648	-	-	6.035.648	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	39.010.634	-	-	39.010.634	Securities - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	4.826.791	-	-	4.826.791	Securities purchased with agreements to resell - net
Kredit - bersih	132.702.645	-	(1.204.372)	131.498.273	Loans - net
Piutang jual dan sewa-balik - bersih	-	33.148	-	33.148	Sale and lease-back receivables - net
Tagihan anjak piutang - bersih	-	44.049	-	44.049	Factoring receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	528.480	-	528.480	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	8.429.005	-	8.429.005	Consumer financing receivables - net
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	9.782.927	219.217	-	10.002.144	Premises and equipment and right-of-use assets - net
Aset lainnya - bersih	20.982.839	640.822	(21.783)	21.601.878	Other assets - net
Jumlah Aset	<u>213.341.484</u>	<u>9.894.721</u>	<u>(1.226.155)</u>	<u>222.010.050</u>	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan	135.103.976	-	(14.495)	135.089.481	Deposits
Simpanan dari bank lain	2.424.659	-	(3.931)	2.420.728	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.761.945	-	-	9.761.945	Securities sold under agreement to repurchase
Pinjaman yang diterima	-	4.007.721	(1.204.348)	2.803.373	Borrowings
Liabilitas lainnya	4.001.257	376.356	(3.381)	4.374.232	Other liabilities
Obligasi subordinasi - bersih	3.699.276	-	-	3.699.276	Subordinated bonds - net
Jumlah Liabilitas	<u>154.991.113</u>	<u>4.384.077</u>	<u>(1.226.155)</u>	<u>158.149.035</u>	Total Liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER	10.548.530	-	-	10.548.530	TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Pengeluaran modal	129.876	29.959	-	159.835	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	428.103	43.420	-	471.523	Depreciation and amortization
Beban kerugian penurunan nilai	2.326.854	431.052	-	2.757.906	Provision for impairment losses

	2022				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
	Rp Million	Rp Million	Rp Million	Rp Million	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan bunga	12.914.153	1.071.149	(79.092)	13.906.210	Interest revenues
Beban bunga	3.868.340	166.154	(77.034)	3.957.460	Interest expense
Pendapatan (beban) lainnya	1.578.187	433.524	(180)	2.011.531	Other revenues (expenses)
Jumlah	<u>10.624.000</u>	<u>1.338.519</u>	<u>(2.238)</u>	<u>11.960.281</u>	Total

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
HASIL					INCOME
Bagian laba bersih entitas asosiasi	87.579	-	-	87.579	Share in net income of associates
Hasil dari operasi	3.765.215	307.485	-	4.072.700	Income from operations
Laba sebelum beban pajak	3.693.156	395.504	(767)	4.087.893	Income before tax expense
Laba bersih				3.273.532	Net income
Penghasilan komprehensif lain				(810.867)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif				2.464.626	Total comprehensive income
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
ASET					ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	7.590.503	-	(400.000)	7.190.503	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	33.398.418	-	-	33.398.418	Securities - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	10.642.145	-	-	10.642.145	Securities purchased with agreements to resell - net
Kredit - bersih	124.031.425	-	(761.843)	123.269.582	Loans - net
Piutang jual dan sewa-balik - bersih	-	55.187	-	55.187	Sale and lease-back receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	272.141	-	272.141	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	6.795.450	-	6.795.450	Consumer financing receivables - net
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	9.947.487	229.408	-	10.176.895	Premises and equipment and right-of-use assets - net
Aset lainnya - bersih	19.970.269	684.837	(24.948)	20.630.158	Other assets - net
Jumlah Aset	<u>205.580.247</u>	<u>8.037.023</u>	<u>(1.186.791)</u>	<u>212.430.479</u>	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan	132.700.662	-	(17.187)	132.683.475	Deposits
Simpanan dari bank lain	2.553.970	-	(5.867)	2.548.103	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.408.299	-	-	2.408.299	Securities sold under agreement to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.999.020	-	-	3.999.020	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima	435.531	2.470.507	(761.843)	2.144.195	Borrowings
Liabilitas lainnya	3.800.754	467.222	(1.894)	4.266.082	Other liabilities
Obligasi subordinasi - bersih	3.795.470	-	-	3.795.470	Subordinated bonds - net
Jumlah Liabilitas	<u>149.693.706</u>	<u>2.937.729</u>	<u>(786.791)</u>	<u>151.844.644</u>	Total Liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER	10.271.143	-	(400.000)	9.871.143	TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Pengeluaran modal	187.905	28.137	-	216.042	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	595.287	42.211	-	637.498	Depreciation and amortization
Beban kerugian penurunan nilai	2.399.967	390.586	-	2.790.553	Provision for impairment losses

Informasi Wilayah Geografis

Operasional utama Grup di wilayah Indonesia yang memiliki risiko dan imbalan relatif sama. Bank hanya memiliki kantor perwakilan di Singapura, yang kegiatan operasionalnya tidak signifikan.

Geographical Information

The principal operations of the Group in Indonesia have risks and returns which are relatively similar. The Bank owns a representative office in Singapore whose operations are insignificant.

53. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 pada tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang telah disempurnakan dengan peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.

53. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS

Based on "Lembaga Penjamin Simpanan" Regulation No. 1/PLPS/2005 dated September 26, 2005 regarding Deposit Guarantee Program, as enhanced by LPS regulation No. 1/LPS/2006 dated March 9, 2006 that stated, since September 22, 2005, the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee bank deposits including demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings deposit, and other forms of deposits, including deposits from other banks.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100 juta diubah menjadi maksimal Rp 2.000 juta.

Beban premi penjaminan simpanan yang dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 284.780 juta dan Rp 272.815 juta.

In accordance with Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008, starting October 13, 2008, the "Lembaga Penjamin Simpanan" guarantee deposits for each customer in a bank which was previously set at a maximum of Rp 100 million was changed to maximum of Rp 2,000 million.

The Deposit insurance premium paid up to December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 284,780 million and Rp 272,815 million, respectively.

54. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Selain daripada yang disebutkan dalam tabel dibawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat bruto dari aset dan liabilitas keuangan adalah hampir sama dengan nilai wajarnya.

54. CLASIFICATION AND FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

Except as detailed in the following table, the management considers that the gross carrying amount of financial assets and liabilities approximate their fair values.

Catatan/ Notes	2023		2022			
	Nilai tercatat bruto/ Gross carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat bruto/ Gross carrying amount	Nilai wajar/ Fair value		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi						
Efek-efek	9	7.030.980	7.556.384	5.042.782	5.398.272	Financial assets Measured at amortized cost
Kredit	12	128.195.988	128.195.988	119.640.840	119.640.840	Securities Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11	4.827.120	5.113.375	10.642.145	11.253.285	Securities purchased with agreement to resell
Piutang jual dan sewa- balik	15	93.334	98.107	78.778	75.976	Sales and lease- back receivables
Piutang sewa pembiayaan	13	529.433	529.767	281.868	281.912	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	14	8.614.493	8.630.639	6.914.427	7.038.603	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	13	75.000	73.967	100.000	98.614	Factoring receivables
Piutang lain-lain	20	391.544	391.544	375.037	375.037	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan		149.757.892	150.589.771	143.075.877	144.162.539	Total Financial Assets
Liabilitas keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi						
Surat berharga yang diterbitkan	24	-	-	3.999.020	4.019.199	Financial liabilities Measured at amortized cost Securities issued
Pinjaman yang diterima	25	2.803.373	2.459.599	2.144.195	2.689.650	Borrowings
Obligasi subordinasi	28	3.699.276	3.741.140	3.795.470	3.939.427	Subordinated bonds
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	23	9.761.945	10.239.610	2.408.299	2.537.262	Securities sold with agreement to repurchase
Jumlah Liabilitas Keuangan		16.264.594	16.440.349	12.346.984	13.185.538	Total Financial Liabilities

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan non-keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, pendapatan yang masih akan diterima, simpanan, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan liabilitas keuangan lainnya dengan suku bunga tetap yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair value of financial and non-financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Management considers that the carrying amount of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, income receivables, deposits, deposits from other banks, securities sold with agreements to repurchase, accrued interest, margin deposits and other financial instruments with fixed interest recognized in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

- Nilai wajar efek-efek dan penyertaan saham dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.
- Nilai wajar tagihan dan liabilitas derivatif diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva *yield* yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan *dealer* untuk instrumen sejenis.
- Nilai wajar aset tetap dan aset hak guna ditentukan antara lain dengan menggunakan pendekatan pasar yang mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding, pendekatan pendapatan yang mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, serta pendekatan biaya yang berdasarkan prinsip harga yang akan dibayarkan pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya.
- Fair value of securities and investments in shares of stocks with standard terms and conditions and traded on active markets, securities issued and subordinated bonds are determined with reference to quoted market prices.
- Fair value of derivative receivables and payables are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- Fair value of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models on discounted cash flow analysis using prices from observable current market transactions and dealer quotes for similar instruments.
- Fair value of premises and equipment and right-of-use assets were determined based on market approach that consider current market value from identical or comparable assets transaction, income approach that consider the value of income that generates by the assets during its useful life and calculating the value through capitalization. Capitalization is conversion process from revenue into equity through appropriate discount rate, also cost approach that based on cost principal that will be paid by the buyer in the market for the assets that valued less than its cost to buy or to build the comparable assets, except for unfair timing factor, inconvenience, risk or other factors.

Tabel berikut ini memberikan analisis dari nilai wajar aset dan liabilitas yang dikelompokkan ke level 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

The following table provides an analysis of fair value of assets and liabilities, grouped into levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

	2023			Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
	Level 1 Rp Juta/ Rp Million	Level 2 Rp Juta/ Rp Million	Level 3 Rp Juta/ Rp Million		
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial asset
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Efek- efek	23.948.044	-	-	23.948.044	Securities
Penyertaan dalam bentuk saham	112.520	-	17.443	129.963	Investments in share of stock
	<u>24.060.564</u>	<u>-</u>	<u>17.443</u>	<u>24.078.007</u>	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Measured at fair value through profit and loss
Efek- efek	8.031.649	-	-	8.031.649	Securities
Tagihan derivatif	-	20.437	-	20.437	Derivative receivables
	<u>8.031.649</u>	<u>20.437</u>	<u>-</u>	<u>8.052.086</u>	
Aset non keuangan					Non-financial asset
Aset tetap dan aset hak guna - bersih					Premises and equipment and right-of-use assets - net
Tanah	-	5.769.774	-	5.769.774	Land
Bangunan	-	3.233.073	-	3.233.073	Buildings
Kendaraan dan inventaris kantor	-	847.085	-	847.085	Motor vehicles and furniture and fixtures
Aset tetap yang akan digunakan	-	30.049	-	30.049	Premises and equipments to be used
Aset hak guna	-	122.163	-	122.163	Right-of-use assets
	<u>-</u>	<u>10.002.144</u>	<u>-</u>	<u>10.002.144</u>	

	2022				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Penyertaan dalam bentuk saham	547.721	-	-	547.721	Investment on share of stock
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Efek- efek	5.398.272	-	-	5.398.272	Securities
Kredit	-	-	119.640.840	119.640.840	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.253.285	-	-	11.253.285	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	-	-	281.912	281.912	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	7.038.603	7.038.603	Consumer financing receivables
Piutang jual dan sewa- balik	-	-	75.976	75.976	Sales and lease- back receivables
Tagihan anjak piutang	-	-	98.614	98.614	Factoring receivables
Piutang lain-lain	-	-	375.037	375.037	Other receivables
	<u>16.651.557</u>	<u>-</u>	<u>127.510.982</u>	<u>144.162.539</u>	
Jumlah Aset	<u>45.694.647</u>	<u>10.206.321</u>	<u>127.528.977</u>	<u>183.429.945</u>	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Liabilities measured at fair value through profit and loss
Liabilitas derivatif	-	29.561	-	29.561	Derivative payables
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities of which fair values are disclosed
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.537.262	-	-	2.537.262	Securities sold with agreement to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	4.019.199	-	-	4.019.199	Securities issued
Pinjaman yang diterima	-	-	2.689.650	2.689.650	Borrowings
Obligasi subordinasi	3.939.427	-	-	3.939.427	Subordinated bonds
	<u>10.495.888</u>	<u>-</u>	<u>2.689.650</u>	<u>13.185.538</u>	
Jumlah Liabilitas	<u>10.495.888</u>	<u>29.561</u>	<u>2.689.650</u>	<u>13.215.099</u>	Total Liabilities

Pada tahun 2023 dan 2022, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari level 1 menjadi level 2, dan sebaliknya.

In 2023 and 2022, there were no transfer between level 1 to level 2, and vice versa.

55. INFORMASI LAINNYA

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan perubahannya POJK No. 27 tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* secara bertahap mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, *Capital Conservation Buffer* yang wajib dibentuk oleh Bank masing-masing adalah sebesar 2,500% dari ATMR.

55. OTHER INFORMATION

a. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) on December 31, 2023 and 2022 is calculated based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016 and its amendment No. 27 dated December 28, 2022 regarding Concerning Capital Adequacy Ratio of Commercial Bank where as is mandatory for the bank to establish Capital Conservation Buffer gradually starting from January 1, 2016 until January 1, 2019. On December 31, 2023 and 2022, Capital Conservation Buffer which should be established by the Bank amounted to 2.500% respectively from Risk Weighted Assets.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu masing-masing peringkat 2 (dua), maka KPMM minimum ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Based on the Bank' risk profile, which is level 2 (two) respectively as of December 31, 2023 and 2022, therefore minimum CAR is set to 9% to less than 10% as of December 31, 2023 and December 31, 2022.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dihitung sebagai berikut:

The Bank's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Konsolidasian			Consolidated
Modal Inti (Tier 1)			Core Capital (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)	47.287.667	45.370.359	Prime Core Capital (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	1.948.888	2.371.772	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	<u>49.236.555</u>	<u>47.742.131</u>	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets
ATMR untuk risiko kredit *)	139.667.479	146.316.529	for credit risk *)
ATMR untuk risiko pasar **)	3.349.635	1.976.716	for market risk **)
ATMR untuk risiko operasional ***)	8.949.435	10.489.207	for operational risk ***)
Total ATMR	<u>151.966.549</u>	<u>158.782.452</u>	Total risk weighted assets
Rasio KPMM			CAR Ratio
Rasio CET 1	31,12%	28,57%	Ratio CET 1
Rasio Tier 1	31,12%	28,57%	Ratio Tier 1
Rasio Tier 2	1,28%	1,49%	Ratio Tier 2
Rasio Total	<u>32,40%</u>	<u>30,07%</u>	Total Ratio
Rasio KPMM berdasarkan profil risiko	<u>9,70%</u>	<u>9,55%</u>	CAR ratio based on risk profile
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	Minimum Ratio Tier 1
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	Minimum Ratio CET 1
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	<u>9,00% - 10,00%</u>	<u>9,00% - 10,00%</u>	Minimum CAR based on profile
CET 1 untuk Buffer	22,70%	20,52%	CET 1 for Buffer
Persentase Buffer yang wajib dipenuhi oleh Bank			The percentage of the Buffer that must be fulfilled by the Bank
Capital Conservation Buffer	2,500%	2,500%	Capital Conservation Buffer
Countercyclical Buffer	0,000%	0,000%	Countercyclical Buffer
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik	<u>1,000%</u>	<u>1,000%</u>	Capital Surcharge for Systemic Bank
Bank			Bank
Modal Inti (Tier 1)			Core Capital (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)	41.784.263	40.181.986	Prime Core Capital (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	1.761.068	2.203.719	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	<u>43.545.331</u>	<u>42.385.705</u>	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets
ATMR untuk risiko kredit *)	120.669.494	130.625.091	for credit risk *)
ATMR untuk risiko pasar **)	3.353.746	1.982.725	for market risk **)
ATMR untuk risiko operasional ***)	8.016.975	9.589.659	for operational risk ***)
Total ATMR	<u>132.040.215</u>	<u>142.197.475</u>	Total risk weighted assets

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rasio CAR			CAR Ratio
Rasio CET 1	31,65%	28,26%	Ratio CET 1
Rasio Tier 1	31,65%	28,26%	Ratio Tier 1
Rasio Tier 2	1,33%	1,55%	Ratio Tier 2
Rasio Total	<u>32,98%</u>	<u>29,81%</u>	Total Ratio
Rasio KPMM berdasarkan profil resiko	<u>9,74%</u>	<u>9,59%</u>	CAR ratio based on risk profile
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	Minimum Ratio Tier 1
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	Minimum Ratio CET 1
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	<u>9,00% - 10,00%</u>	<u>9,00% - 10,00%</u>	Minimum CAR based on profile
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	23,24%	20,22%	CET 1 for Buffer
Persentase <i>Buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh Bank			The percentage of the Buffer that must be fulfilled by the Bank
<i>Capital Conservation Buffer</i>	2,500%	2,500%	Capital Conservation Buffer
<i>Countercyclical Buffer</i>	0,000%	0,000%	Countercyclical Buffer
<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	<u>1,000%</u>	<u>1,000%</u>	Capital Surcharge for Systemic Bank

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

On December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with required ratio set by Bank Indonesia for capital adequacy ratio.

*) Rasio ATMR untuk risiko kredit dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

*) Risk weighted assets ratio for credit risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2021 dated October 7, 2021.

***) Rasio ATMR untuk risiko pasar dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

***) Risk weighted assets ratio for market risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016.

****) Rasio ATMR untuk risiko operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020.

****) Risk weighted assets ratio for operational risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020.

b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif dan non produktif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 2,95% dan 2,93%.

b. The ratio of classified earning assets to total earning assets and non-earning assets as of December 31, 2023 and 2022 are 2.95% and 2.93%, respectively.

c. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

c. As of December 31, 2023 and 2022, there was no excess of Legal Lending Limit (LLL) to both related parties and non-related parties.

Perhitungan BMPK disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dalam perhitungan BMPK Bank yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020.

LLL calculation is prepared based on regulation No. 38/POJK.03/2019 regarding the implementation of consolidated risk management to the subsidiaries which are controlled by the Bank in the Bank's LLL calculation which is effective starting on January 1, 2020.

Batas Maksimum Penyediaan Dana diatur sebagai berikut:

- Kepada pihak terkait tidak melebihi 10% dari modal Bank.
- Kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari modal inti Bank.
- Kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari modal inti Bank.

Berikut ini adalah saldo penyediaan dana kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada bank lain	221.111	139.786	Demand deposits with other banks
Kredit	2.343.570	1.882.578	Loans
Penyertaan dalam bentuk saham	16.500	16.500	Investments in shares of stock
Rekening administratif	107.098	325.019	Administrative accounts
Jumlah	<u>2.688.279</u>	<u>2.363.883</u>	Total

Batas maksimum pemberian kredit kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.354.533 juta dan Rp 4.238.571 juta (10% dari modal Bank).

The maximum lending limit is as follows:

- To related parties not exceed than 10% from Bank's capital.
- To one non-related party debtor not exceed than 25% of the Bank's tier 1 capital.
- To one non-related party group debtors not exceed than 25% of the Bank's tier 1 capital.

The following are the balances of amounts with affiliates as of December 31, 2023 and 2022 in accordance with the Legal Lending Limit (LLL) regulation of Bank Indonesia:

Maximum legal lending limit to affiliates as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 4.354.533 million and Rp 4,238,571 million (10% of the Bank's capital), respectively.

56. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Bank yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2023	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.999.020	(4.000.000)	980	-	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	2.144.195	656.363	2.815	2.803.373	Borrowing - third parties
Obligasi subordinasi - bersih	3.795.470	(100.000)	3.806	3.699.276	Subordinated bonds - net
Jumlah	<u>9.938.685</u>	<u>(3.443.637)</u>	<u>7.601</u>	<u>6.502.649</u>	Total

56. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Banks's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.994.226	-	4.794	3.999.020	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	1.286.050	858.145	-	2.144.195	Borrowing - third parties
Obligasi subordinasi - bersih	3.791.711	-	3.759	3.795.470	Subordinated bonds - net
Jumlah	9.071.987	858.145	8.553	9.938.685	Total

57. MANAJEMEN RISIKO

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko tertinggi di tingkat Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko Bank dan Entitas Anak.

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen risiko, mengelola risiko secara keseluruhan di Bank dan Entitas Anak, serta perbaikan atas pelaksanaan strategi, kebijakan dan evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya ini, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal.

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

57. RISK MANAGEMENT

The organization of the Bank's risk management involves oversight from the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Risk Oversight Committee is a highest risk committee at the Board of Commissioners' level who are responsible to oversight the implementation of risk management strategies and policies and evaluate implementation of duties of the Risk Management Committee and risk management working unit in the Bank and Subsidiaries.

The Board of Commissioners delegate authority to the Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Management Committee is established at the Board of Directors' level and is responsible in providing recommendation to the President Director for developing the risk management strategy and policy, managing overall risk in the Bank and Subsidiaries, and improving the implementation of strategies, policies and evaluating significant risk issues.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. In performing the role, the Audit Committee is assisted by internal audit working unit.

The risks arising from the financial instruments are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

Entitas Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada struktur organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian internal melalui laporan-laporan untuk digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang tepat pada Entitas Anak.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan OJK. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM) konsolidasian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, laporan Profil Risiko konsolidasian, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) konsolidasian dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) konsolidasian.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Entitas Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), kegagalan settlement (*settlement risk*), dan *country risk*. Eksposur risiko kredit pada Bank terutama muncul dari kegiatan perkreditan maupun aktivitas lainnya seperti pembiayaan perdagangan (*trade finance*), treasury dan investasi. Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah untuk mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam batasan yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *risk adjusted return*.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakankebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination, persetujuan kredit, penetapan pricing, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Subsidiary has implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in its organizational structure, which has responsibility to monitor the compliance of risk management policies and procedures on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risks faced by the Subsidiary.

In addition, the Subsidiary's Board of Commissioners and Board of Directors actively monitor and evaluate the internal controls, through the reports, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

As The Parent Entity, the Bank has implemented consolidated risk management in accordance with OJK regulation. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL), risk profile, Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Credit Risk Management

Credit risk is the risk due to failure of other parties to meet its obligation to the Bank and/or Subsidiaries, including credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, settlement risk and country risk. Credit risk exposure at the Bank primarily arises from lending activities as well as other activities such as trade finance, treasury and investment. Credit risk exposure can also increase due to the concentration of credit on certain debtor, geographic region, products, type of financing or business field. The objective of credit risk management is to control and manage credit risk exposures within acceptable limits in accordance to risk appetite, while optimizing the risk adjusted returns.

Credit risk is managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit origination, approval, pricing, monitoring, problem loan management and portfolio management.

Untuk memastikan fungsi Manajemen Risiko berjalan dengan efektif, Bank telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merupakan unit kerja yang terpisah dan independen dari risk taking unit dan unit Kerja pengendalian intern.

Bank juga memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

a. Pengukuran Risiko Kredit

Klasifikasi Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dilakukan berdasarkan model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan dan pengujian karakteristik arus kas kontraktual (*Solely Payment of Principal & Interest* (SPPI)). Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain
- Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Perhitungan pencadangan Bank mengacu pada PSAK 71. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen, berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Bank juga telah menerapkan perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian mengacu pada prinsip-prinsip PSAK 71 sesuai ketentuan Regulator, dimana menghitung pencadangan Kerugian Kredit Ekspektasian secara *forward-looking*, Bank menggunakan 2 (dua) metode perhitungan, yaitu:

- Perhitungan secara kolektif, yaitu perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara portofolio untuk lini bisnis. Pada metode ini, Bank menggunakan rating/umur tunggakan sebagai basis dalam penentuan model PD (*Probability of Default*) untuk masing-masing Debitur. Sedangkan untuk model LGD mempertimbangkan nilai *Recovery* dan EAD (*Exposure at Default*) merupakan posisi semua *on balance sheet* and *off balance sheet*.

To ensure the risk management function operates effectively, the Bank has established Risk Management Directorate which has role and responsibility as the Risk Management Working Unit (SKMR) and as a separate and independent working unit from the risk taking unit and internal control working unit.

The Bank also closely monitors the performance of its loan portfolios, that enable to initiate preventive actions in a timely manner when deterioration is observed in credit quality.

a. Credit Risk Measurement

Classification of Financial Assets

The classification of financial assets is based on the Bank's business model in managing financial assets and testing the characteristics of contractual cash flows (*Solely Payment of Principal & Interest* (SPPI)). The Bank's financial assets are classified as follows:

- Measured at fair value through profit and loss (FVTPL)
- Measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
- Measured at amortized cost

Measurement of Expected Credit Loss

Calculation of allowance for impairment loss refers to PSAK 71. PSAK 71 introduces the expected credit loss method in measuring financial instrument losses, which changes from the previous PSAK 55 which recognized credit losses when the credit loss event occurred, PSAK 71 required the immediate recognition of the effect of changes in expected credit losses after the initial recognition of the financial asset.

The Bank has also implemented the calculation of Expected Credit Loss which refers to the principles of PSAK 71 that is in accordance with the Regulators' provisions, which calculates the allowance for Expected Credit Loss in a forward-looking approach, the Bank uses 2 (two) calculation methods, as follow:

- Collective calculation, which is the calculation of expected credit loss by Portfolio for business lines of the Bank. In this method, the Bank uses the rating/age of arrears as the basis for determining the PD (*Probability of Default*) model for each debtor. Meanwhile, the LGD model considers the value of recovery and EAD (*Exposure at Default*) that is including all assets on balance sheet and off balance sheet.

- b. Perhitungan secara individu, untuk portofolio besar dengan kondisi yang mengalami penurunan nilai dan eksposur di atas Rp 15 Miliar. Perhitungan ini menggunakan pendekatan DCF (*Discounted Cash Flow*) atau pendekatan agunan (*Collateral*) yang dihitung secara individu.

Kriteria Penentuan Stage

PSAK 71 mensyaratkan Bank untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (stage 1, stage 2, dan stage 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (stage 1) dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (stage 2 dan stage 3).

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Bank membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal.

Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR).

Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar (memiliki tunggakan lebih dari 90 hari) atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Informasi terkait *Forward-Looking*

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan saat ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

- b. Individual calculations, for large exposure portfolios with impaired conditions and exposures above Rp 15 billion. This calculation uses the DCF (*Discounted Cash Flow*) or *Collateral* approach which is calculated in individual level.

Stage Criteria

PSAK 71 requires Banks to classify financial assets into three stages of impairment (stage 1, stage 2, and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk.

The Bank measures the allowance for impairment losses in the amount of 12 months expected credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime expected credit loss for financial assets that experience a significant increase in credit risk (stage 2 and stage 3).

At each reporting date, the Bank assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly (SICR) since initial recognition. In conducting this assessment, the Bank compares the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition.

In general, financial assets with arrears of 30 days or more and have not experienced a impairment in value will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk (SICR).

Financial assets will only be deemed impaired and expected credit losses are recognized throughout their life, if there is observable objective evidence of impairment, such as default (having arrears of more than 90 days) or experiencing significant financial difficulties.

Forward-Looking Information

The evolving economic environment is a determinant key of the Bank's customers' ability to fulfill their obligations as they become due. It is a basic principle of PSAK 71 that potential future losses must depend not only on the current economic health, but must also consider the possible changes in the economic environment. For example if the Bank anticipates a sharp slowdown in the world economy, the bank should create more allowance for the current time to absorb possible credit losses in the near future.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi forward looking dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variable ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali debitur Bank.

Macroeconomic Variables (MEV), merupakan salah satu parameter/komponen pada perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara pendekatan forward-looking. Bank juga menetapkan variabel makro ekonomi secara berkala dan mengkorelasikan terhadap model-model PSAK 71. MEV yang digunakan Bank antara lain GDP Indonesia, Inflasi, 7 days repo rate, kurs USDIDR, harga minyak dunia dan suku bunga USD 3-month.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ("ECL") bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linear serta tergantung pada portofolio yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, bukan hanya variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

Kesesuaian Model dengan Kondisi Ekonomi

Untuk evaluasi kesesuaian model dengan kondisi ekonomi dilakukan backtesting secara berkala minimal 1 tahun sekali. Model forward looking dibentuk dalam kondisi normal dengan data historis pembentuknya juga data-data pada saat kondisi normal sehingga proyeksi yang dihasilkan merupakan proyeksi kondisi normal. Pada situasi diluar normal dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit, maka model *forward-looking* yang telah dibentuk sebelumnya tidak dapat memproyeksikan kondisi dengan tepat dan memerlukan penyesuaian (*adjustment*).

Untuk mengatasi hal tersebut, Bank melakukan post model overlay dengan melakukan analisa terhadap debitur-debitur yang terdampak pandemi Covid-19 secara signifikan dan kredit-kredit yang direstrukturisasi untuk dapat melakukan penyesuaian pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan potensi risiko kreditnya.

To capture the effects of changes in the economic environment, the PD model is used to calculate expected credit losses, by including forward looking information in the form of estimated values of economic variables that are likely to have an impact on the repayment ability of Bank debtors.

Macroeconomics Variables (MEV), is one of the parameters/components in calculating expected credit loss using a forward-looking approach. The Bank also determines macroeconomic variables on a regular basis and correlates them with the PSAK 71 models. The MEV used by the Bank includes Indonesian GDP, inflation, 7 days repo rate, USDIDR exchange rate, world oil price and the USD 3-month LIBOR interest rate.

The calculation of allowance for impairment losses ("ECL") is dependent on several variables and is inherently non-linear and portfolio dependent which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of expected credit loss to changes in MEV. The Bank believes that sensitivity should be applied to all variables, not just single variables, as this is in line with the multi-variable nature of ECL calculations.

Suitability of the Model with Economic Conditions

To evaluate the suitability of the model with economic conditions, back testing is conducted periodically at least once a year. The forward looking model is formed in normal conditions with historical data forming it as well as data during normal conditions so that the resulting projection is a projection of normal conditions. In situations outside of normal, with the Covid-19 pandemic and the existence of a credit restructuring relaxation policy, the forward-looking model that has been formed previously cannot project conditions appropriately and requires adjustments.

To overcome the situation, the Bank conducted a post model overlay by analyzing debtors who were significantly affected by the Covid-19 pandemic and restructured credits to be able to make adjustments to the formation of allowance for impairment losses in accordance with their potential credit risk.

Agunan

Bank menerapkan kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Praktik yang umum dilakukan adalah dengan meminta agunan sebagai jaminan. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan yang diterima antara lain adalah hipotek, tanah dan bangunan, persediaan, piutang usaha dan instrumen keuangan.

Berikut adalah tabel eksposur kredit dibanding dengan nilai jaminan:

Collateral

The Bank implements policies and practices to mitigate credit risk. The most common practice is to receive collateral. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific collateral that can be accepted to mitigate the credit risk. The types of collateral accepted includes; mortgage, land and building, inventories, account receivable and financial instruments.

The credit exposure compared with the value of collateral are as follows:

	2023						
	Korporasi/ Corporate	Komersial/ Commercial	Retail/ Retail	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Karyawan/ Employee	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Eksposur kredit	26.299.560	45.311.802	24.328.487	32.193.162	62.977	128.195.988	Credit exposure
Nilai jaminan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Grup	140.580.621	135.351.869	47.020.712	23.047.132	75.069	346.075.403	Collateral value based on Group's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	-	-	-	9.146.030	-	9.146.030	Total unsecured credit exposure
Porsi eksposur piutang tanpa jaminan	-	-	-	28,41%	-	7,13%	Unsecured portion of credit exposure
Jenis agunan							Types of collateral
Tanah dan bangunan	74.338.326	114.121.835	46.356.495	2.986.789	17.013	237.820.458	Land and buildings
Garansi	-	69.397	-	1.602.620	-	1.672.017	Personal guarantee
Mesin-mesin	9.554.383	991.462	-	-	-	10.545.845	Machineries
Kendaraan	600	1.135.777	1.961	7.805.807	1.042	8.945.187	Vehicles
Deposito dan tabungan	91.500	4.879.597	45.879	28.050	-	5.045.026	Deposits and savings
Kapal	3.854.815	-	-	-	-	3.854.815	Vessels
Lainnya	52.740.997	14.153.801	616.377	10.623.866	57.014	78.192.055	Others
Jumlah	140.580.621	135.351.869	47.020.712	23.047.132	75.069	346.075.403	Total
	2022						
	Korporasi/ Corporate	Komersial/ Commercial	Retail/ Retail	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Karyawan/ Employee	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Eksposur kredit	27.631.799	40.575.160	21.216.881	30.153.577	63.423	119.640.840	Credit exposure
Nilai jaminan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Grup	151.912.917	133.782.146	42.355.792	25.602.761	72.938	353.726.554	Collateral value based on Group's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	-	-	-	4.550.816	-	4.550.816	Total unsecured credit exposure
Porsi eksposur piutang tanpa jaminan	-	-	-	15,09%	-	3,80%	Unsecured portion of credit exposure
Jenis agunan							Types of collateral
Tanah dan bangunan	78.626.305	114.465.904	41.976.347	3.864.575	13.843	238.946.974	Land and buildings
Garansi	13.029.681	3.826.196	199.695	2.015.739	-	19.071.311	Personal guarantee
Mesin-mesin	10.699.598	1.099.203	-	-	-	11.798.801	Machineries
Kendaraan	23.960	720.163	6.926	7.510.762	828	8.262.639	Vehicles
Deposito dan tabungan	93.760	4.270.312	34.271	69.550	-	4.467.893	Deposits and savings
Kapal	3.105.066	-	-	-	-	3.105.066	Vessels
Lainnya	46.334.547	9.400.368	138.553	12.142.135	58.267	68.073.870	Others
Jumlah	151.912.917	133.782.146	42.355.792	25.602.761	72.938	353.726.554	Total

b. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Bank mengelola, membatasi dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di manapun risiko tersebut teridentifikasi – secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta geografis. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur, atau beberapa kelompok debitur, dan berdasarkan segmen geografis dan industri. Batas pemberian kredit ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi dan telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi.

c. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

b. Risk limit control and mitigation policies

The Bank manages, limits and controls the credit risk's concentrations wherever the risk is identified - in particular, to individual counterparties and group, and industries and also geographical. The Bank determined the levels of credit risk by applying limits on the amount of risk that can be accepted related to a debtor or a group of debtors, and based on geographic and industry segments. Legal lending limits are reviewed by following the change in the market and economic conditions and periodically credit reviews and assessment of the default probability.

c. Maximum exposure to credit risk (net of allowance for impairment losses)

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk on financial instruments in its consolidated statements of financial position and commitments and contingencies (administrative accounts), without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

Uraian	2023	2022	Description
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Laporan posisi keuangan:			Statements of financial position:
Kas	1.297.547	1.704.409	Cash
Giro pada Bank Indonesia	7.870.438	7.204.803	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.297.706	1.252.071	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	6.035.648	7.190.503	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	1.067.013	1.601.311	Securities - net
Tagihan derivatif	20.437	29.385	Derivative receivables
Kredit - bersih	120.236.215	113.274.987	Loans - net
Tagihan anjak piutang - bersih	44.049	50.420	Factoring receivables - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	4.826.791	10.642.145	Securities purchased with agreements to resell - net
Piutang jual dan sewa- balik - bersih	33.148	55.187	Sales and lease- back receivables
Piutang sewa pembiayaan - bersih	528.480	272.141	Finance leases receivable - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	8.429.005	6.795.450	Consumer financing receivables - net
Tagihan akseptasi - bersih	1.630.129	2.125.849	Acceptance receivables - net
Obligasi pemerintah	37.943.621	31.797.107	Government bonds
Aset lain-lain	1.575.061	1.478.683	Other assets
Sub Jumlah	192.835.288	185.474.451	Sub Total
Komitmen dan Kontinjensi:			Commitments and Contingencies:
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	37.861.547	37.997.926	Unused loan facilities
Bank garansi yang diterbitkan <i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	1.387.672	1.715.621	Guarantees issued
	1.415.309	1.672.645	Outstanding irrevocable L/C
Sub Jumlah	40.664.528	41.386.192	Sub Total
Jumlah	233.499.816	226.860.643	Total

d. Analisis risiko konsentrasi kredit

Tabel berikut ini menggambarkan rincian konsentrasi kredit Grup pada nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri:

d. Concentration of credit analysis

The following table presents the Group's credit concentration on its carrying value before deducted by the allowance for impairment losses, categorized based on its industry sector:

	2023						
	Dalam perhatian khusus/						
	Lancar/ Current Rp Juta/ Rp Million	Special mention Rp Juta/ Rp Million	Kurang lancar/ Substandard Rp Juta/ Rp Million	Diragukan/ Doubtful Rp Juta/ Rp Million	Macet/ Loss Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rumah tangga	23.953.160	959.296	66.503	81.193	411.337	25.471.489	Household
Perdagangan besar dan eceran	19.683.159	460.290	64.109	63.058	392.763	20.663.379	Trading
Industri pengolahan	19.499.530	454.542	26.537	2.977	209.691	20.193.277	Manufacturing
Aktivitas keuangan dan asuransi	17.985.913	1.423	-	1.500	273.795	18.262.631	Financial activity and insurance
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	9.843.036	2.232.932	-	-	409.405	12.485.373	Property, residential and others
Konstruksi	6.761.002	3.487.811	13.500	21.746	83.972	10.368.031	Construction
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.520.206	790.260	284	308.386	407.055	5.026.191	Accommodation and food and beverages
Pengangkutan dan pergudangan	3.167.916	1.849.002	2.397	31.055	18.201	5.068.571	Transportation and warehouse
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan dan agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	1.781.776	46.081	192	228	80.938	1.909.215	Rental activities and lease without options, employment and travel agent, and other business support
Listrik, gas dan air	1.504.956	793.074	-	-	11.986	2.310.016	Electricity, gas and water
Pertanian, perburuan dan kehutanan	2.053.675	17.399	-	2.532	348.941	2.422.547	Agrobusiness and forestry
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	966.462	2.454	-	-	76.706	1.045.622	Professional activities, science and technic
Pertambangan dan penggalian	530.019	98.387	-	-	101.923	730.329	Mining
Informasi dan komunikasi	342.703	20.004	-	-	308.169	670.876	Information and communication
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	621.968	3.556	-	-	-	625.524	Human health and social activities
Aktivitas jasa lainnya	348.761	12.147	-	94	11.476	372.478	Other services
Kesenian, hiburan dan rekreasi	98.570	221.910	-	-	4.047	324.527	Art, entertainment and recreation
Jasa pendidikan	141.145	27.170	-	-	2.532	170.847	Education services
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	74.065	1.000	-	-	-	75.065	Water management, waste water management and waste recycle and remedy activities
Jumlah	112.878.022	11.478.738	173.522	512.769	3.152.937	128.195.988	Total
	2022						
	Dalam perhatian khusus/						
	Lancar/ Current Rp Juta/ Rp Million	Special mention Rp Juta/ Rp Million	Kurang lancar/ Substandard Rp Juta/ Rp Million	Diragukan/ Doubtful Rp Juta/ Rp Million	Macet/ Loss Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rumah tangga	20.868.337	849.613	86.451	68.702	294.123	22.167.226	Household
Industri pengolahan	19.070.571	976.800	70.611	29.914	265.955	20.413.851	Manufacturing
Perdagangan besar dan eceran	17.890.091	488.619	73.272	54.979	302.554	18.809.515	Trading
Aktivitas keuangan dan asuransi	15.063.582	2.284	-	-	295.888	15.361.754	Financial activity and insurance
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	10.075.291	2.317.721	46.202	641	460.764	12.900.619	Property, residential and others
Konstruksi	9.487.816	202.205	1.835	13.977	34.384	9.740.217	Construction
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.098.563	321.641	175.475	315.043	677.740	5.588.462	Accommodation and food and beverages
Pengangkutan dan pergudangan	1.644.813	1.868.646	11.366	3.811	32.968	3.561.604	Transportation and warehouse
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan dan agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	1.365.388	1.532.735	-	-	63.303	2.961.426	Rental activities and lease without options, employment and travel agent, and other business support
Listrik, gas dan air	2.133.609	275.070	-	-	11.836	2.420.515	Electricity, gas and water
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.303.591	15.074	150	73	348.384	1.667.272	Agrobusiness and forestry
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	811.888	10.738	-	48.385	18.642	889.653	Professional activities, science and technic
Pertambangan dan penggalian	739.982	26.611	443	207	86.847	854.090	Mining
Informasi dan komunikasi	286.009	26.859	-	-	303.869	616.737	Information and communication
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	588.116	1.467	-	70	59	589.712	Human health and social activities
Aktivitas jasa lainnya	383.169	12.123	-	1.000	102.828	499.120	Other services
Kesenian, hiburan dan rekreasi	136.870	214.535	-	603	1.269	353.277	Art, entertainment and recreation
Jasa pendidikan	189.722	3.503	160	-	2.440	195.825	Education services
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	49.389	319	-	257	-	49.965	Water management, waste water management and waste recycle and remedy activities
Jumlah	106.186.797	9.146.563	465.965	537.662	3.303.853	119.640.840	Total

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai, yang dikategorikan berdasarkan area geografis operasi debitur pada Desember 2023 dan 2022.

The following table present the details of the Group's credit exposure at their carrying amounts before allowance for impairment losses, categorized by the debtor's geographical area of operation as at December 2023 and 2022:

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
DKI Jakarta	94.200.651	88.895.034	DKI Jakarta
Jawa Timur dan Bali	10.933.334	9.947.999	East Java and Bali
Sumatera	8.431.509	7.509.139	Sumatera
Jawa Barat	5.838.607	5.332.720	West Java
Jawa Tengah dan Yogyakarta	2.933.303	2.655.256	Central Java dan Yogyakarta
Sulawesi	2.546.832	2.335.657	Sulawesi
Kalimantan	1.794.687	1.679.752	Kalimantan
Lain-lain	1.517.065	1.285.283	Others
Jumlah	128.195.988	119.640.840	Total

e. Konsentrasi kredit berdasarkan jenis debitur (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai).

e. Credit concentration by type of debtors (gross of allowance for impairment losses)

	2023						
	Bl dan pemerintah/						
	Korporasi/ Corporate	Bl and government	Bank-bank/ Other banks	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	-	7.870.438	1.297.741	-	-	9.168.179	Demand deposit with BI and other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2.465.914	3.572.422	-	-	6.038.336	Placement with BI and other banks
Efek-efek	466.013	-	601.039	-	-	1.067.052	Securities
Tagihan derivatif	2.622	-	17.815	-	-	20.437	Derivative receivable
Kredit yang diberikan	50.634.122	-	16.990	10.300.114	67.244.762	128.195.988	Loan
Tagihan akseptasi	1.630.233	-	6.855	699	-	1.637.787	Acceptance receivable
Obligasi pemerintah	-	37.943.621	-	-	-	37.943.621	Government bonds
Aset lain-lain *)	1.350.853	589.331	4.845.651	7.961.235	1.036.431	15.783.501	Other assets *)
Komitmen dan kontinjensi	21.150.183	-	9.922	6.816.919	12.687.504	40.664.528	Commitments and contingencies
Jumlah	75.234.026	48.869.304	10.368.435	25.078.967	80.968.697	240.519.429	Total
	2022						
	Bl dan pemerintah/						
	Korporasi/ Corporate	Bl and government	Bank-bank/ Other banks	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	-	7.204.803	1.252.121	-	-	8.456.924	Demand deposit with BI and other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2.237.666	4.954.470	-	-	7.192.136	Placement with BI and other banks
Efek-efek	980.172	-	621.192	-	-	1.601.364	Securities
Tagihan derivatif	9.981	-	19.404	-	-	29.385	Derivative receivable
Kredit yang diberikan	101.323.013	-	1.303	10.969.469	7.347.055	119.640.840	Loan
Tagihan akseptasi	2.124.615	-	7.886	-	-	2.132.501	Acceptance receivable
Obligasi pemerintah	-	31.797.107	-	-	-	31.797.107	Government bonds
Aset lain-lain *)	1.769.640	11.196.273	12.019	6.365.231	214.426	19.557.589	Other assets *)
Komitmen dan kontinjensi	36.214.220	-	25.472	4.850.954	295.546	41.386.192	Commitments and contingencies
Jumlah	142.421.641	52.435.849	6.893.867	22.185.654	7.857.027	231.794.038	Total

*) Akun ini terdiri dari tagihan anjak piutang, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset keuangan lainnya.

*) This account consists of factoring receivables, finance leases receivable, consumer financing receivables, securities purchased with agreements to resell and other financial assets.

f. Analisis umur pinjaman dan piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

f. Aging analysis of loans and receivables that would otherwise be past due or impaired

	2023							
	Kredit/ Loans	Piutang sewa pembiayaan/ Finance lease receivables	Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables	Piutang jual dan sewa-balik/ Sales and lease-back receivables	Tagihan anjak piutang/ Factoring receivables	Aset lain-lain/ Other assets	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 30 hari	-	1.036	-	-	-	-	1.036	within 30 days
31 - 60 hari	-	6.096	-	-	-	-	6.096	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	17	-	-	-	-	17	61 - 90 days
91 - 180 hari	-	-	-	-	-	-	-	91 - 180 days
> 180 hari	-	-	-	-	-	-	-	over 180 days
Jumlah	-	7.149	-	-	-	-	7.149	Total
	2022							
	Kredit/ Loans	Piutang sewa pembiayaan/ Finance lease receivables	Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables	Piutang jual dan sewa-balik/ Sales and lease-back receivables	Tagihan anjak piutang/ Factoring receivables	Aset lain-lain/ Other assets	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 30 hari	4.475	-	-	-	-	-	4.475	within 30 days
31 - 60 hari	808	-	-	-	-	-	808	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	-	-	-	-	-	61 - 90 days
91 - 180 hari	-	-	-	-	-	-	-	91 - 180 days
> 180 hari	-	-	-	-	-	-	-	over 180 days
Jumlah	5.283	-	-	-	-	-	5.283	Total

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang dimana nilai wajar atau arus kas dimasa mendatang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat adanya pergerakan dari variabel pasar seperti: suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas. Risiko pasar melekat pada semua portofolio bank, baik posisi *trading book* maupun posisi pada *banking book* di neraca dan rekening administratif. Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian, mingguan, hingga bulanan. Untuk meningkatkan fungsi pemantauan tersebut Bank menggunakan *Guava Treasury System* yang telah terintegrasi antara *front office*, *middle office*, dan *back office*.

Risiko pasar dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko yang timbul akibat adanya pergerakan nilai tukar yang akan berpengaruh terhadap portofolio bank yang memiliki posisi valuta asing. Risiko nilai tukar bank tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN).

Market Risk Management

Market Risk is the potential loss that occurs due to the movements of market factor in which the fair value or cash flow of financial instruments in the future fluctuates due to movements from market variables such as: interest rate, foreign exchange, equity price and commodity price. Market Risk is inherent to all Bank's portfolio, be it in the trading book position as well as in the banking book within the balance sheet and administrative account. Market risk monitoring is constantly done in routine and periodically in daily, weekly until monthly. To increase such monitoring function the Bank utilize the *Guava Treasury system* which is integrated in the front office, middle office and back office.

Market risk is divided into two parts, specifically:

1. Exchange Rate Risk

Exchange rate risk is the risk that arise from the existence of foreign exchange rate movements that will affect bank's portfolio which has foreign exchange positions. Bank's exchange rate risks are reflected within the Net Open Position.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, batas maksimum posisi devisa neto yang dapat dipegang oleh Bank adalah sebesar 20% dari modal, mengikuti aturan dari regulator. Pada Triwulan IV 2023 Posisi devisa neto Bank sebesar IDR 79.20 milyar atau 0,18% dan berada dalam kisaran antara Rp 30.53 milyar – Rp 441.63 miliar (0,07% - 1.01% dari modal Bank). Value at Risk per 31 Desember 2023 yaitu sebesar IDR 549 juta atau sebesar 0,69% dari posisi devisa neto.

To manage and mitigate exchange rate risk, the maximum Net Open position that Bank can withhold is as much as 20% from the Bank's capital, adhering to the regulator's provision. In the IV quarter of 2023 the bank's Net Open Position is IDR 79.20 Billion or 0,18% and within the range of 30.53 billion – Rp 441.63 billion (0,07% - 1.01% of the bank's capital). Value at Risk as of 31 Desember 2023 is IDR 549 million or 0,69% of Net Open Position.

Tabel di bawah ini menyajikan posisi devisa neto Bank per mata uang pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

The table below presents the Bank's Net Open Position by currency at the 31st December 2023 position.

Mata Uang	2023			Currencies
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ Liabilities, commitment and contingent liabilities	Bersih absolut/ Net absolute	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Amerika Serikat	23.478.188	23.538.123	59.935	United States Dollar
Dollar Australia	2.015.905	2.014.391	1.514	Australian Dollar
Dollar Singapura	1.225.620	1.221.177	4.443	Singapore Dollar
Euro	797.821	794.035	3.786	Euro
Yen Jepang	907.571	906.876	695	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	225.856	226.178	322	Great Britain Poundsterling
Yuan China	165.657	161.022	4.635	Chinese Yuan
Dollar Hongkong	28.226	25.393	2.833	Hongkong Dollar
Dollar Kanada	88.892	89.094	202	Canadian Dollar
Dollar Selandia Baru	84.932	84.381	551	New Zealand Dollar
Franc Swiss	9.541	9.831	290	Swiss Franc
Jumlah	<u>29.028.209</u>	<u>29.070.501</u>	<u>79.206</u>	Total
Jumlah Modal			<u>43.603.939</u>	Total Capital
Persentase PDN terhadap modal			<u>0,18%</u>	Percentage of NOP to capital
Mata Uang	2022			Currencies
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ Liabilities, commitment and contingent liabilities	Bersih absolut/ Net absolute	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Amerika Serikat	26.984.526	27.219.574	235.048	United States Dollar
Dollar Australia	2.267.651	2.240.203	27.448	Australian Dollar
Dollar Singapura	1.362.318	1.358.187	4.131	Singapore Dollar
Euro	992.606	984.714	7.892	Euro
Yen Jepang	602.520	595.861	6.659	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	379.062	372.383	6.679	Great Britain Poundsterling
Yuan China	229.242	216.850	12.392	Chinese Yuan
Dollar Hongkong	26.952	25.512	1.440	Hongkong Dollar
Dollar Kanada	103.989	101.032	2.957	Canadian Dollar
Dollar Selandia Baru	105.473	104.587	886	New Zealand Dollar
Franc Swiss	13.705	13.330	375	Swiss Franc
Jumlah	<u>33.068.044</u>	<u>33.232.233</u>	<u>305.907</u>	Total
Jumlah Modal			<u>41.926.170</u>	Total Capital
Persentase PDN terhadap modal			<u>0,73%</u>	Percentage of NOP to capital

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio PDN sebesar 0,18%, cenderung rendah jauh berada dibawah ketentuan regulasi Bank Indonesia yaitu dibawah 20% dari modal. Pada akhir triwulan IV 2023, komposisi PDN terbesar yang dimiliki oleh bank adalah mata uang USD sebesar 75.67% dari total PDN, diikuti oleh mata uang CNY yaitu sebesar 5.85% dari total PDN dan SGD sebesar 5.61%.

Dalam pengelolaan risiko pasar dalam trading book, Bank menggunakan beberapa metode selain Posisi Devisa Neto, yaitu dengan menggunakan *Value at Risk (VaR)*, *Present Value of Basis Point (PVBP)* dan *Stop Loss Limit*, serta sensitivitas nilai tukar dan suku bunga.

VaR digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar pada posisi devisa neto. VaR didefinisikan sebagai potensi kerugian maksimum yang berasal dari pergerakan pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan dan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sensitivitas atau volatilitas dari setiap variabel instrumen. Metodologi VaR yang digunakan Bank adalah metode *parametric (variance covariance)* dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) sebesar 99%.

Tabel di bawah ini menyajikan VaR posisi devisa neto Bank sepanjang Triwulan IV tahun 2023 dan 2022.

Based on the table above it can be seen that the NOP Ratio is as much as 0.18%, it is still below the Bank Indonesia regulation which is under 20% from capital. At the end of Q4 2023, the largest NOP composition held by the bank is USD currency as much as 75.67% from the total NOP, followed by CNY currency which is 5.85% and SGD currency is 5.61%.

In managing market risk within the trading book, the bank utilize several methods besides Net Open Position, the bank also measures market risk by using Value at Risk (VaR), Present Value of Basis Point (PVBP) and Stop Loss Limit as well as exchange value and interest rate sensitivity.

Var is utilized to measures the exchange rate risk on Net Open Position. VaR is defined as the maximum potential loss that originates from normal market movements with confidence level and for a certain time periods based on the sensitivity or volatility of every variable instrument. VaR methodology that is being utilized by the Bank is the parametric method (variance covariance) with the confidence level of 99%.

The table below provides VaR the bank's Net Open position throughout fourth Quarter of 2023.

Valuta asing	2023				Foreign currencies
	Rata-rata/ Average	Tertinggi/ Maximum	Terendah/ Minimum	VaR akhir tahun/ Year-end VaR	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Australia	58,26	123,16	18,02	18,02	Australian Dollar
Dollar Kanada	5,09	11,54	1,52	1,52	Canadian Dollar
Franc Swiss	8,42	13,41	3,80	3,80	Swiss Franc
Euro	22,80	35,95	6,47	6,47	Euro
Poundsterling Inggris	10,94	26,49	3,03	3,03	Great Britain Poundsterling
Dollar Hongkong	26,91	38,11	19,00	19,00	Hongkong Dollar
Yen Jepang	17,43	33,74	6,95	6,95	Japanese Yen
Yuan China	19,39	33,35	2,84	2,84	China Yuan
Dollar Selandia Baru	8,52	11,48	6,91	6,91	New Zealand Dollar
Dollar Singapura	26,98	49,12	6,98	6,98	Singapore Dollar
Dollar Amerika Serikat	1.488,51	3.278,20	507,86	507,86	United States Dollar

Valuta asing	2022				Foreign currencies
	Rata-rata/ Average	Tertinggi/ Maximum	Terendah/ Minimum	VaR akhir tahun/ Year-end VaR	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Australia	228,32	475,08	24,96	475,08	Australian Dollar
Dollar Kanada	15,52	30,33	4,68	30,33	Canadian Dollar
Franc Swiss	2,98	3,57	2,09	3,57	Swiss Franc
Euro	55,69	74,16	26,74	74,16	Euro
Poundsterling Inggris	46,52	94,88	17,34	94,88	Great Britain Poundsterling
Dollar Hongkong	58,37	140,92	12,14	12,14	Hongkong Dollar
Yen Jepang	61,69	113,26	31,75	113,26	Japanese Yen
Yuan China	80,82	107,64	33,08	107,64	Chinese Yuan
Dollar Selandia Baru	17,74	35,90	5,93	11,40	New Zealand Dollar
Dollar Singapura	26,10	48,00	2,23	28,07	Singapore Dollar
Dollar Amerika Serikat	1.096,65	1.904,03	33,08	1.904,03	United States Dollar

Sensitivitas Nilai Tukar

Analisis sensitivitas nilai tukar diukur dengan kemampuan eksekusi modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari nilai tukar, yaitu dengan membuat asumsi perubahan/fluktuasi nilai tukar yang berlawanan arah dengan masing-masing posisi nilai tukar. Pada posisi Desember 2023, selisih lebih modal Bank mampu meng-cover risiko nilai tukar sebesar 1707,57 kali Bank dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan demikian, Bank dinilai tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar.

2. Risiko Suku Bunga

Manajemen Risiko untuk *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) diterapkan Bank pada tingkat entitas maupun pada tingkat konsolidasi dengan memperhatikan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Penerapan manajemen IRRBB Bank bertujuan untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pergerakan suku bunga yang berdampak terhadap nilai ekonomis (*Economic Value of Equity – EVE*) maupun pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income – NII*). Pengukuran eksposur IRRBB pada masa kini maupun masa depan meliputi aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Strategi Bank terkait IRRBB adalah mengambil posisi *long / positive gap* antara *Rate Sensitive Assets* (RSA) dengan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL) dengan profil perubahan suku bunga jangka pendek. Hal tersebut memungkinkan Bank mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi perubahan suku bunga baik pada saat suku bunga naik maupun turun. Selain itu Bank menyusun strategi IRRBB sejalan dengan strategi bisnis dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

Exchange Rate Sensitivity

Exchange rate sensitivity analysis is measured by Bank's capital excess ability to absorb potential loss from the exchange rate, namely by creating assumption of changes/fluctuation of exchange rate that are in opposition with each exchange rate position. In the Desember 2023 position, the bank's capital excess has the adequacy to cover exchange rate risk as much as 1707.57 times, decrease compared to previous quarter. Nevertheless, the Bank is not considered vulnerable to exchange rate movements.

2. Interest Rate Risk

Risk management for Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) applied by the Bank on the entity level as well as on the consolidated level by considering the purpose, policy, size and the complexity of the business. The Bank IRRBB management practice is intended to measure, monitor and control interest rate movement risk that may impact the Economic Value of Equity (EVE) as well as the Net Interest Income (NII). Measurement of IRRBB exposure is to include present as well as the future asset, liabilities and administrative transaction accounts that are sensitive to interest rate movements.

The Bank's strategy relating to IRRBB is to take long position / positive gap between Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) with short term interest rate shift profile. In such case this allows the Bank to take quick steps to anticipate changes in interest rates when interest rates rise or fall. In addition, the Bank prepares an IRRBB strategy in line with the business strategy by taking into account risk appetite and risk tolerance.

Dalam hal pengendalian IRRBB, manajemen Bank akan mengambil langkah – langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian IRRBB yang lebih besar, pengendalian terhadap laba rugi serta kepatuhan terhadap ketentuan. Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait IRRBB adalah Departement *Market & Liquidity Risk* dibawah Direktorat *Risk and Compliance* yang melakukan pemantauan termasuk pelaporan IRRBB. ALCO adalah komite yang bertanggung jawab untuk pengelolaan IRRBB termasuk menetapkan kebijakan dan limit. Strategi IRRBB sejalan dengan strategi bisnis dan konsisten dengan *risk appetite* dan *risk tolerance bank* secara keseluruhan (*bank-wide*).

Pelaporan perhitungan IRRBB dilakukan secara triwulanan sesuai dengan pelaporan Profil Risiko Bank. Sensitivitas Bank terhadap IRRBB diukur menggunakan Δ EVE/Modal Tier 1, Δ NII/NII proyeksi dan *Repricing Profile Gap* dengan berbagai skenario *shock* perubahan suku bunga.

Untuk skenario *shock* suku bunga yang digunakan untuk mengukur sensitifitas NII dan EVE, Bank menggunakan skenario standar yang sesuai dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018) yaitu terdiri dari 6 *shock* skenario suku bunga untuk EVE.

Rata- rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) yang diterapkan yaitu jangka waktu *reprice* pada *time bucket* 1 – 3 bulan dan 3-6 bulan. Sementara itu, jangka waktu terpanjang untuk penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) terlama yaitu 6-12 bulan.

Berikut Tabel hasil *Repricing* terhadap perubahan *shock* suku bunga pada *banking book* dengan 6 (enam) *shock* skenario suku bunga untuk EVE dan 2 (dua) *shock* skenario suku bunga untuk NII.

Tabel mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

Shock scenarios/ Shock Scenarios	2023				
	Δ EVE		Δ NII		
	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Paralel up (400 bps)	(1.561.346)	(1.516.491)	2.834.002	(292.245)	Paralel up (400 bps)
Paralel down (400 bps)	2.143.910	2.110.262	(608.881)	2.423.970	Paralel down (400 bps)
Stepener (500 bps, 350 bps)	244.224	109.057	-	-	Stepener (500 bps, 350 bps)
Flattener (500 bps, 350 bps)	(278.789)	(98.220)	-	-	Flattener (500 bps, 350 bps)
Short rate up (500 bps)	(980.294)	(897.431)	-	-	Short rate up (500 bps)
Short rate down (500 bps)	494.839	249.001	-	-	Short rate down (500 bps)
Nilai maksimum negatif (absolut)	(1.561.346)	(1.516.491)	(608.881)	(292.245)	Negative maximum value (absolute)
Modal tier 1 (Δ EVE) atau projected income (Δ NII)	49.957.168	49.576.578	8.219.378	8.130.993	Capital tier 1 (Δ EVE) or projected income (Δ NII)
Nilai maksimum dibagi modal tier 1 atau projected income	3,13%	3,06%	7,41%	3,59%	Maximum value divided by capital tier 1 or projected income

In terms of IRRBB control, the Bank's management will take preventive steps against the possibility of a greater IRRBB loss, control of profit and loss and compliance with regulations. The Risk Management Work Unit related to IRRBB is the Market & Liquidity Risk Department under Risk and Compliance Directorate which carries out monitoring including IRRBB reporting. ALCO is the committee responsible for IRRBB management including setting policies and limits. The IRRBB strategy is in line with the business strategy and consistent with the risk appetite and risk tolerance of the bank as a whole (*bank-wide*).

IRRBB calculation is done quarterly in correspond with the Bank Risk Profile reporting. Bank Sensitivity towards IRRBB is measured using Δ EVE/Modal Tier 1, Δ NII/NII projection and *Repricing Profile Gap* with various interest rate movement shock scenario.

For the interest rate shock scenario used to measure the sensitivity of NII and EVE, the Bank uses the standard scenario referred in the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK number 12/SEOJK.03/2018), which consists of 6 interest rate shock scenarios for EVE.

The average re-pricing maturity period applied is the re-price period in the time bucket of 1-3 months and 3-6 months. Meanwhile, the longest period of interest rate adjustment (*repricing maturity*) is 6-12 months.

The following is the repricing results table for changes in interest rate shocks in the banking book with 6 (six) interest rate shocks for EVE and 2 (two) interest rate shocks for NII.

Below is table for Rupiah currency:

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Shock scenarios/ Shock Scenarios	2022				
	ΔEVE		ΔNIL		
	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Parallel up (400 bps)	(2.240.673)	(1.672.081)	(382.826)	(2.471.855)	Parallel up (400 bps)
Parallel down (400 bps)	3.047.641	2.371.022	2.389.880	2.471.855	Parallel down (400 bps)
Steepener (500 bps, 350 bps)	(228.984)	(231.233)	-	-	Steepener (500 bps, 350 bps)
Flattener (500 bps, 350 bps)	40.837	168.217	-	-	Flattener (500 bps, 350 bps)
Short rate up (500 bps)	(1.102.304)	(715.397)	-	-	Short rate up (500 bps)
Short rate down (500 bps)	484.787	116.257	-	-	Short rate down (500 bps)
Nilai maksimum negatif (absolut)	(2.240.673)	(1.672.081)	(382.826)	(2.471.855)	Negative maximum value (absolute)
Modal tier 1 (ΔEVE) atau projected income (ΔNIL)	47.717.082	46.123.574	9.616.945	9.616.945	Capital tier 1 (ΔEVE) or projected income (ΔNIL)
Nilai maksimum dibagi modal tier 1 atau projected income	4,70%	3,63%	3,98%	25,70%	Maximum value divided by capital tier 1 or projected income

Perhitungan IRRBB dilakukan untuk level konsolidasi atas mata uang USD periode Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The IRRBB calculation for the consolidated level of USD currency for the period December 2023 and 2022 is as follows:

Shock scenarios/ Shock Scenarios	2023				
	ΔEVE		ΔNIL		
	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Parallel up (200 bps)	219.958	243.100	15.062	107.423	Parallel up (200 bps)
Parallel down (200 bps)	(222.191)	(248.156)	57.450	(57.384)	Parallel down (200 bps)
Steepener (300 bps, 150 bps)	(53.600)	(55.833)	-	-	Steepener (300 bps, 150 bps)
Flattener (300 bps, 150 bps)	107.549	115.067	-	-	Flattener (300 bps, 150 bps)
Short rate up (300 bps)	181.188	197.823	-	-	Short rate up (300 bps)
Short rate down (300 bps)	(196.751)	(213.899)	-	-	Short rate down (300 bps)
Nilai maksimum negatif (absolut)	(222.191)	(248.156)	15.062	(57.384)	Negative maximum value (absolute)
Modal tier 1 (ΔEVE) atau projected income (ΔNIL)	49.957.168	49.576.578	958.683	870.298	Capital tier 1 (ΔEVE) or projected income (ΔNIL)
Nilai maksimum dibagi modal tier 1 atau projected income	0,44%	0,50%	1,57%	6,59%	Maximum value divided by capital tier 1 or projected income

Shock scenarios/ Shock Scenarios	2022				
	ΔEVE		ΔNIL		
	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	Tanggal laporan/ Reporting date (T)	Tanggal laporan sebelumnya/ Previous reporting date (T-1)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Parallel up (200 bps)	267.894	273.395	80.661	(91.595)	Parallel up (200 bps)
Parallel down (200 bps)	(269.976)	(276.982)	(7.778)	91.595	Parallel down (200 bps)
Steepener (300 bps, 150 bps)	(60.632)	(60.533)	-	-	Steepener (300 bps, 150 bps)
Flattener (300 bps, 150 bps)	126.952	127.964	-	-	Flattener (300 bps, 150 bps)
Short rate up (300 bps)	216.904	220.429	-	-	Short rate up (300 bps)
Short rate down (300 bps)	(235.257)	(276.982)	-	-	Short rate down (300 bps)
Nilai maksimum negatif (absolut)	(269.976)	(276.982)	(7.778)	(91.595)	Negative maximum value (absolute)
Modal tier 1 (ΔEVE) atau projected income (ΔNIL)	47.717.082	46.123.574	2.048.218	2.048.218	Capital tier 1 (ΔEVE) or projected income (ΔNIL)
Nilai maksimum dibagi modal tier 1 atau projected income	0,57%	0,60%	0,38%	4,47%	Maximum value divided by capital tier 1 or projected income

Sensitivitas Suku Bunga

Analisis sensitivitas suku bunga diukur dengan kemampuan eksekusi modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari perubahan suku bunga, yaitu dengan membuat asumsi perubahan/fluktuasi suku bunga terhadap aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Pada posisi Desember 2023, selisih lebih modal Bank mampu menutup risiko suku bunga sebesar 10.41 kali turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan demikian Bank masih dalam kategori tidak rentan terhadap perubahan suku bunga.

Interest Rate Sensitivity

Interest rate sensitivity analysis is measured by the ability of the Bank's excess capital to absorb potential loss from changes in interest rate, namely by making an assumption of interest rate changes or fluctuations on assets and liabilities that are sensitive to interest rate. In December 2023, the excess of the Bank's capital able to cover the risk of interest rate of 10.41 times, decreased compared to the previous quarter. However that Bank is not vulnerable to interest rate changes.

Bank mengelola risiko likuiditas secara hati-hati (*prudent*) dengan memastikan kecukupan dana secara harian maupun di masa datang baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan liabilitas secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis.

Bank manages liquidity risk carefully (*prudent*) to ensure sufficient funds on a daily basis and in the future both during normal time and crisis condition in the fulfillment of obligation in a timely manner from various sources of available funds, including ensuring the availability of high-quality liquid assets. Contingency funding plan has been made to prepare the Bank if there is a crisis.

Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar. Bank juga telah mengimplementasi perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sesuai dengan ketentuan LCR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada triwulan IV 2023 likuiditas bank masih terjaga sangat baik dengan rata – rata LCR triwulan IV 2023 sebesar 227% turun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bank measures and monitors liquidity risk through the difference in the maturity of liquidity and liquidity ratios analysis. One liquidity ratio used is the ratio of liquid assets to current liabilities. Bank has also to implement Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculation in accordance with the LCR provisions of the Financial Services Authority (OJK). In Quarter IV 2023 bank liquidity has been maintained very well with a quarterly average LCR of 227%.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar.

The table below presents the ratio of liquid assets to current liabilities.

	2023	2022	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kas	1.297.547	1.704.409	Cash
Giro, SBI dan penempatan BI lainnya	10.336.352	9.442.469	Demand deposits, BI Certificate and other BI placements
Obligasi Pemerintah	37.943.621	31.797.107	Government bonds
Penempatan pada bank lain dikurangi dengan simpanan dari bank lain	2.449.435	2.947.801	Placement with other banks less deposits from other banks
Jumlah aset likuid bersih	52.026.955	45.891.786	Total net liquid assets
Simpanan	135.089.481	141.843.931	Deposits
Rasio	38,51%	32,35%	Ratio

Analisis Jatuh Tempo untuk Liabilitas Keuangan

Maturity Analysis for Financial Liabilities

Tabel di bawah menunjukkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas tidak terdiskonto. Dalam tabel dibawah bank telah mengelompokan jatuh tempo untuk liabilitas keuangan berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual dari tanggal pelaporan.

The table below shows the maturity profile of the Group's financial liabilities based on the cash flows that are not discounted. In the table below the bank has grouped the maturity of financial liabilities based on the remaining contractual maturity of the reporting date.

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

Tabel di bawah menunjukkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas tidak terdiskonto.

The table below shows the maturity profile of the Group's financial liabilities based on undiscounted cash flows.

		2023							
		> 1 bulan s/d	> 3 bulan s/d	> 1 tahun s/d	> 2 tahun s/d				
Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	3 bulan/ > 1 - 3 months	12 bulan/ > 3 - 12 months	2 tahun/ > 1 - 2 years	5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total		
Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Liabilitas keuangan									
Tanpa suku bunga:									
Liabilitas segera	-	186.926	-	-	-	-	186.926	Financial liabilities Without interest:	
Simpanan	-	94.395	3.080	605	-	-	98.080	Liabilities payable immediately	
Simpanan dari bank lain	-	19.658	-	-	-	-	19.658	Deposits	
Liabilitas derivatif	-	8.437	6.086	1.909	-	-	16.432	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	566.227	534.818	540.318	-	-	1.641.363	Derivative payables	
Liabilitas lain-lain	-	193.568	78.341	-	-	203.084	212.829	Acceptance payables	
								Other liabilities	
Suku bunga variabel:									
Simpanan	-	65.395.215	-	-	-	-	65.395.215	Variable interest rate:	
Simpanan dari bank lain	-	38.967	-	-	-	-	38.967	Deposits	
								Deposits from other banks	
Suku bunga tetap:									
Simpanan	-	50.073.945	13.149.918	6.706.976	56.008	-	69.986.847	Fixed interest rate:	
Simpanan dari bank lain	-	2.359.914	5.832	2.535	-	-	2.368.281	Deposits	
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	9.772.476	-	-	-	-	9.772.476	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	-	389.516	268.273	859.222	836.441	997.025	3.350.477	Securities sold with agreements to repurchase	
Obligasi subordinasi	-	-	2.451.410	-	1.486.144	-	3.937.554	Borrowings	
Sub jumlah	-	129.099.244	16.497.758	8.111.565	2.378.593	1.200.109	212.829	Subordinated bonds	
								Sub total	
Dana syirkah temporer									
Suku bunga tetap	-	5.634.424	2.437.513	2.149.135	557	-	10.221.629	Temporary syirkah funds	
Suku bunga variabel	-	416.802	-	-	-	-	416.802	Fixed interest rate	
								Variable interest rate	
Liabilitas komitmen									
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	3.205.231	4.117.495	19.538.907	2.480.596	6.640.292	1.879.026	37.861.547	Commitment liabilities
L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	-	348.094	662.935	404.190	90	-	-	1.415.309	Unused facilities
Sub jumlah liabilitas komitmen	-	3.553.325	4.780.430	19.943.097	2.480.686	6.640.292	1.879.026	39.276.856	Outstanding irrevocable letters of credit (L/C) for export and import
Jumlah	-	138.703.795	23.715.701	30.203.797	4.859.836	7.840.401	2.091.855	207.415.385	Sub total commitment liabilities
								Total	
2022									
		> 1 bulan s/d	> 3 bulan s/d	> 1 tahun s/d	> 2 tahun s/d				
Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	3 bulan/ > 1 - 3 months	12 bulan/ > 3 - 12 months	2 tahun/ > 1 - 2 years	5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total		
Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Liabilitas keuangan									
Tanpa suku bunga:									
Liabilitas segera	-	157.874	6.613	-	-	-	164.487	Financial liabilities Without interest:	
Simpanan	-	8.871.054	1.247.450	612.158	-	-	10.730.662	Liabilities payable immediately	
Simpanan dari bank lain	-	37.634	-	-	-	-	37.634	Deposits	
Liabilitas derivatif	-	8.989	15.497	5.075	-	-	29.561	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	461.314	946.858	728.870	-	-	2.137.042	Derivative payables	
Liabilitas lain-lain	-	337.865	139.747	94.526	600	245.007	206.442	Acceptance payables	
								Other liabilities	
Suku bunga variabel:									
Simpanan	-	61.877.640	-	-	-	-	61.877.640	Variable interest rate:	
Simpanan dari bank lain	-	726.187	-	-	-	-	726.187	Deposits	
Liabilitas lain-lain	-	38.726	-	-	-	-	38.726	Deposits from other banks	
								Other liabilities	
Suku bunga tetap:									
Simpanan	-	49.486.513	14.539.903	5.726.016	647	-	69.753.079	Fixed interest rate:	
Simpanan dari bank lain	-	2.513.526	1.478	2.528	-	-	2.517.532	Deposits	
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2.409.822	-	-	-	-	2.409.822	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	-	545.941	186.019	678.307	489.570	244.358	2.144.195	Securities sold with agreements to repurchase	
Obligasi subordinasi	-	-	-	100.000	2.400.000	1.302.000	3.802.000	Borrowings	
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	Subordinated bonds	
Liabilitas lain-lain	-	116.444	1.626	4.500	-	-	122.570	Securities issued	
Sub jumlah	-	127.589.529	20.985.191	8.051.980	2.890.817	1.791.365	206.442	161.515.324	Other liabilities
								Sub total	
Liabilitas komitmen									
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	36.039.350	86.995	287.317	332.414	152.219	638.790	460.841	37.997.926	Commitment liabilities
L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	-	1.464.308	93.317	115.020	-	-	-	1.672.645	Unused facilities
Sub jumlah liabilitas komitmen	36.039.350	1.551.303	380.634	447.434	152.219	638.790	460.841	39.670.571	Outstanding irrevocable letters of credit (L/C) for export and import
								Sub total commitment liabilities	
Liabilitas kontinjensi									
Bank garansi	-	433.800	326.658	771.887	178.871	4.405	-	1.715.621	Contingent liabilities
Sub jumlah liabilitas kontinjensi	-	433.800	326.658	771.887	178.871	4.405	-	1.715.621	Bank guarantee
Jumlah	36.039.350	129.574.632	21.692.483	9.271.301	3.221.907	2.434.560	667.283	202.901.516	Sub total contingent liabilities
								Total	

Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi terjadinya kesalahan operasional dan/atau kerugian operasional baik secara langsung ataupun tidak langsung yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional sangat penting bagi Bank sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalkan terjadinya insiden kerugian finansial maupun non-finansial termasuk insiden *fraud*. Serta menghindarkan Bank dari terjadinya jenis-jenis risiko ikutan lainnya yang dipicu oleh risiko operasional. Bank yang dapat mengelola risiko operasionalnya secara efektif akan menghasilkan kualitas dari aktivitas operasional dan bisnis yang efisien sehingga mendorong tercapainya objektif Bank.

Pemaparan risiko operasional melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank, sehingga mekanisme pengendaliannya wajib untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat dan Karyawan Bank, dan khususnya yang terkait dengan risiko-risiko baru (*emerging risks*) seperti pemaparan risiko yang terkait dengan ketahanan dan keamanan siber dalam pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK No. 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan bisnis digital saat ini.

Bank Panin selalu mengerahkan upaya terbaiknya dalam menerapkan manajemen risiko operasional yang melekat pada semua aktivitas fungsional Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a) Memastikan terjaganya efektivitas dari Tata Kelola dan Fungsi Pengawasan atas praktik manajemen risiko Bank yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Kecukupan pedoman kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang lengkap, kerangka kerja/pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas (*segregation of duties*) disertai limit risiko mengenai pengelolaan risiko operasional.
- c) Menjaga konsistensi dan efektivitas dari proses dan berjalannya mekanisme Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian/Mitigasi atas pemaparan risiko operasional pada setiap Unit Kerja. Bank Panin juga telah memanfaatkan sistem informasi manajemen risiko operasional yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha.

Operational Risk Management

Operational Risk is the potential occurrence of operational errors and/or operational losses, either directly or indirectly, caused by inadequacy and/or dysfunction of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations.

The management of Operational Risk is essential to the Bank as a preventive measure to lower down the occurrence of financial and non-financial loss incidents, including fraud incidents. As well as preventing the Bank from subsequent occurrence of other risk types being triggered by the operational risks. Banks that can manage their operational risks effectively will deliver quality operations and efficient business activities, which in turn will encourage the achievement of the Bank's objectives.

Operational risk exposure is inherent to all functional activities of the Bank, so that the required control mechanisms will have to be well understood and implemented by all Bank Officials and Employees, and especially to those related to emerging risks, such as cyber security risks inherent to the adoption of information technology in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 11 /POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks and OJK Circular (SEOJK) No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks. This is also in line with the rapid growth of information technology and digital businesses nowadays.

Panin Bank consistently exerts its best efforts in effective management of operational risk exposures inherent to all functional activities of the Bank, in concurrence to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 18/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, by carrying out the following activities:

- a) Ensuring that the effective Governance and Overseeing Functions on Bank's risk management practices are carried out with by the Board of Directors and Board of Commissioners.
- b) Adequacy of operational risk management policies and standard operating procedures, comprehensive framework/clear segregation of accountability/duties and authorities as well as definitions of operational risk limits.
- c) Maintaining consistency and effectiveness of the process and practices of Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigation mechanisms for operational risk exposure in all operational Work Units. Panin Bank has been deploying an operational risk management information system which well suit to Bank's business characteristics, activities and complexity.

- d) Melakukan kajian dan pemberian opini manajemen risiko operasional pada penerbitan produk baru dengan cakupan potensi risiko yang lebih komprehensif sesuai dengan pedoman dan standarisasi mengenai tata kelola yang berdasarkan ketentuan-ketentuan regulator maupun standar industri.
- e) Melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan Standard (*Standard Measurement Approach*) sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK/2020.
- f) Melakukan pemantauan dan pencatatan insiden kesalahan operasional Bank baik yang menimbulkan kerugian finansial (*loss event management/LEM*) maupun yang hampir menimbulkan kerugian finansial (*nearmisses*), serta langkah mitigasi yang dilakukan.
- g) Secara konsisten melakukan peningkatan dari efektivitas dan efisiensi dalam memantau penerapan manajemen risiko operasional, dengan memanfaatkan Aplikasi *Operational Risk Assessor* (OPRA) dan Aplikasi *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang telah diimplementasikan pada seluruh unit kerja Kantor Pusat atau Kantor Cabang. Aktivitas pengelolaan risiko operasional yang tersedia pada Aplikasi *Operational Risk Assessor* (OPRA) diantaranya:
- *Risk and Control Self-Assessment* (R-CSA), untuk mengidentifikasi dan mengukur paparan risiko, serta memprediksi tingkat risiko operasional dalam beberapa periode ke depan berdasarkan data historis dan efektifitas kontrol yang tersedia.
 - *Loss Event Management* (LEM), yaitu proses pengelolaan Insiden yang berdampak/menimbulkan kerugian finansial bagi Bank.
 - *Nearmiss*, yaitu insiden risiko operasional yang tidak/hampir menimbulkan kerugian finansial bagi bank, namun tetap harus menjadi peringatan dini (*early warning signal*) agar tidak terulang di kemudian hari dan menjadi insiden LEM.
 - *Key Risk Indicators*, yang merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada secara risk-based dengan tujuan agar tindak lanjut dapat segera diambil sebelum terjadinya risiko.
- d) Conduct reviews and provide operational risk management opinions over inception of new products and services, with more comprehensive and in-depth coverage of potential risks in concurrence to guidelines and standardization of governance based on regulatory provisions and industry standards.
- e) Conducting Operational Risk Weighted Assets (RWA) by using the Standard Measurement Approach in concurrence to OJK Circular (SEOJK) Number 6/SEOJK/2020.
- f) Conduct monitoring and recording incidents of Bank operational errors that result in financial losses (nearmisses), as well as mitigation steps taken.
- g) Consistently improve the effectiveness and efficiency in monitoring the implementation of operational risk management, by utilizing Operational Risk Assessor (OPRA) and Risk Based Bank Rating (RBBR) applications, which have been effectively deployed in all Head Office Units and Branch Offices. Operational risk management tools featured in the Operational Risk Assessor (OPRA) include:
- Risk and Control Self-Assessment (R-CSA), to identify and measure operational risk exposure, as well as to predict the level of operational risk exposures for the next 6 months period, based on historical data baselining and the effectiveness of controls practices.
 - Loss Event Management (LEM), is the process of managing operational risk incidents that impacted/caused financial losses for the Bank.
 - Nearmisses, are operational risk incidents that do not/nearly cause financial losses for the Bank, and must still be considered as an early warning signal to prevent future occurrence or operational loss event incidents.
 - Key Risk Indicators (KRI), which are indicators previously defined together with the repetitive thresholds, as part of continuous monitoring over the state of existing risk exposures with the objective to enable early follow-up actions prior to occurrence of risk event.

- Register Risiko Teknologi Informasi, yang terdiri dari register risiko yang berbasis proses dan aset, serta dapat memberikan informasi risiko TI sehingga *Risk Owner/Risk Taking Units* maupun pihak terkait lainnya dapat melakukan pemantauan maupun tindakan mitigasi agar sistem TI tetap terjaga dan mendukung operasional, bisnis dan layanan nasabah secara berkelanjutan.
- h) Terus menyempurnakan program kesadaran akan risiko dengan *hashtag #PeduliKeamanan*, untuk target internal (karyawan Bank) maupun eksternal (Nasabah dan Konsumen), yang dilakukan secara sistematis dan terukur efektivitasnya.
- i) Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas dari pengelolaan risiko terkait Teknologi Informasi dan Digital melalui pembentukan fungsi-fungsi yang mengelola aspek-aspek keamanan dari Layanan Digital diantaranya operasionalisasi dari *CISO Office* yang menjalankan fungsi *CISO – Chief Information Security Officers*, *DPO – Data Protection Officer*, dan eskalasi *CSIRT – Cyber Security Incident Response Team*; serta operasionalisasi dari *CSOC – Cyber Security Operation Center* sebagai infrastruktur pendukung keamanan siber Bank.
- Information Technology Risk Register, which consists of process-based and asset-based risk registers, and can provide the mapping of IT risk information, so that Risk Owners/Risk Taking Units and other related parties can carry out monitoring and mitigation actions, in ensuring continuous IT services to support operations, business and customer service.
- h) Continue to improve the Risk Awareness Program with the *#PeduliKeamanan* hashtag, targeted for internal (Bank employees) and external (Customers and Consumers), and carried out systematically with defined mechanisms to measure its effectiveness.
- i) Improving the coverage and quality of risk management over risks related to IT and Digital through effective operational of functions that manage security aspects of Digital Services consisting of *CISO Office* which carries out the functions of *CISO - Chief Information Security Officers*, *DPO - Data Protection Officer*, and escalation of *CSIRT - Cyber Security Incident Response Team*; as well as the operationalization of *CSOC – Cyber Security Operation Center* as part of the Bank's cyber security supporting infrastructure.

Sebagai sistem pelaporan dan dasar pengawasan atas Proses Pengelolaan Risiko Operasional Bank, maka secara konsisten disampaikan Laporan Profil Risiko Operasional dan hasil Pemantauan *Risk Appetite /Risk Tolerance* kepada Komite Manajemen Risiko (Direksi) dan Komite Pemantau Risiko (Dewan Komisaris), untuk selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) kepada Regulator. Selain itu, dalam rangka pengelolaan risiko operasional terdapat laporan pengelolaan risiko operasional yang disampaikan kepada manajemen sebagai sarana monitoring dan bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan prioritas.

Manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang ditimbulkan akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan kelengkapan pengikatan dokumen yang tidak memadai. Seiring dengan perkembangan bisnis dan perluasan cakupan kerjasama / ekosistem dengan pihak ketiga, maka pengelolaan risiko hukum menjadi penting.

As for reporting system and basis for supervisory over Bank's Operational Risk Management practices, the Bank is providing Operational Risk Profile Reports and Risk Appetite/Risk Tolerance Monitoring being consistently submitted to the Risk Management Committee (Board of Directors) and Risk Monitoring Committee (Board of Commissioners), and then subsequently reported to the Regulators (OJK/Bank Indonesia) in the form of Risk Profile Report and Bank's Soundness Level Report (Risk Based Bank Rating). Additionally, in the context of sound operational risk management practices, more detailed ad-hoc operational risk management reports are also provided to Bank's Management as a means of monitoring and consideration for taking priority actions.

Legal Risk Management

Legal risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in judicial aspects caused by the absence of supporting laws and regulations or weaknesses in the agreement such as not fulfilling the conditions for the validity of the contract and inadequate completeness of binding documents. As business develops and the scope of cooperation/ecosystem with third parties expands, legal risk management becomes important.

Untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, maka kerjasama dengan pihak ketiga wajib dilandasi perikatan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tertulis dengan cakupan klausula yang lengkap yang disepakati dan mengikat bagi para pihak. Selain itu Bank harus melakukan kaji ulang dan mengkinikan PKS yang telah dibuat sebelumnya dengan memasukan klausula-klausula baru yang belum tercakup, seperti klausula Pelindungan Data Pribadi (sesuai UU No.7 tahun 2022), Pelindungan Konsumen (UU No.8 tahun 1999) dan regulasi turunannya. Untuk memastikan kelengkapan klausula dalam PKS Bank dapat meminta kajian dan opini hukum kepada Bagian/Departemen hukum Bank.

Sebagai dasar bagi pengawasan atas proses Pengelolaan Risiko Hukum, maka Bank melaksanakan penilaian Profil Risiko Hukum secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan Regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Hukum secara *bankwide*.

Manajemen Risiko Strategik

Risiko strategik dapat terjadi akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan operasional dan bisnis Bank dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal serta perkembangan global yang dapat mengganggu tujuan objektif Bank.

Bank senantiasa melakukan analisis kesesuaian bisnis internal dengan lingkungan eksternal serta menganalisa realisasi pencapaian target rencana bisnis bank yang telah ditetapkan secara periodik, melakukan pengukuran realisasi pencapaian target aset, aset produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk baru, jaringan kantor dan lainnya dibanding proyeksi yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank.

Sebagai dasar bagi pengawasan atas proses Pengelolaan Risiko Strategik, maka Bank melaksanakan penilaian Profil Risiko Strategik secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Strategik secara *bankwide*.

To prevent disputes from occurring in the future, cooperation with third parties must be based on a comprehensive contractual agreement (PKS-Perjanjian Kerjasama) with a complete scope of clauses that are agreed upon and binding on the parties. In addition, the Bank must review and update agreements that have been previously created by including new clauses that yet to be covered, such as the Personal Data Protection clause (according to Law No. 7 of 2022), Consumer Protection (Law No. 8 of 1999) and derivative regulations. To ensure completeness of the clauses in the PKS, all working Units in the Bank might request consultation and having legal reviews and opinions from the Bank's legal section/department.

As the basis for supervision over Legal Risk Management practices, the Bank carries out quarterly Legal Risk Profile assessments on several risk indicators / risk parameters in accordance to applicable Regulatory provisions so as to obtain an overview of the potential level of bankwide Legal Risk state.

Strategic Risk Management

Strategic risk can occur due to weaknesses in the Bank's decision making processes and/or while implementing strategic decisions as well as failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk management is important to maintain the sustainability of the Bank's operations and businesses in facing dynamics of internal and external business environmental conditions as well as global developments which can disrupt the Bank's objectives.

Bank consistently carries out analysis over the suitability of its internal business directions with the external environment, as well as periodically analyzing the realization of the achievement of bank business plan/ targets which have been previously set, measuring the realization of the achievement of targets for assets, productive assets, sources of funds, capital, profit before tax, new products, office networks and others, and compared them to the projections stated in the Bank's Business Plan.

As a basis for supervision over Strategic Risk Management practices, the Bank carries out quarterly Strategic Risk Profile assessments on several risk indicator/ parameters in accordance with applicable regulatory provisions so as to obtain an overview of the potential level of Strategic Risk exposures on a bankwide basis.

Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, baik yang disebabkan operasional maupun pelanggaran etika bisnis. Bank senantiasa meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi dan redefinisi/pembagian dari masing-masing fungsi yang terkait dengan pengelolaan keluhan dan perlindungan nasabah, yaitu Satuan Kerja *Customer Service*, *Customer Complaint Handling*, *Call Center*, *Helpdesk*, *Corporate Secretary*, dan unit kerja terkait lainnya.

Sebagai dasar bagi pengawasan atas proses Pengelolaan Risiko Reputasi, Bank melaksanakan penilaian Profil Risiko Reputasi secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Reputasi secara *bankwide*.

Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan operasional dan bisnisnya. Bank melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap teguran/*reminding letter*/sanksi denda dari regulator serta menindaklanjuti semua temuan Audit dari eksternal/regulator sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bank menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan pemantauan atas sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari regulator.

Sebagai dasar bagi pengawasan atas proses Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Bank melaksanakan penilaian Profil Risiko Kepatuhan secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Kepatuhan secara *bankwide*.

Reputation Risk Management

Reputation risk is the risk resulted from the losing of stakeholder's trust due to negative perceptions over Bank, whether due to operational defect or violations of business ethics. The Bank continues to improve service quality through coordination and redefinition/clear division of functions related to complaint management and customer protection ie. Customer Service, Customer Complaint Handling, Call Center, Helpdesk, Corporate Secretary, and other related Working Units.

As a basis for overseeing over Reputation Risk Management practices, the Bank carries out quarterly Reputation Risk Profile assessments on several risk indicator/ parameters in accordance to applicable regulatory provisions to obtain an overview of the potential level of bankwide Reputation Risk.

Compliance Risk Management

Compliance risk is the risk resulted from the Bank of not complying to and/or not implementing applicable laws and regulations during its operational and business activities. Bank continuously monitors and timely make corrections over regulatory reminders/reprimands/fine/ sanctions imposed by Regulators and follows up on all audit findings from external/regulators according to the specified time. The bank submits a report on the results of the follow-up Audit Result Report (LHP), monitors the fines and penalties imposed on the bank by the regulator.

As a basis for oversight monitoring over Compliance Risk Management practices, the Bank carries out quarterly Compliance Risk Profile assessments on several risk indicator parameters in accordance to applicable regulatory provisions so as to obtain an overview of the potential level of Bank's Compliance Risk exposures.

**Analisis Perbedaan Jatuh Tempo Aset dan
Liabilitas Keuangan**

Tabel dibawah ini menyajikan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak dan asumsi perilaku (*behavioral assumptions*):

Maturity Mismatch Analysis

The table below showed the maturity gap analysis of the Group on December 31, 2023 and 2022 arranged by remaining days until maturity date and behavioral assumptions:

		2023						
Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total	
Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta Rp Million	
Aset								
Tanpa suku bunga								
Kas	-	1.297.547	-	-	-	-	1.297.547	
Giro pada Bank Indonesia	-	7.870.438	-	-	-	-	7.870.438	
Giro pada bank lain	-	2	-	-	-	-	2	
Tagihan derivatif	-	10.929	7.385	2.123	-	-	20.437	
Kredit	(728)	322	149	1.271	1.862	718	3.594	
Tagihan akseptasi	(7.668)	565.909	533.993	537.885	-	-	1.630.129	
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	766.401	766.401	
Aset lain-lain - bersih	(69.216)	652.327	594.470	377.410	-	5.936	1.560.927	
Suku bunga variabel								
Giro pada bank lain	(35)	1.297.739	-	-	-	-	1.297.704	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	11	-	-	-	-	11	
Kredit	(7.606.250)	5.514.222	9.495.770	27.622.848	7.303.828	30.561.718	26.998.908	
Suku bunga tetap								
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(2.688)	5.576.415	461.910	-	-	-	6.035.637	
Elek-elek	(39)	101	2.287.375	4.968.715	3.127.024	13.378.932	15.248.526	
Kredit	(595.890)	456.373	437.912	3.564.157	2.194.449	9.596.576	17.154.429	
Elek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(329)	4.827.120	-	-	-	-	4.826.791	
Tagihan anjak piutang	(30.951)	75.000	-	-	-	-	44.049	
Piutang jual dan sewa-balik	(60.186)	18.037	11.254	43.122	17.590	3.331	33.148	
Piutang sewa pembiayaan	(953)	31.097	59.690	213.846	169.841	54.959	528.480	
Piutang pembiayaan korsumen	(185.488)	347.200	491.422	2.319.102	2.534.067	2.920.217	8.429.005	
Aset lain-lain - bersih	-	866	1.739	3.940	1.120	4.353	13.978	
Jumlah Aset	(8.560.411)	28.541.655	14.383.069	39.277.009	15.727.191	56.520.804	206.067.962	
Liabilitas								
Tanpa suku bunga								
Liabilitas segera	-	186.926	-	-	-	-	186.926	
Simpanan	-	94.395	3.080	605	-	-	98.080	
Simpanan dari bank lain	-	23.204	-	-	-	-	23.204	
Liabilitas derivatif	-	8.437	6.086	1.909	-	-	16.432	
Liabilitas akseptasi	-	566.227	534.818	540.318	-	-	1.641.363	
Liabilitas lain-lain	-	193.568	78.341	-	-	203.084	607.822	
Suku bunga variabel								
Simpanan	-	6.821.937	3.683.363	54.855.351	5.842	6.748	65.373.904	
Simpanan dari bank lain	-	1.394.538	-	-	-	-	1.394.538	
Suku bunga tetap								
Simpanan	-	49.991.837	13.053.275	6.518.881	53.504	-	69.617.497	
Simpanan dari bank lain	-	994.706	5.780	2.500	-	-	1.002.986	
Elek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	9.761.945	-	-	-	-	9.761.945	
Pinjaman yang diterima	-	374.675	234.805	724.766	675.327	793.800	2.803.373	
Obligasi subordinasi	-	-	2.399.514	-	1.299.762	-	3.699.276	
Jumlah Liabilitas	-	70.412.395	19.999.062	62.644.330	2.034.435	1.003.632	156.307.346	
Suku bunga variabel								
Dana syirkah temporer	-	416.791	-	-	-	-	416.791	
Suku bunga tetap								
Dana syirkah temporer	-	5.975.274	2.063.315	2.093.150	-	-	10.131.739	
Jumlah Dana Syirkah Temporer	-	6.392.065	2.063.315	2.093.150	-	-	10.548.530	
Selisih	(8.560.411)	(48.262.805)	(7.679.308)	(25.460.471)	13.692.756	55.517.172	39.212.086	

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Continued)**

	2022							Jumlah/ Total	Rp Juta Rp Million
	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years			
	Lain-lain/ Others	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset								Asset	
Tanpa suku bunga								Without interest	
Kas	-	1.704.409	-	-	-	-	1.704.409	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	7.204.803	-	-	-	-	7.204.803	Demand deposits with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	(43)	881.237	-	-	-	-	881.194	Demand deposits with other bank	
Tagihan derivatif	-	17.637	10.802	946	-	-	29.385	Derivative receivables	
Kredit	(783)	681	223	1.874	1.479	1.376	4.850	Loans	
Tagihan akseptasi	(6.652)	461.155	944.854	726.492	-	-	2.125.849	Acceptance receivables	
Penyetoran dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	79.1410	791.410	Investments in share of stock	
Aset lain-lain - bersih	(61.689)	600.282	559.882	-	358.945	-	1.462.592	Other assets - net	
Suku bunga variabel								Variable interest rate	
Giro pada bank lain	(7)	370.884	-	-	-	-	370.877	Demand deposits with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	11	-	-	-	-	11	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	-	505.034	-	-	-	-	505.034	Securities	
Kredit	(6.337.483)	7.099.013	9.533.072	27.877.272	8.742.021	31.947.677	26.692.512	Loans	
Suku bunga tetap:								Fixed interest rate	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1.633)	6.525.100	667.025	-	-	-	7.190.492	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	(53)	420.314	3.797	218.116	2.974.057	15.841.147	13.436.006	Securities	
Kredit	(270.451)	11.058	24.877	334.358	1.088.448	6.212.574	10.309.784	Loans	
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	10.642.145	-	-	-	-	-	Securities purchased with agreements to resell	
Tagihan anjakpiutang	(49.580)	100.000	-	-	-	-	50.420	Factoring receivable	
Piutang jual dan sewa-balik	(23.591)	634	1.290	17.869	46.266	12.719	55.187	Sales and lease-back receivables	
Piutang sewa pembiayaan	(9.727)	22.224	25.096	108.603	92.977	-	32.968	Finance leases receivables	
Piutang pembiayaan konsumen	(118.977)	353.431	439.752	1.970.174	1.985.465	2.165.295	310	Consumer financing receivables	
Aset lain-lain - bersih	-	504	972	3.932	4.495	6.188	-	Other assets - net	
Jumlah Aset	(6.680.669)	36.920.556	12.211.642	31.259.636	15.294.153	56.219.944	51.235.194	196.260.456	Total Asset
Liabilitas								Liabilities	
Tanpa suku bunga:								Without interest	
Liabilitas segera	-	169.964	-	-	-	-	-	169.964	Liabilities payable immediately
Simpanan	-	88.394	3.228	605	-	-	-	92.227	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	20.694	-	-	-	-	-	20.694	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	18.762	9.968	831	-	-	-	29.561	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	461.314	946.858	728.870	-	-	-	2.137.042	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	153.828	92.645	-	-	84.067	368.456	698.996	Other liabilities
Suku bunga variabel:								Variable interest rate	
Simpanan	-	6.921.356	4.004.155	52.301.428	4.215	2.355	576	63.234.085	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	1.306	-	-	-	-	-	1.306	Deposits from other banks
Suku bunga tetap:								Fixed interest rate	
Simpanan	-	50.135.385	13.176.800	6.000.527	44.451	-	-	69.357.163	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.522.634	969	2.500	-	-	-	2.526.103	Deposits from other banks
Jumlah Liabilitas	-	60.493.637	18.234.623	59.034.761	48.666	86.422	369.032	138.267.141	Total Liabilities
Suku bunga variabel								Variable interest rate	
Dana syirkah temporer	-	282.278	-	-	-	-	-	282.278	Temporary syirkah funds
Suku bunga tetap								Fixed interest rate	
Dana syirkah temporer	-	7.735.061	1.242.251	611.553	-	-	-	9.588.865	Temporary syirkah funds
Jumlah Dana Syirkah Temporer	-	8.017.339	1.242.251	611.553	-	-	-	9.871.143	
Selisih	(6.680.669)	(31.590.420)	(7.265.232)	(28.386.678)	15.245.487	56.133.522	50.866.162	48.122.172	Difference

58. KONTINJENSI, IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

Bank

- a. Bank mengadakan Perjanjian Induk *Bancassurance* dengan PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Juni 2016 mengenai persetujuan Bank untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menjelaskan produk-produk AMAG kepada para nasabah Bank di Indonesia berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan nilai fasilitas awal adalah sebesar Rp 601.976 juta. Salah satu bentuk promosi produk AMAG adalah dalam bentuk asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai dengan fasilitas KPM di seluruh kantor cabang dan perwakilan yang menjadi wewenang Bank, dengan syarat dan prosedur penutupan objek pertanggungjawaban ditentukan oleh AMAG.

58. CONTINGENCIES, COMMITMENTS AND OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

Bank

- a. The Bank entered into Master Bancassurance Agreement with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) based on joint agreement dated June 27, 2016 regarding the Bank consent to promote, introduce and explain AMAG's products to Bank's customers in Indonesia based on agreement with upfront facilitation fee amounting to Rp 601,976 million. Among others, the promotion of AMAG's product is in motor vehicle insurance funded by KPM facility in all Bank's branches and Bank's authorized representative with terms and procedures of coverage determine by AMAG.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank mengadakan perubahan atas perjanjian kerjasama *Bancassurance*, dimana pembayaran atas komisi dilakukan setiap tahun dengan jangka waktu perjanjian 20 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2020.

Magna Sehat

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Magna Sehat dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2018.

Pada tanggal 8 November 2019 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Magna Sehat, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan yang mengatur proses pemasaran kepada Nasabah Individu.

Asuransi Kecelakaan Diri

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Kecelakaan Diri dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2019.

Pada tanggal 1 Agustus 2019 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Kecelakaan Diri, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan yang mengatur proses penutupan polis kepada nasabah KEP dan menambahkan ketentuan pada ayat 1 pasal 17.

Pada tanggal 7 Juni 2021 Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Kecelakaan Diri, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah fitur produk, proses penutupan polis dan proses klaim.

Magna Property

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Non Kendaraan Bermotor dengan PT Panin Insurance berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2011.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Bank mengadakan perubahan ketiga atas perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Non Kendaraan Bermotor, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah ketentuan referensi produk.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Bank mengadakan perubahan keempat atas perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Non Kendaraan Bermotor, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah ketentuan perluasan penawaran asuransi.

On December 31, 2020 the Bank has amend the Bancassurance agreement, whereby the payment of commission is made annually with 20 years tenor start from July 1, 2020.

Magna Sehat

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product reference marketing of Magna Sehat with AMAG based on agreement dated on November 1, 2018.

On November 8, 2019 the Bank has its first amendment of Bancassurance Agreement Magna Sehat, whereby both parties agree to to the additional of terms regarding marketing process to individual customers.

Self Accident Insurance

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product reference marketing Self Accident Insurance with AMAG based on agreement dated on April 9, 2019.

On August 1, 2019 the Bank has its first amendment of joint agreement of Bancassurance Product Self Accident Insurance, whereby both parties agreed to add some policies regarding the process of the closure of insurance policy of KEP customers and add some policies to article 17 verse 1.

On June 7, 2021 The Bank enter into second amendment of joint agreement of Bancassurance Product Self Accident Insurance, whereby both parties agreed to modified product feature, policy closing process and claim process.

Magna Property

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product marketing Non-Vehicle Insurance with PT Panin Insurance based on Joint Agreement dated June 21, 2011.

On October 17, 2017 the Bank has the third amendment of the joint agreement of Bancassurance Reference Product, Non-Vehicle Insurance, whereby the both parties has agreed to add the policies regarding the product reference.

On March 29, 2019 the Bank has its fourth amendment of the agreement of Bancassurance product reference marketing of Non-Vehicle Insurance, where both parties agree to the additional of terms regarding insurance offerings.

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran distribusi produk Bancassurance Magna Properti dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2023.

Magna Secure

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Magna Secure dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017.

Pada tanggal 15 November 2019, Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Magna Secure, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan perluasan penawaran Asuransi.

Magna Mobil

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Magna Mobil dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Maret 2022.

Asuransi Kecelakaan Diri

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran distribusi produk Bancassurance Asuransi Kecelakaan Diri dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2023.

- b. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Panin Dana Pasti dengan PT Panin Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.254-A/Dir/006/06.11, No. 254-B/Dir/006/06.11 dan No. 254-C/Dir/006/06.11 tanggal 22 Juni 2011.

Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen pemasaran dengan memperoleh kompensasi berupa komisi, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pada tanggal 20 Mei 2013, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah mekanisme penarikan nilai tunai Produk Asuransi Panin Dana Pasti. Pada tanggal 4 November 2013, PT Panin Life berubah nama menjadi PT Panin Dai-ichi Life.

Pada tanggal 26 September 2016, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan perubahan komisi yang diterima Bank menjadi sebesar 0,33%.

Pada tanggal 22 Juni 2021, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang waktu perjanjian selama 5 tahun sampai tanggal 21 Juni 2026.

The Bank enters the agreement of product marketing distribution of Bancassurance Magna Properti with AMAG based on the agreement dated November 1, 2023.

Magna Secure

The Bank enters the agreement of product reference marketing of Bancassurance Magna Secure with AMAG based on the agreement dated November 20, 2017.

On November 15, 2019 the Bank has its second amendment of the agreement of Bancassurance Product Magna Secure Insurance, whereby both parties agree to the additional of terms regarding Insurance offerings.

Magna Mobil

The Bank enters the agreement of product reference marketing of Bancassurance Magna Mobil with AMAG based on the agreement dated March 16, 2022.

Self Accident Insurance

The Bank enters the agreement of product marketing distribution of Bancassurance Self Accident Insurance with AMAG based on the agreement dated November 1, 2023.

- b. The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance with PT Panin Life based on Agreement Letter No. 254-A/Dir/006/06.11, No. 254-B/Dir/006/06.11 and No. 254-C/Dir/006/06.11 dated June 22, 2011.

Based on the agreement, the Bank act as marketing agent and obtains compensation such as commission, for 5 years and can be renewed.

On May 20, 2013, Bank amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to change the mechanism of the withdrawal of value cash Produk Asuransi Panin Dana Pasti. On November 4, 2013, PT Panin Life changed its name into PT Panin Dai-ichi Life.

On September 26, 2016 the Bank has amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to extend the period of the agreement up to June 21, 2021 and the changes of the commision earned by Bank to 0.33%.

On June 22, 2021, Bank has entered into addendum of joint agreement, whereas both parties are willing to extend tenor agreement for 5 years until June 21, 2026.

Pada tanggal 16 Desember 2022 ditandatangani Pengakhiran Perjanjian atas Perjanjian Kerjasama Distribusi (*Bancassurance*) Produk Panin Dana Pasti. Pengakhiran kerjasama dimaksud adalah untuk penjualan baru, sementara polis-polis yang sedang aktif (*existing*) akan tetap dikelola oleh PT Panin Dai-ichi Life sesuai syarat umum dan ketentuan yang berlaku.

c. Panin Premier Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Panin Premier Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Juli 2013.

Pada tanggal 6 Agustus 2019 Bank mengadakan perubahan kedua belas atas Perjanjian Produk *Bancassurance*, di mana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai kepatuhan dan data nasabah dan spesifikasi produk.

Pada tanggal 18 Mei 2020 Bank mengadakan perubahan ketiga belas atas Perjanjian Produk *Bancassurance*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah spesifikasi produk Panin Premier Protection.

Pada tanggal 16 Juni 2023 Bank telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank (*Bancassurance*) Produk Panin Premier Protection.

Critical Illness Infinite Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran distribusi produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2016.

Pada tanggal 26 Oktober 2016 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah seluruh *Standard Operating Procedure* dan menambahkan pasal mengenai *twisting/churning*.

Pada tanggal 5 Februari 2021 Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai jangka waktu perjanjian.

Pada tanggal 2 Februari 2022 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai jangka waktu perjanjian.

On December 16, 2022, the Termination Agreement was signed for the Distribution Joint Agreement (*Bancassurance*) for Panin Fixed Fund Products. Termination of the intended collaboration is for new sales, while existing policies will continue to be managed by PT Panin Dai-ichi Life in accordance with the general terms and conditions that apply.

c. Panin Premier Protection

The Bank entered into a joint agreement of *Bancassurance* product reference marketing with PT Panin Dai-ichi Life based on Agreement Letter dated July 23, 2013.

On August 6, 2019 the Bank has the twelfth amendment of Agreement of *Bancassurance*, whereby the both parties has agreed to amend the article about compliance and customer data and product specification.

On May 18, 2020 the Bank has its thirteenth amendment of the *bancassurance* agreement, whereby both parties agree to change the product specification of Panin Premier Protection.

On June 16, 2023 the Bank has terminated the Non-Bank Product Reference Joint Agreement (*Bancassurance*) for Panin Premier Protection Products.

Critical Illness Infinite Protection

The Bank has entered into joint agreement of *Bancassurance Marketing Product Distribution, Critical Illness Infinite Protection* with PT Panin Dai-ichi Life based on joint agreement dated February 15, 2016.

On October 26, 2016 the Bank has its first amendment of into joint agreement of *Bancassurance Marketing Product, Critical Illness Infinite Protection*, whereby both parties agreed to amend all *Standard Operating Procedures* and add the article about *twisting/churning*.

On February 5, 2021, Bank has its second amendment of *Bancassurance Marketing Product, Critical Illness Infinite Protection*, whereby both parties agreed to amend the article about tenor of the agreement.

On February 2, 2022, Bank has entered into third amendment of *Bancassurance Product Agreement, Critical Illness Infinite Protection*, whereby both parties agreed to amend the article about tenor of the agreement.

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022.

Pada tanggal 16 Juni 2023 Bank telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distribusi (*Bancassurance*) Produk *Critical Illness Infinite Protection*.

Solusi Garda Asuransi Prima

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance Solusi Garda Asuransi Prima* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2015.

Pada tanggal 1 November 2017 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance Solusi Garda Asuransi Prima*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah lampiran spesifikasi produk.

Pada tanggal 20 November 2020 Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Produk *Bancassurance Solusi Garda Asuransi Prima*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai jangka waktu perjanjian.

Premier Maxima Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance Premier Maxima Protection* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Mei 2018.

Pada tanggal 18 Mei 2020 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Produk *Bancassurance Premier Maxima Protection*, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah spesifikasi produk *Premier Maxima Protection*.

Pada tanggal 16 Juni 2023 Bank telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank (*Bancassurance*) Produk *Premier Maxima Protection*.

Asuransi Jiwa Kredit

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance Asuransi Jiwa Kredit* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.275/Dir/006.12.21 tanggal 10 Desember 2021.

The Bank has entered into joint agreement of *Bancassurance Marketing Reference Product, Critical Illness Infinite Protection* with PT Panin Dai-ichi Life, based on Joint Agreement dated March 23, 2022.

On June 16, 2023 the Bank has terminated the *Distribution Joint Agreement (Bancassurance)* for *Critical Illness Infinite Protection* Products.

Solusi Garda Asuransi Prima

The Bank has entered into joint agreement of *Bancassurance Marketing Product Reference, Solusi Garda Asuransi Prima* with PT Panin Dai-ichi Life based on joint agreement dated November 20, 2015.

On November 1, 2017 the Bank has its first amendment of the agreement of *Bancassurance Marketing Product, Solusi Garda Asuransi Prima*, whereby both parties has agreed to change the product specification appendix.

On November 20, 2020, Bank has its second amendment of the agreement of *Bancassurance Marketing Product, Solusi Garda Asuransi Prima*, whereby both parties has agreed to change tenor of the agreement.

Premier Maxima Protection

The Bank has entered into joint agreement of *Bancassurance Marketing Product Reference, Premier Maxima Protection* with PT Panin Dai-ichi Life based on agreement dated May 21, 2018.

On May 18, 2020 Bank has its third amendment to *Bancassurance product agreement of Premier Maxima Protection* whereby both parties agreed to have additional product specification on *Premier Maxima Protection*.

On June 16, 2023 the Bank has terminated the *Reference Cooperation Agreement Not in the Context of Bank Products (Bancassurance)* for *Premier Maxima Protection* Products.

Credit Life Insurance

The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the reference product of *Credit Life Insurance Bancassurance* with PT Panin Dai-ichi Life based on the *Cooperation Agreement No. 275/Dir/006.12.21* dated December 10, 2021.

Pada tanggal 3 Januari 2022 Bank mengadakan perubahan pertama atas perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Jiwa Kredit dengan PT Panin Dai-ichi Life, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai definisi, cara kerjasama pemasaran, hak dan kewajiban para pihak dan materi pemasaran.

Smart Term Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Smart Term Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 23 Maret 2022.

Panin Global Health Plan

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Panin Global Health Plan dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 April 2022.

Panin Smart Secure Wealth

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Panin Smart Secure Wealth dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 September 2022.

Panin Wholelife Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama referensi produk *Bancassurance* Panin Wholelife Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Maret 2023.

- d. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.137/DIR-ACI/PKS/II/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- e. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Avrist Mortgage Protector dengan PT Avrist Assurance berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.111/LEG-AVR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.
- f. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan IV dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 014/BTIM-BANKPANIN/0808 tanggal 22 Agustus 2008.

Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen penjual dengan memperoleh kompensasi berupa imbal jasa.

On January 3, 2022 Bank has its first ammendment of the joint agreement for the marketing reference of bancassurance product, CreditLife Insurance with PT Panin Dai-ichi Life, whereby both parties agreed to ammend the articles about definition, marketing joint procedures, rights and obligations of both parties and marketing substance.

Smart Term Protection

The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the reference of bancassurance product, Smart Term Protection with PT Panin Dai-ichi Life based on the joint agreement dated March 23, 2022.

Panin Global Health Plan

The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the reference of bancassurance product, Panin Global Health Plan with PT Panin Dai-ichi Life based on the joint agreement dated April 5, 2022.

Panin Smart Secure Wealth

The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the reference of bancassurance product Panin Smart Secure Wealth with PT Panin Dai-ichi Life based on the joint agreement dated September 15, 2022.

Panin Wholelife Protection

The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the reference of bancassurance product Panin Wholelife Protection with PT Panin Dai-ichi Life based on the joint agreement dated March 6, 2023.

- d. The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the Bancassurance Citra Jiwa Proteksi Ultima Credit with PT Asuransi Ciputra Indonesia based on Cooperation Agreement No.137/DIR-ACI/PKS/VII/2021 dated July 15, 2021.
- e. The Bank entered into a marketing cooperation agreement for the Bancassurance Avrist Mortgage Protector product with PT Avrist Assurance based on the Cooperation Agreement No.111/LEG-AVR/XII/2021 dated December 10, 2021.
- f. The Bank entered into a joint agreement in marketing Bahana Reksa Panin Terproteksi III and IV with PT Bahana TCW Investment Management based of Agreement Letter No.014/BTIM-BANKPANIN/0808 dated August 22, 2008.

Based on the agreement, the Bank acts as the sole sales agent and obtain compensation in the form of service fees.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah daftar reksadana yang ditawarkan menjadi Bahana Reksadana Panin Terproteksi VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV dan AXVIII.

Pada tanggal 20 Juli 2012, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama pemasaran dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Reksadana Bahana

Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Oktober 2014 dalam memasarkan Reksa Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas Prima.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian.

Pada tanggal 18 November 2020 Bank mengadakan perubahan keempat atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat dan setuju untuk memperbarui rincian informasi produk Reksa Dana Ganesha Abadi menjadi Reksa Dana Ganesha Abadi Kelas G serta menambahkan Fitur baru dengan nama produk Reksa Dana Ganesha Abadi Kelas D.

- g. Bank mengadakan perjanjian kerjasama penjualan efek Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 132 dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan kerjasama No. 014/BTIM-PANIN/X/14 tanggal 28 Oktober 2014.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum I No. 026/BTIM-PANIN/X/16.

Pada tanggal 9 Februari 2017, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum II No. 004/BTIM-PANIN/II/17 Reksa Dana.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum III No. 038/BTIM-PANIN/X/19.

Pada tanggal 18 November 2020, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum IV No. 045/BTIM-PANIN/XI/2020.

On August 25, 2011 the Bank has amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to change the list of mutual funds offered to become Bahana Reksadana Panin Terproteksi VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV and AXVIII.

On July 20, 2012 the Bank made changes on the joint agreement in marketing, wherein both sides agreed to change the period of the agreement for 5 years and can be renewed.

Bahana Mutual Funds

The Bank has entered into joint agreement with PT Bahana TCW Investment Management based on the agreement dated October 28, 2014 in marketing Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Mutual Funds.

On October 17, 2019 the Bank has its third amendment of the agreement, whereby both parties agreed to extend the period of the agreement.

On November 18, 2020 the Bank has its fourth amendment on the agreement whereby both parties agreed to renew detail information of mutual fund product of Reksa Dana Ganesha Abadi and to name the product as Reksa Dana Ganesha Abadi Class G also to add new feature and name the product Reksa Dana Ganesha Abadi Class D.

- g. The Bank entered into a marketing agreement of the sale of Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 132 with PT Bahana TCW Investment Management based on Agreement No. 014/BTIM-PANIN/X/14 dated October 28, 2014.

On October 3, 2016 the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum I No. 026/BTIM-PANIN/X/16.

On February 9, 2017, the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum II No. 004/BTIM-PANIN/II/17 Reksa Dana.

On October 17, 2019, the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum III No. 038/BTIM-PANIN/X/19.

On November 18, 2020, the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum IV No. 045/BTIM-PANIN/XI/2020.

- h. Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Panin Asset Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 September 2014 dalam memasarkan Reksa Panin Dana Utama Plus II, Reksa Dana Panin Dana Prioritas, Reksa Dana Panin Dana Unggulan dan Reksa Dana Panin Dana Prima.

Pada tanggal 17 Juni 2015 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Kerjasama, di mana kedua pihak sepakat untuk mengubah biaya Administrasi yang dibayarkan kepada Agen Penjual sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian mengenai Imbal Jasa menjadi Komisi atas *Management Fee*.

Pada tanggal 20 Mei 2019 Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Kerjasama di mana kedua pihak sepakat untuk mengubah Lampiran A Pejabat Berwenang, Lampiran B Perjanjian Daftar Reksa Dana Untuk Penjualan Non-Eksklusif dan Lampiran C Perjanjian Imbal Jasa.

Pada tanggal 13 September 2019 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah definisi dan pengertian, kewajiban dan tanggung jawab Agen Penjual dan jangka waktu perjanjian.

- i. Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dimana Bank bertindak sebagai Mitra Distribusi Pemerintah dalam rangka penjualan Surat Berharga Ritel Pemerintah di Pasar Perdana Domestik. Perjanjian kerjasama berlaku surut dari tanggal 1 Januari – 31 Desember 2023.
- j. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank mengalami beberapa tuntutan dan perkara hukum berkaitan dengan kegiatan usahanya, salah satunya gugatan yang diajukan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk, namun telah diselesaikan pada tanggal 14 September 2022, dimana majelis hakim telah mengeluarkan Surat Penetapan No. 628/PDT/2022/PT.DKI mengenai pencabutan perkara banding dari PT Berlian Laju Tanker Tbk.

CFI

- a. CFI mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan Bank, pihak berelasi, berdasarkan akta No. 32 tanggal 22 November 2017 yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank akan mendanai piutang-piutang yang dimiliki CFI terhadap pihak-pihak ketiga yang telah membeli mobil baik baru maupun bekas yang dibiayai oleh CFI. Tujuan dari kerjasama/fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan pihak ketiga (konsumen) secara porsi pembiayaan bersama adalah CFI sebesar 10% dari nilai pembiayaan bersama dan Bank sebesar 90% dari nilai pembiayaan bersama.

- h. The Bank entered into a joint agreement with PT Panin Asset Management based on the agreement dated September 15, 2014 in marketing Reksa Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Prioritas Mutual Funds, Panin Dana Unggulan Mutual Funds, Panin Dana Prima Mutual Funds.

On June 17, 2015 the Bank made the first amendment to the Cooperation Agreement, in which both parties agreed to change the Administration fee paid to the Selling Agent as stated in Appendix C of the Agreement on Fees for Services to a Commission on Management Fee.

On May 20, 2019 the Bank made a second amendment to the Cooperation Agreement in which both parties agreed to amend Appendix A to the Authorized Officer, Appendix B to the Mutual Fund List Agreement for Non-Exclusive Sales and Appendix C to the Fee Agreement.

On September 13, 2019 the Bank has third amendment of the agreement, whereby both parties agreed to change the definition and meaning, liabilities and responsibility of Selling Agent and the term of agreement.

- i. The Bank entered into a joint agreement with the Directorate General of Financing and Risk Management, in which the Bank acts as a Government Distribution Partner in the context of selling Government Retail Bonds on the Domestic Primary Market. The joint agreement is retroactive from January 1, – December 31, 2023.
- j. In running its operations, the Bank faced several claims and legal cases related to its business activities, one of which was a lawsuit filed by PT Berlian Laju Tanker Tbk, which already settled on September 14, 2022 whereas the panel of judges has issued the decree No. 628/PDT/2022/PT.DKI regarding withdrawal of appeal from PT Berlian Laju Tanker Tbk.

CFI

- a. CFI enters into joint financing agreement with the Bank, related party, based on deed No. 32 dated November 22, 2017, made by Nanny Wiana Setiawan, S.H., notary in Jakarta. In that agreement, noted that the Bank will finance receivables owned by CFI from third parties that buys new and used car that financed by CFI. The purpose of this agreement is to finance the purchase of vehicles by third parties, by proportion. CFI will finance 10% of the outstanding and the Bank will finance 90% from the outstanding of the joint finance.

CFI memperoleh Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 6.000 miliar dan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Periode tersedianya dana atas fasilitas ini adalah 72 bulan untuk pembiayaan mobil penumpang dan 60 bulan untuk pembiayaan mobil komersial.

Berdasarkan akta No. 28 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta. CFI memperoleh tambahan fasilitas kerjasama pembiayaan bersama (*Joint Finance*) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 6.000 miliar dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 22 November 2027. Periode ketersediaan dana untuk fasilitas ini adalah 72 bulan untuk pembiayaan mobil penumpang dan 60 bulan untuk pembiayaan mobil komersial.

- b. CFI menghadapi berbagai kasus hukum yang belum terselesaikan, tuntutan administrasi, dan gugatan sehubungan dengan kegiatan usaha CFI. Tidak memungkinkan bagi CFI untuk memperkirakan dengan pasti apakah CFI akan menghasilkan dalam setiap kasus hukum tersebut, atau jika tidak, dampak yang mungkin timbul.

59. LAPORAN DI MEDIA ATAS KASUS SUAP PAJAK

Sehubungan dengan pemberitaan di media massa tentang kasus yang dikaitkan dengan Bank Panin, serta penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik KPK di Kantor Pusat Bank pada tanggal 23 Maret 2021, dapat dijelaskan bahwa Manajemen Bank menghormati proses hukum dan prosedur kerja yang sedang dijalankan oleh KPK. Jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak Bank, maka Bank menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bank bersikap kooperatif dan sangat terbuka, serta memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada penyidik KPK untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan. Selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016 tersebut, telah diikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, Bank juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel. Bank sebagai perusahaan terbuka menjalankan perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* yang benar.

CFI obtained Joint Financing Facility with the maximum principal amount of Rp 6,000 billion and loan term of 10 years from signing date of the agreement. The funding period for this facility is 72 months for passenger car financing and 60 months for commercial car financing.

Based on notarial deed No. 28 dated May 9, 2019 by Sri Rahayuningsih, S.H., notary in Jakarta. CFI obtain additional joint finance facility with maximum principle amount Rp 6,000 billion until November 22, 2027. Fund availability for this facility are 72 months for financing passenger vehicle and 60 months for financing commercial vehicle.

- b. CFI is a party to various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the CFI will ultimately be successful in any of these legal matters or, if not, what the impact might be.

59. MEDIA REPORT ON TAX BRIBERY CASE

In connection with the news in the mass media about a case that was linked to Bank Panin, as well as the searches carried out by KPK investigators at the Bank's Head Office on March 23, 2021, it can be explained that the Bank Management respects the legal process and work procedures that are being carried out by KPK. If it is true that the case is related to Bank taxes, the Bank confirms that it will comply as long as the tax findings are in accordance with the applicable tax regulations. Bank is cooperative and very open and provide the widest possible opportunity and access for KPK investigators to perform their duties according to the provisions of regulations. During the 2016 tax assessment process, all the proper mechanisms and procedures had been followed. During the examination process and tax legal efforts in 2016, the Bank was also accompanied by a competent and credible institution. The Bank as a public listed company runs the company according to the correct principles of Good Corporate Governance.

Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, pemanggilan pihak-pihak Bank dalam proses penyidikan dan persidangan permasalahan hukum tersebut di KPK maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dan/atau memberikan keterangan yang menjadi bagian dari proses hukum yang harus diikuti dan didampingi oleh Lembaga yang berkompeten dan kredibel. Manajemen berkeyakinan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Bank dan/atau anggota Dewan Direksi dan Komisaris Bank yang berdampak material kepada Bank dan bahwa pemberitaan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan laporan keuangan konsolidasian.

Bank dan konsultan hukum Bank berkeyakinan tidak ada dampak hukum dan kemungkinan adanya klaim apapun terhadap Bank dan entitas anak, Dewan Komisaris dan Direksi, Manajemen Kunci dan pemegang saham pengendali sampai tanggal 31 Desember 2023 dan setelahnya atas pemberitaan terakhir.

60. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 8 Maret 2024, Bank telah melakukan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK untuk Penawaran Umum Berkelanjutan IV ("PUB IV") terkait dengan (i) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 15.000.000.000.000 (Lima Belas Triliun Rupiah) dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Bank akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) ("Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan"); dan (ii) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8.000.000.000.000 (Delapan Triliun Rupiah) dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Bank akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) ("Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan").

Pada tanggal 5 April 2024, Bank telah melakukan penyampaian kembali pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan IV ("PUB IV") tersebut ke OJK.

Pada tanggal 17 Mei 2024, Bank telah melakukan penyampaian kembali pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan IV ("PUB IV") tersebut ke OJK.

As at the issuance date of the consolidated financial statements, the summons of the Bank's parties in the process of investigation and trial of the legal issues at the KPK and the Corruption Court at the Central Jakarta District Court are as witnesses to complete the case file and/or provide information as part of the legal process, which must be followed and accompanied by a competent and credible institution. Management believes that as of issuance date of the consolidated financial statements, there is no legal case faced by the Bank and/or Board of Directors or Commissioners and that which have material impact to the Bank and that the media report will not have significant impacts to the Bank's operational activities and the consolidated financial statements.

Bank and the Bank's legal consultant believes, that there will be no legal impact and the possibility of any claims against the Bank and subsidiaries, the Board of Commissioners and Directors, Key Management and controlling shareholders until December 31, 2023 and thereafter and based on the latest news.

60. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

On March 8, 2024, the Bank has submitted the registration statement to OJK for Continuous Public Offering Bank Panin ("PUB IV") related to (i) Public Offering of Bank Panin Continuous Bonds IV with a target of funds to be raised of Rp 15,000,000,000,000 (Fifteen Trillion Rupiah) where in the framework of the Continuous Public Offering IV, the Bank will issue and offer Bank Panin Continuous Bonds IV Phase I Year 2024 with a maximum principal amount of bonds equal to Rp 500,000,000,000 (Five Hundred Billion Rupiah) ("Public Offering of Continuous Bonds"); and (ii) Public Offering of Bank Panin Continuous Subordinated Bonds IV with a target of funds to be raised of Rp 8,000,000,000,000 (Eight Trillion Rupiah) where in the framework of the Continuous Public Offering IV, the Bank will issue and offer Bank Panin Continuous Subordinated Bonds IV Phase I in 2024 with a maximum principal amount of subordinated bonds of IDR 500,000,000,000 (Five Hundred Billion Rupiah) ("Public Offering of Continuous Subordinated Bonds").

On April 5, 2024, The Bank has resubmitted the Continuous Public Offering Bank Panin ("PUB IV") registration statement to OJK.

On May 17, 2024, The Bank has resubmitted the Continuous Public Offering Bank Panin ("PUB IV") registration statement to OJK.

61. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan PUB IV, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan dan perubahan pengungkapan seperti di bawah ini:

1. Catatan 3: perubahan pengungkapan pernyataan kepatuhan.
2. Catatan 18: perubahan pengungkapan metode nilai wajar yang digunakan.
3. Catatan 59: tambahan pengungkapan pendapat Bank atas laporan di media atas kasus suap pajak

62. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 216 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Bank untuk diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2024.

61. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the PUB IV, the Group reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022, to conform with the disclosures required by the prevailing capital market regulations. The amendments made pertain to the additions and changes of disclosures as below:

1. Note 3: changes in the disclosure of statement of compliance.
2. Note 18: changes in the disclosure of fair value measurement method used.
3. Note 59: additional disclosure of Bank's opinion regarding media report on tax bribery case.

62. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statement of page 1 to 216 are the responsibilities of the management and, are approved and authorized for issue by the Director on May 28, 2024.

XVII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 6 Maret 2024 dan Perjanjian Agen Pembayaran dalam rangka Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 6 Maret 2024.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 119

Halaman ini sengaja dikosongkan